POLA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI JENEBERANG

TAHUN 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 66/KPTS/M/2015

TENTANG

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan sumber daya air antara lain diselenggarakan dengan berlandaskan pada wilayah sungai yang ditetapkan dan pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Jeneberang merupakan wilayah sungai strategis nasional;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional ditetapkan oleh Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG.**

KESATU : Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Jeneberang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Jeneberang merupakan kerangka dasar pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Jeneberang.

KETIGA : Pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Jeneberang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memuat:
a. tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;
b. skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang;
c. strategi pengelolaan sumber daya air; dan
d. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.,:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
13. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air; dan
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **ii**
DAFTAR TABEL **iv**
DAFTAR GAMBAR **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang 4
1.2.1 Maksud 4
1.2.2 Tujuan 4
1.2.3 Sasaran 4
1.3 Isu-Isu Strategis 5
1.3.1 Isu Strategis Nasional 5
1.3.2 Isu Strategis Lokal 7
BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG **11**
2.1 Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Sumber Daya Air Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait 11
2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air atau Kebijakan Pembangunan Provinsi atau Kabupaten/Kota 15
2.3 Inventarisasi Data 39
2.3.1 Data Umum 39
2.3.2 Data Sumber Daya Air 54
2.3.3 Data Kebutuhan Air 89
2.3.4 Neraca Air 108
2.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi 113
2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan Dan Permasalahan 118
2.5 Identifikasi Potensi Yang Bisa Dikembangkan 122
2.5.1 Konservasi Sumber Daya Air 122
2.5.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air 123
2.5.3 Pengendalian Daya Rusak Air 124
2.5.4 Sistem Informasi Sumber Daya Air 126
2.5.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha 126
BAB III ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG **128**
3.1 Asumsi, Kriteria Dan Standar 128
3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim, Grafik dan Neraca Air pada WS Jeneberang 144
3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang 160
3.3.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air 160
3.3.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air 161
3.3.3 Pengendalian Daya Rusak Air 162

3.3.4 Sistem Informasi Sumber Daya Air 162
3.3.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 163
BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS JENEBERANG 164

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kode, Nama DAS dan Luas DAS di WS Jeneberang 2
Tabel 2.1. Kawasan Lindung WS Jeneberang 20
Tabel 2.2. Ringkasan Rencana Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya 21
Tabel 2.3. Luasan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Sulawesi Selatan Pada WS Jeneberang 24
Tabel 2.4. Daftar Persentase Luas WS Jeneberang pada masing-masing Daerah Administratif 40
Tabel 2.5. Pembagian DAS Pada WS Jeneberang 41
Tabel 2.6. Jenis Tanah Pada WS Jeneberang 45
Tabel 2.7. Kelas Kemiringan Lereng WS Jeneberang 47
Tabel 2.8. Distribusi Keseuaian Tata Guna Lahan WS Jeneberang Tahun 2010 dan Tahun 2013 50
Tabel 2.9. Tipe Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan 54
Tabel 2.10. Stasiun Hujan di WS Jeneberang 55
Tabel 2.11. Debit Air Maksimum, Minimum di WS Jeneberang 57
Tabel 2.12. Bendung di WS Jeneberang 59
Tabel 2.13. Waduk/Bendungan di WS Jeneberang 61
Tabel 2.14. Potensi Air Tanah WS Jeneberang 63
Tabel 2.15. Pemanfaatan Air Tanah WS Jeneberang 63
Tabel 2.16. Potensi Resapan Air Tanah WS Jeneberang 64
Tabel 2.17. Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan WS Jeneberang 67
Tabel 2.18. Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan di WS Jeneberang 69
Tabel 2.19. Kejadian Banjir Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 di WS Jeneberang 75
Tabel 2.20. Pantai Kritis di WS Jeneberang 77
Tabel 2.21. Hasil Uji Kualitas Air DAS Jeneberang Hulu 78
Tabel 2.22. Hasil Uji Kualitas Air DAS Jeneberang Hilir 78
Tabel 2.23. Hasil Uji Kualitas DAS Kelara-Karloe Hulu 79
Tabel 2.24. Hasil Uji Kualitas Air DAS Kelara Karloe Hilir 79
Tabel 2.25. Hasil Uji Kualitas DAS Tamanroya Hulu 80
Tabel 2.26. Hasil Uji Kualitas DAS Tamanroya Hilir 80
Tabel 2.27. Hasil Uji Kualitas DAS Puncara Hulu 81
Tabel 2.28. Hasil Uji Kualitas DAS Puncara Hilir 81
Tabel 2.29. Hasil Uji DAS Cikoang Hulu 82
Tabel 2.30. Hasil Uji Kualitas Air DAS Cikoang Hilir 82
Tabel 2.31. Hasil Uji Kualitas Air DAS Dinging/Pappa Hulu 83
Tabel 2.32. Hasil Uji Kualitas Air DAS Dinging/Pappa Hilir 83
Tabel 2.33. Debit Andalan 80% di Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 86
Tabel 2.34. Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan Tahun 2013 Berdasarkan DAS di WS Jeneberang 90

Tabel 2.35. Kebutuhan Air Industri Tahun 2013 DAS di WS Jeneberang 93
Tabel 2.36. Daerah Irigasi Tiap DAS di WS Jeneberang 94
Tabel 2.37. Kebutuhan Air Irigasi Berdasarkan DAS di WS Jeneberang 104
Tabel 2.38. Kebutuhan Air Tambak Tiap DAS di WS Jeneberang 107
Tabel 2.39. Neraca Air Eksisting di WS Jeneberang Tahun 2013 110
Tabel 2.40. Populasi Penduduk di WS Jeneberang Terhadap Populasi Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 113
Tabel 2.41. Pertumbuhan Penduduk di WS Jeneberang Menurut Kabupaten/Kota 114
Tabel 2.42. Kepadatan Penduduk WS Jeneberang Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota 115
Tabel 2.43. Populasi Penduduk Berdasarkan DAS di WS Jeneberang 115
Tabel 2.44. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 di WS Jeneberang 117
Tabel 2.45. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 di WS Jeneberang (Dalam Milyar Rupiah) 117
Tabel 2.46. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku di WS Jeneberang (Dalam Prosentase) 118
Tabel 2.47. Permasalahan di WS Jeneberang 119
Tabel 3.1. Standar Perhitungan Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan 130
Tabel 3.2. Parameter Luas Tutupan Lahan, Erosi dan Sedimentasi 131
Tabel 3.3. Proyeksi Luas DI Berdasarkan DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 132
Tabel 3.4. Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 134
Tabel 3.5. Proyeksi Jumlah Penduduk Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 135
Tabel 3.6. Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 136
Tabel 3.7. Proyeksi Kebutuhan Air Industri Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 137
Tabel 3.8. Proyeksi Kebutuhan Air Tambak Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 139
Tabel 3.9. Proyeksi Neraca Air di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2013 Skenario Ekonomi Rendah 140
Tabel 3.10. Proyeksi Neraca Air di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2013 Skenario Ekonomi Sedang 141
Tabel 3.11. Proyeksi Neraca Air di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2013 Skenario Ekonomi Tinggi 142

Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 di WS Jeneberang Menurut Kabupaten/Kota 145
Tabel 4.1. Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang (Skenario Ekonomi Rendah) 166
Tabel 4.2. Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang (Skenario Ekonomi Sedang) 196
Tabel 4.3. Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang (Skenario Ekonomi Tinggi) 217

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta WS Jeneberang	3
Gambar 1.2.	Peta Isu Strategis Nasional WS Jeneberang	9
Gambar 1.3.	Peta Isu Strategis Lokal WS Jeneberang	10
Gambar 2.1.	Peta Arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan di WS Jeneberang	26
Gambar 2.2.	Peta Administrasi WS Jeneberang	43
Gambar 2.3.	Peta Pembagian DAS di WS Jeneberang	44
Gambar 2.4.	Peta Jenis Tanah WS Jeneberang	46
Gambar 2.5.	Peta Topografi WS Jeneberang	48
Gambar 2.6.	Peta Penggunaan Lahan WS Jeneberang Tahun 2008	52
Gambar 2.7.	Peta Penggunaan Lahan WS Jeneberang Tahun 2013	53
Gambar 2.8.	Peta Lokasi Stasiun Hujan di WS Jeneberang	56
Gambar 2.9.	Grafik Debit Air Sungai Jeneberang, Sungai Tangka dan Sungai Balantieng	58
Gambar 2.10.	Peta Lokasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air di WS Jeneberang	62
Gambar 2.11.	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) WS Jeneberang	66
Gambar 2.12.	Peta Kekritisan Lahan Tahun 2013 WS Jeneberang	70
Gambar 2.13.	Bendung Karet di Hilir Sungai Jeneberang	73
Gambar 2.14.	Long Storage, Intake dan Pintu Pasang	73
Gambar 2.15.	Neraca Air Eksisting di WS Jeneberang Tahun 2013	111
Gambar 2.16.	Skema Sistem WS Jeneberang (Kondisi Eksisting)	112
Gambar 3.1.	Proyeksi Neraca Air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 Skenario Ekonomi Rendah	141
Gambar 3.2.	Proyeksi Neraca Air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 Skenario Ekonomi Sedang	142
Gambar 3.3.	Proyeksi Neraca Air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 Skenario Ekonomi Tinggi	143
Gambar 3.4.	Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Rendah	149
Gambar 3.5.	Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Sedang	153
Gambar 3.6.	Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Tinggi	158
Gambar 3.7.	Skema Sistem Sungai WS Jeneberang Rencana	159
Gambar 4.1.	Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah	237
Gambar 4.2.	Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah (Lanjutan)	238
Gambar 4.3.	Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah	239
Gambar 4.4.	Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah (Lanjutan)	240

Gambar 4.5. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Rendah 241
Gambar 4.6. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Rendah (Lanjutan) 242
Gambar 4.7. Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah 243
Gambar 4.8. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Rendah 244
Gambar 4.9. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang 245
Gambar 4.10. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang (Lanjutan) 246
Gambar 4.11. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang 247
Gambar 4.12. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang (Lanjutan) 248
Gambar 4.13. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Sedang 249
Gambar 4.14. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Sedang (Lanjutan) 250
Gambar 4.15. Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang 251
Gambar 4.16. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Sedang 252
Gambar 4.17. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi 253
Gambar 4.18. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan) 254
Gambar 4.19. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi 255
Gambar 4.20. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan) 256
Gambar 4.21. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi 257
Gambar 4.22. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan) 258
Gambar 4.23. Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi 259
Gambar 4.24. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Tinggi 260

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, yang merupakan keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun secara terkoordinasi diantara instansi terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha baik Koperasi, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Untuk dapat menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai perlu diketahui sistem pengelolaan sumber daya air yang sedang berjalan saat ini, mencakup aspek aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air dan peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

Disamping inventarisasi sistem pengelolaan sumber daya air saat ini, juga dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dimasa yang akan datang.

Wilayah Sungai Jeneberang yang selanjutnya disebut WS Jeneberang, terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai, WS Jeneberang termasuk dalam WS Strategis Nasional. Luas WS

Jeneberang adalah 9.389,47 km^2 yang meliputi 58 Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS. Secara administratif, terdapat 1 (satu) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten yang dilalui, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, WS Jeneberang meliputi 58 DAS sebagaimana yang dilihat pada Tabel 1.1 dan Peta WS Jeneberang ditampilkan pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1. Kode, Nama DAS dan Luas DAS di WS Jeneberang

KODE	NAMA DAS	LUAS (km^2)	KODE	NAMA DAS	LUAS (km^2)
001	DAS Cabalu	327,00	031	DAS Toppa	57,06
002	DAS Pattiro	487,65	032	DAS Cikoang	158,98
003	DAS Kaju	129,69	033	DAS Pappa	395,54
004	DAS Salangketo	359,38	034	DAS Biringkasi	70,64
005	DAS Luppereng	224,77	035	DAS Saro	96,04
006	DAS Salamekko	207,19	036	DAS Limbung	40,05
007	DAS Tangka	476,76	037	DAS Barombong	22,34
008	DAS Sinjai	130,58	038	DAS Jeneberang	784,80
009	DAS Kalamisu	157,33	039	DAS Tallo	437,75
010	DAS Bua	280,58	040	DAS Bonelengga	42,26
011	DAS Lolisang	180,59	041	DAS Maros	672,24
012	DAS Aparang	211,77	042	DAS Tanakeke	31,18
013	DAS Bampang	318,36	043	DAS Batanglampe	8,73
014	DAS Balantieng	199,39	044	DAS Liangliang	21,12
015	DAS Bijawang	164,24	045	DAS Burungloe	1,94
016	DAS Kalotro	35,81	046	DAS Liukangloe	10,60
017	DAS Bialo	99,26	047	DAS Pasitanete	8,96
018	DAS Togambang	52,73	048	DAS Selayar	650,62
019	DAS Moti	101,00	049	DAS Pasi	29,47
020	DAS Kaloleng	48,49	050	DAS Bahuluang	8,24
021	DAS Umbaung-baung	60,52	051	DAS Tambolongan	9,71
022	DAS Biangloe	68,04	052	DAS Kayu Adi	11,75
023	DAS Allu	44,45	053	DAS Tanah Jampea	117,62
024	DAS Panaikang	45,33	054	DAS Kalao	101,00
025	DAS Tino	42,79	055	DAS Bonerate	19,23
026	DAS Palapalasa	80,41	056	DAS Karompa	11,31
027	DAS Sipiringa	96,69	057	DAS Kaloto	80,94
028	DAS Kelara-Karaloe	388,35	058	DAS Madu	11,37
029	DAS Tamanroya	281,43			
030	DAS Puncara	177,40		**Total**	**9.389,47**

Sumber: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

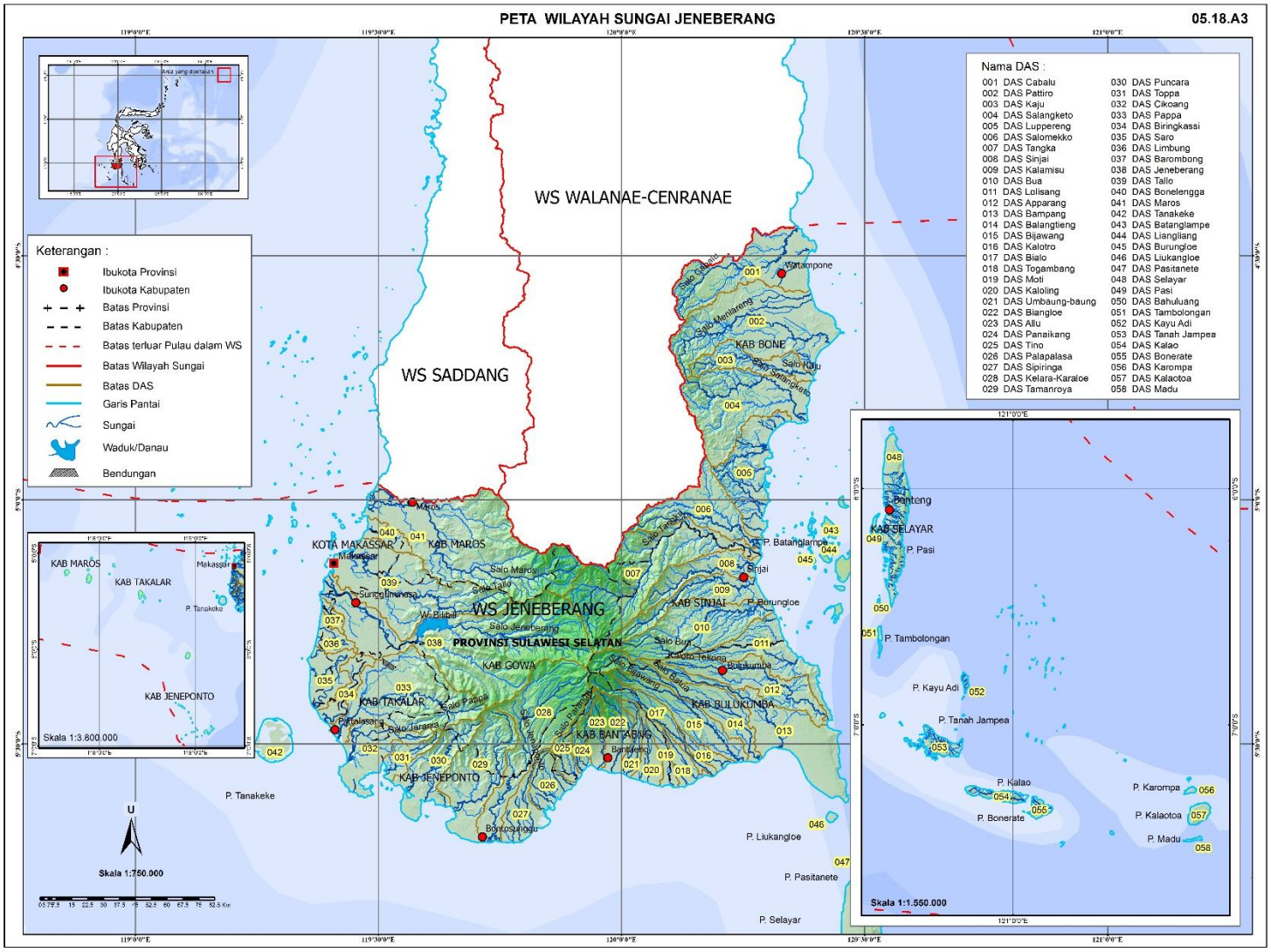

Sumber: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah Sungai

Gambar 1.1. Peta WS Jeneberang

1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang adalah membuat acuan atau kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di WS Jeneberang, serta memberikan arah pengelolaan dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, serta keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, sehingga dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara terapadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang secara umum adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, sedangkan tujuan secara spesifik antara lain:

a. memenuhi kepentingan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Kabupaten/Kota dalam WS Jeneberang (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Kepulauan Selayar);

b. memenuhi kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat sumber daya air di WS Jeneberang; dan

c. mengupayakan konservasi sumber daya air (air, sumber air dan daya air), berdaya dan berhasil guna, dimana daya rusak air dapat dikendalikan, dikelola secara menyeluruh, tepadu, dalam satu kesatuan sistem tata air WS Jeneberang; Melakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan selalu memenuhi fungsi lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras serta menjaga keseimbangan antara ekosistem dan daya dukung lingkungan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang adalah untuk memberikan arahan tentang kebijakan dalam upaya:

a. konservasi sumber daya air di WS Jeneberang;
b. pendayagunaan sumber daya air di WS Jeneberang dengan memperhatikan kebijakan daerah, termasuk dalam penataan ruang wilayah;
c. pengendalian daya rusak air di WS Jeneberang;
d. pelaksanaan sistem informasi sumber daya air di WS Jeneberang; dan

e. pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air di WS Jeneberang.

Visi dan Misi Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Jeneberang

Sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maka **Visi** Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang yaitu:

"***Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat di WS Jeneberang***".

Misi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang adalah:

a. melakukan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan di WS Jeneberang;
b. mendayagunakan sumber daya air secara adil untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik waktu, tempat, kualitas maupun kuantitas di WS Jeneberang;
c. mengendalikan daya rusak air di WS Jeneberang;
d. memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, swasta dan pemerintah di WS Jeneberang; dan
e. meningkatkan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air di WS Jeneberang.

1.3 Isu-Isu Strategis

Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai perlu dilakukan secara terpadu dan dilaksanakan secara holistik, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sumber daya air di wilayah sungai pengelolaan sumber daya air di WS Jeneberang sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang terjadi, baik isu strategis nasional maupun lokal.

1.3.1 Isu Strategis Nasional

a. Target *Millennium Development Goals* 2015 untuk penyediaan air minum

Target sasaran Millennium Development Goals yang selanjutnya disebut MDG's untuk penyediaan air minum tahun 2015 (target nasional) cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan adalah 69%, di perdesaan 54%. Untuk tingkat pelayanan non perpipaan terlindungi targetnya adalah 25% perkotaan dan 26% di pedesaan. Capaian pelayanan air perpipaan di perkotaan di Sulawesi Selatan 65% di pedesaan 31,45%. Pemenuhan air bersih pada WS Jeneberang masih 47,16% berasal dari non perpipaan dan 41,93% berasal dari pelayanan perpipaan (PDAM) dari kebutuhan 9,82 m^3/dt di Tahun 2010, target penyediaan air minum MDGs perlu didukung dengan

penyediaan air baku, yang dapat dialokasikan dengan pembangunan embung ataupun waduk yaitu Waduk Bontosunggu, Waduk Pamukulu, Waduk Kelara, Waduk Bontojaya, Waduk Cinimabela, Waduk Jenelata, Waduk Posi, dan pembangunan embung-embung di setiap kabupaten yang akan dibangun di WS Jeneberang.

b. Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penyediaan air irigasi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang ketahanan pangan tersebut. Saat ini masih terdapat daerah irigasi yang potensial seluas 50.772 ha di WS Jeneberang dengan dibangunnya Bendungan Keralloe, Bendungan Pamukulu, Bendungan Bontosunggu, Bendungan Jenelata, Bendungan Bontojaya, Bendungan Cinemabela, Bendungan Posi, Bendung Bayang-Bayang dan pembangunan embung di setiap kabupaten, akan memberikan manfaat yang paling optimal dan nilai keandalan yang paling tinggi, ini akan memberikan tambahan produksi padi yang signifikan di WS Jeneberang sehinga akan menunjang penyediaan pangan (khususnya padi) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada umumnya.

c. Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Salah satu fenomena perubahan iklim global adalah terjadinya peningkatan suhu dan curah hujan tahunan yaitu dengan penurunan jumlah hari hujan sehingga musim hujan menjadi lebih singkat namun intensitas hujan lebih tinggi. Dampak perubahan iklim terhadap pengelolaan sumber daya air adalah:

1) berkurangnya hasil panen;
2) penurunan kualitas air permukaan dan air tanah;
3) frekuensi banjir semakin meningkat;
4) kerusakan infrastruktur sumber daya air dan pengaman pantai;
5) kegagalan panen akibat kekeringan dan degradasi lahan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menekan-kan pada pentingnya pemeliharaan berbagai sarana pemasok air yang disebut dengan istilah pengelolaan air secara terpadu (*Integrated Water Resources Management*) yang salah satunya dengan cara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

d. Ketersediaan Energi

Pembangkit tenaga listrik di Sulawesi Selatan, khususnya WS Jeneberang meliputi PLTD Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Maros, Selayar, Sinjai, Takalar, Sewatama (Mamminasata); PLTU Gowa, Bone, Tello (Kota Makassar), Punagaya dan Lakatong (Kabupaten Takalar); PLTA Bilibili (Kabupaten Gowa), Manipi (Kabupaten Sinjai); PLTG Gowa; PLTM Sinjai (Kabupaten Sinjai). PLN wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menjamin ketersediaan pasokan listrik hingga 900 megawatt di Sulawesi Selatan dengan penambahan pasokan sebesar 200 MW. Daya mampu listrik saat ini 541 MW lebih dengan beban puncak 728 MW. Ketersediaan listrik akan semakin terjamin dengan penambahan 200 MW dari pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Takalar dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Takalar yang beroperasi pada awal Oktober 2011. Dengan demikian, total daya mampu PLN mencapai 900 MW sehingga PLN dapat memenuhi permintaan kebutuhan listrik termasuk industri.

1.3.2 Isu Strategis Lokal

a. Degradasi Lingkungan

Kerusakan hutan, alih fungsi lahan dan alih tanam, terutama di kawasan hulu, yaitu di Kabupaten Gowa (lahan kritis di DAS Jeneberang seluas 6.260,19 ha atau 5,57% dari luas total lahan kritis di WS Jeneberang 112.350,78 Ha) yang merupakan kawasan konservasi dan kawasan resapan air. Sebagian besar lahan pertanian di kawasan tersebut telah beralih tanam menjadi lahan pertanian tanaman hortikultura. Kegiatan tersebut telah memberikan dampak yang buruk terhadap daya dukung lingkungan yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis dan erosi lahan serta meningkatnya limpasan permukaan.

b. Banjir

Banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat ketidak-mampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat. Banjir tersebut terjadi di Sungai Maros, Sungai Sinjai, Sungai Bialo, Sungai Pappa, Sungai Allo, Sungai Tamanroya, Sungai Calendu, Sungai Pampang dan Sungai Tallo.

c. Sedimentasi

Meningkatnya erosi dan sedimentasi di sungai yang menyebabkan terjadinya pendangkalan dan berkurangnya kapasitas tampungan air terutama di DAS Maros, DAS Jeneberang (terutama akibat longsor Gunung Bawakaraeng), DAS Pappa dan DAS Tamanroya. Khusus di DAS Jeneberang, akibat keruntuhan lereng Gunung Bawakaraeng, menyebabkan sedimentasi yang masuk ke Sungai Jeneberang sebesar

167,2 juta m^3 dan sedimentasi di Waduk Bilibili sebesar 75,2 juta m^3. Sedimentasi tinggi sebesar 3.862 ton/th (DAS Tamanroya 342 ton/th, DAS Jeneberang 1.280 ton/th, DAS Kelara-Karaloe 219 ton/th, DAS Maros 233 ton/th, dan DAS Pappa 247 ton/th).

d. Abrasi Pantai

Abrasi dan pantai kritis yang tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di WS Jeneberang yaitu di Kabupaten Takalar (Pantai Galesong, Pantai Cikoang, Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi), Kabupaten Bantaeng (Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borong-kalukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkaninong), Kabupaten Bulukumba (Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng), Kabupaten Sinjai (Pantai Sinjai), Kabupaten Selayar (Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke), Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto (Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Pattontongan, Pantai Bahari, Pantai Tino) dan Kabupaten Maros (Pantai Maros). Panjang total pantai yang terabrasi dan kritis sepanjang 237 km.

Isu strategis nasional dan isu strategis lokal di WS Jeneberang dibuat peta tematik seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3. berikut ini

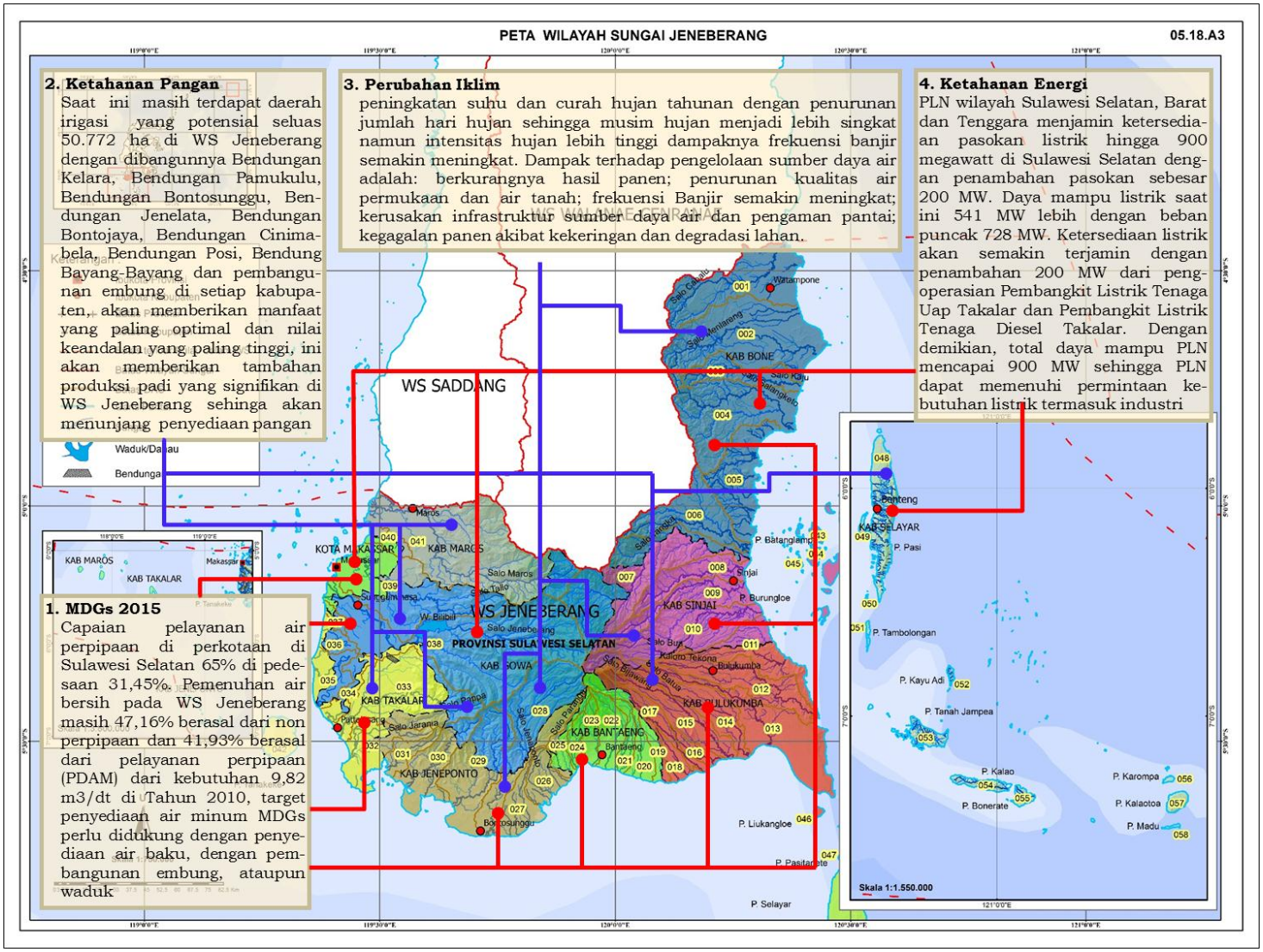

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 1.2. Peta Isu Strategis Nasional WS Jeneberang

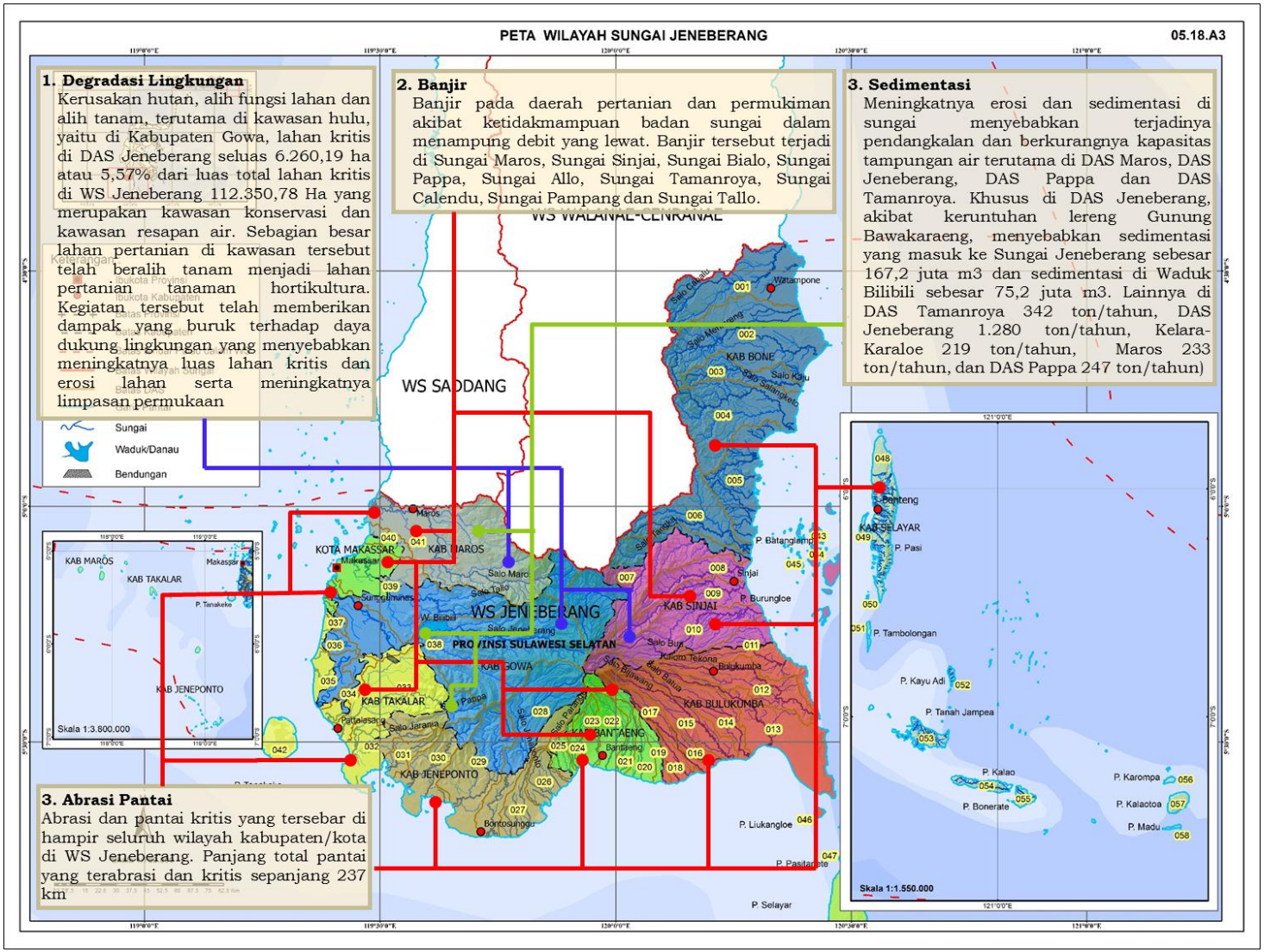

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 1.3. Peta Isu Strategis Lokal WS Jeneberang

BAB II
KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG

2.1 Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Sumber Daya Air Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait

Beberapa aturan yang terkait dengan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

16) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
19) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
20) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
21) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
22) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
23) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
25) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
26) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
27) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
28) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
29) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
30) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
31) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
32) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
33) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012;
34) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan;
35) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
36) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

37) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
38) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
39) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
40) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014;
41) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
42) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
43) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
44) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Efek Rumah Kaca;
45) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
46) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
47) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
48) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
49) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
50) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/PRT/M/1993 tentang Reklamasi Rawa;
51) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/PRT/M/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan Air Provinsi Daerah Tingkat I;
52) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
53) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
54) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
55) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
56) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
57) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai;

58) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014;
59) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
60) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
61) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah;
62) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
63) Keputusan Menteri Nomor 293/KPTS/M/2014 tentang Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
64) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
65) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto;
66) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032;
67) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032;
68) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032;
69) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;
70) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2031;
71) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba;
72) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa;
73) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032;
74) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
75) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2379/X/Tahun 2010 tentang Penetapan Daerah Irigasi Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air atau Kebijakan Pembangunan Provinsi atau Kabupaten/Kota

Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai perlu dilakukan secara terpadu *integrated water resources management* (IWRM) dan dilaksana-kan secara holistik, yang melibatkan seluruh *stakeholders* sumber daya air di wilayah sungai.

1. Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari kebijakan:

a) kebijakan umum;
b) kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
c) kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d) kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak;
e) kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
f) kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya air nasional terpadu.

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air disusun berdasarkan kebijakan:

a) umum, terdiri dari :
   1) peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air;
   2) pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK serta budaya terkait air;
   3) peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air; dan
   4) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
b) peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus, terdiri dari peningkatan upaya:
   1) perlindungan dan pelestarian sumber air;
   2) pengawetan air; dan
   3) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
c) pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari peningkatan upaya:
   1) penatagunaan sumber daya air;
   2) penyediaan sumber daya air;
   3) efisiensi penggunaan sumber daya air;
   4) pengembangan sumber daya air; dan
   5) pengendalian pengusahaan sumber daya air.
d) pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak, terdiri dari

peningkatan upaya:
1) pencegahan;
2) penanggulangan; dan
3) pemulihan.

e) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, terdiri dari peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam:
1) perencanaan;
2) pelaksanaan; dan
3) pengawasan.

f) pengembangan jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut SISDA dalam pengelolaan sumber daya air, terdiri dari :
1) peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolan SISDA;
2) pengembangan jejaring SISDA; dan
3) pengembangan teknologi informasi.

2. Kebijakan Pulau Sulawesi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Hal-hal penting yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR Pulau Sulawesi yang terkait dengan pengelolaan WS Jeneberang adalah sebagai berikut:

a) indikasi program pembangunan sistem pengelolaan sumber daya air menurut prioritas penanganannya meliputi sungai/WS ”prioritas sedang” pada WS Jeneberang;

b) penerapan konsep “Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu” dari hulu hingga hilir;

c) mendayagunakan sumber air di WS Jeneberang yang melayani Kawasan Perkotaan Mamminasata, Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW, yaitu: PKW Jeneponto, PKW Bulukumba, dan PKW Watampone, serta Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone;

d) merehabilitasi DAS kritis dilakukan pada DAS Jeneberang, DAS Jeneponto, DAS Maros, DAS Aparang, DAS Tangka, DAS Pamukulu, DAS Tallo, DAS Pappa, DAS Gamati , dan DAS Mapili di WS Jeneberang;

e) mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan dilakukan di Waduk Bili-bili yang melayani Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata serta Kawasan Andalan Mamminasata dan sekitarnya; dan

f) memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan dilakukan di DI Bili-bili yang melayani Kawasan Andalan Mamminasata dan Sekitarnya.

3. Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah provinsi agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi tercapai. Salah satu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah ialah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, salah satunya mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, satunya meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air.

Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan, salah satunya mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya, salah satunya membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan jaringan prasarana wilayah. Provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasi-kan wilayah Provinsi selain untuk melayani kegiatan skala Provinsi.

Rencana sistem jaringan sumber daya air wilayah Provinsi meliputi:

a) sistem jaringan sumberdaya air nasional meliputi WS, Daerah DAS, bendungan, DI dan Daerah Rawa yang selanjutnya disebut DR;
b) sistem jaringan sumberdaya air lintas Provinsi meliputi WS, DAS;
c) sistem jaringan sumberdaya air Provinsi terdiri atas bendung, bendungan, DI dan Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA; dan
d) sistem pengelolaan sumberdaya air.

Rencana sistem jaringan sumberdaya air nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi merupakan jaringan prasarana sumberdaya air strategis nasional yang meliputi WS Jeneberang: DAS Jeneberang, DAS Jeneponto, DAS Maros, DAS Matulu, DAS Salangketo, DAS Tangka, DAS Aparang, DAS Pamukulu dan DAS Selayar.

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi terdiri dari rencana sistem:

a) perkotaan;
b) jaringan transportasi;
c) jaringan energi;
d) jaringan telekomunikasi dan informasi;
e) jaringan sumber daya air; dan
f) prasarana persampahan dan sanitasi.

Rencana pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun mendatang. Perlu digaris bawahi bahwa rencana pemanfaatan wilayah ruang yang dimaksud hanya bersifat sebagai arahan pemanfaatan ruang, tidak atau belum dapat dijadikan dasar bagi pemberian izin lokasi. Titik berat rencana diletakkan pada upaya atau pembentukan struktur tata ruang agar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mampu berartikulasi secara optimal terhadap kebijaksanaan atau kegiatan-kegiatan pembangunan secara berkelan-jutan. Arahan yang dimaksud adalah:

a) arahan pengelolaan kawasan lindung;
b) arahan pengelolaan kawasan budidaya;
c) arahan pengembangan kawasan budidaya;
d) arahan pengembangan kawasan andalan;
e) arahan pengembangan kawasan penunjang pertahanan;
f) arahan pengembangan sistem kota-kota;
g) arahan pengembangan prasarana wilayah; dan
h) kebijaksanaan tataguna tanah, tataguna air, dan tataguna sumber daya alam lainnya.

Berikut ini adalah arahan penataan ruang dan arahan pengelolaan kawasan di wilayah Provinsi Selatan.

1) Arahan Penataan Ruang

   Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP merupakan suatu rencana publik yang mewadahi arahan pokok pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang 15 (lima belas) tahun. RTRWP menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkem-bangan antar wilayah (kabupaten/kota) serta keserasian antar sektor dan pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah atau masyarakat.

   Sehubungan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dengan berlakunya otonomi daerah di kabupaten/kota, maka peran dan muatan suatu RTRWP dalam pengembangan wilayah juga harus menyesuaikan dengan kewenangan pemerintahan provinsi. RTRWP hanya mengatur pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah kabupaten/kota baik dilihat dari segi fisik maupun fungsinya.

2) Arahan Pengelolaan Kawasan

Arahan pengelolaan kawasan terdiri atas arahan pengelolaan ”kawasan lindung”, ”kawasan budidaya”, serta ”kawasan pesisir dan laut”.

a. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Didalam upaya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan di perlukan kawasan lindung yang dikelola secara terarah. Pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang kegiatan yang dimaksud memenuhi persyaratan. Sasaran utama yang ingin dicapai dengan adanya pengelolaan kawasan lindung adalah:

- melindungi dan meningkatkan fungsi terhadap konservasi tanah, air, pengendalian iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; dan
- menjaga dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Untuk mencapai sasaran diatas maka di perlukan suatu upaya yang baik dan terarah. Secara umum pengelolaan kawasan lindung di Sulawesi Selatan diarahkan pada:

- penetapan dan pemantapan batas serta status kawasan lindung sehingga keberadaannya menjadi lebih jelas, baik secara fisik maupun hukum;
- memanfaatkan kawasan lindung untuk kesejahteranaan masyarakat sekitar sejauh tidak mengurangi fungsi lindungnya;
- mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pemeliharaan kawasan lindung; dan
- pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah adminstrasi, baik dari segi fisik maupun fungsional dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi. Kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi.

Berdasarkan fungsinya, arahan pengelelolaan kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam WS Jeneberang di tampilkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kawasan Lindung WS Jeneberang

No	Kawasan Lindung Nasional	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Suaka Margasatwa Ko'mara	Takalar	2.250,87
2	Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung	Maros	42.794,24
3	Taman Nasional Laut Takabonerate	Kepulauan Selayar	430.886,30
4	Taman Hutan Raya Bonto Bahari	Bulukumba	3.484,86
5	Taman Wisata Alam Malino	Gowa	3.285,62
6	Taman Wisata Alam Cani Sirenrang	Bone	3.779,91
7	Taman Buru Ko'mara	Takalar	1.632,24
8	Taman Buru Bangkala	Jeneponto	2.382,03

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRW) Tahun 2009 – 2029.

Menurut fungsi lindungnya, kawasan lindung terdiri atas 4 jenis yaitu kawasan:

- yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahnya;
- perlindungan setempat;
- suaka alam dan cagar budaya; dan
- rawan bencana.

b. Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompok-kan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan budidaya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan-kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi

dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Penetapan suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu, selain mengacu pada kriteria harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu:

- lingkungan buatan, sosial, dan interaksi antar wilayah;
- tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan; dan
- keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan

Berdasarkan fungsinya, kawasan budidaya dikelompokkan ke dalam kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan danau, kawasan pesisir laut dan kepulauan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.2. Suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama tertentu dapat dilakukan kegiatan budidaya yang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan pemanfaatan.

Tabel 2.2. Ringkasan Rencana Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya	Sub Sistem Budidaya	Lokasi Di WS Jeneberang
A	Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat.	Hutan produksi dan hutan rakyat	Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Takalar; Kabupaten Bantaeng; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Selayar; Kabupaten Maros; Kabupaten Gowa; Kabupaten Bone.
B	Kawasan pertanian dan perikanan.	Kawasan potensial budidaya padi sawah	Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Gowa; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Maros; Kepulauan Selayar; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Takalar.
		Kawasan potensial budidaya kakao sama dengan yang potensial untuk budidaya kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete dan jarak	Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Takalar; Kabupaten Bantaeng; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Selayar; Kabupaten Maros; Kabupaten Gowa; Kabupaten Bone.
		Kawasan potensial peternakan sapi kandang	Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Takalar;

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya	Sub Sistem Budidaya	Lokasi Di WS Jeneberang
			Kabupaten Bantaeng; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Selayar; Kabupaten Maros; Kabupaten Gowa; Kabupaten Bone.
		Kawasan potensial budidaya rumput laut	Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Takalar; Kabupaten Bantaeng; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Bone.
		Kawasan potensial perikanan tangkap.	Kota Makassar; Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Sinjai; Kabupaten Bone.
C	Kawasan pertambangan	a) Potensial Tambang Logam	Pasir besi: Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
		b) Potensial Tambang Non Logam	tambang andesit: Kabupaten Bone; tambang basal: Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai; tambang jasper: Kabupaten Bone; tambang marmer dan kapur bahan semen: Kabupaten Bone; tambang batu dan pasir: Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kepulauan Selayar.
		c) Potensial Tambang Migas	Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar; Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar; Blok Bone di Teluk Bone; Blok Sigeri di Selat Makassar; Blok Kambuno di laut Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba; Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar.
D	Kawasan Industri	Kawasan industri skala besar	Kota Makassar; Kabupaten Maros; Kabupaten Gowa.
		Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah	Kabupaten Bone; Kabupaten Bulukumba; Kabupaten Bantaeng;

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya	Sub Sistem Budidaya	Lokasi Di WS Jeneberang
			Kabupaten Jeneponto
E	Kawasan Perdagangan	Kawasan perdagangan skala besar	Kota Makassar; Kabupaten Maros; Kabupaten Gowa; Kabupaten Takalar; Kabupaten Bone;Kabupaten Jeneponto;Kabupaten Bulukumba
		Kawasan perdagangan skala sedang	Kepulauan Selayar.
F	Kawasan Pariwisata	Taman Wisata Alam (TWA) Skala nasional	TWA Malino (Kabupaten Gowa); TWA Cani Sirenreng (Kabupaten Bone); Taman Nasional Laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar); Taman Buru Ko'mara (Kabupaten Takalar); Taman Buru Bangkala (Kabupaten Jeneponto).
		Taman Wisata Alam (TWA) Skala provinsi	TWA Laut Kepulauan Spermode yang terletak di wilayah Mamminasata; Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai).
		Taman Wisata Budaya (TWB) skala nasional	-
		Taman Wisata Budaya (TWB) skala provinsi	TWB Permukiman Adat Ammatoa Kajang (Kabupaten Bulukumba); Taman Miniatur Sulawei Selatan di Situs Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu (Kota Makassar dan Kabupaten Gowa); Wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere (Kota Makassar); Pusat industri perahu tradisional Pinisi (Kabupaten Bulukumba).
		Taman Wisata Sejarah	Fort Rotterdam, Situs Benteng Tallo, Makam Raja-raja Gowa, Makam Raja-raja Tallo, Makam Syech Yusuf (Kota Makassar); Masjid Tua Katangka (Kabupaten Gowa); Museum Saoraja Lapawawoi Karaeng Sigeri (Kabupaten Bone); Taman prasejarah Batu Pakek Gong (Kabupaten Sinjai).
G	Kawasan Simpul Pelayanan Transportasi	Kawasan Pelabuhan Nasional	Soekarno, Hatta dan Sultan Hasanuddin (Kota Makassar); Bajoe

No	Sistem Tata Ruang Kawasan Budidaya	Sub Sistem Budidaya	Lokasi Di WS Jeneberang
			(Kabupaten Bone); Lepee (Kabupaten Bulukumba); Benteng (Kabupaten Kepulauan Selayar); Sinjai (Kabupaten Sinjai).
		Kawasan Pelabuhan Provinsi	Pattirobajo (Kabupaten Bone); Galesong (Kabupaten Takalar); Jeneponto (Kabupaten Jeneponto); Benteng dan Jampea (Kabupaten Kepulauan Selayar); Bantaeng (Kabupaten Bantaeng).
		Kawasan bandar udara bukan pusat penyebaran	Bajoe (Kabupaten Bone); Lepee dan Bira (Kabupaten Bulukumba); Pamatata (Kabupaten Kepulauan Selayar)
H	Kawasan Permukiman	Kawasan perkotaan	
		Kawasan permukiman perdesaan	

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRW) Tahun 2009 – 2029.

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya pada WS Jeneberang berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 terdiri dari kawasan budidaya hutan dan kawasan budidaya non hutan. Adapun luas kawasan budidaya hutan 7.414,05 Km^2 atau sekitar 78,96% dari luas WS Jeneberang. Rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Luasan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Sulawesi Selatan Pada WS Jeneberang

No	Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Luas (Km^2)
1	Kawasan Lindung	Hutan Lindung	723,76
2	Kawasan Lindung	Kawasan Suaka Margasatwa	41,54
3	Kawasan Lindung	Kawasan Taman Wisata Alam	62,54
4	Kawasan Lindung	Taman Hutan Raya	36,31
5	Kawasan Lindung	Taman Nasional	103,81
6	Kawasan Lindung	Taman Buru	26,70
7	Kawasan Lindung	Beting Karang	654,13
8	Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	93,50

No	Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Luas (Km²)
9	Kawasan Lindung	Rentan Gerakan Tanah	215,22
10	Kawasan Lindung	Tubuh Air	17,90
11	Kawasan Budidaya Hutan	Hutan Produksi	459,26
12	Kawasan Budidaya Hutan	Hutan Produksi Terbatas	556,92
13	Kawasan Budidaya Hutan	Hutan Rakyat	185,04
14	Kawasan Budidaya Non Hutan	Kawasan Permukiman	407,96
15	Kawasan Budidaya Non Hutan	Pertanian Komoditas Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung & Sapi	1.181,20
16	Kawasan Budidaya Non Hutan	Pertanian Komoditas Padi,Ladang,Jagung & Sapi	688,79
17	Kawasan Budidaya Non Hutan	Komoditi Rumput Laut di Darat	49,46
18	Kawasan Budidaya Non Hutan	Perkebunan Komoditi Sawit, Robusta,Mete	24,84
19	Kawasan Budidaya Non Hutan	Perkebunan Komoditas Kakao, Sawit, Robusta, Mete	1.006,61
20	Kawasan Budidaya Non Hutan	Perkebunan Komoditas Jarak	149,74
21	Kawasan Budidaya Non Hutan	Tidak Sesuai Unggulan Provinsi	2.704,22
	WS Jeneberang		9.389,47

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi arahan penataan ruang ruang dan arahan pengelolaan kawasan Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam WS Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

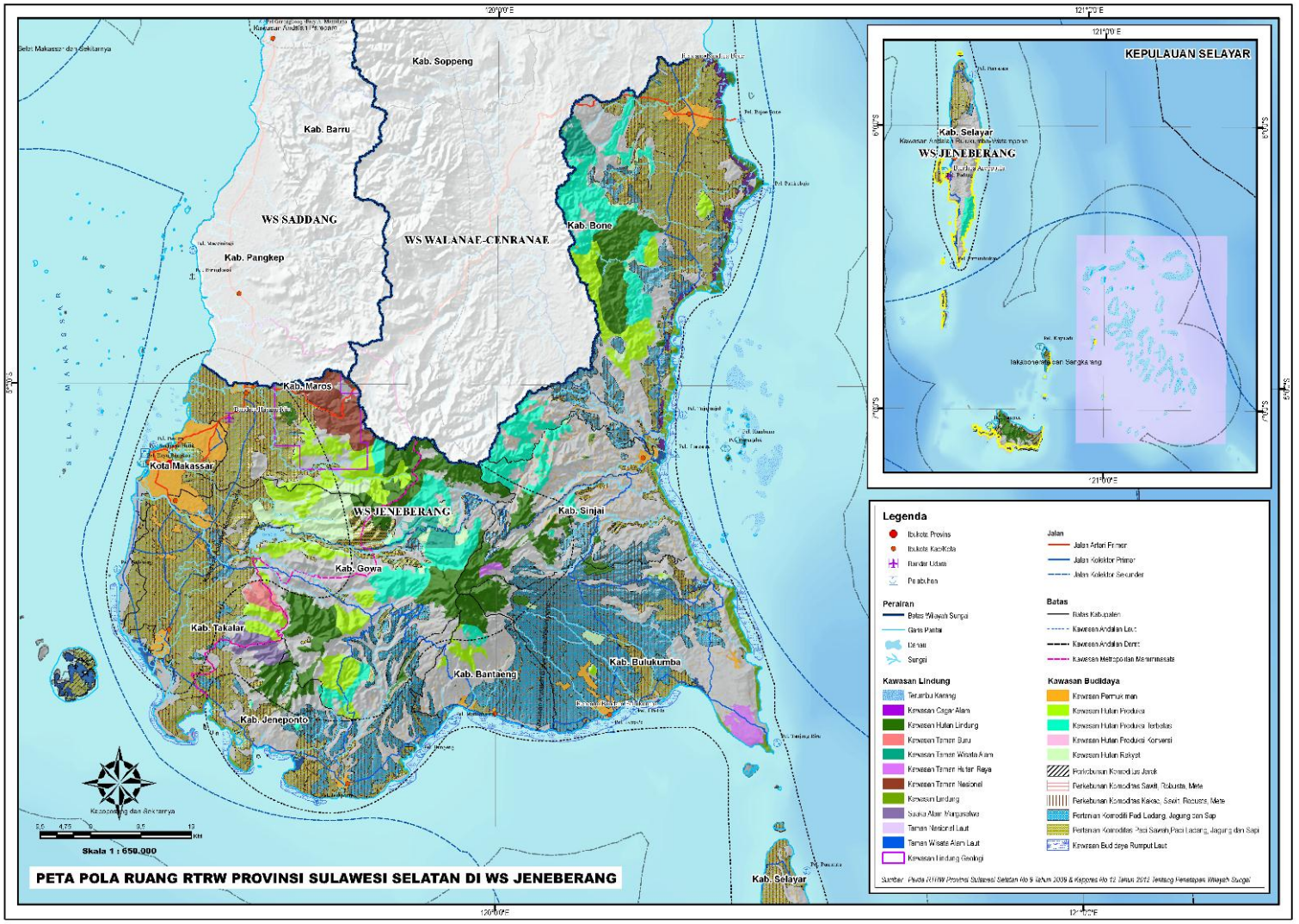

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRW) Tahun 2009 – 2029.

Gambar 2.1. Peta Arahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan di WS Jeneberang

4. Arah Kebijakan Kabupaten dan Kota

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Kebijakan penataan ruang Kawasan Mamminasata, meliputi:
   1) pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan;
   2) pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya;
   3) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
   4) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
   5) mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata, khususnya di kawasan pantai dan daerah irigasi teknis.

   Strategi penataan ruang Kawasan Mamminasata, meliputi:

   1) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia;
   2) mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

   Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, meliputi:

   1) mendorong pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan perikanan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil produksi;
   2) mendorong pengembangan sentra-sentra kawasan ekonomi baru dalam pengolahan hasil produksi, pertanian, dan perikanan;

   Strategi peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan Perkotaan Mamminasata, meliputi:

   1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
   2) meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan

3) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Koata Makassar. Kebijakan pengembangan penataan ruang wilayah Kota Makassar, meliputi:
   1) memprioritaskan arah pengembangan Kota ke arah koridor timur, selatan, utara, dan membatasi pengembangan ke arah barat agar tercapai keseimbangan ekosistem; dan
   2) melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros meliputi:
   1) pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata;
   2) pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki; peningkatan fungsi kawasan lindung;
   3) peningkatan sumber daya hutan produksi;
   4) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;

   Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Maros, meliputi:

   1) pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional;
   2) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
   3) mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DAS;
   4) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
   5) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
   6) termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen, bantaran sungai dan pesisir pantai;
   7) mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, abrasi dan tsunami.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa, meliputi:
   1) peningkatan fungsi kawasan lindung;
   2) peningkatan sumber daya hutan produksi;
   3) peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

   Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Gowa, meliputi:

   1) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya di daerah perbukitan, bantaran sungai dan pantai;
   2) meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan Sumber Daya Air;
   3) meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
   4) meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
   5) meningkatkan kualitas dan sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah domestik, limbah industri maupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   6) menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
   7) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya daerah aliran sungai kritis;
   8) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, termasuk reboisasi di Taman Wisata Alam Malino dengan menarik partisipasi para wisatawan, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten;
   9) mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
   10) menyediakan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
   11) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
   12) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
   13) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Takalar meliputi:
   1) pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
   2) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
   3) penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya;
   4) pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   5) pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
   6) pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil; dan

   Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Takalar, meliputi:

   1) meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan kelautan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan lahan;
   2) menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihan fungsi hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
   3) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
   4) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
   5) mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat; dan

f. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Jeneponto, meliputi:

1) kebijakan pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung;
2) kebijakan pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung;
3) kebijakan pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah; dan
4) kebijakan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto, meliputi:

1) pengembangan sistem irigasi yang terpadu dengan rencana pengembangan budidaya pertanian, yang meliputi pengembangan intensifikasi lahan basah (sawah) dan kegiatan pertanian lainnya;
2) pengembangan air baku untuk keperluan domestik dan industri dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan termasuk pemanfaatan air bawah tanah;
3) pengembangan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan DAS;
4) identifikasi sumber-sumber air berupa mata air, air permukaan dan air tanah;
5) perbaikan manajemen sumber daya air;
6) pengembangan sumber-sumber air baku baru;
7) peningkatan infrastruktur sumberdaya air;
8) pengembangan sistem IPAL terpadu/kolektif pada zona-zona industri yang direncanakan;
9) mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan serta meningkatkan kualitas kawasan lindung melalui pelaksanaan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis yang berlaku;
10) pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung serta pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana;
11) perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir;
12) perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk meminimasi dampak areal berpotensi tsunami di sepanjang pesisir;

13) pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung terutama pada zona atas (perbukitan/pegunungan) wilayah kabupaten melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi; dan
14) perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (irigasi teknis dan lahan kelas satu untuk pertanian pangan).

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng, meliputi:
   1) penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung;
   2) pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   3) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan; dan
   4) pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

   Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng, meliputi:

   1) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
   2) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
   3) mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain; dan
   4) mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemiri.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba, meliputi:
   1) Sistem Prasarana Sumber Daya Air. Rencana sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Bulukumba dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri, dan untuk pengembangan pertanian; dan
   2) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan. Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa dan

kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sinjai, meliputi:
   1) penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
   2) penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

   Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai, meliputi:

   1) melestarikan dan mengembangkan sumber daya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat;
   2) mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya;
   3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
   4) menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat;
   5) merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah diekploitasi; dan
   6) mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibubidayakan oleh masyarakat.

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone, meliputi:
   1) penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainya; dan
   2) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone, meliputi:

1) pemantapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
2) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3) mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain;
4) meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan; dan
5) memanfaatkan lahan non produktif dan/atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

k. Kabupaten Kepulauan Selayar Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032. Kebijakan penataan ruang wilayah Kepulauan Selayar, meliputi:
   1) pemantapan fungsi kawasan lindung; dan
   2) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

   Strategi Penataan Ruang Wilayah Kepulauan Selayar, meliputi:

   1) menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
   2) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.Adapun prioritas kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.

a. Konservasi Sumber Daya Air
   1) Sasaran:
      a) peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan; dan

b) peningkatan rehabilitasi lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Strategi: peningkatan keterlibatan multipihak dalam gerakan penanganan lahan kritis dan pelestarian sumber daya hayati. Kebijakan umum: konservasi dan rehabilitasin hutan dan lahan kritis.

2) Sasaran:
   a) peningkatan perlindungan fungsi lingkungan; dan
   b) penanganan dampak lingkungan hidup.

   Strategi: peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup secara beriring dengan penanganan dampak lingkungan hidup.

   Kebijakan umum: perlindungan fungsi lingkungan hidup dan Penanganan dampak lingkungan.
3) Sasaran: pengendalian luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

   Strategi: pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru.

   Kebijakan umum: penegakan regulasi lahan pangan berkelanjutan.

b. Pendayagunaan Sumber Daya Air
1) Sasaran: peningkatan kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah.

   Strategi: penguatan keterpaduan hulu dan hilir dalam pengelolaan sumber daya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi.

   Kebijakan umum: peningkatan kualitas air dan optimalisasi pemanfaatan air.
2) Sasaran: peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

   Strategi: penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.

   Kebijakan umum: peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
3) Sasaran: pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

   Strategi: kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau kecil.

   Kebijakan umum: dukungan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil.

c. Pengendalian Daya Rusak Air

Sasaran: penyediaan infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.

Strategi: Pengembangan daya resiliensi masyarakat atas bencana secara beriring dengan peningkatan kordinasi pemerintah dan lembaga lain dalam penanganan kebencanaan.

Kebijakan umum: Memperkuat Pusat Pengendalian Operasi dan Penyiapan Logistik untuk mendukung penaggulangan bencana di kawasan timur di Indonesia.

d. SISDA

Sasaran: perkembangan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.

Strategi: Membangun sinergitas penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Kebijakan umum: Kebijakan Penguatan SDM dan Iptek daerah serta Kebijakan Penguatan SIDa.

e. Pemberdayaan Masyarakat

1) Sasaran: peningkatan kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat.
   Strategi: Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.
   Kebijakan umum: Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
2) Sasaran: peningkatan kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa.
   Strategi: Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa.
   Kebijakan umum: Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa.
3) Sasaran: peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
   Strategi: Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan, level provinsi dan kabupaten/kota.
   Kebijakan umum: Peningkatan kordinasi penyuluhan.
4) Sasaran: peningkatan efektivitas peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota, klaster MP3EI, kerjasama regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan kerjasama internasional.
   Strategi: Pengembangan simpul sinergi antar pihak dan antar wilayah secara multi-level provinsi, regional, nasional dan global.

Kebijakan umum: Pengembangan dukungan BKPRS dan MP3EI serta Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri.

5) Sasaran: peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
Strategi: Peningkatan kordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan pangan.
Kebijakan umum: Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028

Sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028, dengan demikian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pokok sebagai berikut:

a. mengupayakan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan. Sasaran arah kebijakan ini ditandai oleh kualitas hidup yang tinggi, yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM, makin rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta didukung oleh pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang makin baik. Menghargai keberagaman dalam masyarakat, serta memiliki kemampuan adaptif-kreatif sehingga senantiasa dapat mengaktualisasikan diri secara mandiri, terutama menghadapi persaingan kehidupan global;

b. menjadikan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar. Sasaran dari arah kebijakan ini agar masyarakat Sulawesi Selatan mampu berkembang sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki (*self-organizing capacity*), ditandai dengan mantapnya ketahanan Budaya Lokal dan penghayatan akan ajaran agama yang dianut masyarakat. Makin meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama, sehingga pengaruh luar yang masuk dapat beradaptasi tanpa membawa pengaruh negatif. Pada gilirannya membentuk ketahanan terhadap kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri sehingga mampu mendukung terselenggara-nya pembangunan berbasis komunitas (*Community-Based Development*);

c. mengupayakan Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif. Sasaran dari arah kebijakan ini ditandai oleh terciptanya lingkungan yang memungkinkan terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik dan budaya serta peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan internal untuk melakukan aktualisasi diri. Terciptanya kemitraan dan sinergitas antara aparat keamanan, pemerintahan dan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam menjaga dan memelihara keamananserta ketertiban. Dengan demikian akan terwujud suatu tatanan yang kondusif dan atraktif yang dapat diukur dengan terwujudnya rasa aman, keadilan,

transparan, pelayanan professional oleh aparatur pemerintah daerah;

d. menjadikan wilayah Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Sasaran yang diharapkan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita dan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Tercipta tata ruang wilayah sebagai dasar atau acuan dalam mensinergikan suatu wilayah sosial ekonomi. Terwujudnya kemitraan dan sinergitas pembangunan ekonomi dan sosial antara Kabupaten/Kota sehingga masing-masing dapat membangun sesuai keunggulan lokal yang mereka miliki; dan

e. meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri, maju dalam memperkuat ketahanan nasional. Sasaran yang diharapkan pada kebijakan di bidang ini sasarannya ditandai oleh berkembangnya sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagai simpul (*main hubs*) transportasi nasional maupun regional serta sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi dan sosial budaya lainnya yang bertaraf nasional dan internasional. Pengembangan industri dan jasa yang memiliki keterkaitan wilayah. Pembangunan sumber daya ekonomi secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir, laut dan kepulauan yang dapat memberikan kontribusi bagi terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu serta dapat memberikan konstribusi terhadap ketahanan nasional.

7. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka rencana pembangunan atau pengembangan infrastruktur sumber daya air harus terpadu dan searah dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembanguan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan atau pengembangan sistem jaringan infratstruktur sumber daya air harus sesuai dengan struktur ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Selanjutnya, dalam rangka integrasi dengan rencana pembangunan atau pengembangan sektor-sektor lain, maka pembangunan atau pengembangan infrastruktur sumber daya air harus mendukung sektor-sektor lain, dengan strategi seperti dalam uraian berikut :

a. strategi pembangunan atau pengembangan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan mengacu RTRW (nasional, provinsi, kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Besar Wilayah

Sungai Pompengan Jeneberang);

b. strategi pembangunan atau pengembangan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan sejalan dengan pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah untuk peningkatan sektor-sektor strategis dan pengembangan kawasan cepat tumbuh;

c. strategi pembangunan atau pengembangan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan dalam rangka ikut mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan guna pengembangan potensi pertanian skala besar, dan pengembangan kawasan agropolitan; dan

d. strategi pembangunan atau pengembangan jaringan infrastruktur sumber daya air harus dikaitkan dengan upaya mendorong kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dalam suatu kesatuan wilayah sungai. Misalnya, pendayagunaan sumber daya air untuk penyediaan air baku (irigasi dan RKI) dan air bersih, konservasi sumber daya air untuk menjaga kelestarian sumber daya air dipadukan dengan keberadaan kawasan lindung dan hutan konservasi. Pengaturan fungsi pengendalian daya rusak air diarahkan pada kawasan lindung setempat antara lain, sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana.

2.3 Inventarisasi Data

2.3.1 Data Umum

1. Lokasi

Secara geografis, WS Jeneberang yang berada pada posisi antara 4°25'15,6"LS – 6°28'40"LS dan 119°20'20,4"BT – 120°19'12"BT. Batas-batas administrasi WS Jeneberang adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan

b. Sebelah timur : Teluk Bone

c. Sebelah selatan : Laut Flores

d. Sebelah barat : Selat Makassar

Sedangkan batas-batas hidrologis WS Jeneberang adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : WS Walanae-Cenranae, dan WS Saddang

b. Sebelah timur : WS Towari-Lasusua, WS Poleang-Roraya, dan WS Muna

c. Sebelah selatan : Laut Flores

d. Sebelah barat : Selat Makassar

WS Jeneberang merupakan WS strategis nasional yang terletak di 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yang tersebar di Provinsi

Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bone, dan Sebaran Kabupaten dalam WS Jeneberang.

Luas dan prosentase Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam WS Jeneberang lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 2.4. Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone merupakan daerah yang mempunyai luasan terbesar dalam WS Jeneberang, yaitu 20,06% dan 20,23% terhadap total luasan WS Jeneberang. Peta batas administrasi pada WS Jeneberang ditampilkan pada Gambar 2.2

Tabel 2.4. Daftar Persentase Luas WS Jeneberang pada masing-masing Daerah Administratif

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kabupaten/Kota Dalam WS (km^2)	Prosentase Luas Kabupaten/Kota Dalam WS (%)
1	Bantaeng	395,83	4,22
2	Bone	1.899,75	20,23
3	Bulukumba	1.154,67	12,30
4	Gowa	1.883,32	20,06
5	Jeneponto	903,35	9,62
6	Makassar	175,77	1,87
7	Maros	686,80	7,31
8	Selayar	903,50	9,62
9	Sinjai	819,96	8,73
10	Takalar	566,51	6,03
Total		9.389,47	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, jumlah DAS di WS Jeneberang berjumlah 58 (lima puluh delapan) DAS dengan DAS terbesar adalah DAS Jeneberang (8,36%), DAS Maros (7,16%), DAS Selayar (6,93%), DAS Tangka (5,08%), DAS Tallo (4,66%), DAS Jenedinging/Pappa (4,21%), dan DAS Kelara-Karaloe (4,14%). Daftar pembagian DAS di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Peta pembagian DAS di WS Jeneberang ditampilkan dalam Gambar 2.3

Tabel 2.5. Pembagian DAS Pada WS Jeneberang

No	DAS	Luas DAS (km^2)	Prosentase Luas DAS Dalam WS	Kabupaten/Kota
001	DAS Cabalu	327,00	3,48%	Bone
002	DAS Pattiro	487,65	5,19%	Bone
003	DAS Kaju	129,69	1,38%	Bone
004	DAS Salangketo	359,38	3,83%	Bone
005	DAS Luppereng	224,77	2,39%	Bone
006	DAS Salamekko	207,19	2,21%	Bone
007	DAS Tangka	476,76	5,08%	Bone, Gowa, Sinjai
008	DAS Sinjai	130,58	1,39%	Sinjai
009	DAS Kalamisu	157,33	1,68%	Sinjai
010	DAS Bua	280,58	2,99%	Bulukumba, Sinjai
011	DAS Lolisang	180,59	1,92%	Bulukumba, Sinjai
012	DAS Aparang	211,77	2,26%	Bulukumba, Sinjai
013	DAS Bampang	318,36	3,39%	Bulukumba, Sinjai
014	DAS Balantieng	199,39	2,12%	Bantaeng, Bulukumba, Gowa, Sinjai
015	DAS Bijawang	164,24	1,75%	Bantaeng, Bulukumba, Gowa, Sinjai
016	DAS Kalotro	35,81	0,38%	Bulukumba
017	DAS Bialo	99,26	1,06%	Bulukumba
018	DAS Togambang	52,73	0,56%	Bulukumba
019	DAS Moti	101,00	1,08%	Bantaeng, Bulukumba
020	DAS Kaloleng	48,49	0,52%	Bantaeng
021	DAS Umbaung-baung	60,52	0,64%	Bantaeng, Jeneponto
022	DAS Biangloe	68,04	0,72%	Bantaeng
023	DAS Allu	44,45	0,47%	Bantaeng
024	DAS Panaikang	45,33	0,48%	Bantaeng
025	DAS Tino	42,79	0,46%	Bantaeng
026	DAS Palapalasa	80,41	0,86%	Jeneponto
027	DAS Sipiringa	96,69	1,03%	Jeneponto
028	DAS Kelara-Karaloe	388,35	4,14%	Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai
029	DAS Tamanroya	281,43	3,00%	Gowa, Jeneponto
030	DAS Puncara	177,40	1,89%	Gowa, Takalar, Jeneponto
031	DAS Toppa	57,06	0,61%	Gowa, Takalar, Jeneponto
032	DAS Cikoang	158,98	1,69%	Gowa, Takalar, Jeneponto
033	DAS Pappa	395,54	4,21%	Gowa, Takalar, Jeneponto
034	DAS Biringkasi	70,64	0,75%	Gowa, Takalar
035	DAS Saro	96,04	1,02%	Gowa, Takalar
036	DAS Limbung	40,05	0,43%	Gowa
037	DAS Barombong	22,34	0,24%	Gowa, Makassar, Takalar
038	DAS Jeneberang	784,80	8,36%	Gowa, Makassar, Maros, Sinjai
039	DAS Tallo	437,75	4,66%	Maros, Gowa, Makassar
040	DAS Bonelengga	42,26	0,45%	Maros, Makassar

No	DAS	Luas DAS (km^2)	Prosentase Luas DAS Dalam WS	Kabupaten/Kota
041	DAS Maros	672,24	7,16%	Maros, Bone, Gowa
042	DAS Tanakeke	31,18	0,33%	Bone
043	DAS Batanglampe	8,73	0,09%	Bone
044	DAS Liangliang	21,12	0,22%	Bone
045	DAS Burungloe	1,94	0,02%	Bone
046	DAS Liukangloe	10,60	0,11%	Selayar
047	DAS Pasitanete	8,96	0,10%	Selayar
048	DAS Selayar	650,62	6,93%	Selayar
049	DAS Pasi	29,47	0,31%	Selayar
050	DAS Bahuluang	8,24	0,09%	Selayar
051	DAS Tambolongan	9,71	0,10%	Selayar
052	DAS Kayu Adi	11,75	0,13%	Selayar
053	DAS Tanah Jampea	117,62	1,25%	Selayar
054	DAS Kalao	101,00	1,08%	Selayar
055	DAS Bonerate	19,23	0,20%	Selayar
056	DAS Karompa	11,31	0,12%	Selayar
057	DAS Kaloto	80,94	0,86%	Selayar
058	DAS Madu	11,37	0,12%	Selayar
	Total	9.389,47	100%	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

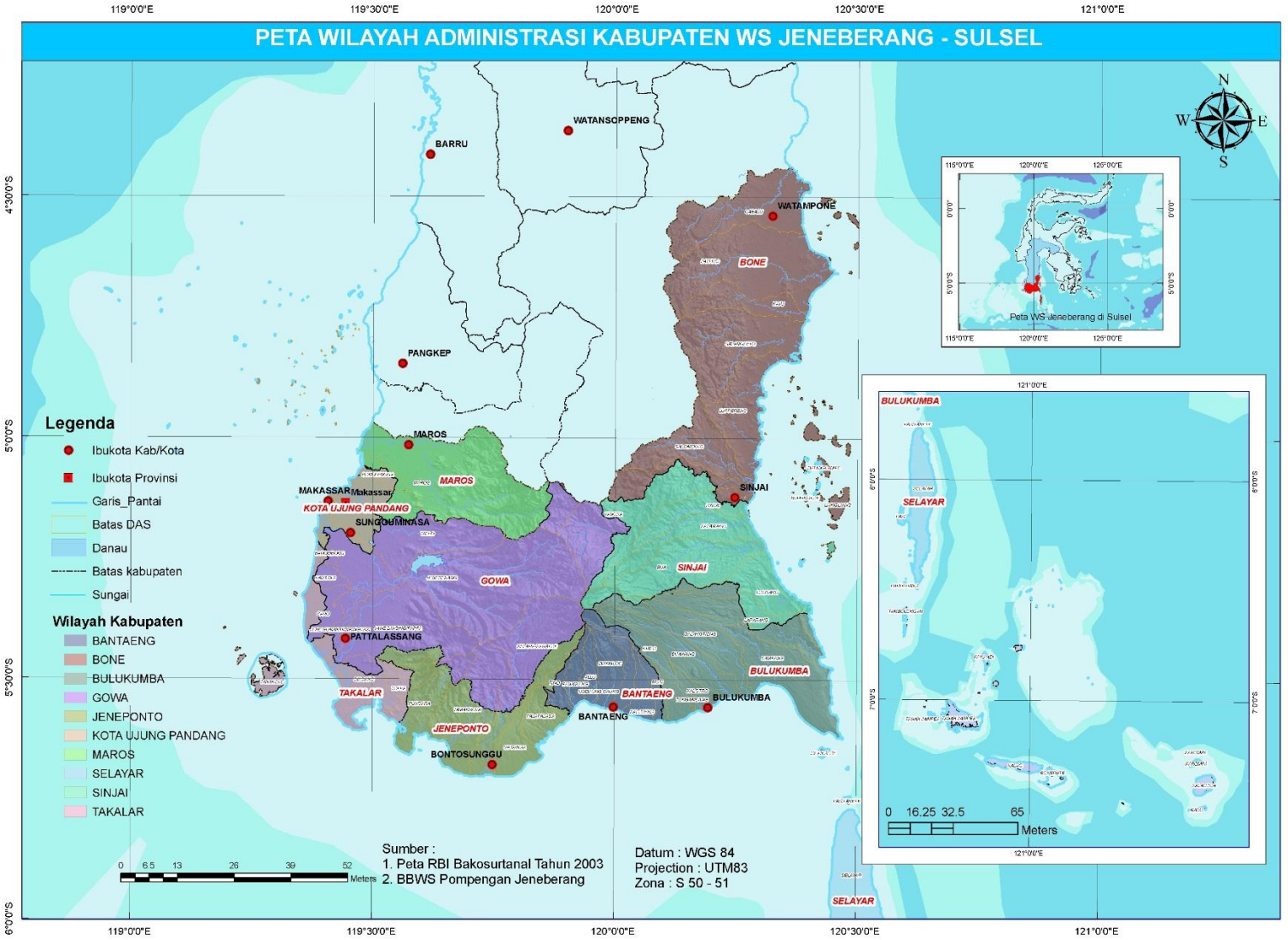

Sumber: Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2003, Peta Citra Satelit Landsat Tahun 2010

Gambar 2.2. Peta Administrasi WS Jeneberang

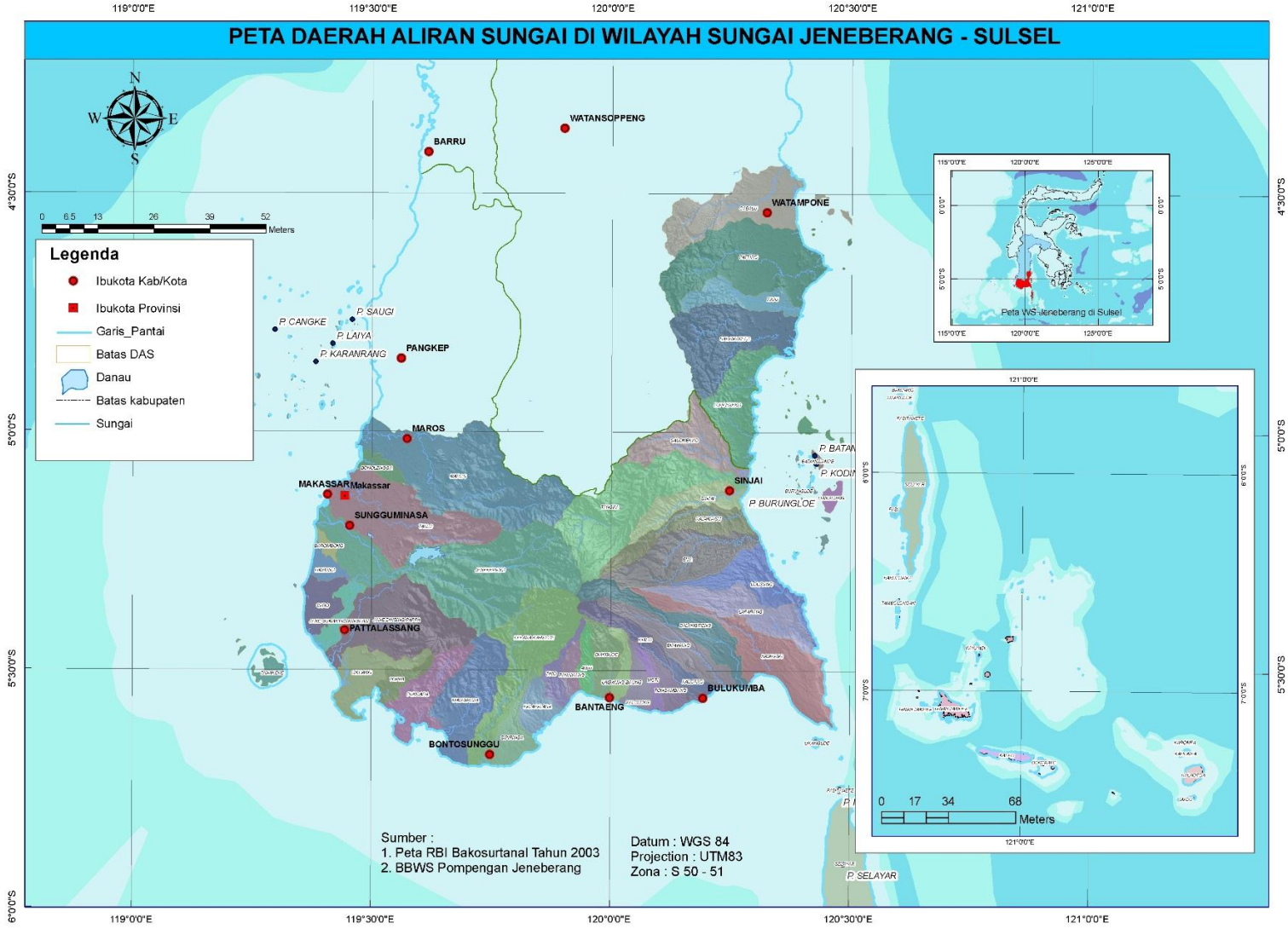

Sumber: Lampiran V.114 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

Gambar 2.3. Peta Pembagian DAS di WS Jeneberang

2. Data Jenis Tanah di WS Jeneberang

Sebaran jenis tanah di WS Jeneberang tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan peta sebaran jenis tanah di WS Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Tabel 2.6. Jenis Tanah Pada WS Jeneberang

No.	Jenis Tanah	Luas (Km^2)	% terhadap WS Jeneberang
1	Aluvial	1,59	0,02
2	Andosol	3.682,17	39,22
3	Grumosol	49,67	0,53
4	Kambisol	58,23	0,62
5	Latosol	639,99	6,82
6	Mediterania	2.261,52	24,09
7	Nitosol	466,15	4,96
8	Podsolik	141,30	1,50
9	Regosol	3,83	0,04
10	Renzinna	340,97	3,63
11	Mediteran litosol	1.744,03	18,57
Total		9.389,47	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

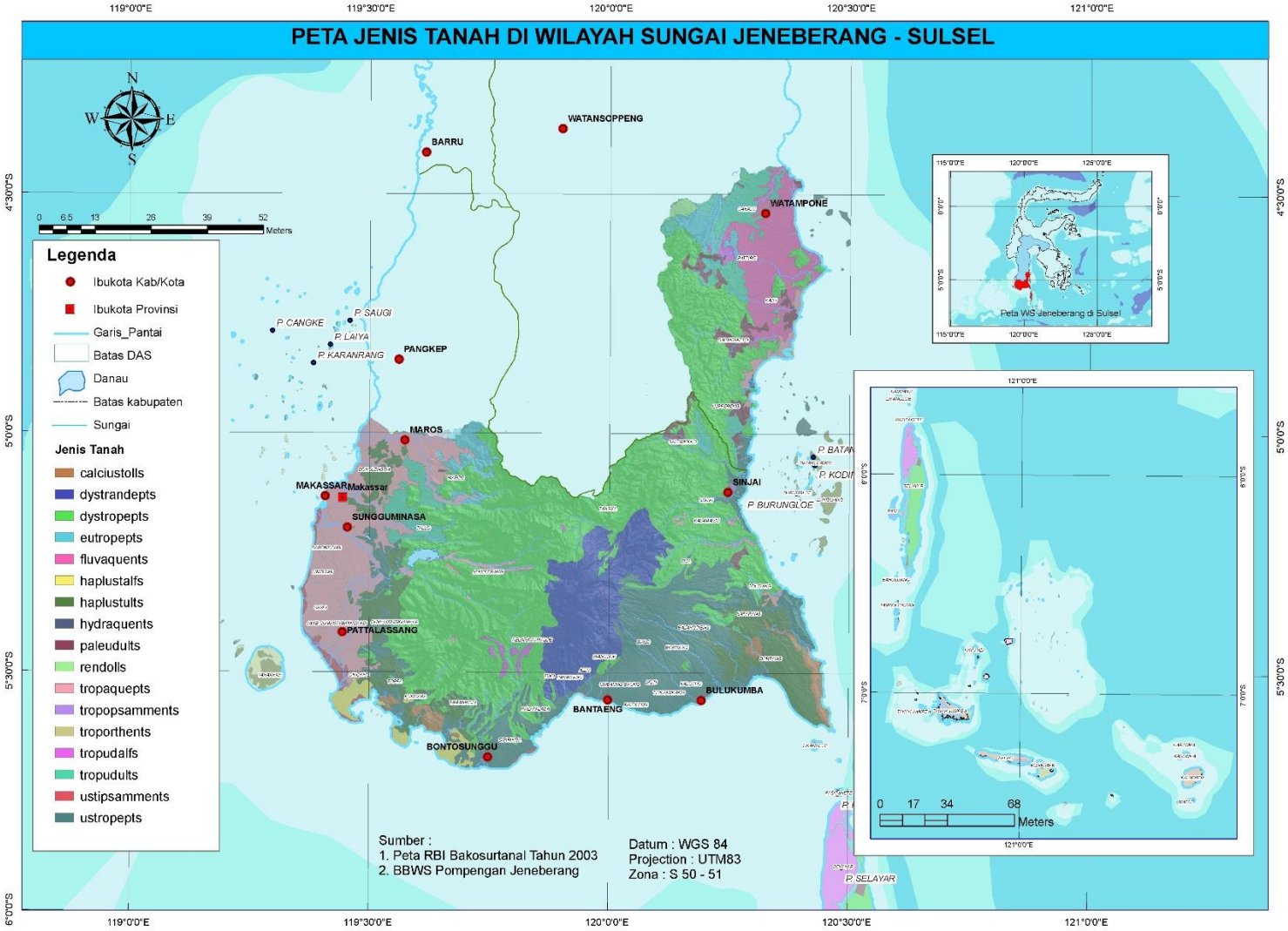

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah WS Jeneberang

3. Kondisi Topografi

Luasan masing-masing kelas kemiringan lereng di WS Jeneberang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. Peta topografi di WS Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Tabel 2.7. Kelas Kemiringan Lereng WS Jeneberang

Kelerengan Lahan (%)	Luas (km²)	% terhadap WS Jeneberang
0,0 - 9,60	7.156,64	76,22
9,60 - 19,21	1.433,91	15,27
19,21 - 28,82	573,58	6,11
28,82- 38,43	161,75	1,72
38,43 - 48,04	38,77	0,41
48,04 - 57,64	11,86	0,13
57,64 - 67,25	6,24	0,07
67,25 - 76,86	4,13	0,04
76,86 - 86,46	2,59	0,03
Total	9.389,47	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

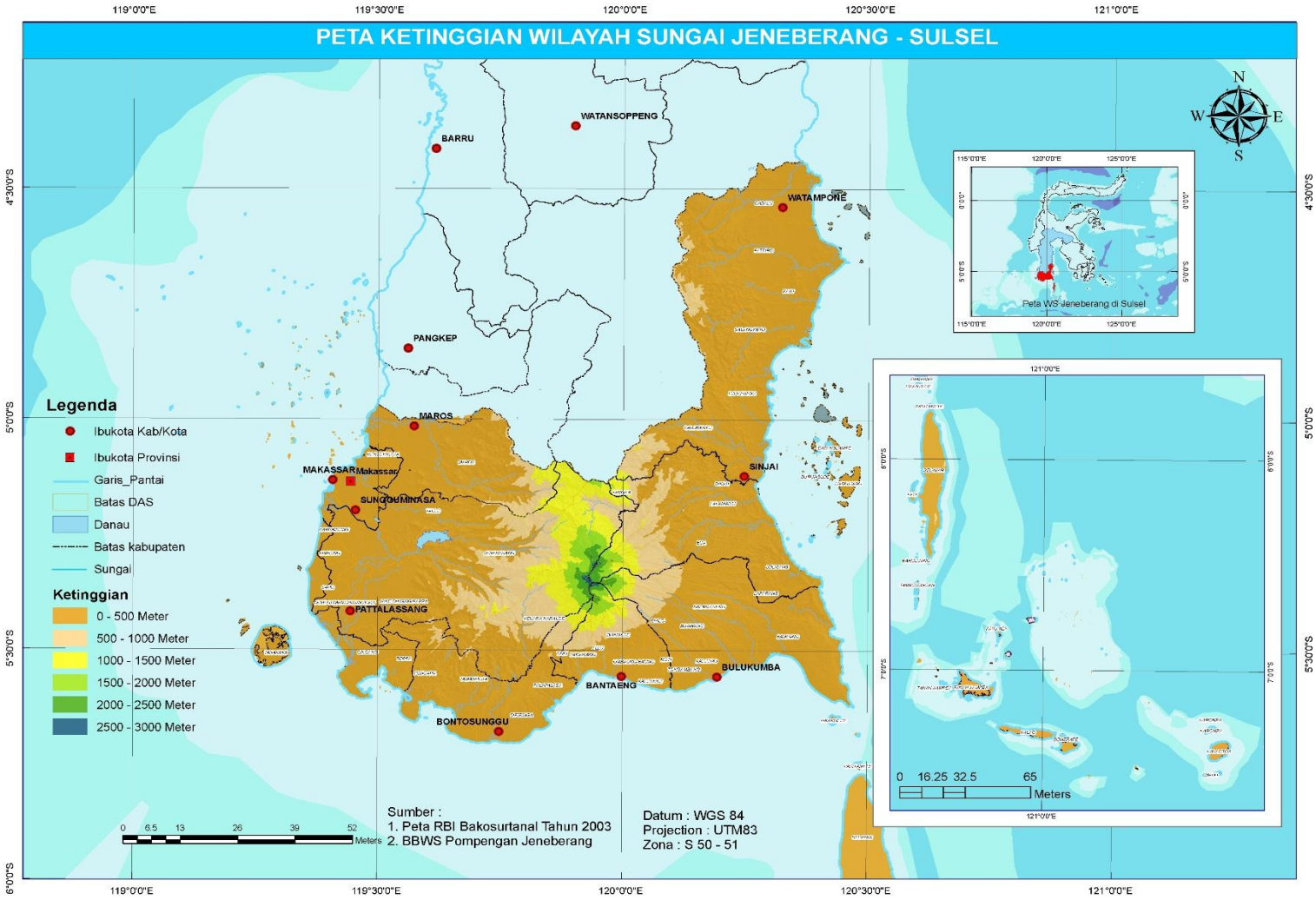

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.5. Peta Topografi WS Jeneberang

4. Keadaan Fisiografi

Fisiografi pertemuan lengan utara Sulawesi Selatan dan lengan Sulawesi Tenggara dibentuk oleh empat pegunungan besar dari barat sampai ke timur adalah pegunungan Quarles, Koroue, Verbeek dengan puncak teringgi Bulu Lantangunta (+3.731 m).

Morfologi regional daerah penelitian dapat dibagi menjadi lima satuan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan. Dataran terdapat di bagian selatan yang berhubungan langsung dengan Teluk Bone. Bagian utara dibatasi oleh keempat pengunungan tersebut di atas, dibentuk oleh bukit, gunung dan pegunungan.

Struktur geologi regional yang sangat berpengaruh adalah zona sesar (patahan) Matano, melintas mulai dari bagian utara Sulawesi Tenggara kearah barat laut sepanjang lebih dari 170 km dan sesar Palu-Koro. Selain itu, dijumpai banyak sesar-sesar besar dan kecil yang tersebar secara regional. Jenis sesar pada daerah ini dijumpai sesar normal, sesar geser dan sesar naik.

Sesar normal membentuk struktur Graben dan Horst yang terlihat pada daerah Danau Matano. Pada danau ini terdapat depresi sempit dengan dasar yang curam sampai pada kedalaman 600 m, sedangkan pada daerah permukaan lainnya naik 300-400 m di atas permukaan danau kearah utara dan selatan (simandjuntak et al, 1986). Selain itu masih banyak dijumpai Horst dan Graben yang membentuk wilayah ini berukuran lebih kecil.

Struktur kekar banyak dijumpai pada zona sesar dan berhubungan dengan proses terjadinya sesar itu sendiri. Kekar-kekar ini pada umumnya terjadi pada batuan metamof, batuan ultramfik dan batugamping (batuan karbonat). Terdapat beberapa jenis kekar dari yang paling dominan yaitu kekar utama, kekar regang, kekar vertical, kekar diagonal dan kekar rekah.

Pola aliran sungai secara regional terdapat tiga pola aliran utama yaitu pola *dendritik*, *subradial* dan *rectangular*. Pola aliran subradial terutama pada sungai-sungai intermitten (sungai tadah hujan) yang alirannya masuk ke danau sebagai pusat aliran, terutama bila terjadi hujan. Pola aliran rectangular terdapat pada zona patahan dimana aliran sungai mengikuti arah patahan dan relatif tegak lurus pada sungai utamanya. Sedangkan pola aliran sungai dendritik terutama diperlihatkan oleh sungai permanen dan besar dari timur ke barat, yaitu Sungai Larona (Malili), Sungai Cerekang, Sungai Angkona, Sungai Kalaena, Sungai Bone-Bone dan lain-lain. Di dataran rendah yang luas sungai bermeander (*meandering river*) dan alirannya sering berpindah-pindah.

5. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di WS Jeneberang untuk hutan relatif kecil seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.8. Luas hutan yang terdapat dalam WS Jeneberang 1.620,20 atau 16,57 % dari total luas WS Jeneberang 9.389,47 km^2. Hutan tersebut terdiri dari hutan rapat, hutan sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove skunder, dan hutan tanaman. Pemanfaatan ruang yang paling terlihat nyata adalah pemanfaatan untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan, baik yang berada pada wilayah daratan, pesisir dan kepulauan. Tata guna lahan di WS Jeneberang sebagian besar terdiri dari pemukuman, perkebunan, pertanian lahan kering, rawa, savana/padang rumput, sawah, semak belukar, dan tambak. Kesesuaian dan distribusi tata guna lahan WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8. Distribusi Keseuaian Tata Guna Lahan WS Jeneberang Tahun 2010 dan Tahun 2013

No	Jenis Tata Guna Lahan	Luas (km^2) dan Prosentase (%)					
		Tahun 2010		Tahun 2013		Beda 2010- 2013	
		km^2	(%)	km^2	(%)	km^2	(%)
1	Awan	39,53	0,42	39,53	0,42	0,00	0,00
2	Bandara/ Pelabuhan	6,57	0,07	6,57	0,07	0,00	0,00
3	Hutan Rapat	64,57	0,69	64,57	0,69	0,00	0,00
4	Hutan Mangrove Primer	9,64	0,10	11,34	0,12	-1,70	-0,02
5	Hutan Mangrove Sekunder	24,44	0,26	12,43	0,13	12,01	0,13
6	Hutan Sekunder	1.489,67	15,87	560,82	5,97	928,85	9,89
7	Hutan Tanaman	31,88	0,34	57,77	0,62	-25,89	-0,28
8	Pemukiman	236,41	2,52	264,30	2,81	-27,89	-0,30
9	Perkebunan	45,71	0,49	167,69	1,79	-121,98	-1,30
10	Pertanian Lahan Kering	2.973,74	31,67	2.160,83	23,01	812,90	8,66
11	Pertanian Lahan Kering Campur	31,32	0,33	1.743,28	18,57	-1.711,96	-18,23
12	Rawa	0,04	0,00	0,18	0,00	-0,14	0,00
13	Savanna/ Padang rumput	37,71	0,40	48,13	0,51	-10,42	-0,11
14	Sawah	71,97	0,77	1.929,86	20,55	-1.857,89	-19,79
15	Sawah Irigasi	1.838,84	19,58	556,93	5,93	1.281,91	13,65
16	Sawah Tadah Hujan	32,52	0,35	0,50	0,01	32,02	0,34
17	Semak Belukar	1.735,05	18,48	1.050,09	11,18	684,96	7,29
18	Tambak	146,66	1,56	202,95	2,16	-56,29	-0,60

No	Jenis Tata Guna Lahan	Luas (km²) dan Prosentase (%)					
		Tahun 2010		Tahun 2013		Beda 2010- 2013	
		km²	(%)	km²	(%)	km²	(%)
19	Tanah Terbuka	70,23	0,75	8,73	0,09	61,50	0,65
20	Tubuh Air	502,96	5,36	502,96	5,36	0,00	0,00
	Total	**9.389,47**	**100,00**	**9.389,47**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Hasil Analsis, Tahun 2013

Dari Tabel 2.8 tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2010, Pertanian Lahan Kering merupakan tata guna lahan terluas dengan luas 2.973,74 km² atau 31,67% dari total luas lahan di WS Jeneberang, sementara selebihnya dipergunakan untuk lahan permukiman dan penggunaan lahan yang lain.

Pada Tahun 2013, terjadi perubahan luasan tiap penggunaan lahan yang ada, dimana perubahan terbesar terjadi pada penggunaan lahan pertanian lahan kering campur dan sawah irigasi dimana Tahun 2010 pertanian lahan kering campur 31,32 km² dan sawah irigasi 1.838,84 km², dan pada Tahun 2013 bertambah menjadi 1.743,28 km² untuk pertanian lahan kering campur dan 556,93 km² untuk sawah irigasi. Selain itu, karena kondisi topografi WS Jeneberang yang sangat bervariasi mulai dari datar, berbukit, lembah dan bergunung, hal ini menyebabkan lahan yang tersedia tidak seluruhnya dapat dibudidayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena harus terdapat kawasan lindung yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah berulangnya kerusakan lingkungan, khususnya erosi yang menyebabkan tanah longsor dan banjir akibat berkurangnya tutupan lahan. Peta sebaran penggunaan lahan di WS Jeneberang Tahun 2008 dan peta sebaran penggunaan lahan di WS Jeneberang Tahun 2013 ditampilkan pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.

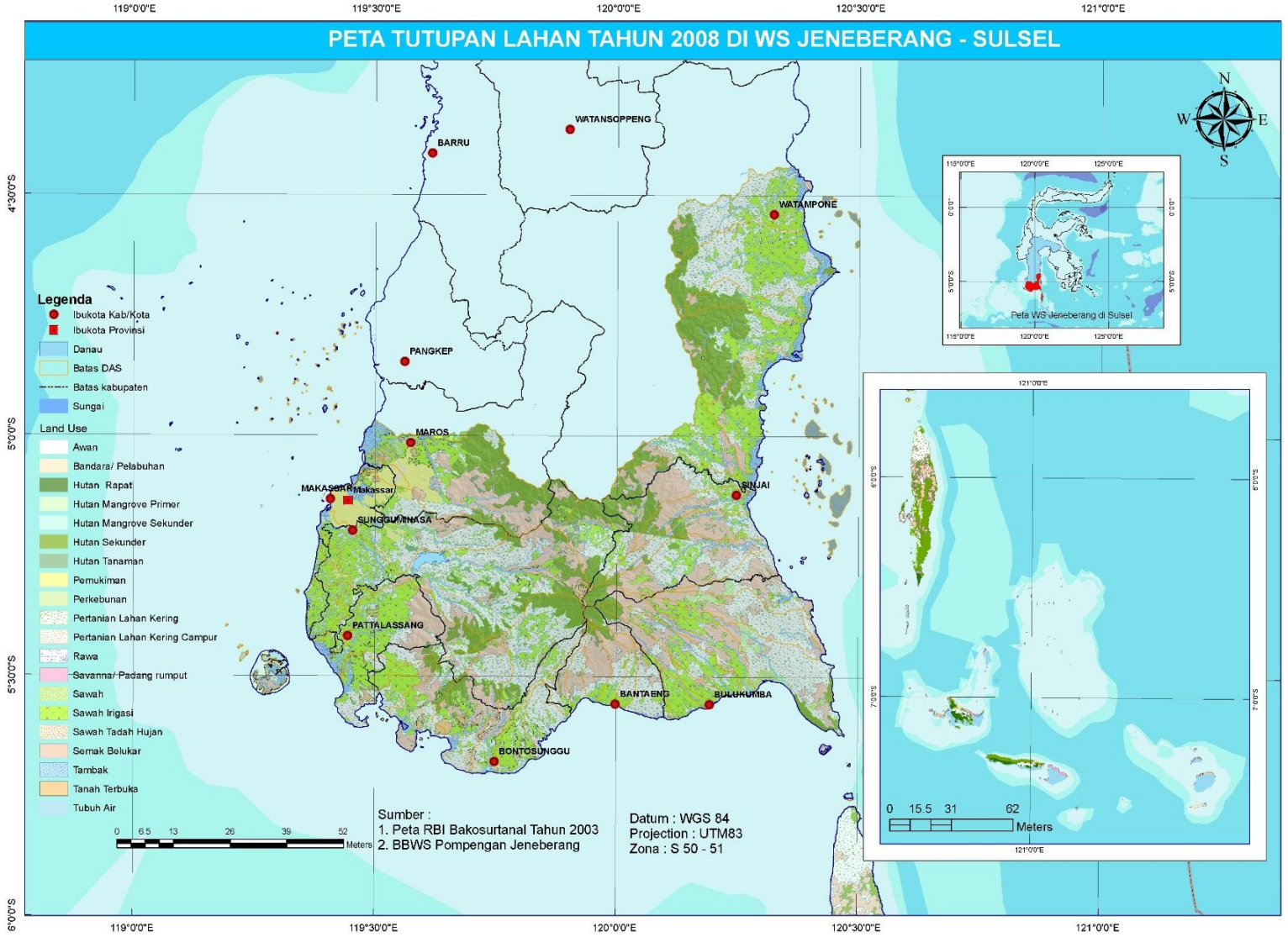

Sumber : Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2003 dan Peta Citra Satelit Landsat Tahun 2010

Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan WS Jeneberang Tahun 2008

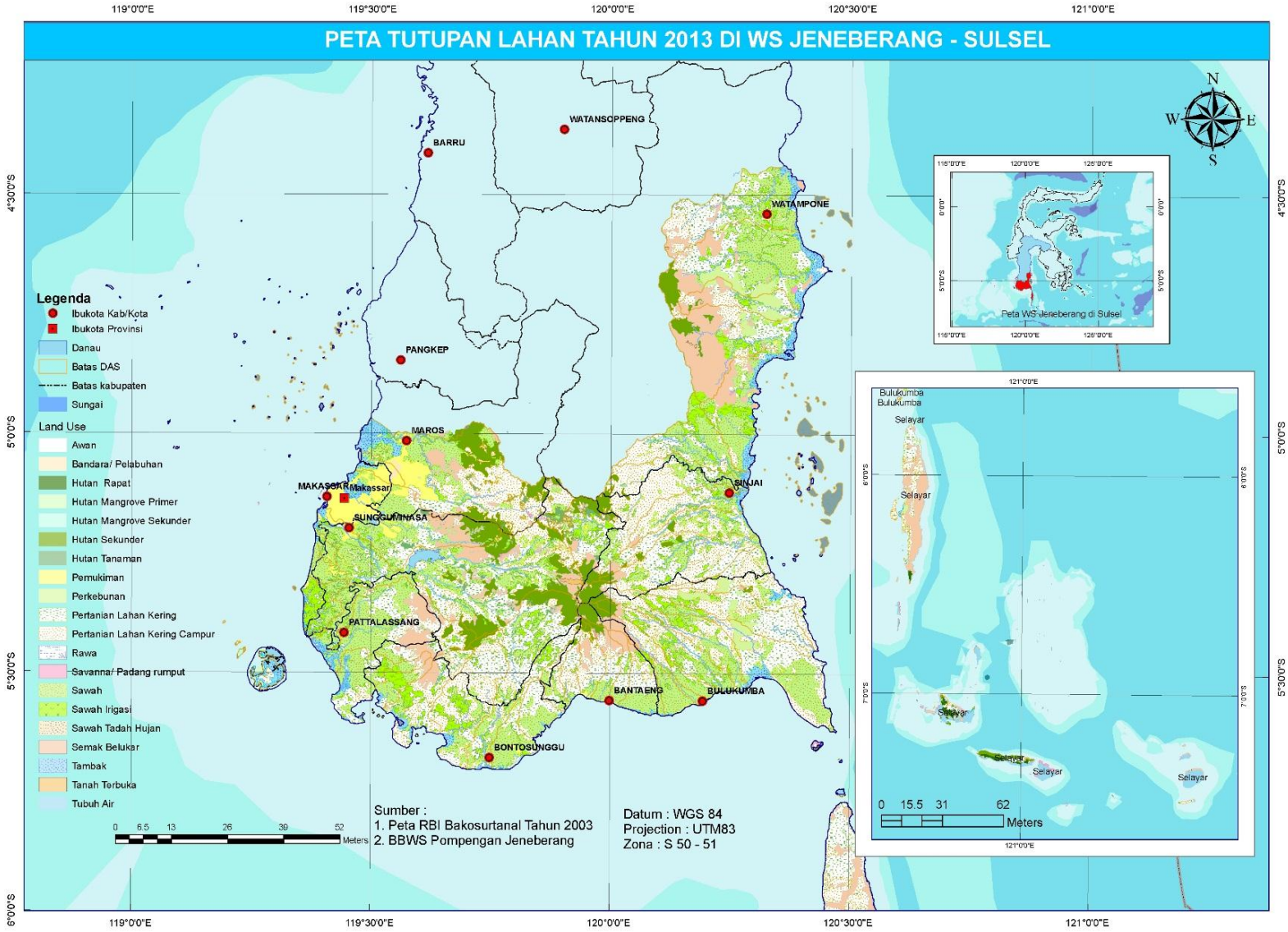

Sumber : Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2003 dan Peta Citra Satelit Landsat Tahun 2010

Gambar 2.7.Peta Penggunaan Lahan WS Jeneberang Tahun 2013

2.3.2 Data Sumber Daya Air

1. Iklim

Iklim Sulawesi Selatan termasuk tropis basah yang dipengaruhi angin musim barat dan angin musim timur, sehingga curah hujan cukup tinggi yang merata setiap tahunnya dan volume curah hujan berkisar antara 1.000 - 2.500 milimeter. Suhu udara bervariasi antara 24°C-33°C. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana, antara lain erosi tanah, banjir dan kebakaran hutan. Tipe-tipe iklim di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Tipe Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan

Zona	Bulan Basah > 200mm	Bulan Basah < 100 mm	Sebaran
A	10-12	0-2	Luwu Utara
B1	7-9	0-1	Bone-bone, Wotu, Malili
B2	7-9	2-3	Malakaji, Sinjai, Bagian selatan Sulsel
C123	5-6	0-6	Sinjai Barat, Pare-pare, Watampone, Palopo
D123	3-4	0-6	Pinrang, Takalar
E1234	0-2	0-6	Bagian selatan dan tengah Sulsel, Bone, Sidrap

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2011

Pada WS Jeneberang, suhu tertinggi berada pada bulan Oktober, yaitu sebesar 27,4°C sedangkan suhu terendah berada pada bulan Desember, Januari dan Februari yaitu sebesar 25,9°C. Curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari, yaitu sebesar 670 mm dan terendah pada bulan Agustus, yaitu sebesar 35,3 mm.

2. Data Hujan

Sebagai dasar dari analisa hidrologi, dalam studi ini digunakan data hujan dari 63 (enam puluh tiga) stasiun hujan yang tersebar di WS Jeneberang dengan panjang data selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu mulai tahun 2000 sampai 2009. Stasiun hujan yang tersebar di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan lokasi stasiun hujan di WS Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Tabel 2.10. Stasiun Hujan di WS Jeneberang

No	Nama Stasiun Hujan	No	Nama Stasiun Hujan	No	Nama Stasiun Hujan	No	Nama Stasiun Hujan
1	Maccope	16	Padangloang	31	Moti	46	Das Maros
2	Cakura	17	Pandang II	32	Bend Kelara	47	Salojirang
3	Bengo	18	Di Bettu	33	Salomekko	48	Bonto Kappong
4	Manere	19	Tanralili	34	Batu Bassi	49	Panakukkang
5	Toata	20	Bulo Bulo	35	Komara	50	Bendung Kampil
6	Maroangin	21	Marrada	36	Likupande	51	Senre
7	Pakelli	22	Bpa Walenna	37	Bayang Bayang	52	Bendung Pamuklu
8	S Balantieng	23	Bantimurung	38	Sungai Aparang	53	Pamukkulu
9	S Sanrego Hulu	24	Aparang III	39	S Lekopancing	54	Jenemarung
10	Das Pamukkulu	25	Onto	40	Malino	55	Cakura
11	Paitana	26	Tino Toa Panaikang	41	Kampili	56	Malolo
12	Salojirang	27	Bend Falakka	42	Mangempong	57	Das Pappa
13	Camming	28	Seka	43	Bili Bili	58	Takalar
14	Pallatae	29	Maloloi	44	Jonggoa	59	Biangkeke
15	Sungai Palaka	30	Kampili	45	Limbunga	60	Kalamisu
						61	Bulukamase

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

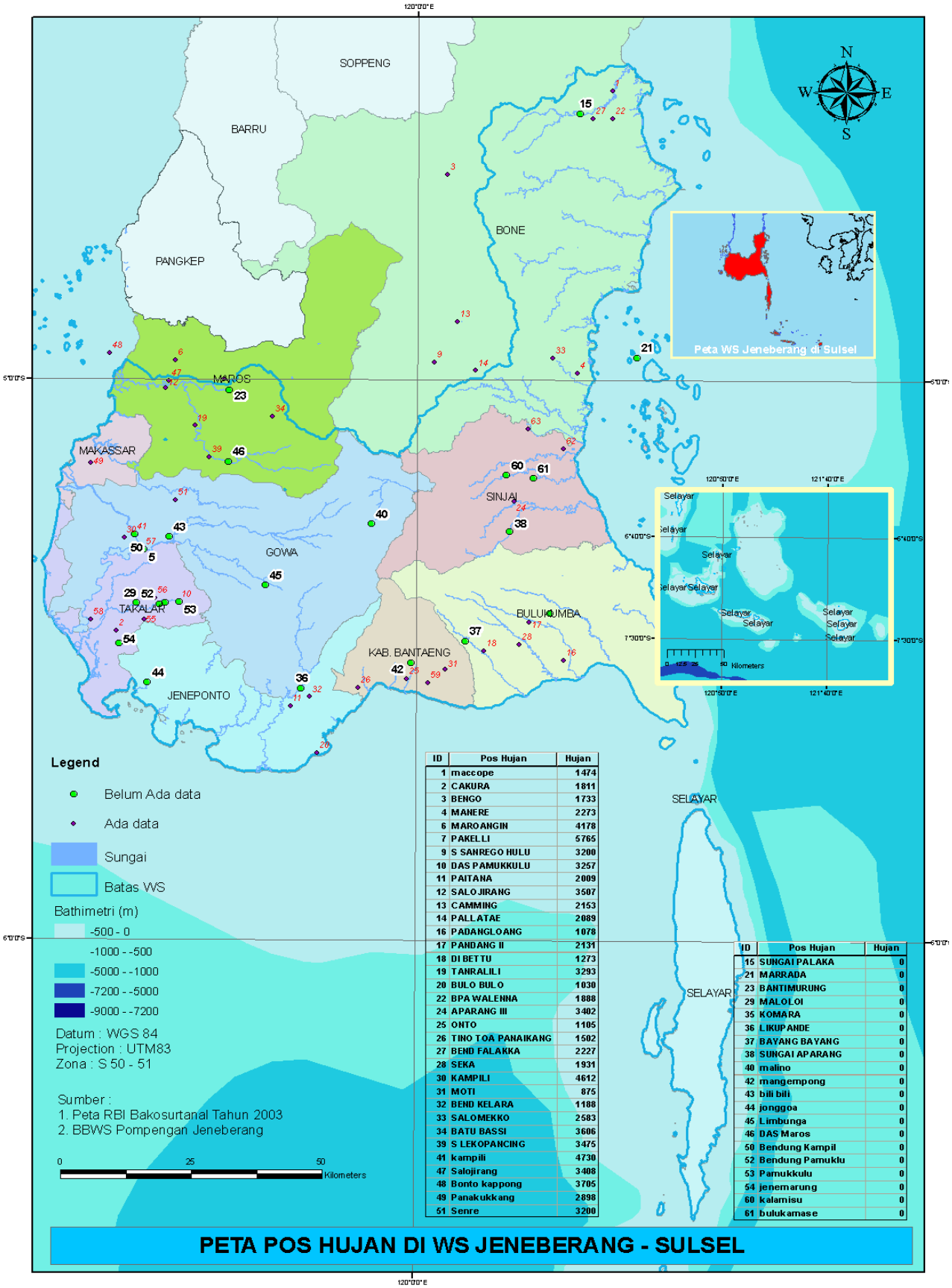

ID	Pos Hujan	Hujan
1	maccope	1474
2	CAKURA	1811
3	BENGO	1733
4	MANERE	2273
6	MAROANGIN	4178
7	PAKELLI	5765
9	S SANREGO HULU	3200
10	DAS PAMUKKULU	3257
11	PAITANA	2009
12	SALOJIRANG	3507
13	CAMMING	2153
14	PALLATAE	2089
16	PADANGLOANG	1078
17	PANDANG II	2131
18	DI BETTU	1273
19	TANRALILI	3293
20	BULO BULO	1030
22	BPA WALENNA	1888
24	APARANG III	3402
25	ONTO	1105
26	TINO TOA PANAIKANG	1502
27	BEND FALAKKA	2227
28	SEKA	1931
30	KAMPILI	4612
31	MOTI	875
32	BEND KELARA	1188
33	SALOMEKKO	2583
34	BATU BASSI	3606
39	S LEKOPANCING	3475
41	kampili	4730
47	Salojirang	3408
48	Bonto kappong	3705
49	Panakukkang	2898
51	Senre	3200

ID	Pos Hujan	Hujan
15	SUNGAI PALAKA	0
21	MARRADA	0
23	BANTIMURUNG	0
29	MALOLOI	0
35	KOMARA	0
36	LIKUPANDE	0
37	BAYANG BAYANG	0
38	SUNGAI APARANG	0
40	malino	0
42	mangempong	0
43	bili bili	0
44	jonggoa	0
45	Limbunga	0
46	DAS Maros	0
50	Bendung Kampil	0
52	Bendung Pamuklu	0
53	Pamukkulu	0
54	jenemarung	0
60	kalamisu	0
61	bulukamase	0

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2013

Gambar 2.8.Peta Lokasi Stasiun Hujan di WS Jeneberang

3. Data Air Permukaan

a. Debit

Debit sungai sangat fluktuatif tergantung curah hujan. Perbedaan antara debit tertinggi dengan yang terendah dalam satu tahun cukup signifikan. Data debit air sungai maksimum dan minimum di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.11. dan grafik debit aliran untuk Sungai Jeneberang, Sungai Tangka, Sungai Balantieng dan lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.9

Tabel 2.11. Debit Air Maksimum, Minimum di WS Jeneberang

No.	Nama DAS	Debit Max (m^3/dt)	Debit Min (m^3/dt)	No.	Nama DAS	Debit Max (m^3/dt)	Debit Min (m^3/dt)
1	Balangtieng	149,59	17,79	11	Luppereng	46,80	6,61
2	Bampang	22,41	3,26	12	Maros	209,46	47,31
3	Bua	181,40	17,62	13	Pattiro	146,93	19,27
4	Cabalu	104,26	13,81	14	Puncara	100,28	15,54
5	Jene Dinging/Pappa	162,70	26,70	15	Salangketo	155,46	20,23
6	Jene Tamanroya	109,50	16,66	16	Salomekko	66,03	8,88
7	Jeneberang	315,20	59,95	17	Saro	75,06	12,79
8	Kalamisu	107,52	15,75	18	Selayar	32,93	3,60
9	Kelara-Karaloe	81,07	15,35	19	Tallo	153,40	33,19
10	Aparang	57,10	12,38	20	Tangka	130,80	22,94

Sumber: Data dan Hasil Analisis, Tahun 2012

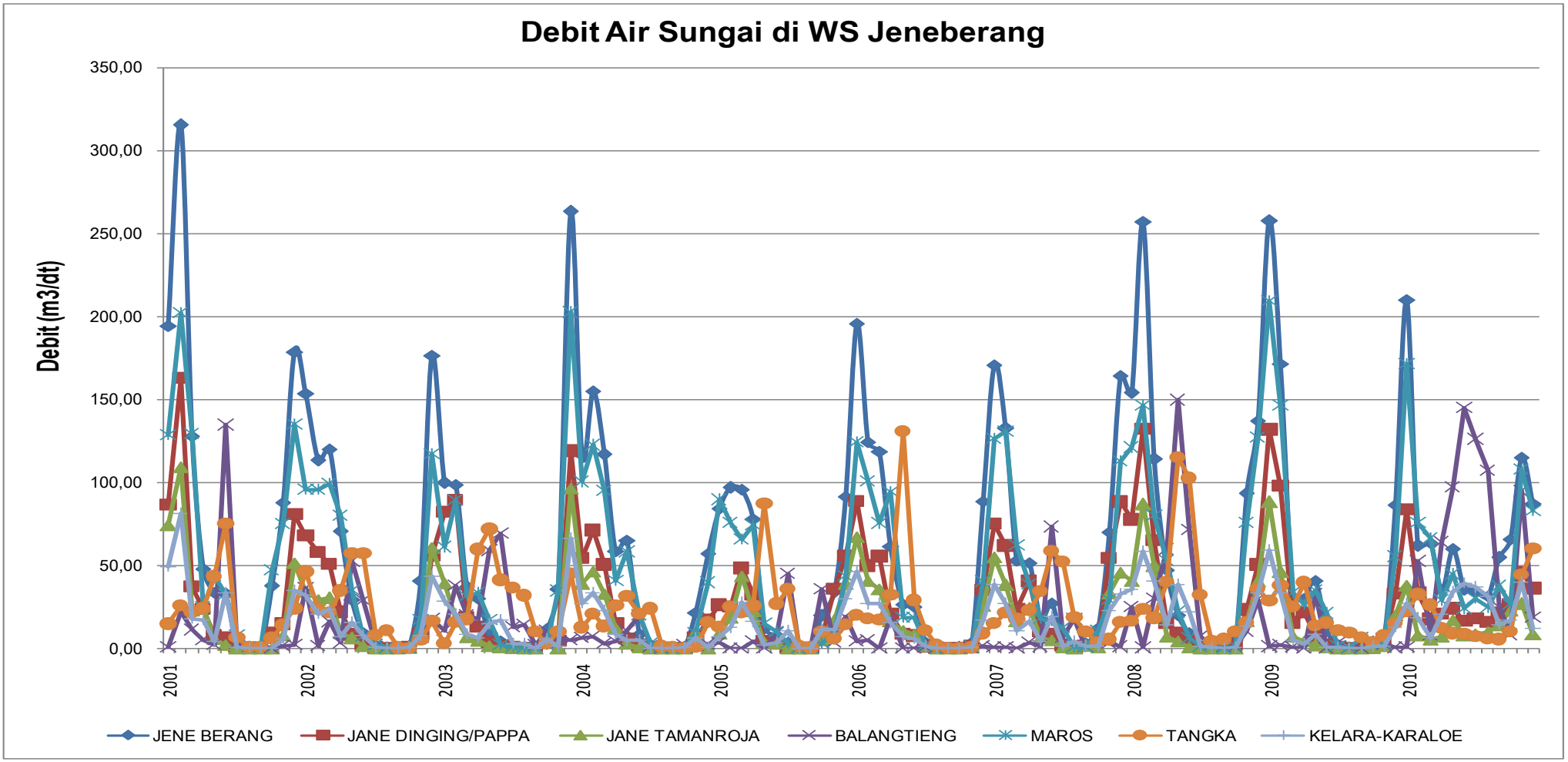

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Gambar 2.9. Grafik Debit Air Sungai Jeneberang, Sungai Tangka dan Sungai Balantieng

b. Data Prasarana Sumber Daya Air

Beberapa bangunan prasarana Sumber Daya Air di WS Jeneberang berupa bendung dan bendungan. Daftar bendung di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Bendung di WS Jeneberang

No	Nama Bendung	Lokasi	Nama Sungai	Tahun Pembuatan	Manfaat Irigasi (Ha)
1	Aparang 1	Desa Sanggiaserri, Bikeru Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	Aparang	1974	
2	Aparang Hulu	Desa Batu Bulerang Kecamatan Biji Nangka Kabupaten Sinjai	Aparang	1984	
3	Barugaya	Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar			
4	Batang Lappo	Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar			
5	Batang Tanayya	Kabupaten Takalar			
6	Batu Bassi	Kabupaten Maros	Bantimurung	1939	5.717
7	Bettu	Desa Dampang, Barombong Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba		1982	
8	Bili – Bili	Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa		1930	2.000
9	Bissua	Kabupaten Gowa	Jeneberang		10.758
10	Bontonyeleng	Desa Bontonyeleng Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba	Bontonyeleng	1981	1.000
11	Bontorea	Kabupaten Takalar			
12	Bulumarampa	Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros	Tombolo	1970	
13	Cambajawaya	Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros		1913	

No	Nama Bendung	Lokasi	Nama Sungai	Tahun Pembuatan	Manfaat Irigasi (Ha)
14	Jene Tallasa	Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Jene Tallasa		
15	Jene' Marrung	Desa Bontokadatto, Lungke Kecamatan Polongbangkeng Selat Kabupaten Takalar		1961	
16	Jenemaeja	Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Jenemaeja		
17	Kalamisu	Desa Kanrung, Baru Kecamatan Sinjai Tengah Barat Kabupaten Sinjai	Kalamisu	1955	
18	Kampili	Kabupaten Gowa	Jeneberang		10.545
19	Katonokang	Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar			
20	Pamukkulu	Kabupaten Takalar	Pamukkulu	1986	4.054
21	Pate'ne	Desa Pate'ne Kabupaten Takalar			
22	Pattiro	Kabupaten Bone	Pattiro	1928	4.970
23	Salomekko	Desa Biccoing Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone		1998	
24	Sangkala	Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Sangkala	1930	
25	Sanrego	Kabupaten Bone	Sanrego	1990	6.615
26	Selli Ceppobulu	Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone			
27	Tabo-Tabo	Kabupaten Bone	Tabo-Tabo	2005	7.013
28	Unyi	Desa Cabbenge Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone		1981	

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

Daftar waduk atau bendungan di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.13. dan peta sebaran lokasi bangunan prasarana sumber daya air di WS Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Tabel 2.13. Waduk/Bendungan di WS Jeneberang

No.	Nama Bendungan	Lokasi	Daerah Tangkapan Air (Ha)	Luas Muka Air Normal (Ha)	Volume Waduk (Juta m³)		Tinggi Di Atas Dasar Galian (m)	Puncak (m)		Tahun Pelaksanaan Konstruksi	
					Normal	Efektif		Elevasi	Panjang	Mulai	Selesai
1	Bili-Bili	Desa Bonto Parangla Kecamatan Parangloe, Kab Gowa	727		375,0	346,0	33			1986	1993
2	Mawang	Kabupaten Gowa			3,0						
3	LongStorage Jeneberang	Desa Tanjung Merdeka									
		Kecamatan Tamalate, Makassar									
4	Salomekko	Desa Biccoing, Kecamatan Salomekko	1.320		8,2	7,3		80	300	1996	1998
		Kabupaten Gowa, Kabupaten bone	13		7,0				300		1998
5	Balang Tonjong	Kabupaten Gowa			1,0						
6	Waduk Tunggu Pampang	Desa Borong Kecamatan Panakukkang Kabupaten Kota Makassar			1,4						

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013

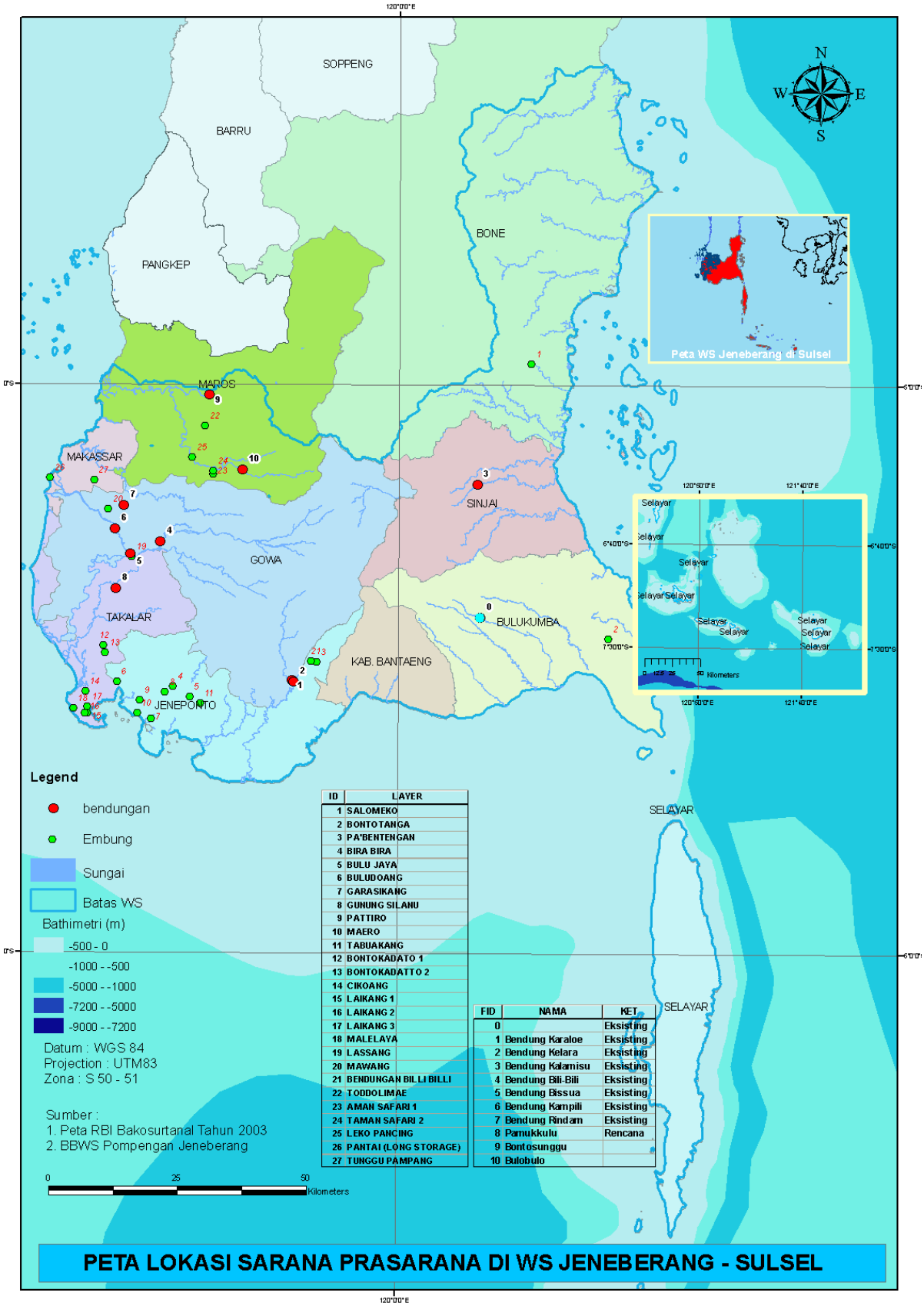

Sumber: Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2003, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2013

Gambar 2.10. Peta Lokasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air di WS Jeneberang

4. Data Potensi Air Tanah

Potensi air tanah di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Potensi Air Tanah WS Jeneberang

No.	Nama CAT	Luas CAT (Km^2)	Lokasi	Jumlah Air Tanah [Juta m^3/tahun]	
				Bebas	Tertekan
1	Makassar	580	Kota Makassar Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar	226	4
2	Gowa	482	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Bantaeng	332	2
3	Sinjai	81	Kabupaten Sinjai	56	1
4	Bantaeng	1.433	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar	600	5
5	Bira	230	Kabupaten Bulukumba	73	-
6	Selayar	656	Kabupaten Selayar	205	-
	Total	**3.462**		**1.492**	**12**

Sumber: Peta Cekungan Air Tanah Pulau Sulawesi Skala 1:250.000, Tahun 2011

Beberapa cekungan tersebut telah dieksplorasi sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan sawah ladang. Potensi air tanah di WS Jeneberang yang sudah dieksplorasi sudah cukup besar, sehingga perlu adanya upaya konservasi dan pengaturan pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah yang ada di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.15 dan peta cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT WS Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Tabel 2.15. Pemanfaatan Air Tanah WS Jeneberang

No	Kota/Kabupaten	Volume (l/dt)
1	Bantaeng	220,00
2	Bone	140,00
3	Bulukumba	140,00
4	Gowa	770,00
5	Jeneponto	320,00
6	Maros	100,00
7	Selayar	30,00
8	Sinjai	30,00
9	Makassar	1.200,00
10	Takalar	100,00
	Total	3.050,00

Sumber: Peta Cekungan Air Tanah Pulau Sulawesi, Tahun 2011

Adapun jumlah volume potensi air tanah yang terdapat di CAT Jeneberang diestimasi dengan berdasarkan besar infiltrasi yang terjadi, yaitu di DAS Jeneberang. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, diketahui nilai infiltrasi tiap DAS di WS Jeneberang dan dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Potensi Resapan Air Tanah WS Jeneberang

No.	Nama DAS	Luas (km^2)	Infiltrasi (mm)
1	Balangtieng	199,39	19,29
2	Bampang	318,36	14,38
3	Barombong	22,34	50,69
4	Bialo	99,26	26,25
5	Biangloe	68,04	22,37
6	Bijawang	164,24	19,15
7	Bonolengga	42,26	65,78
8	Bua	280,58	22,34
9	Cikoang	158,98	31,37
10	Jane Dinging/Pappa	395,54	43,82
11	Jane Gumanti/Biringkasi	70,64	49,01
12	Jane Tamanroja	281,43	43,07
13	Jeneberang	784,80	52,35
14	Kalamisu	157,33	28,60
15	Kaloleng	48,49	18,95
16	Kalotro	35,81	13,55
17	Kelara-Karaloe	388,35	27,74
18	Laparang	211,77	24,56
19	Limbung	40,05	48,72
20	Lolisang	180,59	22,52
21	Maros	672,24	74,24
22	Moti	101,00	12,28
23	Palapalasa	80,41	11,29
24	Panaikang	75,33	19,71
25	Puncara	177,40	38,11
26	Saro	96,04	42,37
27	Selayar	650,74	18,66
28	Sinjai	130,58	31,44
29	Sipiringa	96,69	13,48
30	Tallo	437,75	47,22
31	Tangka	476,76	32,78
32	Tino	42,79	16,76
33	Togambang	52,73	13,25
34	Toppa	57,06	27,71
35	Umbaungbaung	60,52	17,55
36	Salomekko	207,19	33,60

No.	Nama DAS	Luas (km^2)	Infiltrasi (mm)
37	Luppereng	224,77	36,45
38	Salangketo	359,38	58,28
39	Kaju	129,69	21,03
40	Pattiro	487,65	79,07
41	Cabalu	327,00	53,02
42	Burungloe	1,94	0,31
43	Batanglampe	8,73	1,42
44	Liangliang	21,12	3,42
45	Tanakeke	31,18	5,06
46	Pasi	29,47	4,78
47	Bahuluang	8,24	1,34
48	Kayu Adi	11,75	1,91
49	Tanah Jampea	117,62	19,07
50	Kalao	101,00	16,38
51	Bonerate	19,23	3,12
52	Karompa	11,31	1,83
53	Kalaotoa	80,94	13,12
54	Madu	11,37	1,84
55	Likangloe	10,60	1,72
56	Tambolongan	9,71	1,57
57	Allu	44,45	7,21
58	Pasitanete	8,96	1,45
	Total	9.389,47	1.061,37

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Berdasarkan data di atas, maka dapat diperkirakan nilai infiltrasi sebagai nilai *recharge* air tanah di WS Jeneberang, sedangkan nilai potensi air tanah di WS Jeneberang adalah sebesar 1.492 juta m^3/tahun. Peta cekungan air tanah WS Jeneberang disajikan pada Gambar 2.11 berikut ini.

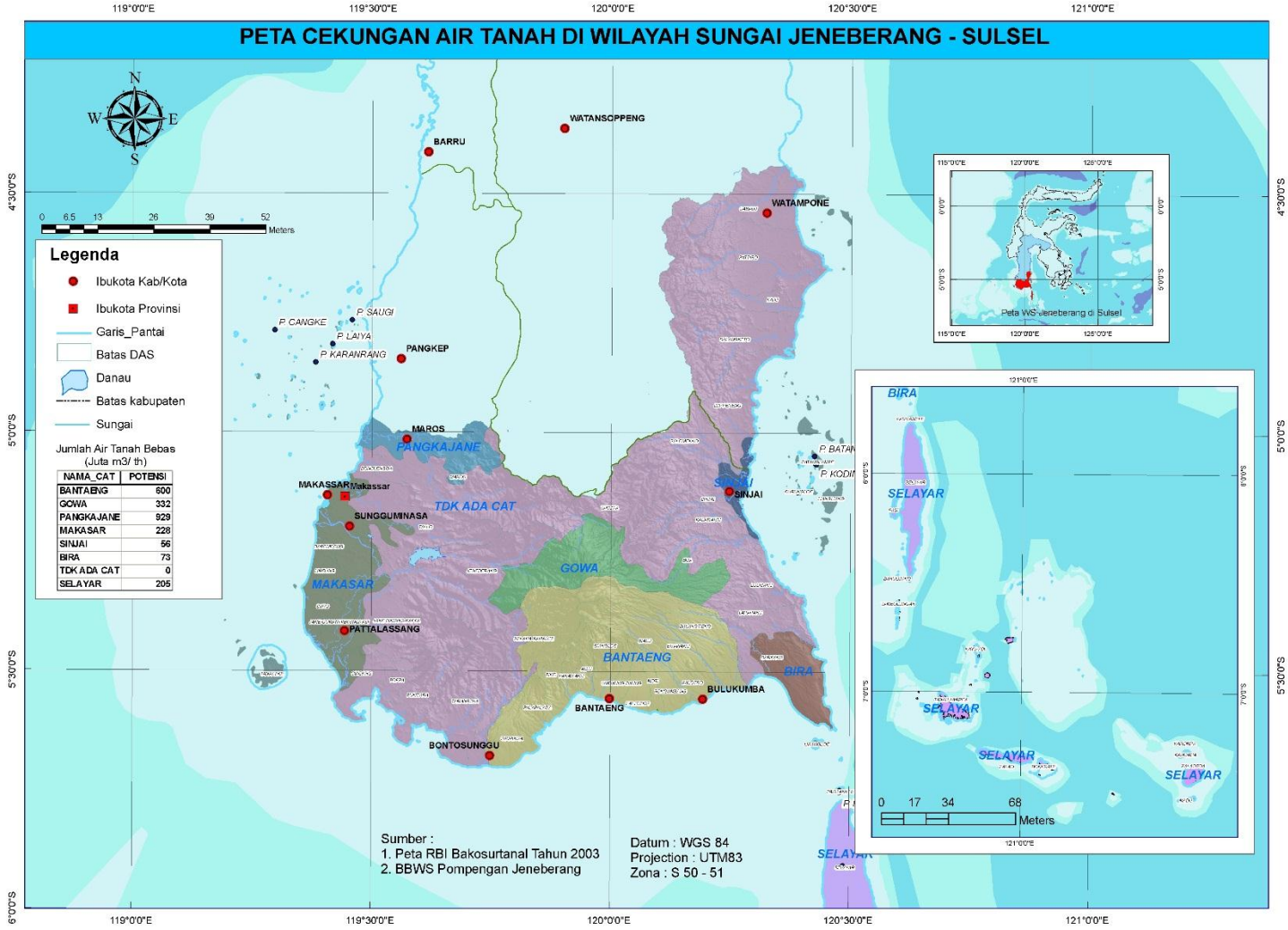

Sumber: Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2003, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.11. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) WS Jeneberang

5. Lahan Kritis

Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan baik yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan. Usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut RHL salah satunya ditujukan untuk mengurangi atau menanggulangi lahan kritis di dalam DAS atau sub DAS.

Penentuan kekritisan lahan berdasarkan pada metode penilaian lahan kritis dimana sasaran penilaiannya adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang berhubungan dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan lindung bagi hutan lindung dan fungsi lindung di luar kawasan hutan dan juga fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian.

Pada setiap fungsi lahan ditentukan kriteria atau faktor pendukung yang terbagi kedalam beberapa kelas. Penilaian masing-masing kelas diberi bobot, besaran serta skoring. Jumlah total skor dikalikan bobot masing-masing merupakan kelas kekritisan lahan masing-masing kawasan.

Berdasarkan pada penilain tersebut diatas maka tingkat kekritisan lahan WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan WS Jeneberang

No DAS	Nama DAS	Luas DAS (Km^2)	Luas Kekritisan Lahan (Ha)			
			Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
1	Cabalu	327,00	790,33	23.09	5.811,56	6.624,99
2	Pattiro	487,65	2.107,12	675.79	5.869,61	8.652,53
3	Kaju	129,69	331,43	333.04	1.030,47	1.694,94
4	Salangketo	359,38	1.069,55	179.34	2.577,13	3.826,02
5	Luppereng	224,77	1.040,62	915.26	1.241,99	3.197,87
6	Salomekko	207,19	.1670,25	3.077.79	899,97	5.648,00
7	Tangka	476,76	4.783,40	7.082.89	8.631,75	20.498,04
8	Sinjai	130,58	326,27	4.778.35	1.390,80	6.495,42
9	Kalamisu	157,33	3.087,44	4.967.75	1.642,79	9.697,97
10	Bua	280,58	2.549,48	10.024.59	3.133,23	15.707,30
11	Lolisang	180,59	3.117.91	7.831.56	498,91	11.448,39
12	Laparang	211,77	3.354.25	4.186.86	2.423,20	9.964,31
13	Bampang	318,36	3.933.31	3.992.35	1.164,81	9.090,48
14	Balangtieng	199,39	140,45	6.876.58	1.998,77	9.015,79
15	Bijawang	164,24	3,99	3.893.40	1.245,09	5.142,49
16	Kalotro	35,81	-	307.62	146,27	453,89
17	Bialo	99,26	263,78	4.248.72	349,07	4.861,57
18	Togambang	52,73	96,85	-	-	96,85
19	Moti	101,00	110,53	873.57	-	984,10
20	Kaloleng	48,49	393,12	630.00	-	1.023,12
21	Umbaung-Baung	60,52	96,91	1.240.42	-	1.337,33
22	Biangloe	68,04	1.003,33	3.299.51	1.011,21	5.314,04
23	Allu	44,45	657,39	1.682.03	1.31527	3.654,69

No DAS	Nama DAS	Luas DAS (Km²)	Luas Kekritisan Lahan (Ha)			
			Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
24	Panaikang	45,33	1.650,68	1.477.18	587,12	3.714,98
25	Tino	42,79	2.270,89	1.451.69	439,96	4.162,54
26	Palapalasa	80,41	42,22	27.01	2.117,60	2.186,83
27	Sipiringa	96,69	53,19	222.74	1.311,49	1.587,43
28	Kelara-Karaloe	388,35	10.163,23	1.990.38	3.635,79	15.789,41
29	Jene Tamanroja	281,43	3.063,86	4.036.70	7.528,80	14.629,36
30	Puncara	177,40	2.417,10	2.409.48	5.665,95	10.492,53
31	Toppa	57,06	682,25	140.42	871,64	1.694,31
32	Cikoang	158,98	660,88	964.48	1.826,03	3.451,38
33	Jene Dinging/ Pappa	395,54	1.781,16	1.121.48	8.719,82	11.622,46
34	Jene Gumanti/ Biringkasi	70,64	0,57	16.66	181,87	19,10
35	Saro	96,04	-	37.60	271,65	309,25
36	Limbung	40,05	-	88.40	-	88,40
37	Barombong	22,34	-	98.45	-	98,45
38	Jeneberang	784,80	10.838,86	6.231.68	19.215,34	36.285,88
39	Tallo	437,75	2.675,86	690.75	8.686,87	12.053,48
40	Bonolengga	42,26	140,87	330.81	-	471,68
41	Maros	672,24	1.373,77	5.132.96	16.525,83	23.032,56
42	Tanakeke	31,18	-	-	1.079,61	1.079,61
43	Liangliang	21,12	-	-	-	-
44	Batanglampe	8,73	-	-	-	-
45	Burungloe	1,94	-	-	-	-
46	Likangloe	10,60	-	-	-	-
47	Pasitanete	8,96	-	-	-	-
48	Selayar	650,62	2.465,98	10.441,09	3.815,12	16.722,20
49	Pasi	29,47	7,74	90,85	-	98,60
50	Bahuluang	8,24	-	-	174,15	174,15
51	Tambolongan	9,71	-	-	-	-
52	Kayu Adi	11,75	-	-	-	-
53	Tanah Jampea	117,62		5,39	223,30	228,69
54	Kalao	101,00	0.00	10,14	200,17	210,31
55	Bonerate	19,23	-	-	-	-
56	Karompa	11,31	-	-	-	-
57	Kalaotoa	80,94	-	-	-	-
58	Madu	11,37	-	-	-	-
	Total	**9.389,47**	**71.216,82**	**108.136,85**	**125.460,02**	**304.813,69**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Luas lahan kritis berdasarkan luas di wilayah Kabupaten/Kota tercatat 75.671,66 Ha di luar kawasan hutan, 46.990,82 Ha dalam kawasan hutan, 6.771,76 Ha di kawasan lindung, 720,39 Ha di Taman Wisata/Suaka Margasatwa/Cagar Alam. Luas dan tingkat kekritisan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.18. Peta kekritisan lahan Tahun 2013 ditampilkan dalam Gambar 2.12.

Tabel 2.18. Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan di WS Jeneberang

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Luas Lahan Kritis (Ha)											
		Luar Kawasan Hutan			Dalam Kawasan Hutan			Kawasan Lindung			Taman Wisata/Suaka Margasatwa/Cagar Alam		
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
1	Kabupaten Gowa	46.982,84	9.627,45	71,15	13.620,45	8.693,89	2.462,44	-	-	-	520,80	-	-
2	Kabupaten Takalar	31.423,56	2.027,82	-	1.754,25	1.464,13	33,25	-	506,40	-	3.601,45	33,64	-
3	Kabupaten Jeneponto	45.871,21	2.283,31	44,48	5.571,81	248,44	268,51	-	687,52	283,74	-	-	-
4	Kabupaten Bantaeng	20.951,57	6.422,51	36,05	2.022,90	450,92	574,31	755,04	6,65	-	-	-	-
5	Kabupaten Kabupaten Bulukumba	49.051,54	1.320,75	-	1.303,25	94,16	-	2.535,10	1.598,67	-	3.221,99	-	-
6	Kabupaten Sinjai	42.158,15	9.778,70	7,07	3.824,93	964,26	-	1.155,48	519,74	79,55	-	-	-
7	Kabupaten Bone	201.856,73	26.790,66	93,51	22.520,68	12.112,73	8.395,35	997,97	3.452,78	82,67	190,56	-	-
8	Kabupaten Maros	21.316,96	13.215,81	-	5.655,85	6.406,67	1.174,62	-	-	-	1,82	-	-
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	36.797,31	4.179,03	-	3.484,04	16.555,62	142,48	-	-	-	-	686,75	208,81
10	Kota Makassar	2.137,76	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**498.547,63**	**75.671,66**	**252,26**	**59.758,16**	**46.990,82**	**13.050,96**	**5.443,59**	**6.771,76**	**445,96**	**7.536,62**	**720,39**	**208,81**

Sumber: BPDAS Jeneberang-Walanae, Tahun 2010

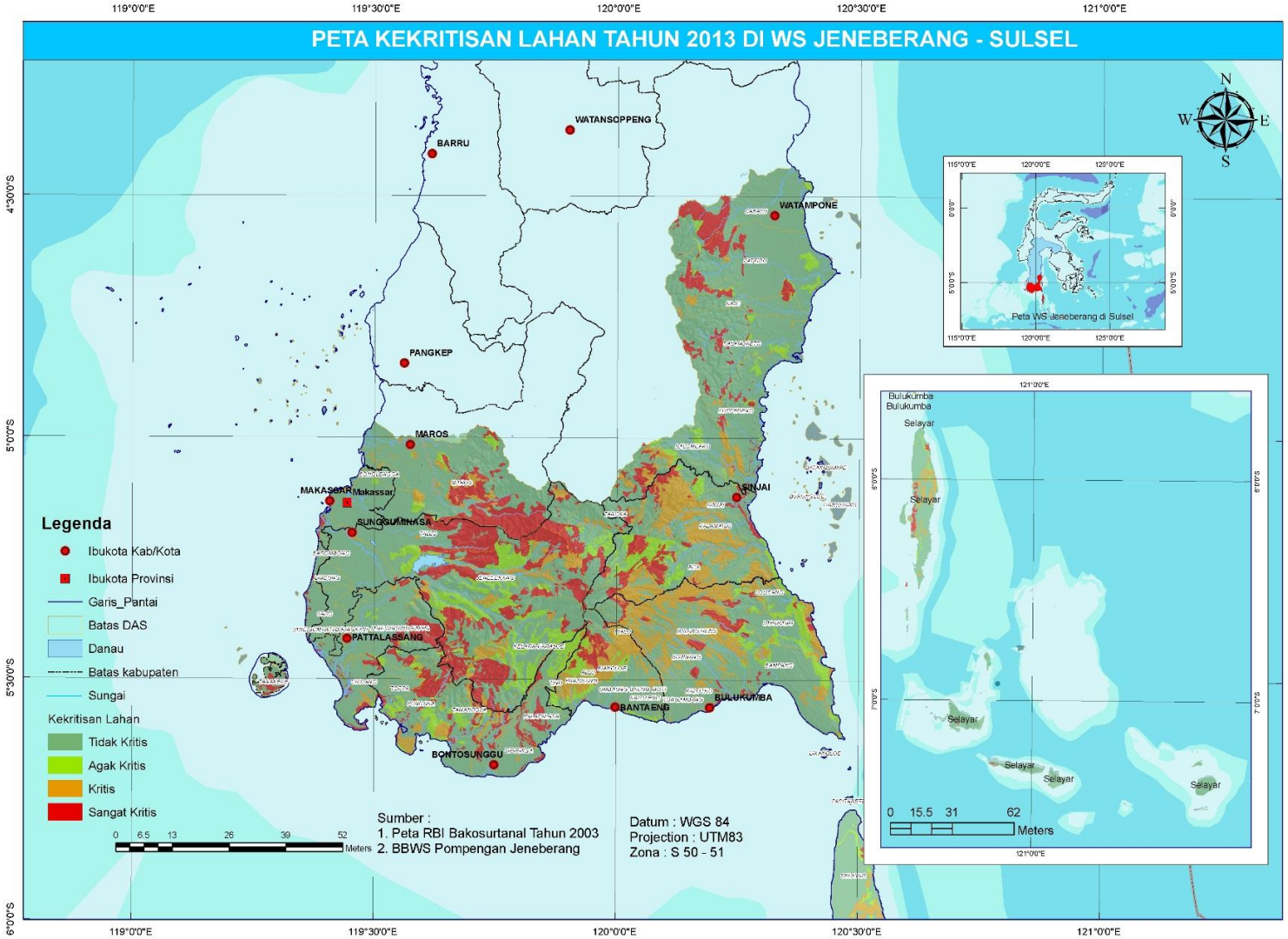

Sumber: BPDAS Jeneberang-Walanae, Tahun 2013

Gambar 2.12.Peta Kekritisan Lahan Tahun 2013 WS Jeneberang

6. Data Erosi Lahan dan Sedimentasi Sungai

a. Erosi Lahan dan Sedimentasi Sungai

Kondisi daerah tangkapan hujan di bagian hulu WS Jeneberang semakin menurun akibat pengolahan lahan yang tidak mengindahkan aspek konservasi tanah dan penggundulan hutan. Hal ini menyebabkan peningkatan erosi lahan yang kemudian mengakibat-kan peningkatan sedimentasi di daerah hilir, berkurangnya kapasitas pengaliran sungai akibat pendangkalan, penurunan *base-flow* pada musim kemarau panjang, kekeringan pada musim kemarau dan terjadinya banjir di musim penghujan.

Selain itu, terjadinya longsor lereng Gunung Bawakaraeng semakin memperparah kondisi erosi dan sedimentasi di Sungai Jeneberang, khususnya di Bendungan Bili-bili.

b. Longsor Gunung Bawakaraeng

Dinding kaldera raksasa bagian bukit timur runtuh pada 25 Maret 2004, bukit tersebut mempunyai ketinggian 2.830 m di atas muka air laut dan merupakan sumber mata air awal Sungai Jeneberang. Kawasan yang runtuh diidentifikasi suatu zona yang meliputi Bukit Sorongan (El.2.514 m). Volume material yang runtuh diestimasi 230 juta m^3. Material debris hasil dari runtuhan menutup lembah Jeneberang dan menyebabkan kerusakan di kawasan hilir.

Setelah runtuh, terbentuk beberapa kolam dan alur-alur yang berkembang di endapan debris, dan aliran debris terjadi secara berulang. Sabo Dam 4 (empat), yang dibangun pada Tahun 2000 yang lokasinya di 5 (lima) km di hilir kaldera terkubur seluruhnya oleh endapan debris. Dan sawah yang cukup luas sepanjang sungai rusak disebabkan oleh aliran debris. Debit sungai mengandung kepekatan sedimen yang tinggi yang mengalir ke Waduk Bili-Bili yang terletak 35 (tiga puluh lima) km di hilir dinding kaldera. Akibat sedimentasi di waduk, maka umur waduk akan berkurang dan kualitas air perkotaan akan menurun.

Sebagai langkah awal pengendalian sedimen telah dilakukan pembangunan Kantung Pasir 5 (lima) unit dan Sabo Dam 3 (tiga) unit sebagai berikut:

1) Kantung Pasir No.1: L = 620 m, H = 7,5 m, kapasitas sedimen = 164.000 m^3
2) Kantung Pasir No.3: L = 336 m, H = 7 m, kapasitas sedimen = 129.000 m^3
3) Kantung Pasir No.2: L = 465 m, H = 7 m, kapasitas sedimen = 202.000 m^3

4) Kantung Pasir No.4: L = 644 m, H = 7 m, kapasitas sedimen = 444.000 m^3

5) Kantung Pasir No.5: L = 441 m, H = 7 m, kapasitas sedimen = 142.000 m^3

6) Sabo Dam No.4: L = 150 m, H = 8 m, kapasttas sedimen = 129.000 rn^3

7) Sabo Dam No.4: L = 230 m, H = 10 m, kapasltas sedimen = 74.400 m^3

8) Sabo Dam No.6: L = 104 m, H = 10 m, kapasitas sedimen = 122.400 m^3

Perkiraan total volume yang tidak stabil seluruh kemiringan dinding kaldera sekitar 145.068.000 m^3, sedangkan pada dinding kaldera timur sekitar 111.073.000 m^3.

1) Tingkat I menunjukkan bagian yang mempunyai kemungkinan besar terjadi keruntuhan dalam waktu yang akan datang dan volume runtuhan ditaksir 20.102.500 m^3. Runtuhan ini utamanya terpusat di Kaldera Timur, dan sebagian di sisi timur Kaldera Utara.

2) Tingkat II menunjukkan bagian yang mempunyai kemungkinan runtuh hanya beberapa tahun yang akan datang, dalam hal ini terkait dengan sekelilingnya dan volumenya diperkirakan sebesar 24.646.000 m3.

3) Tingkat III menunjukkan bagian yang mempunyai struktur dan faktor kejadian runtuh yang akan datang atau juga tidak lama yang datang, dan volumenya diperkirakan sebesar 27.819.500 m^3.

4) Bagian yang berkembang yang menunjukkan kemungkinan terjadi keruntuhan maksimum dan berlanjut pada kondisi sekararg dan volumenya diperkirakan 72.500.000 m^3.

Volume endapan sedimen di sungai utama Jeneberang diperkirakan 244,9 juta m^3 (JEC, 2009) dan 33,89% dari endapan sedimen masih tertinggal di kawasan kaldera. Endapan sedimen yang tidak stabil di kaldera diperkirakan 82,7 m^3 pada tahun 2009.

Sekitar 66,2% total volume sedimen telah mengalir ke hilir, volumenya diperkirakan sebesar 162,2 juta m^3.

Untuk menangani sejumlah kejadian aliran debris antara bagian hulu dan tengah dilaksanakan pembangunan 7 (tujuh) sabo dam seri di bagian hulu dan konsoildasi dam seri di bagian tengah, dan meningkatkan kapasitas penambangan pasir, memperbesar kapasitas pengendalian fasilitas "*sand pocket*" yang ada.

7. Intrusi Air Laut

Untuk mengatasi pengaruh intrusi air laut di Sungai Jeneberang, telah dibangun sebuah bendung karet di bagian hilir Sungai Jeneberang, yaitu pada jarak ± 4 (empat) km di hulu muara Sungai Jeneberang. Pelaksanaan konstruksi bendung karet dimulai pada tahun 1995 dan selesai tahun 1997. Bendung karet ini memiliki ketinggian 2,10 m dengan panjang 210 m. Bendung karet di bagian hilir Sungai Jeneberang dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13. Bendung Karet di Hilir Sungai Jeneberang

Selain itu, juga dilaksanakan konstruksi waduk pantai (*long storage*), *intake* pintu pembuangan, *outlet* pintu pembuangan dan pintu pasang surut yang selesai dibangun pada bulan November 2001. Selain berfungsi sebagai pengendali intrusi air laut ke Sungai Jeneberang, juga berfungsi sebagai penyediaan air baku dan air untuk penggelontoran saluran drainase pada musim kernarau. Waduk pantai tersebut mempunyai panjang 4 (empat) km, lebar 200-300 m dengan volume tampungan sebesar 1.100.000 m^3. Waduk pantai (*long storage*), intake pintu pembuangan, dan pintu pasang surut dapat dilihat pada Gambar 2.14.

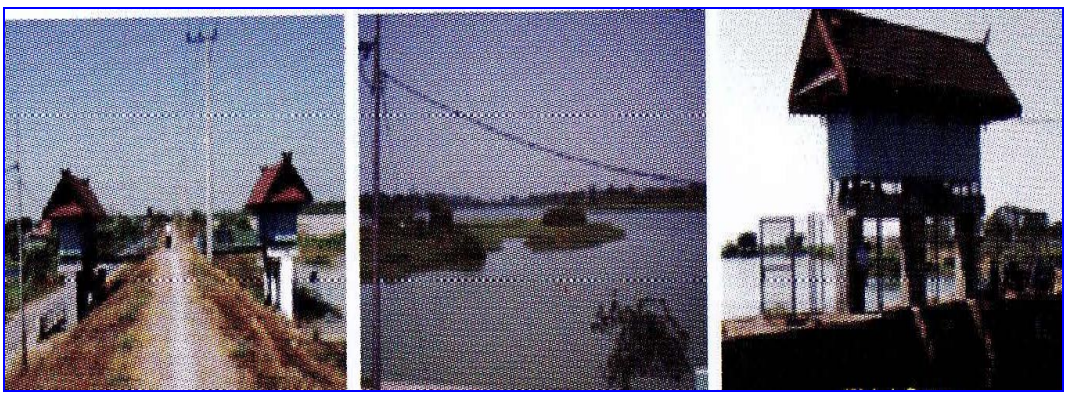

Gambar 2.14. Long Storage, Intake dan Pintu Pasang

8. Tambak Garam

Pengelolaan tambak garam di Provinsi Sulawesi Selatan yang terbesar berada di Kabupaten Jeneponto dengan Luas potensial sebesar 2.000 Ha. Garam dari Kabupaten Jeneponto menyuplai hampir seluruh kebutuhan garam di Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Data Banjir dan Pantai Kritis

Beberapa daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan, khususnya WS Jeneberang adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Data kejadian banjir di WS Jeneberang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.19 dan data pantai-pantai kritis di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.19. Kejadian Banjir Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 di WS Jeneberang

No	Sungai	Lokasi			Waktu Terjadi-nya (Hari/Jam)	Dampak Bencana/Kerugian			Genangan		Tindakan Darurat Penanggu-langan	Skala banjir: 1) Nasional 2) Lokal	Keterangan
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota		Pen-duduk (KK)	Lahan (Ha) 1) Perumahan 2) Irigasi 3) Perkebunan 4) Perikanan	Infrastruktur 1) Jalan (Km) 2) Jembatan (Bh) 3) Tanggul (m) 4) Saluran (m)	Luas (Ha)	Tinggi (cm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sungai Pappa	Pappa	Polombangkeng Selatan	Takalar	08 Januari 2005	30	1) 50 Ha 2) 200 Ha 3) 200 Ha	1) 1,5 km	500 Ha	s/d 150	Pengamanan dengan bahan banjiran	Lokal	LG : 6 jam
2	Sungai Maros	a) Kelurahan Baju Bodoa b) Kelurahan Turikale c) Kelurahan Mattiro Deceng	Maros Baru Pettu Ada Lau	Maros	26 Januari 2006	50	1) ± 10 Ha 2) ± 350 Ha	1) 2 km tergenang	± 400 Ha	s/d 100	Pengamanan dengan bahan banjiran	Lokal	LG : 1 hari
3	Sungai Tallo	a) Ba'doka b) Kapasa c) Batara bira d) Pacceranakkang e) Antang f) Borong g) Tamangapa	Biringkanaya Manggala	Makassar	28 Maret 2006	700	1) 3.010 Ha	1) 3 km tergenang	± 3.500 Ha	s/d 100	Pengama-nan dengan bahan banjiran	Lokal	LG : 6 jam
4	Sungai Maros	Bontotallasa, Tanete, Allaere, Purna Karya, Benteng Gaja, Tompobulu, Pucak, Bonto-sunggu, Balu Cekopaning, Lekopancing, Toddopulia	Simbang, Tanralili, Tompobulu, Pucak, Pucak Pangembang	Maros	28 Maret 2006	1500	2) 1400 ha 4) 3.000 Ha	1) 200 m 2) 7 rusak	6.000 Ha	s/d 150	Pengama-nan dengan bahan banjiran	Lokal	1 orang tewas LG : 3 Jam
5	1.Sungai Mangottong 2.Sungai Kalamisu 3.Sungai Tangka 4.Sungai	1.Kelurahan Biring Ere 2.Desa Talle	1.Sinjai Utara 2.Sinjai Tengah 3.Sinjai Timur 4.Sinjai Selatan	Sinjai	20 Juni 2006	150	1) ± 15 Ha 2) ± 3.348 Ha 3) 50 Ha 4) ± 678 Ha	2) Hilang 29 bh 3) 3000 m	5.000 Ha	s/d 400	Pembersihan titik banjir dari sampah & tumpu-kan kayu	Nasional	250 Tewas

	Bikeru												
6	1.Sungai Bialo 2.Sungai Balantieng 3.Sungai Teko	1.Bialo 2.Bontomanai 3.Baji 4.Kelurahan Kasim-pureng 5.Kelurahan Ben-tenge 6.Kindang 7.Lolisang	1.Gantareng 2.Rilau Ale 3.Kindang 4.Ujung Bulu 5.Ujung LoE 6.Herlang 7.Bontobahari 8.Kajang	Bulu-kumba	20 Juni 2006	± 750	1) ± 20 Ha 2) ± 4000 Ha 3) ± 1000 Ha 4) Tambak ± 3000 Ha	1) Rusak ± 2 Km 2) Rusak= 11buah 3) Rusak 1.300 m	± 8.000 Ha	s/d 150	Evakuasi/Pen-duduk	Nasional	LG = 2 hari Tewas = 5 orang
7	Sungai Calendu	1.Kelurahan Cale-ndu 2.Kelurhan Pal-lantikang 3.Kelurahan Letta	1.Bantaeng 2.Bissapu	Bantaeng	20 Juni 2006	± 1.620	1) ± 30 Ha 2) Rusak ± 1 800 Ha 3) Kebun ± 350 Ha	1) Rusak ± 0,5 Km 2) Rusak= 3 buah 3) Rusak ± 5 Km	± 2.100 Ha	s/d 100	Evakuasi Pen-duduk	Nasional	LG = 1 hari 1.041 org mengungsi 2 orang meninggal
8	Sungai Kelara Sungai Tamanroya Sungai Tarowang	1.Bonto Lebang 2.Tabbing Jai 3.Tarowang	1.Kelara 2.Tamalatea 3.Bonto Ramba 4.Batang 5.Persiapan Tarowang	Jeneponto	20 Juni 2006	± 250	1) Tergenang ±10 Ha 2) Rusak ± 800 Ha 3) Rusak ± 563 Ha 4) Tambak ± 700 Ha	1) Rusak ± 1 Km 2) Rusak - buah 3) Rusak ± 0,4 Km 4) Rusak ± 200 m	± 2.000 Ha	s/d 150	Evakuasi Pen-duduk	Lokal	LG = 1 hari Tewas = 1 Orang
9	Sungai Jenebe-rang	Parangloe	Tinggi Moncong	Gowa	30 Des 2006	-	-	1) 0,5 Km 2) 1 buah	50 Ha		Jembatan darurat	Lokal	LG : 3 jam
10	Sungai Pappa	Pappa	Polombang-keng Selatan	Takalar	08 Januari 2007	50	1) 50 Ha 2) 200 Ha 3) 200 Ha	1) 1,5 Km	600 Ha	s/d 150	Pengamanan dengan bahan banjiran	Lokal	4 jam
11	Sungai Taman-roya dan Sungai Poko-bulo	Maero	Bonto Ramba	Jeneponto	01 Mei 2008	700	1) 16 Ha 2) - 3) - 4) -	1) 2 km 2) - 3) 1900 m 4) 110 m	600 Ha	s/d 50	Pembersihan sungai dari sampah yang hanyut	Lokal	3 jam
12	Sungai Tonra	Manira	1. Tonra 2. Salo-mekko	Bone	25 Mei 2008	-	2. Sawah ± 50 Ha		100 Ha	100	Evaluasi	Lokal	6 jam
13	Sungai Calendu	1.Garegea 2.Tappanjeng 3.Pallantikang 4.Bonto-Ati 5.Bonto Kebang 6.Pulau Kayangan 7.Bonto Rita	1. Bantaeng 2. Bissapu	Bantaeng	31 Mei 2008 Sampai dengan 2 Juni 2008	268	1) ± 6 Ha 2) - 3) -	1) 3 km tergenang	200 Ha	100	Pengama-nan dengan karung diisi pasir	Lokal	5 jam
14	Sungai Bonto-manai	Parukku	Rilau Ale	Bulu-kumba	06 Desembe r2008	165	1) 30 Ha	1) 2 km tergenang	100 Ha	200	Penangnan dengan bahan banjiran	Lokal	4 jam

Sumber: BBWS Pompengan-Jeneberang, Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011

Tabel 2.20. Pantai Kritis di WS Jeneberang

No.	Nama Pantai	Panjang (Km)	Kabupaten
1	Pantai Takalar Kabupaten Takalar	2,300	Kabupaten Takalar
2	Pantai Bantaeng Kabupaten Bantaeng	1,126	Kabupaten Bantaeng
3	Pantai Selayar, Kabupaten Selayar	0,300	Kabupaten Selayar
4	Pantai Batangmata, Kabupaten Selayar	1,131	Kabupaten Selayar
5	Pantai Tile-Tile, Kabupaten Selayar	0,625	Kabupaten Selayar
6	Pantai Bonehalang, Kabupaten Selayar	0,485	Kabupaten Selayar
7	Pantai Cikoang, Kabupaten Takalar	0,622	Kabupaten Takalar
8	Pantai Bangkala, Kabupaten Jeneponto	0,380	Kabupaten Jeneponto
9	Pantai Losari Kota Makassar	0,679	Kota Makassar
10	Pantai Lasepang, Kabupaten Jeneponto	-	Kabupaten. Jeneponto
11	Pantai Galesong Utara, Kabupaten Takalar	-	Kabupaten. Takalar
12	Pantai Galesong Selatan, Kabupaten Takalar	-	Kabupaten Takalar
13	Pantai Garassikang, Kabupaten Jeneponto	-	Kabupaten Jeneponto

Sumber: BBWS Pompengan-Jeneberang, Tahun 2013

10. Data Kualitas Air

Hasil pemantauan atau pengukuran yang telah dilakukan, dan hasil analisa laboratorium Kualitas Air, ditampilkan/ sajikan pada beberapa DAS di WS Jeneberang dan dapat dilihat pada Tabel 2.21 sampai dengan Tabel 2.32.

Tabel 2.21. Hasil Uji Kualitas Air DAS Jeneberang Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	40,9	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	6,30	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	14,35	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	-	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,071	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,005	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,011	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	-	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	<2,50	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	0,191	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,56	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,10	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,013	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.22. Hasil Uji Kualitas Air DAS Jeneberang Hilir

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	220,20	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,20	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	16,44	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	<0,004	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,014	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,005	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,004	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	-	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	<2,50	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	0,985	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,30	0,3	-	-	-

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,053	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,012	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.23. Hasil Uji Kualitas DAS Kelara-Karloe Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	19,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,80	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	24,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	1,2	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,004	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,09	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	23,50	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	400	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	360	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,56	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,10	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,013	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.24. Hasil Uji Kualitas Air DAS Kelara Karloe Hilir

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	20,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,30	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	48,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,00016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,20	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,001	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,14	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	115,40	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	600	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	160	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
1	Besi (Fe)	mg/l	0,30	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,053	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,012	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Prov. Sul-Sel 2014

Tabel 2.25. Hasil Uji Kualitas DAS Tamanroya Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	21,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	8,30	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	24,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	1,80	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,011	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,07	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	19,00	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	600	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	320	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,50	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,053	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,018	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.26. Hasil Uji Kualitas DAS Tamanroya Hilir

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	31,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,80	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	32,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,80	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,012	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,12	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	87,00	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
1	Minyak dan Lemak	µg/l	800	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	160	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,31	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,08	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,008	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Prov. Sul-Sel 2014

Tabel 2.27. Hasil Uji Kualitas DAS Puncara Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	7,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	8,10	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	16,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	3,80	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,002	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,13	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	138,00	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	400	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	220	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,51	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,12	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,021	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.28. Hasil Uji Kualitas DAS Puncara Hilir

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	27,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,50	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	64,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,02	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,006	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,18	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	18,40	400	(-)	(-)	(-)

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	600	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	130	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,49	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,08	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,015	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.29. Hasil Uji DAS Cikoang Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	55,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,30	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	56,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,40	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,003	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,22	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	134,00	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	600	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	230	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,15	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,053	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,008	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.30. Hasil Uji Kualitas Air DAS Cikoang Hilir

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	29,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	8,00	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	72,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,12	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,40	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,001	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,21	0,5	-	-	-

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	57,80	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	600	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	140	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,16	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,053	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,008	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.31. Hasil Uji Kualitas Air DAS Dinging/Pappa Hulu

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	16,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,80	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	16,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	1,00	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,026	0,06	0,06	0,06	(-)
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,17	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	140,60	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	800	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	210	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,35	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,10	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,009	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Tabel 2.32. Hasil Uji Kualitas Air DAS Dinging/Pappa Hilir

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
I	**FISIKA**						
1	TSS	mg/l	56,00	50	50	400	400
II	**KIMIA ANORGANIK**						
1	pH	mg/l	7,50	6-9	6-9	6-9	5-9
2	COD	mg/l	24,00	10	25	50	100
3	Phospat (PO_4)	mg/l	0,0016	0,2	0,2	1	5
4	Nitrat (NO_3)	mg/l	0,50	10	10	20	20
5	Nitrit (NO_2)	mg/l	0,016	0,06	0,06	0,06	(-)

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Kelas			
				I	II	III	IV
6	Amonia (NH_3)	mg/l	0,18	0,5	-	-	-
7	Sulfat (SO_4)	mg/l	134,80	400	(-)	(-)	(-)
III	**KIMIA ORGANIK**						
1	Minyak dan Lemak	µg/l	600	1000	1000	1000	(-)
2	Detergen sebagai MBAS	µg/l	180	200	200	200	(-)
IV	**LOGAM**						
1	Besi (Fe)	mg/l	0,25	0,3	-	-	-
2	Mangan (Mn)	mg/l	0,053	0,1	-	-	-
3	Tembaga (Cu)	mg/l	0,011	0,02	0,02	-	-

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014

Pada hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa WS Jeneberang memenuhi nilai baku mutu air yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. Berikut ini hasil evaluasi terhadi uji kualitas air:

a. Evaluasi Terhadap Hasil Pengukuran *Residu Tersuspensi*

Residu tersuspensi *tootal suspended solid* yang selanjutnya disebut TSS adalah jumlah total bahan padat yang tersuspensi dalam air. Dari hasil analisis terhadap residu tersuspensi menunjukkan nilai antara 5,00 mg/l - 102,00 mg/l. Nilai TSS sampel air sungai tersebut masih memenuh[persyaratan nilai baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.

b. Evaluasi Parameter Kimia

Parameter Kimia yang dievaluasi adalah parameter sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, adalah seperti dalam penjelasan berikut.

c. Evaluasi Terhadap Hasil Pengukuran *Acidity*

Pengukuran *acidity* yang disimbulkan dengan pH, dimaksudkan adalah besarnya kadar asam dan kadar basa dalam suatu larutan melalui pengukuran konsentrasi ion hydrogen H+. Ion hidrogen merupakan faktor utama penentu besaran pH. Hasil analisis pH sampel air menunjukkan nilai antara 7,3 – 8,3. Nilai pH tersebut masih memenuhi persyaratan Nilai baku mutu air yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.

d. Evaluasi Terhadap Hasil Pengukuran *Chemical Oxygen Demand* (COD)

Pengukuran dan analisa *chemical oxygen demand* yang selanjutnya disebut COD adalah suatu analisis untuk mengetahui jumlah oksigen terlarut yang dibutlihkan untuk menguraikan (mengoksidasi) hampir semua zat organik dan anorganik yang terlarut dalam air. Hasil analisis COD pada sampel air menunjukkan nilai antara 16,00 mg/l – 80,00 mg/l. Dengan demikian nilai COD sampel air sungai tersebut masih memenuhi persyaratan nilai baku mutu air yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.

e. Evaluasi Terhadap Hasil Pengukuran Senyawa dan Logam Berat lainnya

Pengukuran dan analisa senyawa dan logam berat lainnya, pada beberapa sampel air sungai di WS Jeneberang, hasilnya menunjukkan nilai yang bervariasi, dan memenuhi persyaratan nilai baku mutu air yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup.

11. Potensi Ketersediaan Air

Jumlah ketersediaan air di Jeneberang adalah 526,23 m^3/dt, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Debit Andalan 80% di Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013

No.	Nama DAS	Potensi												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-rata
		(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)
1	Cabalu	77,24	39,19	38,67	26,47	23,13	16,08	10,86	2,12	3,75	5,86	18,19	48,23	25,82
2	Pattiro	115,18	58,45	57,66	39,47	34,50	23,98	16,20	3,16	5,59	8,73	27,13	71,93	38,50
3	Kaju	30,63	15,54	15,34	10,50	9,17	6,38	4,31	0,84	1,49	2,32	7,21	19,13	10,24
4	Salangketo	84,88	43,08	42,49	29,09	25,42	17,67	11,94	2,33	4,12	6,44	19,99	53,01	28,37
5	Luppereng	53,09	26,94	26,58	18,19	15,90	11,05	7,47	1,46	2,57	4,03	12,50	33,15	17,74
6	Salomekko	48,94	24,83	24,50	16,77	14,66	10,19	6,88	1,34	2,37	3,71	11,53	30,56	16,36
7	Tangka	112,61	57,15	56,37	38,59	33,73	23,45	15,83	3,09	5,46	8,54	26,52	70,32	37,64
8	Sinjai	30,84	15,65	15,44	10,57	9,24	6,42	4,34	0,85	1,50	2,34	7,26	19,26	10,31
9	Kalamisu	37,16	18,86	18,60	12,73	11,13	7,74	5,23	1,02	1,80	2,82	8,75	23,21	12,42
10	Bua	66,27	33,63	33,18	22,71	19,85	13,80	9,32	1,82	3,21	5,02	15,61	41,39	22,15
11	Lolisang	42,65	21,65	21,35	14,62	12,78	8,88	6,00	1,17	2,07	3,23	10,05	26,64	14,26
12	Laparang	50,02	25,38	25,04	17,14	14,98	10,42	7,03	1,37	2,43	3,79	11,78	31,24	16,72
13	Bampang	75,20	38,16	37,64	25,77	22,52	15,66	10,57	2,06	3,65	5,70	17,71	46,96	25,13
14	Balangtieng	47,10	23,90	23,58	16,14	14,11	9,81	6,62	1,29	2,28	3,57	11,09	29,41	15,74
15	Bijawang	38,79	19,69	19,42	13,29	11,62	8,08	5,45	1,06	1,88	2,94	9,14	24,23	12,97
16	Kalotro	8,46	4,29	4,23	2,90	2,53	1,76	1,19	0,23	0,41	0,64	1,99	5,28	2,83
17	Bialo	23,44	11,90	11,74	8,03	7,02	4,88	3,30	0,64	1,14	1,78	5,52	14,64	7,84
18	Togambang	12,45	6,32	6,24	4,27	3,73	2,59	1,75	0,34	0,60	0,94	2,93	7,78	4,16
19	Moti	23,86	12,11	11,94	8,17	7,14	4,97	3,35	0,65	1,16	1,81	5,62	14,90	7,97
20	Kaloleng	11,45	5,81	5,73	3,92	3,43	2,38	1,61	0,31	0,56	0,87	2,70	7,15	3,83
21	Umbaung-Baung	14,32	7,27	7,17	4,91	4,29	2,98	2,01	0,39	0,69	1,09	3,37	8,94	4,79
22	Biangloe	16,07	8,16	8,05	5,51	4,81	3,35	2,26	0,44	0,78	1,22	3,79	10,04	5,37
23	Allu	10,50	5,33	5,26	3,60	3,14	2,19	1,48	0,29	0,51	0,80	2,47	6,56	3,51

No.	Nama DAS	Potensi												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-rata
		(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)
24	Panaikang	10,71	5,43	5,36	3,67	3,21	2,23	1,51	0,29	0,52	0,81	2,52	6,69	3,58
25	Tino	10,11	5,13	5,06	3,46	3,03	2,10	1,42	0,28	0,49	0,77	2,38	6,31	3,38
26	Palapalasa	18,99	9,64	9,51	6,51	5,69	3,95	2,67	0,52	0,92	1,44	4,47	11,86	6,35
27	Sipiringa	22,84	11,59	11,43	7,83	6,84	4,76	3,21	0,63	1,11	1,73	5,38	14,26	7,63
28	Kelara-Karaloe	91,73	46,55	45,92	31,43	27,47	19,10	12,90	2,51	4,45	6,95	21,60	57,28	30,66
29	Jene Tamanroja	66,47	33,73	33,28	22,78	19,91	13,84	9,35	1,82	3,22	5,04	15,66	41,51	22,22
30	Puncara	41,90	21,26	20,98	14,36	12,55	8,72	5,89	1,15	2,03	3,18	9,87	26,17	14,00
31	Toppa	13,48	6,84	6,75	4,62	4,04	2,81	1,90	0,37	0,65	1,02	3,17	8,42	4,50
32	Cikoang	37,55	19,06	18,80	12,87	11,25	7,82	5,28	1,03	1,82	2,85	8,84	23,45	12,55
33	Jene Dinging/Pappa	93,43	47,41	46,77	32,01	27,98	19,45	13,14	2,56	4,53	7,08	22,00	58,34	31,23
34	Jene Gumanti/Biringkasi	16,68	8,47	8,35	5,72	5,00	3,47	2,35	0,46	0,81	1,27	3,93	10,42	5,58
35	Saro	22,68	11,51	11,36	7,77	6,79	4,72	3,19	0,62	1,10	1,72	5,34	14,17	7,58
36	Limbung	9,46	4,80	4,74	3,24	2,83	1,97	1,33	0,26	0,46	0,72	2,23	5,91	3,16
37	Barombong	5,28	2,68	2,64	1,81	1,58	1,10	0,74	0,14	0,26	0,40	1,24	3,30	1,76
38	Jeneberang	185,37	94,07	92,80	63,52	55,52	38,60	26,07	5,08	8,99	14,05	43,66	115,76	61,96
39	Tallo	103,40	52,47	51,76	35,43	30,97	21,53	14,54	2,83	5,01	7,84	24,35	64,57	34,56
40	Bonolengga	9,98	5,07	5,00	3,42	2,99	2,08	1,40	0,27	0,48	0,76	2,35	6,23	3,34
41	Maros	158,78	80,58	79,49	54,41	47,56	33,06	22,33	4,35	7,70	12,04	37,40	99,16	53,07
42	Tanakeke	7,36	3,74	3,69	2,52	2,21	1,53	1,04	0,20	0,36	0,56	1,73	4,60	2,46
43	Batanglampe	2,06	1,05	1,03	0,71	0,62	0,43	0,29	0,06	0,10	0,16	0,49	1,29	0,69
44	Liangliang	4,99	2,53	2,50	1,71	1,49	1,04	0,70	0,14	0,24	0,38	1,17	3,12	1,67
45	Burungloe	0,46	0,23	0,23	0,16	0,14	0,10	0,06	0,01	0,02	0,03	0,11	0,29	0,15
46	Likangloe	2,50	1,27	1,25	0,86	0,75	0,52	0,35	0,07	0,12	0,19	0,59	1,56	0,84
47	Pasitanete	2,12	1,07	1,06	0,73	0,63	0,44	0,30	0,06	0,10	0,16	0,50	1,32	0,71

No.	Nama DAS	Potensi												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-rata
		(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)	(m^3/dt)
48	Selayar	153,67	77,98	76,93	52,66	46,03	32,00	21,61	4,21	7,45	11,65	36,19	95,97	51,36
49	Pasi	6,96	3,53	3,48	2,39	2,08	1,45	0,98	0,19	0,34	0,53	1,64	4,35	2,33
50	Bahuluang	1,95	0,99	0,97	0,67	0,58	0,41	0,27	0,05	0,09	0,15	0,46	1,22	0,65
51	Tambolongan	2,29	1,16	1,15	0,79	0,69	0,48	0,32	0,06	0,11	0,17	0,54	1,43	0,77
52	Kayu Adi	2,78	1,41	1,39	0,95	0,83	0,58	0,39	0,08	0,13	0,21	0,65	1,73	0,93
53	Tanah Jampea	27,78	14,10	13,91	9,52	8,32	5,78	3,91	0,76	1,35	2,11	6,54	17,35	9,29
54	Kalao	23,86	12,11	11,94	8,17	7,14	4,97	3,35	0,65	1,16	1,81	5,62	14,90	7,97
55	Bonerate	4,54	2,30	2,27	1,56	1,36	0,95	0,64	0,12	0,22	0,34	1,07	2,84	1,52
56	Karompa	2,67	1,36	1,34	0,92	0,80	0,56	0,38	0,07	0,13	0,20	0,63	1,67	0,89
57	Kalaotoa	19,12	9,70	9,57	6,55	5,73	3,98	2,69	0,52	0,93	1,45	4,50	11,94	6,39
58	Madu	2,69	1,36	1,34	0,92	0,80	0,56	0,38	0,07	0,13	0,20	0,63	1,68	0,90
	Total	**2.217,79**	**1.125,45**	**1.110,27**	**759,96**	**664,24**	**461,79**	**311,86**	**60,80**	**107,55**	**168,15**	**522,35**	**1.384,96**	**741,26**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2011

2.3.3 Data Kebutuhan Air

Neraca air dimaksudkan sebagai keseimbangan antara ketersediaan air yang merupakan produk dari karakter DAS dan karakter iklim di suatu DAS dengan berbagai macam kebutuhan (air yang dibutuhkan untuk pertanian, tambak dan kolam ikan, peternakan, rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI), air untuk pertambangan, untuk menjaga kualitas air di sungai (pemeliharaan sungai), untuk menjaga lingkungan ekosistem lahan basah dan sebagainya.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat, maka kebutuhan air untuk berbagai sektor juga terus meningkat. Data Kebutuhan air di WS Jeneberang mencakup antara lain:

1. Kebutuhan Air untuk Rumah Tangga dan Perkotaan

Kebutuhan air untuk rumah tangga dan perkotaan yang selanjutnya disebut RKI WS Jeneberang pada saat ini disuplai dari air PDAM, air tanah, mata air dan sumber air-sumber air yang lain. Tingkat pelayanan PDAM di wilayah studi terbilang masih rendah, dan diharapkan tingkat pelayanan PDAM di wilayah studi dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya bangunan-bangunan prasarana pengairan di WS Jeneberang.

Kebutuhan air domestik akan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang ada di WS Jeneberang. Sedangkan proyeksi kebutuhan air dihitung berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan berdasarkan metode yang telah diuraikan di atas, diperoleh besar kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan yang dapat dilihat pada Tabel 2.34, sedangkan kebutuhan air untuk industri dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.34. Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan Tahun 2013 Berdasarkan DAS di WS Jeneberang

No.	Nama DAS	Luas DAS	Σ Penduduk	Kriteria	Rumah Tangga	Perkotaan	Total		
		(km²)	(jiwa)	(l/kapita/hr)	(l/hr)		(l/hr)	(m³/hr)	(m³/dt)
1	Cabalu	327,00	138.166	126	17.408.955	5.222.686	22.631.641	22.632	0,26
2	Pattiro	487,65	117.171	126	14.763.518	4.429.055	19.192.573	19.193	0,22
3	Kaju	129,69	16.896	54	912.409	45.620	958.029	958	0,01
4	Salangketo	359,38	28.225	78	2.201.565	440.313	2.641.878	2.642	0,03
5	Luppereng	224,77	9.760	54	527.059	26.353	553.412	553	0,01
6	Salomekko	207,19	18.725	78	1.460.577	292.115	1.752.693	1.753	0,02
7	Tangka	476,76	72.720	78	5.672.142	1.134.428	6.806.570	6.807	0,08
8	Sinjai	130,58	73.543	78	5.736.333	1.147.267	6.883.600	6.884	0,08
9	Kalamisu	157,33	38.475	78	3.001.035	600.207	3.601.242	3.601	0,04
10	Bua	280,58	79.490	78	6.200.193	1.240.039	7.440.232	7.440	0,09
11	Lolisang	180,59	36.047	78	2.811.690	562.338	3.374.028	3.374	0,04
12	Laparang	211,77	62.922	78	4.907.909	981.582	5.889.491	5.889	0,07
13	Bampang	318,36	91.212	78	7.114.523	1.422.905	8.537.428	8.537	0,10
14	Balangtieng	199,39	66.000	78	5.148.037	1.029.607	6.177.645	6.178	0,07
15	Bijawang	164,24	65.640	78	5.119.951	1.023.990	6.143.941	6.144	0,07
16	Kalotro	35,81	39.832	78	3.106.884	621.377	3.728.260	3.728	0,04
17	Bialo	99,26	47.268	78	3.686.907	737.381	4.424.288	4.424	0,05
18	Togambang	52,73	27.898	78	2.176.051	435.210	2.611.262	2.611	0,03
19	Moti	101,00	34.290	78	2.674.609	534.922	3.209.530	3.210	0,04
20	Kaloleng	48,49	11.264	54	608.275	30.414	638.688	639	0,01
21	Umbaung-Baung	60,52	26.582	78	2.073.398	414.680	2.488.078	2.488	0,03
22	Biangloe	68,04	40.522	78	3.160.692	632.138	3.792.830	3.793	0,04

No.	Nama DAS	Luas DAS	Σ Penduduk	Kriteria	Rumah Tangga	Perkotaan	Total		
		(km²)	(jiwa)	(l/kapita/hr)	(l/hr)		(l/hr)	(m³/hr)	(m³/dt)
23	Allu	44,45	10.840	54	585.377	29.269	614.646	615	0,01
24	Panaikang	45,33	23.913	78	1.865.187	373.037	2.238.225	2.238	0,03
25	Tino	42,79	2.858	54	154.331	7.717	162.047	162	0,00
26	Palapalasa	80,41	29.826	78	2.326.443	465.289	2.791.731	2.792	0,03
27	Sipiringa	96,69	47.172	78	3.679.381	735.876	4.415.257	4.415	0,05
28	Kelara-Karaloe	388,35	118.485	126	14.929.110	4.478.733	19.407.842	19.408	0,22
29	Jene Tamanroja	281,43	101.850	126	12.833.124	3.849.937	16.683.062	16.683	0,19
30	Puncara	177,40	57.499	78	4.484.908	896.982	5.381.889	5.382	0,06
31	Toppa	57,06	26.604	78	2.075.133	415.027	2.490.159	2.490	0,03
32	Cikoang	158,98	92.016	78	7.177.264	1.435.453	8.612.717	8.613	0,10
33	Jene Dinging/Pappa	395,54	148.681	126	18.733.779	5.620.134	24.353.913	24.354	0,28
34	Jene Gumanti/Biringkasi	70,64	45.453	78	3.545.333	709.067	4.254.399	4.254	0,05
35	Saro	96,04	50.436	78	3.933.987	786.797	4.720.784	4.721	0,05
36	Limbung	40,05	51.241	78	3.996.766	799.353	4.796.119	4.796	0,06
37	Barombong	22,34	60.683	78	4.733.306	946.661	5.679.968	5.680	0,07
38	Jeneberang	784,80	454.949	126	57.323.566	17.197.070	74.520.635	74.521	0,86
39	Tallo	437,75	1.138.400	174	198.081.686	118.849.011	316.930.697	316.931	3,67
40	Bonolengga	42,26	75.100	78	5.857.830	1.171.566	7.029.396	7.029	0,08
41	Maros	672,24	209.130	126	26.350.428	7.905.128	34.255.556	34.256	0,40
42	Tanakeke	31,18	43.304	78	3.377.681	675.536	4.053.217	4.053	0,05
43	Batanglampe	8,73	258	54	13.926	696	14.622	15	0,00
44	Liangliang	21,12	2.595	54	140.144	7.007	147.151	147	0,00
45	Burungloe	1,94	234	54	12.611	631	13.241	13	0,00

No.	Nama DAS	Luas DAS	Σ Penduduk	Kriteria	Rumah Tangga	Perkotaan	Total		
		(km²)	(jiwa)	(l/kapita/hr)	(l/hr)		(l/hr)	(m³/hr)	(m³/dt)
46	Likangloe	10,60	819	54	44.219	2.211	46.430	46	0,00
47	Pasitanete	8,96	163	54	8.824	441	9.265	9	0,00
48	Selayar	650,62	76.861	78	5.995.184	1.199.037	7.194.221	7.194	0,08
49	Pasi	29,47	1.809	54	97.664	4.883	102.547	103	0,00
50	Bahuluang	8,24	89	54	4.808	240	5.049	5	0,00
51	Tambolongan	9,71	190	54	10.238	512	10.750	11	0,00
52	Kayu Adi	11,75	334	54	18.062	903	18.965	19	0,00
53	Tanah Jampea	117,62	19.533	78	1.523.577	304.715	1.828.292	1.828	0,02
54	Kalao	101,00	10.949	54	591.238	29.562	620.800	621	0,01
55	Bonerate	19,23	684	54	36.958	1.848	38.806	39	0,00
56	Karompa	11,31	234	54	12.653	633	13.285	13	0,00
57	Kalaotoa	80,94	4.178	54	225.600	11.280	236.880	237	0,00
58	Madu	11,37	235	54	12.686	634	13.320	13	0,00
	Total	**9.389,47**	**4.050.255**		**485.265.722**	**191.917.504**	**677.183.226**	**677.183**	**7,84**

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka 2013 dan Hasil Analisis Tahun 2013

Tabel 2.35. Kebutuhan Air Industri Tahun 2013 DAS di WS Jeneberang

No	Nama DAS	Luas DAS (km^2)	Kebutuhan Industri (m^3/dt)
1	Cabalu	327,00	0,023
2	Pattiro	487,65	0,097
3	Kaju	129,69	0,000
4	Salangketo	359,38	0,000
5	Luppereng	224,77	0,000
6	Salomekko	207,19	0,000
7	Tangka	476,76	0,000
8	Sinjai	130,58	0,023
9	Kalamisu	157,33	0,023
10	Bua	280,58	0,000
11	Lolisang	180,59	0,000
12	Aparang	211,77	0,023
13	Bampang	318,36	0,000
14	Balangtieng	199,39	0,000
15	Bijawang	164,24	0,000
16	Kalotro	35,81	0,000
17	Bialo	99,26	0,000
18	Togambang	52,73	0,000
19	Moti	101,00	0,000
20	Kaloleng	48,49	0,000
21	Umbaung-Baung	60,52	0,000
22	Biangloe	68,04	0,025
23	Allu	44,45	0,000
24	Panaikang	45,33	0,000
25	Tino	42,79	0,000
26	Palapalasa	80,41	0,000
27	Sipiringa	96,69	0,000
28	Kelara-Karaloe	388,35	0,023
29	Tamanroya	281,43	0,000
30	Puncara	177,40	0,000
31	Toppa	57,06	0,000
32	Cikoang	158,98	0,000
33	Pappa	395,54	0,122
34	Biringkasi	70,64	0,000
35	Saro	96,04	0,000
36	Limbung	40,05	0,000
37	Barombong	22,34	0,000
38	Jeneberang	784,80	0,025
39	Tallo	437,75	0,025

No	Nama DAS	Luas DAS (km^2)	Kebutuhan Industri (m^3/dt)
40	Bonolengga	42,26	0,000
41	Maros	672,24	0,042
42	Tanakeke	31,18	0,000
43	Batanglampe	8,73	0,000
44	Liangliang	21,12	0,000
45	Burungloe	1,94	0,000
46	Liukangloe	10,60	0,000
47	Pasitanete	8,96	0,000
48	Selayar	650,62	0,023
49	Pasi	29,47	0,000
50	Bahuluang	8,24	0,000
51	Tambolongan	9,71	0,000
52	Kayu Adi	11,75	0,000
53	Tanah Jampea	117,62	0,019
54	Kalao	101,00	0,000
55	Bonerate	19,23	0,000
56	Karompa	11,31	0,000
57	Kalaotoa	80,94	0,000
58	Madu	11,37	0,000
	Total	**9.389,47**	**0,496**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

2. Kebutuhan Air untuk Irigasi

Kebutuhan air irigasi ditentukan oleh faktor luas tanam, pola tanam yang digunakan, dan iklim yang mempengaruhi DI. Ada 828 (delapan ratus dua puluh delapan) buah DI di WS Jeneberang saat ini seluas 219.453 ha seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2.36. Jumlah kebutuhan air irigasi eksisting Tahun 2013 ditampilkan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.36. Daerah Irigasi Tiap DAS di WS Jeneberang

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)	No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
1	Assobung Parea	Maros	150	28	Panaikang III	Bantaeng	172
2	Babang Bua	Maros	110	29	Paniki	Bantaeng	150
3	Balocci	Maros	115	30	Pao-pao	Bantaeng	100
4	Batu Putih	Maros	235	31	Papaloe	Bantaeng	234
5	Bira-bira	Maros	64	32	Parabuang*	Bantaeng	111
6	Bontopanno	Maros	115	33	Pasang Tala*	Bantaeng	60
7	Bulu Bulu	Maros	100	34	Pattallassang	Bantaeng	130

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
8	Bulu Lohe	Maros	80
9	Bulu Mallapo	Maros	70
10	Bulu Marapa	Maros	482
11	Bunga Eja	Maros	68
12	Camba Jawaya	Maros	965
13	Campaniga	Maros	200
14	Cenrana	Maros	350
15	Jampue	Maros	100
16	Kacici	Maros	145
17	Kaluku	Maros	95
18	Kaluku I	Maros	105
19	Leange	Maros	155
20	Leang-leang	Maros	693
21	Leniti	Maros	90
22	Lolang	Maros	90
23	Mahaka	Maros	55
24	Malaka	Maros	200
25	Mallawa	Maros	200
26	Mario	Maros	64
27	Massapie	Maros	150
55	Mattajang	Maros	123
56	Padaelo	Maros	270
57	Pangisoreng	Maros	210
58	Parang	Maros	64
59	Pattiro	Maros	70
60	Pattontongan	Maros	207
61	Pettanyaman	Maros	100
62	Punagi	Maros	215
63	Rea Toa	Maros	75
64	Rumbia	Maros	220
65	Samanggi	Maros	383
66	Swadiri	Maros	150
67	Taboe	Maros	64
68	Takke Batu	Maros	57
69	Tana Takko	Maros	125
70	Tanete Cenrana	Maros	85
71	Tangapparang	Maros	195
72	Timpuseng	Maros	80
73	Tombolo	Maros	55
74	Tompobalang	Maros	100
75	Ulu Malino	Maros	258
76	Wanua Waru	Maros	183
77	Alorengnge	Maros	45
78	Bontoe	Maros	35
79	Pattunang	Maros	36
80	Asana	Gowa	100

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
35	Patte	Bantaeng	100
36	Pemolengan	Bantaeng	100
37	Pondeceng	Bantaeng	90
38	Rappo Dewa	Bantaeng	150
39	Sabarro	Bantaeng	80
40	Sabasso*	Bantaeng	80
41	Sajoangin	Bantaeng	100
42	Samboanga	Bantaeng	100
43	Sappanaya	Bantaeng	100
44	Sappaya	Bantaeng	150
45	Sassoangin*	Bantaeng	100
46	Senea	Bantaeng	245
47	Sinoa	Bantaeng	200
48	Suranga	Bantaeng	156
49	Tanetea	Bantaeng	112
50	Tarung Asu	Bantaeng	289
51	Taruttu	Bantaeng	102
52	Tino Toa	Bantaeng	102
53	Tomboloka	Bantaeng	200
54	Tomboloka	Bantaeng	145
98	Tompo Bulu*	Bantaeng	122
99	Turatea*	Bantaeng	102
100	Anisia	Bulukumba	130
101	Babana	Bulukumba	448
102	Balakkang I*	Bulukumba	150
103	Balakkang II*	Bulukumba	130
104	Balangbessi	Bulukumba	559
105	Balangriri	Bulukumba	368
106	Balangtikeke	Bulukumba	704
107	Balantieng	Bulukumba	235
108	Bali Konkong	Bulukumba	110
109	Balokang	Bulukumba	271
110	Barabatu	Bulukumba	67
111	Barana	Bulukumba	150
112	Batu Eja I	Bulukumba	350
113	Batu Eja II*	Bulukumba	100
114	Batu Panjang*	Bulukumba	70
115	Bintanaja	Bulukumba	197
116	Bong Parring	Bulukumba	120
117	Bongki-bongki	Bulukumba	467
118	Bonto Matenne*	Bulukumba	400
119	Bonto Pao	Bulukumba	123
120	Bonto Rita	Bulukumba	100
121	Bonto Tongang*	Bulukumba	150
122	Bonto Ulu	Bulukumba	70
123	Bontopao I	Bulukumba	123

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
81	Balang Katammong	Gowa	80
82	Balang Labbua	Gowa	200
83	Balang Mampa	Gowa	200
84	Balang Sokko	Gowa	150
85	Balangcoro	Gowa	303
86	Balangingi	Gowa	300
87	Balangsuka	Gowa	60
88	Baliti	Gowa	75
89	Baliti	Gowa	190
90	Barana Kumpang	Gowa	200
91	Batu Lapisi	Gowa	55
92	Batu Rappe	Gowa	70
93	Bilarenging	Gowa	150
94	Birampang	Gowa	351
95	Bonto Rampanto	Gowa	100
96	Bonto Boddo	Gowa	122
97	Bonto Budong	Gowa	70
141	Bonto Te'ne	Gowa	150
142	Bontoa	Gowa	66
143	Bontojai	Gowa	96
144	Bontoloe	Gowa	210
145	Bontosunggu	Gowa	153
146	Borisallo	Gowa	80
147	Borong Kaluku	Gowa	100
148	Buakang Balengkang	Gowa	108
149	Buakang Moro	Gowa	119
150	Buangkang Labua	Gowa	200
151	Bulo-bulo	Gowa	136
152	Campagaya	Gowa	85
153	Dandole	Gowa	250
154	Datara	Gowa	241
155	Gantarang	Gowa	175
156	Jangan-jangan	Gowa	65
157	Jaweleleng	Gowa	80
158	Jengkopala I	Gowa	60
159	Jonjo	Gowa	55
160	Kaciping	Gowa	150
161	Kalengkang	Gowa	52
162	Kalolo	Gowa	305
163	Kaluwe	Gowa	100
164	Karaloe I	Gowa	152
165	Karaloe II	Gowa	175
166	Karampuang	Gowa	55
167	Kasimburang	Gowa	54

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
124	Campenge	Bulukumba	97
125	Da'ngasa*	Bulukumba	870
126	Danggaherang I*	Bulukumba	65
127	Galung Beru	Bulukumba	80
128	Galunglohe	Bulukumba	961
129	Garumbang	Bulukumba	150
130	Hisan II	Bulukumba	235
131	Hisang I	Bulukumba	174
132	Hulo	Bulukumba	75
133	Illi	Bulukumba	163
134	Jalepang	Bulukumba	137
135	Jammu	Bulukumba	58
136	Jampue	Bulukumba	95
137	Jennae	Bulukumba	70
138	Kadieng	Bulukumba	638
139	Kantising	Bulukumba	200
140	Kaseseng I	Bulukumba	145
183	Kaseseng II	Bulukumba	100
184	Kassi Buleng	Bulukumba	75
185	Katimbang	Bulukumba	145
186	Lamang	Bulukumba	250
187	Latambang	Bulukumba	54
188	Lembanyorang	Bulukumba	175
189	Lonrong	Bulukumba	870
190	Madduleng	Bulukumba	75
191	Ma'rame	Bulukumba	158
192	Maramme*	Bulukumba	100
193	Matunggalang	Bulukumba	175
194	Oddunge	Bulukumba	80
195	Pa Gentung	Bulukumba	226
196	Pacollong	Bulukumba	86
197	Paenre Lompoa	Bulukumba	87
198	Pakombong II	Bulukumba	75
199	Pakombong II	Bulukumba	120
200	Palio I & II	Bulukumba	400
201	Pandang Kiri*	Bulukumba	250
202	Pandang-pandang Kanan	Bulukumba	85
203	Panggilingan	Bulukumba	90
204	Pao Canie	Bulukumba	68
205	Paolohe	Bulukumba	91
206	Parigi	Bulukumba	150
207	Pattoengan	Bulukumba	95
208	Pattontongan	Bulukumba	140
209	Pawuanjarang	Bulukumba	120

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
168	Keroang	Gowa	123
169	Koccikang	Gowa	242
170	Kunjung	Gowa	100
171	Labbakkang Tambah	Gowa	400
172	Labbasa	Gowa	125
173	Lanta	Gowa	215
174	Lebbasa*	Gowa	217
175	Lembang Bata	Gowa	155
176	Lembang Panai	Gowa	190
177	Lembaya	Gowa	371
178	Lemoa	Gowa	60
179	Likubili	Gowa	116
180	Maderibuki	Gowa	133
181	Makabori	Gowa	56
182	Malanjo	Gowa	200
225	Manggunturu	Gowa	55
226	Matere	Gowa	208
227	Matere Kompania	Gowa	275
228	Matteze Berua	Gowa	208
229	Matteze' Panting	Gowa	97
230	Metere Panting	Gowa	97
231	Pa'bundukang	Gowa	300
232	Pacceroang	Gowa	300
233	Pakang	Gowa	75
234	Pakkalengkerang	Gowa	300
235	Palanci	Gowa	150
236	Palangtikang	Gowa	150
237	Palladingan	Gowa	548
238	Pamanjengan	Gowa	383
239	Panaikang	Gowa	55
240	Pangulu	Gowa	125
241	Panjang Kalang	Gowa	149
242	Paralengoreng	Gowa	300
243	Parangloe	Gowa	100
244	Pasosokia	Gowa	400
245	Pattalasang	Gowa	250
246	Pencong	Gowa	195
247	Pokoborong	Gowa	138
248	Pumbola	Gowa	150
249	Salentang	Gowa	300
250	Seko	Gowa	98
251	Senre	Gowa	710
252	Sicini	Gowa	446
253	Sinalla	Gowa	150
254	Sipokeke	Gowa	74

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
210	Punranga I*	Bulukumba	145
211	Punranga II	Bulukumba	330
212	Sangkala	Bulukumba	800
213	Sapo Bonto	Bulukumba	97
214	Sarajoko III*	Bulukumba	80
215	Serre	Bulukumba	60
216	T' Gentung	Bulukumba	195
217	Ta'bangka	Bulukumba	117
218	Tagentung I*	Bulukumba	200
219	Ta'gentung*	Bulukumba	365
220	Tanah Kongkong	Bulukumba	633
221	Tibona	Bulukumba	75
222	Tuli	Bulukumba	150
223	Anyorang	Sinjai	189
224	Aparang III	Sinjai	730
269	Aparang Keke	Sinjai	73
270	Arango I	Sinjai	518
271	Arango II	Sinjai	202
272	Balakia I & II	Sinjai	851
273	Balang	Sinjai	70
274	Balang Jatie	Sinjai	75
275	Balang/ padangnge	Sinjai	60
276	Barang	Sinjai	55
277	Batang	Sinjai	106
278	Bilanri	Sinjai	98
279	Bonto Sinala	Sinjai	75
280	Bonto Sunggu	Sinjai	100
281	Buke I	Sinjai	150
282	Bulo	Sinjai	65
283	Cangka-cangka	Sinjai	69
284	Galung Langi	Sinjai	99
285	Galung Lappa	Sinjai	65
286	Galung Lohe	Sinjai	57
287	Galung Lompoa	Sinjai	126
288	Galung Siri	Sinjai	142
289	Hilalang	Sinjai	98
290	Kacoco	Sinjai	155
291	Kalamisu Kanan*	Sinjai	97
292	Kaloling*	Sinjai	126
293	Kati-kati	Sinjai	52
294	Lajemma	Sinjai	110
295	Lappa Batu	Sinjai	90
296	Lappa Mejelling	Sinjai	88
297	Lappa/uranga*	Sinjai	158
298	Lembang Lohe	Sinjai	60

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
255	Songkolo	Gowa	200
256	Takapala	Gowa	360
257	Tallang Gantarang	Gowa	51
258	Tanete	Gowa	96
259	Tanralili	Gowa	364
260	Tanrorita	Gowa	265
261	Tanrurusa I, II	Gowa	669
262	Teko	Gowa	125
263	Tujuang	Gowa	75
264	Tunrung Lading	Gowa	116
265	Apakang	Gowa	20
266	Base-base	Gowa	16
267	Bori-bori	Gowa	50
268	Jene Kampala	Gowa	50
313	Julumate Nne	Gowa	45
314	Kassi	Gowa	20
315	Leang Panyikia	Gowa	20
316	Liku Bili	Gowa	45
317	Nyulu	Gowa	50
318	Pamoka	Gowa	25
319	Ponroka	Gowa	25
320	Rappo Daeng	Gowa	25
321	Sappa	Gowa	20
322	Tamang Mayang	Gowa	50
323	Taruttu	Gowa	50
324	Balangtanaya	Takalar	370
325	Barungae	Takalar	214
326	Batang Lappo	Takalar	325
327	Bontorea	Takalar	266
328	Jenemaeja	Takalar	220
329	Jenetallasa	Takalar	481
330	Kampung Bugisi	Takalar	190
331	Katonakang	Takalar	161
332	Ngai-ngai	Takalar	45
333	Air Mandingin	Jeneponto	200
334	Allu	Jeneponto	447
335	Balang Baleng-kang I	Jeneponto	159
336	Balang Loe II	Jeneponto	296
337	Balang Loe II	Jeneponto	296
338	Batu Kaloci	Jeneponto	250
339	Belong	Jeneponto	659
340	Beroangin	Jeneponto	300
341	Bira-bira	Jeneponto	200
342	Boli Eja	Jeneponto	114
343	Borong Padang I	Jeneponto	150

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
299	Lembangnge	Sinjai	66
300	Lembanna	Sinjai	346
301	Lempereng	Sinjai	95
302	Lestari I	Sinjai	148
303	Lestari/ kampala	Sinjai	70
304	Lompoa	Sinjai	500
305	Lopi	Sinjai	76
306	Magala	Sinjai	53
307	Manalohe I	Sinjai	309
308	Manalohe II	Sinjai	129
309	Manumbung	Sinjai	75
310	Mappekae	Sinjai	150
311	Maroangin	Sinjai	70
312	Massaile II	Sinjai	100
356	Nyenyeng Toa	Sinjai	79
357	Pakkeli I	Sinjai	150
358	Pakkokko	Sinjai	81
359	Pakue	Sinjai	75
360	Pangisoreng	Sinjai	55
361	Parigi*	Sinjai	175
362	Passahungan	Sinjai	55
363	Passibungan	Sinjai	55
364	Pattongko	Sinjai	70
365	Pattongko	Sinjai	70
366	Saohiring	Sinjai	85
367	Sapawae	Sinjai	130
368	Swadaya*	Sinjai	97
369	Tadi	Sinjai	79
370	Taleang Toang	Sinjai	96
371	Tambarian	Sinjai	64
372	Tambarian I*	Sinjai	64
373	Tangkulu	Sinjai	99
374	Tippulue	Sinjai	173
375	Tonasa	Sinjai	96
376	Aggala Cengnge	Sinjai	15
377	Alleperenge	Sinjai	40
378	Arungan	Sinjai	40
379	Baku Bodoa	Sinjai	30
380	Balang Pangi	Sinjai	15
381	Balang Riri	Sinjai	50
382	Balimengko	Sinjai	45
383	Balimengko II	Sinjai	20
384	Banua	Sinjai	25
385	Barae	Sinjai	35
386	Barahangan	Sinjai	45

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
344	Borong Padang II	Jeneponto	100
345	Buakang Matimba	Jeneponto	115
346	Campagaya	Jeneponto	150
347	Canda	Jeneponto	200
348	Galurang Boro	Jeneponto	175
349	Kalibong Jina	Jeneponto	176
350	Kaluku	Jeneponto	100
351	Karangasa	Jeneponto	110
352	Karisa	Jeneponto	200
353	Kua-kuala	Jeneponto	200
354	Kunjung Mange	Jeneponto	132
355	Liku Barana	Jeneponto	95
399	Liku Jati	Jeneponto	250
400	Liku Panyila	Jeneponto	198
401	Lompo Depa	Jeneponto	150
402	Loro-loro	Jeneponto	233
403	Lumpakang	Jeneponto	60
404	Nana Pala	Jeneponto	200
405	Palengka	Jeneponto	150
406	Pao-pao	Jeneponto	150
407	Papan Eja	Jeneponto	75
408	Parang Baku	Jeneponto	120
409	Pattiro	Jeneponto	100
410	Pokobulo Kanan	Jeneponto	425
411	Pokobulo Kiri	Jeneponto	762
412	Ralla/campagaya	Jeneponto	110
413	Tamanroya	Jeneponto	497
414	Tanrang	Jeneponto	187
415	Tantalisi	Jeneponto	144
416	Tappalalo	Jeneponto	300
417	Taruttu	Jeneponto	200
418	Tarutu	Jeneponto	192
419	Tino I	Jeneponto	330
420	Tombolo	Jeneponto	118
421	Tombolo	Jeneponto	118
422	Tombo-tombolo	Jeneponto	250
423	Topa	Jeneponto	400
424	Topanjeng I	Jeneponto	366
425	Tumurang	Jeneponto	250
426	U L O	Jeneponto	269
427	Allu	Bantaeng	224
428	Balang Sikuyu	Bantaeng	127
429	Bang Loe	Bantaeng	149
430	Bangkala Loe	Bantaeng	150
431	Biangkeke II	Bantaeng	306

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
387	Barasa	Sinjai	35
388	Batu	Sinjai	23
389	Batu Gulung	Sinjai	25
390	Batu Huleng	Sinjai	23
391	Batu Uleng	Sinjai	35
392	Benteng	Sinjai	25
393	Bentengia	Sinjai	25
394	Bihulo I*	Sinjai	40
395	Bihulo II	Sinjai	40
396	Biroro	Sinjai	29
397	Bole	Sinjai	50
398	Bonto Paddu	Sinjai	50
443	Bua	Sinjai	46
444	Buke II	Sinjai	50
445	Bulu Ase	Sinjai	35
446	Bunga Satta	Sinjai	35
447	Bunga Satta I	Sinjai	50
448	Bungan Satta II	Sinjai	50
449	Caboro	Sinjai	20
450	Cempaga	Sinjai	30
451	Cobu	Sinjai	25
452	Damae	Sinjai	35
453	Dekeng	Sinjai	35
454	Demme	Sinjai	35
455	Galung Lambere	Sinjai	25
456	Galung Toa*	Sinjai	35
457	Hengan	Sinjai	25
458	Jene Arahulu	Sinjai	50
459	Jira	Sinjai	35
460	Junggena	Sinjai	30
461	Kaju Mate	Sinjai	28
462	Kalibong/laiya	Sinjai	43
463	Kambono	Sinjai	15
464	Karampuan	Sinjai	21
465	Keke	Sinjai	40
466	Kucang	Sinjai	50
467	Lajangnge	Sinjai	45
468	Lajoa	Sinjai	25
469	Lamberia	Sinjai	25
470	Lampe-lampe	Sinjai	41
471	Lampungan	Sinjai	21
472	Langgulli*	Sinjai	30
473	Lapacceng	Sinjai	22
474	Lembang-lembang	Sinjai	30
475	Liu Sirie	Sinjai	35

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
432	Bangun Erasa	Bantaeng	130
433	Bantaeng*	Bantaeng	104
434	Batu Doli	Bantaeng	305
435	Batu Doli II*	Bantaeng	150
436	Batu Duli	Bantaeng	305
437	Batu Leppa	Bantaeng	134
438	Batu Mayong	Bantaeng	60
439	Bialo	Bantaeng	100
440	Biangkeke I	Bantaeng	75
441	Biangkeke V	Bantaeng	723
442	Biangloe II	Bantaeng	159
487	Biangloe Iv	Bantaeng	401
488	Biangloe V / Vi	Bantaeng	696
489	Biangloe X	Bantaeng	180
490	Bilianjua	Bantaeng	200
491	Bontolena	Bantaeng	104
492	Borong Tanga	Bantaeng	150
493	Buakang Tanjaya	Bantaeng	158
494	Bukiora*	Bantaeng	100
495	Bulu Buloa	Bantaeng	143
496	Bulu Summang	Bantaeng	80
497	Bungun Bara	Bantaeng	150
498	Bungun Batu	Bantaeng	165
499	Bungung Batu	Bantaeng	165
500	Bungung Kucci	Bantaeng	100
491	Bunnea	Bantaeng	100
492	Calendu I	Bantaeng	251
493	Calendu III	Bantaeng	103
494	Damma	Bantaeng	200
495	Dampang	Bantaeng	99
496	Dongki-dongki	Bantaeng	100
497	Junggea	Bantaeng	116
498	Kalamassang I	Bantaeng	727
499	Kaloling	Bantaeng	420
500	Kaloling II*	Bantaeng	200
501	Kaluku	Bantaeng	100
502	Kampung Beru	Bantaeng	70
503	Kariu I	Bantaeng	429
504	Kariu II	Bantaeng	104
505	Kasimburang	Bantaeng	110
506	Kiling-kiling	Bantaeng	150
507	Lassang-lassang	Bantaeng	89
508	Lemoa II	Bantaeng	251
509	Liku Bodong	Bantaeng	108
510	Liku Bundang	Bantaeng	100
511	Liku Metang	Bantaeng	134

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
476	Lombo	Sinjai	35
477	Maddakko	Sinjai	50
478	Malenreng	Sinjai	35
479	Mallembong	Sinjai	35
480	Mallembong	Sinjai	35
481	Mamingko*	Sinjai	40
482	Mangkala	Sinjai	40
483	Maroangin	Sinjai	35
484	Palisu	Sinjai	30
485	Pammuntuleng	Sinjai	35
486	Pao	Sinjai	35
521	Pasalu	Sinjai	25
522	Passuliang	Sinjai	32
523	Pitohoni	Sinjai	15
524	Pokko	Sinjai	30
525	Polehali	Sinjai	50
526	Sampago	Sinjai	30
527	Sapo Loe	Sinjai	15
528	Sengkala Tellu	Sinjai	42
529	Syeping	Sinjai	25
530	Talleang	Sinjai	15
531	Tallue	Sinjai	20
532	Tappilasa	Sinjai	75
533	Tassala	Sinjai	37
534	Tingkasae	Sinjai	50
535	Tombalo	Sinjai	25
536	Tonrong	Sinjai	25
537	Topala	Sinjai	25
538	Toribi	Sinjai	36
539	Galung Beru	Sinjai	50
540	Tomisseng	Sinjai	60
541	Bulu - Bulu	Sinjai	55
542	Massesa	Sinjai	30
543	Lupereng	Sinjai	120
544	Hulu	Sinjai	65
545	Mangkola	Sinjai	40
546	Kampala	Sinjai	71
547	Papangkungan	Sinjai	56
548	Batu Lontong	Sinjai	42
549	Lembang Gogoso	Sinjai	66
550	Batu Liputan	Sinjai	35
551	Batu Santung	Sinjai	55
552	Balla Kengkeng	Sinjai	35
553	Bili Bili	Gowa	2.443
554	Bettu	Bulukumba	1.817
555	Bontonyeleng	Bulukumba	1.096

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
512	Lolo*	Bantaeng	80
513	Magarong*	Bantaeng	80
514	Mawang I	Bantaeng	241
515	Mawang II	Bantaeng	198
516	Moti	Bantaeng	764
517	Muntea	Bantaeng	100
518	Muntea II*	Bantaeng	100
519	Nipa-nipa I	Bantaeng	163
520	Nipa-nipa II	Bantaeng	205
565	Palaguna	Bantaeng	400
566	Palappa	Bantaeng	200
567	Palle*	Bantaeng	90
568	Panaikang I	Bantaeng	234
569	Panaikang II	Bantaeng	216
570	Bonelambere	Selayar	150
571	Binangan Parra	Selayar	360
572	Binanga Nipa	Selayar	100
573	Pakangkang	Selayar	25
574	Dodak	Selayar	280
575	Bontobulaeng	Selayar	400
576	Ere Lompo	Selayar	100
577	Binangan Bakka	Selayar	200
578	Lambego	Selayar	70
579	Tete Bontojaya	Selayar	90
580	Lembang Tedong	Selayar	200
581	Tete Losong	Selayar	30
582	Tetes Posi	Selayar	100
583	Tetes Bolu-Bolu	Selayar	200
584	Tetes Patikore	Selayar	275
585	Cinimabela	Selayar	20
586	Benteng Panga	Selayar	300
587	Lembang Lauro	Selayar	200
588	Tetes Balo'boro	Selayar	150
589	Ere Mata	Selayar	270
590	Lajongko	Selayar	150
591	Corawali	Bone	272
592	Ajja Lireng	Bone	150
593	Alinge I	Bone	119
594	Alinge II	Bone	319
595	Angasangnge	Bone	120
596	Apangnge	Bone	60
597	Atakka	Bone	80
598	B. Batua	Bone	120
599	Bake	Bone	90
600	Balubu	Bone	120
601	Bana	Bone	100

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
556	Jenemarung	Takalar	1.052
557	Aparang I	Sinjai	1.049
558	Kalamisu	Sinjai	2.023
559	Aparang Hulu	Sinjai	1.174
560	Bonto Manai	Bulukumba	3.830
561	Bayang-bayang	Bulukumba	5.030
562	Kelara	Jeneponto	7.199
563	Pamukkulu	Takalar	5.204
564	Bantimurung	Maros	6.513
609	Bissua	Gowa	10.758
610	Lekopancing	Maros	3.626
611	Kampili	Gowa	10.545
612	Maroanging	Bone	110
613	Melle	Bone	310
614	Mico	Bone	60
615	Moncong	Bone	82
616	Paccing	Bone	286
617	Pacekeng	Bone	83
618	Pada Idi	Bone	77
619	Padang Lampe	Bone	146
620	Padang Tengngae	Bone	110
621	Pallengoreng	Bone	552
622	Palongki II	Bone	51
623	Palongki I	Bone	83
624	Pammusureng	Bone	110
625	Pannampung	Bone	109
626	Pangisoreng	Bone	217
627	Panyili	Bone	273
628	Parangeng	Bone	500
629	Parigi	Bone	137
630	Pasempe	Bone	153
631	Pationgi	Bone	150
632	Patimpa	Bone	144
633	Lappa Jupeng	Bone	150
634	Lappa Poro	Bone	100
635	Lappa Talle	Bone	286
636	Laputteng	Bone	297
637	Lasina	Bone	140
638	Lekoballo	Bone	240
639	Lerang	Bone	100
640	Lonrong	Bone	90
641	Lonru	Bone	75
642	Madde Watae	Bone	60
643	Malaka	Bone	200
644	Malaka	Bone	220
645	Malinrung	Bone	464

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
602	Bana I	Bone	94
603	Barugae	Bone	102
604	Botto	Bone	58
605	Bekku	Bone	82
606	Bulo	Bone	150
607	Cakkulo	Bone	60
608	Cako B	Bone	100
653	Calimpong	Bone	200
654	Calirung	Bone	542
655	Campaniga	Bone	210
656	Cenrana	Bone	200
657	Cinnong	Bone	120
658	Cirowali	Bone	272
659	Congko	Bone	150
660	Kannango	Bone	60
661	Karangeng	Bone	200
662	Katapang	Bone	49
663	Kawerang	Bone	205
664	Labone	Bone	330
665	Laccori	Bone	130
666	Lacemme	Bone	175
667	Lajang	Bone	119
668	Laliddong	Bone	258
669	Lapince	Bone	70
670	Lerang	Bone	100
671	Lonrong	Bone	90
672	Lonru	Bone	75
673	Madde Watae	Bone	60
674	Malaka	Bone	200
675	Malaka	Bone	220
676	Malinrung	Bone	464
677	Malinrung II	Bone	200
678	Malinrung III	Bone	145
679	Mannagae	Bone	67
680	Mannera	Bone	150
681	Manuang	Bone	130
682	Maroanging	Bone	110
683	Melle	Bone	310
684	Mico	Bone	60
685	Moncong	Bone	82
686	Pacekeng	Bone	83
687	Pada Idi	Bone	77
688	Padang Lampe	Bone	146
689	Padang Tengngae	Bone	110
690	Pallengoreng	Bone	552
691	Palongki II	Bone	51

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
646	Malinrung II	Bone	200
647	Malinrung III	Bone	145
648	Mannagae	Bone	67
649	Mannera	Bone	150
650	Manuang	Bone	130
651	Coppo Melle	Bone	53
652	Coccoro	Bone	76
697	Galung I	Bone	192
698	Galung II	Bone	50
699	Gattareng	Bone	44
700	Gona	Bone	100
701	Jempo	Bone	200
702	Kaddu Pae	Bone	76
703	Raja	Bone	370
704	Rappa	Bone	120
705	Sabillah	Bone	262
706	Sabillah II	Bone	100
707	Sailong I	Bone	350
708	Sailong II	Bone	150
709	Samagora	Bone	350
710	Sijeling	Bone	161
711	Soga I	Bone	150
712	Sura	Bone	110
713	Talabangi I	Bone	54
714	Tabbe Waliae	Bone	148
715	Taddagae	Bone	113
716	Tajong	Bone	184
717	Tajong I	Bone	184
718	Talabangi III	Bone	50
719	Talabangi II	Bone	80
720	Tanate	Bone	100
721	Tanete Buang	Bone	343
722	Taretta	Bone	337
723	Tarogi	Bone	200
724	Tellongeng	Bone	165
725	Tempe-Tempe	Bone	400
726	Teppo Tae	Bone	62
727	Tobempa	Bone	129
728	To Cinna	Bone	300
729	Tokeddu	Bone	50
730	Tolaga	Bone	187
731	Tolewo	Bone	350
732	Tolewo II	Bone	300
733	Toragi	Bone	200
734	Tuangleo I	Bone	250
735	Uloe I	Bone	500

No.	Nama DI	Kab.	Luas (ha)
692	Palongki I	Bone	83
693	Pammusureng	Bone	110
694	Pannampung	Bone	109
695	Pangisoreng	Bone	217
696	Lerang	Bone	100
741	Lonrong	Bone	90
742	Lonru	Bone	75
743	Madde Watae	Bone	60
744	Malaka	Bone	200
745	Malaka	Bone	220
746	Malinrung	Bone	464
747	Malinrung II	Bone	200
748	Malinrung III	Bone	145
749	Mannagae	Bone	67
750	Mannera	Bone	150
751	Manuang	Bone	130
752	Ulu Bubung	Bone	200
753	Unra	Bone	76
754	Wae Lennae	Bone	135
755	Waetuo	Bone	105
756	Walenrang I	Bone	209
757	Walenreng	Bone	226
758	Walimpong	Bone	519
759	Waru - Waru	Bone	1.000
760	Watang Cani	Bone	188
761	Weddie	Bone	69
762	Wessa	Bone	400
763	Wollangi I	Bone	463
764	Wollangi III	Bone	94
765	Toragi I	Bone	200
766	Walennae	Bone	135
767	Sanrego	Bone	9.460
768	Pattiro**	Bone	4.970
769	Soga	Bone	95
770	Talaga	Bone	137
771	Tanate Karuwang	Bone	100
772	Ako Bango	Bone	90
773	Barereng	Bone	226
774	Batu - Batu	Bone	80
775	Beno Batue	Bone	120
736	Uloe II	Bone	400
737	Wollangi II	Bone	94
738	Ajang Ale	Bone	65
739	Galung III	Bone	50
740	Salomekko*	Bone	1.900
776	Bila	Bone	200
777	Binuang	Bone	130
778	Bt. Masunggu	Bone	250
779	Bukku	Bone	97
780	Camilo	Bone	150
801	Tangkulu	Bone	150
802	Tapampang	Bone	60
803	Teppae	Bone	150
804	Tocuma	Bone	75
805	Tolewo I	Bone	250
806	Tompo Bulu	Bone	105
807	Toddong Bua	Bone	120
808	Kahu	Bone	60
809	Katapang I	Bone	45
810	Lacenno	Bone	70
811	Lacorri	Bone	50
812	Lamoncong	Bone	100
813	Langi	Bone	300
814	Lappa Kanrung	Bone	200
815	Libukange	Bone	50
816	Lompu	Bone	150
817	Lonrong I	Bone	100
818	Massapae	Bone	50
819	Nagae	Bone	150
820	Palongki	Bone	70
821	Panyili II	Bone	50
822	Passappareng	Bone	50
823	Perangeng	Bone	200
824	Rumpia	Bone	270
825	Jerae	Bone	114
826	Jompeng	Bone	200
827	Ere Cinnong	Bone	250
828	Jampu	Bone	80
	Jumlah		**219.453**

Sumber: Keputusan Menteri Nomor 293/KPTS/M/2014, tentang Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 2.37. Kebutuhan Air Irigasi Berdasarkan DAS di WS Jeneberang

No	Nama DAS	Luas DI (ha)	Kebutuhan Bulanan (m3/dt)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-Rata
1	Cabalu	11.167	7,53	8,65	6,02	10,21	7,96	7,61	6,05	2,96	2,12	2,70	3,20	10,02	6,25
2	Pattiro	13.767	9,29	10,66	7,43	12,59	9,81	9,39	7,46	3,65	2,62	3,33	3,95	12,35	7,71
3	Kaju	1.369	0,92	1,06	0,74	1,25	0,98	0,93	0,74	0,36	0,26	0,33	0,39	1,23	0,77
4	Salangketo	5.130	3,46	3,97	2,77	4,69	3,66	3,50	2,78	1,36	0,97	1,24	1,47	4,60	2,87
5	Luppereng	3.239	2,18	2,51	1,75	2,96	2,31	2,21	1,75	0,86	0,62	0,78	0,93	2,91	1,81
6	Salomekko	3.456	2,33	2,68	1,86	3,16	2,46	2,36	1,87	0,92	0,66	0,84	0,99	3,10	1,94
7	Tangka	8.774	5,92	6,79	4,73	8,02	6,25	5,98	4,75	2,33	1,67	2,12	2,52	7,87	4,91
8	Sinjai	997	0,67	0,77	0,54	0,91	0,71	0,68	0,54	0,26	0,19	0,24	0,29	0,89	0,56
9	Kalamisu	3.067	2,07	2,37	1,65	2,81	2,19	2,09	1,66	0,81	0,58	0,74	0,88	2,75	1,72
10	Bua	7.828	5,28	6,06	4,22	7,16	5,58	5,34	4,24	2,08	1,49	1,89	2,25	7,02	4,38
11	Lolisang	5.561	3,75	4,31	3,00	5,09	3,96	3,79	3,01	1,47	1,06	1,35	1,60	4,99	3,11
12	Laparang	2.555	1,72	1,98	1,38	2,34	1,82	1,74	1,38	0,68	0,49	0,62	0,73	2,29	1,43
13	Bampang	1.080	0,73	0,84	0,58	0,99	0,77	0,74	0,59	0,29	0,21	0,26	0,31	0,97	0,60
14	Balangtieng	8.623	5,82	6,68	4,65	7,89	6,14	5,88	4,67	2,29	1,64	2,09	2,47	7,74	4,83
15	Bijawang	11.058	7,46	8,56	5,96	10,11	7,88	7,54	5,99	2,93	2,10	2,68	3,17	9,92	6,19
16	Kalotro	446	0,30	0,35	0,24	0,41	0,32	0,30	0,24	0,12	0,08	0,11	0,13	0,40	0,25
17	Bialo	3.662	2,47	2,84	1,98	3,35	2,61	2,50	1,98	0,97	0,70	0,89	1,05	3,29	2,05
18	Togambang	688	0,46	0,53	0,37	0,63	0,49	0,47	0,37	0,18	0,13	0,17	0,20	0,62	0,39
19	Moti	764	0,52	0,59	0,41	0,70	0,54	0,52	0,41	0,20	0,15	0,18	0,22	0,69	0,43
20	Kaloleng	1.883	1,27	1,46	1,02	1,72	1,34	1,28	1,02	0,50	0,36	0,46	0,54	1,69	1,05
21	Umbaung-Baung	4.348	2,93	3,37	2,35	3,98	3,10	2,96	2,36	1,15	0,83	1,05	1,25	3,90	2,43
22	Biangloe	2.999	2,02	2,32	1,62	2,74	2,14	2,04	1,62	0,80	0,57	0,73	0,86	2,69	1,68
23	Allu	3.048	2,06	2,36	1,64	2,79	2,17	2,08	1,65	0,81	0,58	0,74	0,87	2,73	1,71
24	Panaikang	1.717	1,16	1,33	0,93	1,57	1,22	1,17	0,93	0,46	0,33	0,42	0,49	1,54	0,96

No	Nama DAS	Luas DI (ha)	Kebutuhan Bulanan (m3/dt)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-Rata
25	Tino	2.153	1,45	1,67	1,16	1,97	1,53	1,47	1,17	0,57	0,41	0,52	0,62	1,93	1,21
26	Palapalasa	2.367	1,60	1,83	1,28	2,16	1,69	1,61	1,28	0,63	0,45	0,57	0,68	2,12	1,33
27	Sipiringa	775	0,52	0,60	0,42	0,71	0,55	0,53	0,42	0,21	0,15	0,19	0,22	0,70	0,43
28	Kelara-Karaloe	19.046	12,85	14,75	10,27	17,42	13,57	12,99	10,32	5,05	3,62	4,61	5,46	17,09	10,67
29	Jene Tamanroja	5.782	3,90	4,48	3,12	5,29	4,12	3,94	3,13	1,53	1,10	1,40	1,66	5,19	3,24
30	Puncara	2.452	1,65	1,90	1,32	2,24	1,75	1,67	1,33	0,65	0,47	0,59	0,70	2,20	1,37
31	Toppa	2.841	1,92	2,20	1,53	2,60	2,02	1,94	1,54	0,75	0,54	0,69	0,82	2,55	1,59
32	Cikoang	237	0,16	0,18	0,13	0,22	0,17	0,16	0,13	0,06	0,05	0,06	0,07	0,21	0,13
33	Jene Dinging/Pappa	14.088	9,50	10,91	7,60	12,88	10,04	9,61	7,63	3,74	2,68	3,41	4,04	12,64	7,89
34	Jene Gumanti/ Biringkasi	412	0,28	0,32	0,22	0,38	0,29	0,28	0,22	0,11	0,08	0,10	0,12	0,37	0,23
35	Saro	697	0,47	0,54	0,38	0,64	0,50	0,48	0,38	0,18	0,13	0,17	0,20	0,63	0,39
36	Limbung	190	0,13	0,15	0,10	0,17	0,14	0,13	0,10	0,05	0,04	0,05	0,05	0,17	0,11
37	Barombong	91	0,06	0,07	0,05	0,08	0,06	0,06	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,08	0,05
38	Jeneberang	40.955	27,62	31,71	22,09	37,46	29,18	27,93	22,19	10,86	7,78	9,91	11,75	36,74	22,93
39	Tallo	5.475	3,69	4,24	2,95	5,01	3,90	3,73	2,97	1,45	1,04	1,32	1,57	4,91	3,07
40	Bonolengga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Maros	10.887	7,34	8,43	5,87	9,96	7,76	7,42	5,90	2,89	2,07	2,63	3,12	9,77	6,10
42	Tanakeke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Batanglampe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Liangliang	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Burungloe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Likangloe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pasitanete	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Selayar	1.959	1,32	1,52	1,06	1,79	1,40	1,34	1,06	0,52	0,37	0,47	0,56	1,76	1,10
49	Pasi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Nama DAS	Luas DI (ha)	Kebutuhan Bulanan (m3/dt)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Rata-Rata
50	Bahuluang	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Tambolongan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kayu Adi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Tanah Jampea	1.820	1,23	1,41	0,98	1,66	1,30	1,24	0,99	0,48	0,35	0,44	0,52	1,63	1,02
54	Kalao	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bonerate	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Karompa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kalaotoa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Madu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	219.453	148,01	169,91	118,37	200,71	156,36	149,64	118,89	58,19	41,70	53,09	62,96	196,89	122,89

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

3. Kebutuhan air untuk Perikanan atau Tambak

Kebutuhan air untuk perikanan hanya ditinjau untuk perikanan tambak. Luas tambak Tiap DAS di WS Jeneberang adalah 26.330 ha dan kebutuhan tambak tiap DAS di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38. Kebutuhan Air Tambak Tiap DAS di WS Jeneberang

No.	Nama DAS	Luas DAS	Luas Tambak	Kebutuhan Tambak
		(km^2)	(ha)	(m^3/dt)
1	Cabalu	327,00	2.460	1,619
2	Pattiro	487,65	3.670	2,414
3	Kaju	129,69	976	0,642
4	Salangketo	359,38	2.705	1,779
5	Luppereng	224,77	1.692	1,113
6	Salomekko	207,19	1.559	1,026
7	Tangka	476,76	756	0,498
8	Sinjai	130,58	206	0,135
9	Kalamisu	157,33	248	0,163
10	Bua	280,58	1.106	0,727
11	Lolisang	180,59	712	0,468
12	Aparang	211,77	501	0,329
13	Bampang	318,36	753	0,495
14	Balangtieng	199,39	487	0,320
15	Bijawang	164,24	388	0,255
16	Kalotro	35,81	0	0,000
17	Bialo	99,26	243	0,160
18	Togambang	52,73	125	0,082
19	Moti	101,00	246	0,162
20	Kaloleng	48,49	118	0,078
21	Umbaung-Baung	60,52	4	0,003
22	Biangloe	68,04	5	0,003
23	Allu	44,45	3	0,002
24	Panaikang	45,33	3	0,002
25	Tino	42,79	45	0,030
26	Palapalasa	80,41	85	0,056
27	Sipiringa	96,69	95	0,063
28	Kelara-Karaloe	388,35	414	0,272
29	Tamanroya	281,43	281	0,185
30	Puncara	177,40	177	0,116
31	Toppa	57,06	526	0,346
32	Cikoang	158,98	1.464	0,963
33	Pappa	395,54	394	0,259

No.	Nama DAS	Luas DAS	Luas Tambak	Kebutuhan Tambak
		(km^2)	(ha)	(m^3/dt)
34	Biringkasi	70,64	582	0,383
35	Saro	96,04	791	0,520
36	Limbung	40,05	0	0,000
37	Barombong	22,34	184	0,121
38	Jeneberang	784,80	804	0,529
39	Tallo	437,75	618	0,406
40	Bonolengga	42,26	43	0,028
41	Maros	672,24	688	0,453
42	Tanakeke	31,18	0	0,000
43	Batanglampe	8,73	0	0,000
44	Liangliang	21,12	0	0,000
45	Burungloe	1,94	0	0,000
46	Liukangloe	10,60	0	0,000
47	Pasitanete	8,96	0	0,000
48	Selayar	650,62	147	0,097
49	Pasi	29,47	0	0,000
50	Bahuluang	8,24	0	0,000
51	Tambolongan	9,71	0	0,000
52	Kayu Adi	11,75	0	0,000
53	Tanah Jampea	117,62	27	0,017
54	Kalao	101,00	0	0,000
55	Bonerate	19,23	0	0,000
56	Karompa	11,31	0	0,000
57	Kalaotoa	80,94	0	0,000
58	Madu	11,37	0	0,000
	Total	**9.389,47**	**26.330**	**17,320**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

2.3.4 Neraca Air

Perencanaan pengelolaan sumber daya air memerlukan data dan informasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan air yang disajikan dalam neraca air. Neraca air adalah analisis kondisi ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air adalah jumlah air yang tersedia pada sumber air, sedangkan kebutuhan air adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk berbagai penggunaan.

Ketersediaan air pada dasarnya terdiri atas tiga jenis, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Dalam pengelolaan alokasi air, air hujan berkontribusi untuk mengurangi kebutuhan air irigasi yaitu dalam bentuk hujan efektif. Air hujan yang ditampung dengan baik juga dapat

menjadi sumber air yang cukup berarti untuk keperluan rumah tangga. Sumber air utama dalam pengelolaan alokasi air adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai, saluran, danau, dan tampungan lainnya. Penggunaan air tanah kenyataannya sangat membantu pemenuhan kebutuhan air baku maupun air irigasi pada daerah yang sulit mendapatkan air permukaan, akan tetapi keberlanjutannya perlu dijaga dengan pengambilan yang terkendali di bawah debit aman (*safe yield*). Neraca air eksisting di WS Jeneberang Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.39. Grafik nerca air eksisting di WS Jeneberang Tahun 2013 ditampilkan dalam Gambar 2.15. Selanjutnya dibuat skema sistem sungai di WS Jeneberang kondisi eksisting tanpa ada upaya pemenuhan ketersediaan air sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Tabel 2.39. Neraca Air Eksisting di WS Jeneberang Tahun 2013

Keterangan	Bulan (m^3/dt)												Rata-rata
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agust	Sep	Oct	Nov	Des	(m^3/dt)
Kebutuhan:													
- Irigasi	148,01	169,91	118,37	200,71	156,36	149,64	118,89	58,19	41,70	53,09	62,96	196,89	122,89
- Rumah Tangga dan Perkotaan	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
- Industri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Tambak	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32
Jumlah Kebutuhan Air	173,66	195,56	144,03	226,36	182,01	175,29	144,54	83,84	67,36	78,75	88,61	222,54	148,55
Debit Andalan 80%	2.217,79	1.125,45	1.110,27	759,96	664,24	461,79	311,86	60,80	107,55	168,15	522,35	1.384,96	741,26
Ketersediaan	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

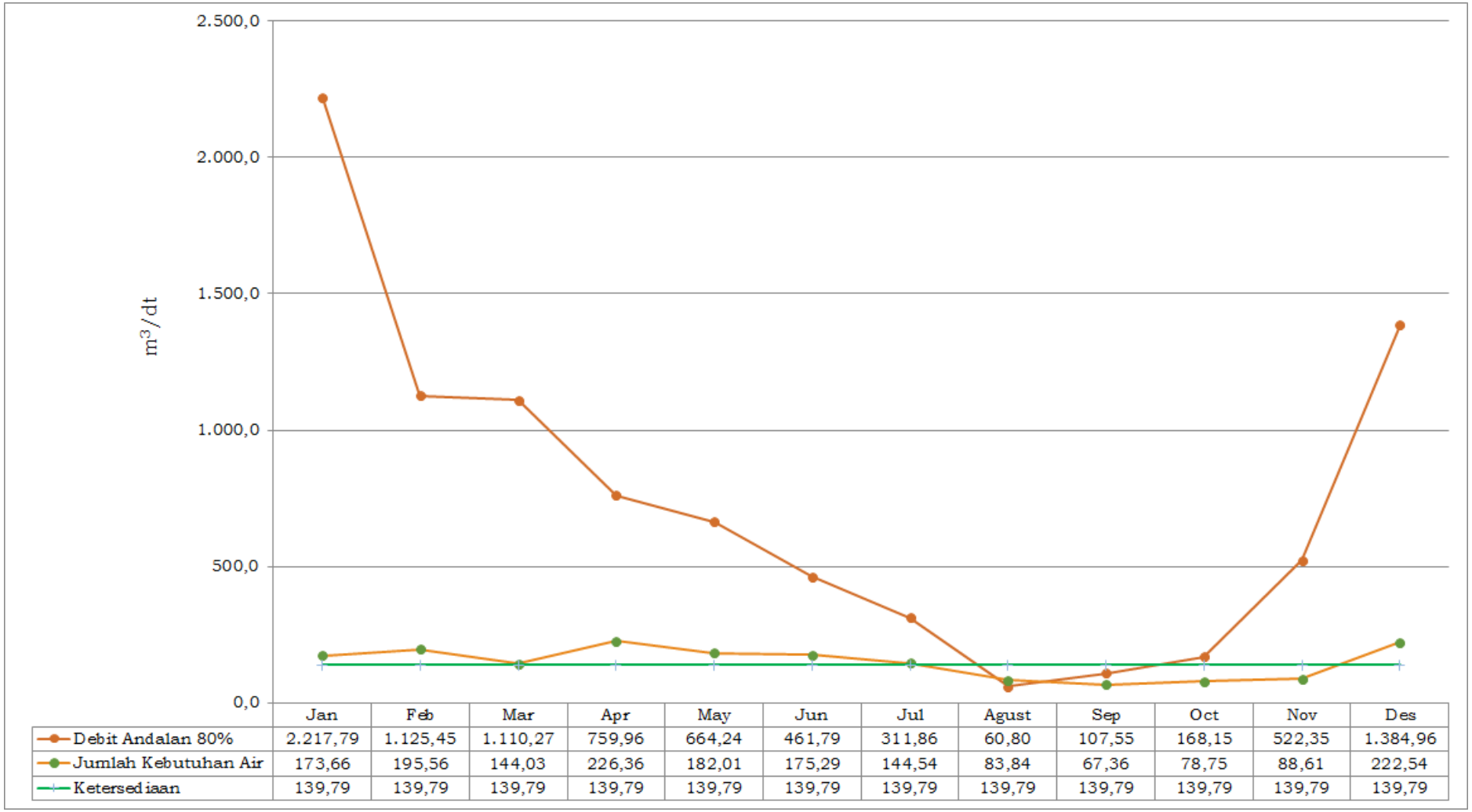

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agust	Sep	Oct	Nov	Des
Debit Andalan 80%	2.217,79	1.125,45	1.110,27	759,96	664,24	461,79	311,86	60,80	107,55	168,15	522,35	1.384,96
Jumlah Kebutuhan Air	173,66	195,56	144,03	226,36	182,01	175,29	144,54	83,84	67,36	78,75	88,61	222,54
Ketersediaan	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.15. Neraca Air Eksisting di WS Jeneberang Tahun 2013

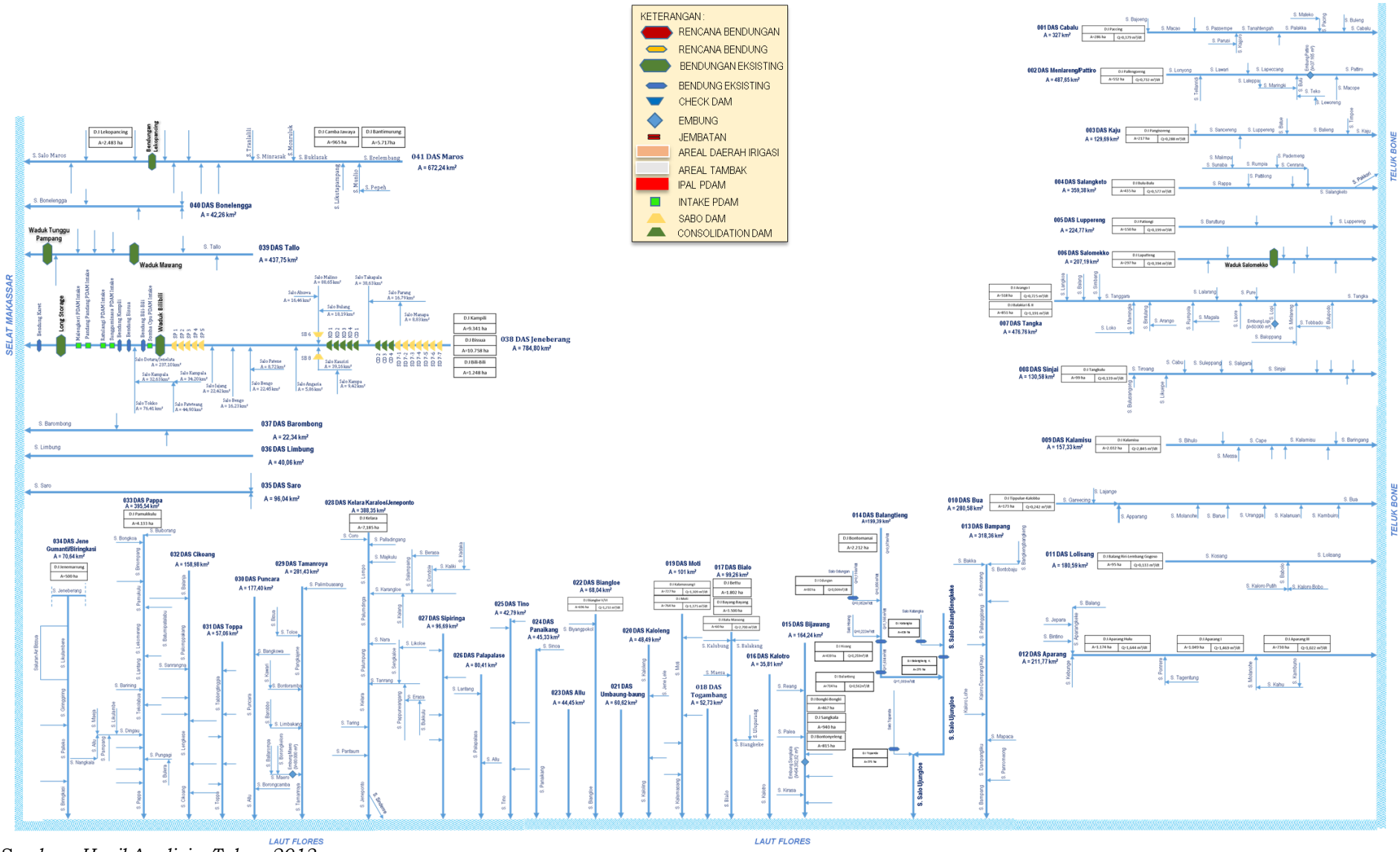

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 2.16. Skema Sistem WS Jeneberang (Kondisi Eksisting)

2.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi

1) Demografi di WS Jeneberang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010, penduduk kabupaten/kota di WS Jeneberang pada Tahun 2005 berjumlah 3.489.696 jiwa, naik menjadi sekitar 3.826.989 jiwa pada Tahun 2009. Populasi penduduk di WS Jeneberang pada tahun 2009 adalah 46,87% dari populasi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi penduduk di WS Jeneberang terhadap populasi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40. Populasi Penduduk di WS Jeneberang Terhadap Populasi Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Populasi Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan (Jiwa)	Populasi Penduduk WS Jeneberang (Jiwa)	Prosentase Penduduk WS Jeneberang Terhadap Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
2009	8.840.298	3.856.486	43,62
2010	8.928.700	3.895.681	43,63
2011	9.017.988	3.946.628	43,76
2012	9.108.168	3.997.843	43,89
2013	9.199.249	4.050.255	44,03

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2013

Berdasarkan data dan hasil analisis pada Tabel 2.40, diketahui bahwa hampir setengah dari populasi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan berada di WS Jeneberang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Wilayah Sungai Jeneberang mempunyai potensi yang besar sebagai pendukung utama proses perkembangan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di WS Jeneberang pada kurun waktu Tahun 2005-2009 adalah rata - rata 1,24%, lebih kecil daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,57%. Data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota yang masuk di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41. Pertumbuhan Penduduk di WS Jeneberang Menurut Kabupaten/Kota

No	Daerah	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2013-2014	Rata-rata
		%	%	%	%	%
1	Kepulauan Selayar	1,53	1,68	1,66	1,62	1,62
2	Bulukumba	1,17	1,14	1,11	1,08	1,12
3	Bantaeng	0,86	0,83	0,81	0,77	0,81
4	Jeneponto	0,64	0,62	0,59	0,55	0,60
5	Takalar	1,20	1,17	1,14	1,11	1,15
6	Gowa	1,98	1,96	1,93	1,89	1,94
7	Sinjai	1,14	1,11	1,08	1,04	1,09
8	Maros	1,24	1,21	1,18	1,15	1,19
9	Bone	0,35	0,40	0,89	0,85	0,62
10	Makassar	1,54	1,52	1,49	1,45	1,50
Rata-Rata Wilayah Sungai Jeneberang		**1,16**	**1,16**	**1,18**	**1,15**	**1,16**
Sulawesi Selatan		**1,45**	**1,37**	**1,34**	**1,30**	**1,36**

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka, Tahun 2013

Berdasarkan data dan hasil analisis pada Tabel 2.41, menunjukkan bahwa ada daerah-daerah di WS Jeneberang yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan penduduk relatif sama, dengan kisaran terendah sebesar 0,55% dan kisaran tertinggi sebesar 1,98%. Di samping itu, terdapat banyak daerah yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang turun, yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar.

2) Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk kabupaten/kota yang ada di WS Jeneberang pada Tahun 2013 memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang masuk dalam WS Jeneberang dapat dilihat dalam Tabel 2.42.

Tabel 2.42. Kepadatan Penduduk WS Jeneberang Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kabupaten/Kota	Luas Kabupaten/Kota Dalam WS	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(Km²)	(Km²)	(Jiwa)	(Jiwa/Km²)
1.	Kepulauan Selayar	903,50	903,50	128.852	143
2.	Bulukumba	1.154,67	1.154,67	417.775	362
3.	Bantaeng	395,83	395,83	184.337	466
4.	Jeneponto	903,35	903,35	353.671	392
5.	Takalar	566,51	566,51	273.024	482
6.	Gowa	1.883,32	1.883,32	653.331	347
7.	Sinjai	819,96	819,96	241.623	295
8.	Maros	1.619,12	686,80	137.680	200
9.	Bone	4.559,00	1.899,75	313.891	165
10.	Makassar	175,77	175,77	1.346.070	7.658
Total		**12.981,03**	**9.389,47**	**4.050.225**	**431**

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2011

Berdasarkan data dan hasil analisis pada Tabel 2.27, dapat dijelaskan bahwa daerah di WS Jeneberang dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kota Makassar dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 7.236 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam) jiwa/km^2, disusul Kabupaten Takalar dengan kepadatan penduduk 445 (empat ratus empat puluh lima) jiwa/km^2, sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu sebesar 135 (seratus tiga puluh lima) jiwa/km^2. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk kabupaten/kota di WS Jeneberang adalah 440 (empat ratus empat puluh) jiwa/km^2.

Sedangkan data populasi penduduk berdasarkan DAS yang masuk di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43. Populasi Penduduk Berdasarkan DAS di WS Jeneberang

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Maros	672,24	138.166	423
2	Bonolengga	42,26	117.171	240
3	Tallo	437,75	16.896	130
4	Jeneberang	784,80	28.225	79
5	Barombong	22,34	9.760	43
6	Limbung	40,05	18.725	90
7	Saro	96,04	72.720	153
8	Jene Gumanti /Biringkasi	70,64	73.543	563
9	Jene Dinging/Pappa	395,54	38.475	245
10	Cikoang	158,98	79.490	283
11	Toppa	57,06	36.047	200

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
12	Puncara	177,40	62.922	297
13	Jene Tamanroja	281,43	91.212	287
14	Kelara-Karaloe	388,35	66.000	331
15	Sipiringa	96,69	65.640	400
16	Palapalasa	80,41	39.832	1112
17	Umbaung-Baung	60,52	47.268	476
18.	Tino	42,79	27.898	529
19.	Panaikang	45,33	34.290	340
20	Biangloe	68,04	11.264	232
21	Kaloleng	48,49	26.582	439
22	Moti	101,00	40.522	596
23	Togambang	52,73	10.840	244
24	Bialo	99,26	23.913	528
25	Kalotro	35,81	2.858	67
26	Bijawang	164,24	29.826	371
27	Balangtieng	199,39	47.172	488
28	Bampang	318,36	118.485	305
29	Laparang	211,77	101.850	362
30	Lolisang	180,59	57.499	324
31	Bua	280,58	26.604	466
32	Kalamisu	157,33	92.016	579
33	Sinjai	130,58	148.681	376
34	Tangka	476,76	45.453	643
35	Salomekko	207,19	50.436	525
36	Luppereng	224,77	51.241	1279
37	Salangketo	359,38	60.683	2716
38	Kaju	129,69	454.949	580
39	Pattiro	487,65	1.138.400	2601
40	Cabalu	327,00	75.100	1777
41	Burungloe	1,94	209.130	311
42	Batanglampe	8,73	43.304	1389
43	Liangliang	21,12	258	30
44	Tanakeke	31,18	2.595	123
45	Selayar	650,62	234	120
46	Pasi	29,47	819	77
47	Bahuluang	8,24	163	18
48	Kayu Adi	11,75	76.861	118
49	Tanah Jampea	117,62	1.809	61
50	Kalao	101,00	89	11
51	Bonerate	19,23	190	20
52	Karompa	11,31	334	28
53	Kalaotoa	80,94	19.533	166
54	Madu	11,37	10.949	108
55	Likangloe	10,60	684	36
56	Tambolongan	9,71	234	21
57	Allu	44,45	4.178	52
58	Pasitanete	8,96	235	21
	Total	**9.389,47**	**4.050.255**	**431**

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2011

3) Mata Pencaharian dan Pendapatan Penduduk

Mata pencaharian penduduk di WS Jenbeberang, sebagian besar bekerja di sektor pertanian, sedangkan yang menjadi sektor ekonomi utama yaitu perdagangan. Sekitar 47,12% dari total penduduk bekerja di sektor pertanian, dan sisanya bekerja di sektor lainnya. Rata-rata PDRB per kapita WS Jeneberang pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 9,62 juta, lebih rendah daripada Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai PDRB per kapita sebesar Rp. 12,63 juta. Tabel 2.44 merangkum PDRB per kapita pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di WS Jeneberang.

Tabel 2.44. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 di WS Jeneberang

No.	Kabupaten/Kota	PDRB (Dalam Rupiah)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kepulauan Selayar	4.365.072	4.829.808	5.429.604	6.437.681	7.534.190
2	Bulukumba	4.597.427	5.148.225	5.699.441	6.941.865	8.246.341
3	Bantaeng	4.637.377	5.267.781	6.007.558	7.205.599	8.800.929
4	Jeneponto	3.124.342	3.478.233	3.908.755	4.693.927	5.604.180
5	Takalar	3.912.675	4.434.165	5.070.562	6.077.413	7.123.207
6	Gowa	3.704.044	4.193.457	4.802.864	5.732.787	6.981.294
7	Sinjai	5.495.184	6.270.385	7.141.520	8.754.447	10.690.012
8	Maros	4.054.767	4.537.920	5.033.997	5.892.627	7.020.209
9	Bone	3.327.720	3.860.830	4.414.330	5.348.740	6.412.650
10	Makassar	13.096.577	14.846.982	16.874.656	20.793.760	24.580.855
Rata-rata		**5.220.829**	**5.889.662**	**6.663.217**	**8.058.901**	**9.620.135**

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2013

Berdasarkan data dan hasil analisis pada Tabel 2.46 dapat dijelaskan bahwa Kota Makassar mempunyai PDRB per kapita paling tinggi di WS Jeneberang, yaitu sebesar Rp. 24,58 juta, kemudian disusul Kabupaten Sinjai memiliki PDRB per kapita sebesar Rp. 10,69 juta.

Secara umum, PDRB menurut harga berlaku berdasarkan Kabupaten/Kota di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 di WS Jeneberang (Dalam Milyar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (2009-2013)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kepulauan Selayar	498,77	562,74	639,93	771,30	917,28
2	Bulukumba	1.740,03	1.976,25	2.201,35	2.711,10	3.255,21
3	Bantaeng	782,00	899,11	1.030,10	1.245,48	1.532,91
4	Jeneponto	1.022,02	1.144,42	1.291,37	1.559,95	1.872,78
5	Takalar	966,67	1.111,43	1.279,15	1.550,68	1.837,60
6	Gowa	2.123,28	2.457,66	2.854,93	3.473,36	4.309,67

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (2009-2013)				
		2009	2010	2011	2012	2013
7	Sinjai	1.204,36	1.393,41	1.596,29	1.978,01	2.440,57
8	Maros	1.189,00	1.350,57	1.508,50	1.786,71	2.153,01
9	Makassar	15.744,19	18.165,88	20.844,23	26.068,22	31.263,65
10	Bone	3.327,72	3.860,83	4.414,33	5.348,74	6.412,65
	Total WS Jeneberang	**28.598,04**	**32.922,30**	**37.660,18**	**46.493,55**	**55.995,33**
	Total Sulawesi Selatan	**51.780,44**	**60.902,82**	**69.271,92**	**85.143,19**	**99.904,66**

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2013

Dari Tabel 2.45 diatas menunjukkan bahwa Kota Makassar mempunyai PDRB paling besar, yaitu Rp. 31.263,65 milyar diikuti selanjutnya Kabupaten Bone dengan PDRB sebesar Rp. 6.412,65 milyar dan PDRB terkecil Kabupaten adalah Kepulaun Selayar dibandingkan wilayah kabupaten lain di WS Jeneberang, yaitu sebesar Rp. 917,28 milyar**.**

Laju Pertumbuhan PDRB di WS Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku di WS Jeneberang (Dalam Prosentase)

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (2009-2013)			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Kepulauan Selayar	12,83	13,72	20,53	18,93
2	Bulukumba	13,58	11,39	23,16	20,07
3	Bantaeng	14,98	14,57	20,91	23,08
4	Jeneponto	11,98	12,84	20,80	20,05
5	Takalar	14,98	15,09	21,23	18,50
6	Gowa	15,75	16,16	21,66	24,08
7	Sinjai	15,70	14,56	23,91	23,39
8	Maros	13,59	11,69	18,44	20,50
9	Makassar	15,38	14,74	25,06	19,93
10	Bone	16,02	14,34	21,17	19,89
Total WS Jeneberang		**15,12**	**14,39**	**23,46**	**20,44**

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2011

2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan Dan Permasalahan

Identifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan hasil rumusan Pertemuan Konsultasi Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan PKM I dan PKM II pada Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada di DAS di WS Jeneberang diuraikan mencakup 5 (lima) aspek, yaitu:

a. konservasi Sumber Daya Air;
b. pendayagunaan Sumber Daya Air;

c. pengendalian daya rusak air;
d. pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan
e. SISDA

Daftar lengkap permasalahan di WS Jeneberang ditunjukkan pada Tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47. Permasalahan di WS Jeneberang

No.	Aspek/Sub Aspek	Permasalahan
I	**KONSERVASI**	
1	Perlindungan dan Pelestarian DAS	- Fungsi kawasan hutan berkurang akibat makin meningkatnya kawasan hutan yang kritis di beberapa DAS, seperti: DAS Maros 2.894 ha, DAS Tallo 3.920 ha, DAS Jeneberang 21.974 ha,DAS Pappa 19.463 ha, DAS Karaloe 9.520 ha, DAS Tangka 8.743 ha, DAS Selayar 1.721 ha
		- Belum optimalnya kegiatan konservasi di dalam dan di luar kawasan hutan di DAS Jeneberang, DAS Maros dan DAS Tangka, termasuk DAS di Selayar
		- Berkurangnya daerah resapan di bagian hulu DAS akibat beralih fungsinya lahan menjadi lahan pertanian semusim
		- Budidaya pertanian di kawasan non hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi sehingga menyebabkan meningkatnya lahan kritis (banyak dijumpai daerah aliiran sungai bagian hulu yang ada di Kabupaten Gowa)
		- Terjadinya kerusakan dasar sungai akibat pengambilan pasir dan bahan galian tambang non mineral lainnya (DAS Tallo dan DAS yang ada di Kab. Sinjai)
		- Terjadinya longsoran dan erosi tebing yang masuk ke Waduk Bili-Bili
		- Meluasnya perambahan daerah retensi dan bantaran sungai terutama di daerah perkotaan untuk sungai-sungai Jeneberang, Tallo, Maros
		- Terjadinya abrasi/erosi muara sungai dan pantai di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kepulauan Selayar, Kabupaten Jeneponto, Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
		- Belum ada penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sungai
		- Masih terbatasnya ruang terbuka hijau terutama di ibu kota-ibu kota kabupaten yang ada di Wilayah Sungai Jeneberang
2	Pengawetan Air	- Secara umum di setiap daerah aliran sungai belum optimal pembangunan dan pemeliharaan tampungan air, sehingga banyak air yang terbuang pada musim hujan
		- Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh pemanfaat air (irigasi, domestik)
		- Terjadinya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas dan pemantauan yang lemah, terutama di cekungan air tanah (CAT) Makassar

No.	Aspek/Sub Aspek	Permasalahan
3	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran	- Menurunnya kualitas air sungai yang melintasi perkotaan/permu-kiman dibandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan
		- Limbah domestik dan industri belum dikelola dan diolah dengan baik
		- Penggunaan pupuk di daerah pertanian yang masih berlebihan sehingga masih banyak yang terbuang sisa-sisanya ke badan air
II	**PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR**	
1	Penatagunaan Sumber Daya Air	- Belum adanya ketentuan atau peraturan tentang peruntukan air pada sumber air tertentu
		- Belum adanya zona pemanfaatan sumber air yang memperhatikan berbagai macam pemanfaatan
2	Penyediaan Air	- Terjadi kekurangan air untuk irigasi dan RKI karena kurangnya waduk/tampungan air dan prasarana penyedian air baku sebesar 1,52 m^3/dt
		- Kebutuhan air baku Kota Makassar dan sekitarnya semakin meningkat, sehingga diperlukan pasokan air baku dari berbagai sumber air baku
		- Tingkat layanan air minum perpipaan yang ada di WS Jeneberang masih terbatas rata-rata kurang dari 50%
		- Perlu dilakukan kajian lebih detail menyangkut potensi waduk-waduk kecil (terutama di Kabupaten Selayar)
3	Penggunaan Sumber Daya Air (SDA)	- Kerusakan prasarana jaringan irigasi, sehingga distribusi air irigasi terganggu (tidak efektif dan tidak efisien). Di DAS Jeneponto 2.156 ha, di DAS Maros 1.642 ha
		- Fungsi layanan prasarana SDA menurun karena kegiatan O&P pada umumnya belum memadai
		- Belum adanya SOP tampungan/embung-embung yang ada di DAS-DAS
		- Belum terlaksananya manajemen aset irigasi dan prasarana SDA lainnya (O&P dan rehabilitasi)
		- Belum adanya pedoman operasional penyusunan analisa kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
		- Kurangnya pembinaan masyarakat petani dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi
		- Tingkat kesadaran masyarakat petani masih rendah dalam pelaksanaan hemat air
		- Masih rendahnya indeks pertanaman/intensitas tanam dengan pemberdayaan petani
4	Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	- Belum ditingkatkannya ketersediaan air terkait dengan kebutuhan air baku yang semakin meningkat (jumlah waduk masih terbatas)
		- Belum dikembangkan secara optimal pemanfaatan potensi tenaga air untuk pembangkitan listrik
		- Masih ada potensi lahan irigasi yang belum dikembangkan terutama di DAS Maros, DAS Kelara, DAS Bialo dan DAS lainnya dengan Luas total yang masih dapat dikembangkan 25.409,50 Ha
		- Masih ada potensi lahan tambak yang belum dikembangkan terutama di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros Kabupaten Bone dan Kabupaten lainnya dengan

No.	Aspek/Sub Aspek	Permasalahan
		Luas total yang masih dapat dikembangkan 8.379,30 Ha
		- Pemanfaatan air baku dari waduk Bili-Bili belum optimal terkait dengan tingkat sedimentasi di waduk yang sangat tinggi
		- Pengelolaan Tambak Garam belum maksimal di kabupaten Jeneponto terkait dengan prasarana yang kurang memadai.
5	Pengusahaan Sumber Daya Air	- Belum ada institusi pengelola sumber daya air di WS Jeneberang yang melakukan pengusahaan Sumber Daya Air
		- Pengontrolan pengusahaan sumber air belum terkontrol, terutama di DAS Maros
III	**PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR**	
1	Pencegahan Bencana	- Terjadinya kerugian akibat bencana longsor Gunung Bawakaraeng ke Waduk Bili-Bili
		- Adanya pembangunan struktur pantai yang belum punya ijin, sehingga mengakibatkan erosi pantai di sekitarnya
		- Pada sungai-sungai utama belum terpasang sistem peringatan dini banjir
		- Kurang tertatanya sistem dan kapasitas drainase di perkotaan, terutama di Kota Makassar, Sungguminasa, Maros, Jeneponto
		- Pembuangan sampah ke saluran drainase dan alur sungai masih sering terjadi sehingga menghambat aliran
		- Belum adanya sistem pengendalian banjir secara menyeluruh pada Sungai Jeneberang, Sungai Maros dan Sungai Tallo
		- Terjadinya abrasi pantai dan terdapat pantai kritis di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar dan Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai.
		- Penggunaan bantaran sungai untuk pemukiman dan tempat usaha, terutama terjadi pada sungai-sungai yang melintas perkotaan
		- Terjadinya sedimentasi pada alur sungai bagian hilir (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang dan Sungai Maros)
2	Penanggulangan	- Meluapnya air Sungai Maros menggenangi daerah persawahan seluas 1.459 ha
		- Meluapnya air Sungai Tallo menggenangi daerah persawahan seluas 1.345 ha
		- Belum optimalnya prasarana pengendali banjir di Sungai Maros dan Sungai Tallo
3	Pemulihan akibat banjir	- Terjadinya kerusakan prasarana SDA di setiap kejadian bencana banjir
		- Belum maksimalnya penyediaan dana untuk pelaksanaan pemulihan kondisi prasarana SDA setelah terjadi banjir

No.	Aspek/Sub Aspek	Permasalahan
IV	**SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SDA)**	
		- *Database* sumber daya air telah tersedia (hidrologi, hidrometri, prasarana SDA, teknologi SDA) namun kebenaran dan keakuratan belum dapat dijamin serta keberadaanya masih tersebar di beberapa instansi
		- Belum rasionalnya stasiun-stasiun pengamatan Hidrometeorologi
		- Sumber Daya Manusia yang menangani Sistem Informasi Sumber Daya Air belum memadai
		- Belum lengkapnya perangkat keras dan lunak untuk menunjang Sistem Informasi Sumber Daya Air
		- Belum tersedianya dana yang memadai untuk melaksanakan Sistem Informasi Sumber Daya Air secara terpadu
		- Belum adanya unit Sistem Informasi Sumber Daya Air yang mengintegrasikan data Sumber Daya Air yang berasal dari instansi-instansi terkait
		- Belum adanya pedoman tentang pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air yang sistematis dan komprehensif
V	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	
		- Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air
		- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sumber daya air
		- Masih terbatasnya penggunaan dana CSR untuk kegiatan konservasi dan lingkungan hidup
		- Belum maksimalnya pengawasan pengembilan air tanah dalam yang dilakukan masyarakat, perusahaan
		- Belum adanya pendelegasian perijinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan dari Menteri Pekerjaan Umum ke Gubernur Sulawesi Selatan

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2011

2.5 Identifikasi Potensi Yang Bisa Dikembangkan

Potensi yang bisa dikembangkan di WS Jeneberang berdasarkan hasil PKM, dapat diidentifikasi sesuai 5 (lima) aspek Pengelolaan sumber daya air (Konservasi, Pendayagunaan, Pengendalian Daya Rusak Air, Sistem Informasi Sumber Daya Air serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha) sebagai berikut:

2.5.1 Konservasi Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui bahwa lahan kritis di WS Jeneberang seluas 1.416,11 km^2 dan yang terluas terdapat di DAS Jeneberang, yaitu 219,74 km^2, sedangkan DAS yang terdapat lahan kritis lebih dari 50 km^2 sejumlah 10 buah DAS. Sebanding dengan hal tersebut, sedimentasi terbesar juga terdapat di DAS Jeneberang, yaitu sebesar

25,62 ton/ha/tahun, sedangkan DAS dengan nilai sedimentasi lebih dari 4 ton/ha/tahun sejumlah 6 buah DAS. Kondisi tersebut menjadi potensi untuk dikembangkan melalui berbagai kegiatan konservasi, sehingga mampu untuk memperbaiki kualitas lingkungan DAS di WS Jeneberang.

Tujuan dari konservasi sumber daya air di WS Jeneberang adalah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi serta ketersediaan sumber daya air di WS Jeneberang. Konservasi Sumber Daya Air tersebut dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang akan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Usaha konservasi dilakukan melalui:

(a) pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

(b) pengendalian pemanfaatan sumber air;

(c) pengisian air pada sumber air;

(d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;

(e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di daerah sekitar sumber air;

(f) pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

(g) pengaturan daerah sempadan sumber air;

(h) rehabilitasi hutan dan lahan; dan

(i) pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

2.5.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pemanfaatan potensi sumber daya air yang cukup besar di WS Jeneberang selama ini sebagian besar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, prioritas selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri.

WS Jeneberang mempunyai potensi pengembangan pertanian yang sangat tinggi, sehingga pemenuhan kebutuhan akan air irigasi merupakan prioritas yang utama. Komoditas pertanian yang sangat penting bagi masyarakat WS Jeneberang adalah tanaman pangan. Pengembangan pertanian di WS Jeneberang diarahkan pada ketahanan pangan yang mantap dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai.

Kawasan Mamminasata merupakan kawasan Strategis Nasional. Kawasan ini akan menjadi megapolitan di Indonesia Timur dengan industri yang berkembang pesat, tentu saja akan dibarengi meningkatnya kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri (RKI). Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih RKI direncanakan dengan pembangunan Bendungan Bontosunggu, Jenelata, peningkatan kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Somba Opu guna menjamin ketersediaan air baku sebesar 4,7 m^3/detik.

Kepulauan Selayar dan Kabupaten Jeneponto merupakan daerah dengan tingkat pemenuhan air yang rendah, perlu pengelolaan Sumber Daya Air optimal dengan pembangunan bendungan Kelara, bendungan Bontojaya dan bendungan Posi akan menyuplai kebutuhan air baku untuk air bersih sebesar 3 m^3/detik.

Potensi sumber daya air terbesar terdapat di DAS Jeneberang dengan total potensi ketersediaan sebesar 1,89 miliar m^3/tahun, terbesar kedua adalah DAS Maros sebesar 1,40 miliar m^3/tahun dan terbesar ketiga adalah DAS Tallo sebesar 1,05 miliar m^3/tahun. Adapun DAS dengan potensi di atas 100 juta m^3/tahun terdiri dari 14 (empat belas) DAS, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Potensi ketersediaan air tersebut masih banyak yang terbuang ke laut terutama pada musim hujan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi air yang ada di WS Jeneberang diperlukan pembangunan bendungan-bendungan baru yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kebutuhan air. Beberapa lokasi bendungan yang telah dilakukan studinya antara lain adalah Bendungan:

1) Bontosunggu di Kabupaten Maros;
2) Jenelata di Kabupaten Gowa;
3) Pamukulu di Kabupaten Takalar;
4) Kelara Karaloe di Kabupaten Jeneponto;
5) Bontojaya di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
6) Bendungan Posi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.5.3 Pengendalian Daya Rusak Air

1) Pengendalian banjir

Berdasarkan analisa debit banjir dengan kala ulang 5 (lima) tahunan, DAS yang perlu diprioritaskan dalam upaya pengendalian banjir adalah DAS dengan debit banjir di atas 100 m^3/detik yang terdiri dari 7 (tujuh) DAS, secara berurutan yaitu DAS Jeneberang, DAS Maros, DAS Bua, DAS Pappa, DAS Tallo, DAS Tangka dan DAS Taman Roya.

Pengendalian banjir melibatkan upaya langsung maupun tidak langsung. Pengendalian secara langsung dilaksanakan dengan memanfaatkan prasarana pengairan, melalui pembuatan:

a. tanggul dan normalisasi sungail; dan
b. bendungan (waduk) serbaguna.

Sedangkan pengendalian dengan upaya tidak langsung lebih ditekankan kepada pengelolaan resiko *(management of risk).*

2) Pengendalian pencemaran

Dalam rangka pengendalian pencemaran, untuk mengatasi masalah penurunan kualitas air di WS Jeneberang, perlu dilakukan pemantauan kualitas air secara berkelanjutan, sehingga akan menghasilkan informasi atau gambaran kualitas air sungai dan sumber-sumber pencemaran secara menyeluruh. Informasi ini secara rutin dikirimkan kepada instansi terkait untuk mendukung usaha terciptanya kualitas air yang memadai dan upaya penegakan hukum.

Selain itu, data yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan untuk:

a. evaluasi pelaksanaan program pengendalian kualitas air sungai;
b. pelaksanaan pemantauan yang dikaitkan dengan penegakan hukum (*law enforcement*);
c. mendukung upaya pengendalian pencemaran dalam upaya memperbaiki kualitas air melalui pengenceran; dan
d. sebagai kontrol pemberian ijin pembuangan limbah cair yang didasarkan pada daya dukung sungai dalam menerima limbah sesuai peraturan daerah.

3) Penanganan Bencana Longsor

Sebagai upaya vegetatif, lokasi-lokasi rawan longsor dapat dibudidayakan untuk pertanian dan penghijauan dengan jenis pohon-pohon yang menghasilkan dan akarnya dapat memperkuat ketahanan terhadap longsoran, sedangkan sebagai upaya sipil teknis dapat ditanggulangi dengan:

a. perkuatan lereng dengan lapisan beton atau batu kali; dan
b. pembuatan teras bambu

Untuk penanganan material longsoran Bawakaraeng untuk menghindari kurang berfungsinya Bendungan Bili-Bili maka upaya yang di lakukan antara lain dengan pengelolaan tambang pasir dan pengerukan di Waduk Bili-Bili.

4) Penanganan Kerusakan Pantai

Potensi perlindungan secara vegetatif dilakukan dengan mempertahankan hutan bakau dan penanaman kembali tanaman bakau untuk perlindungan pantai. Sedangkan secara struktural dapat dibangun konstruksi perlindungan dan perkuatan pantai antara lain:

a. bangunan pemecah gelombang;
b. turap; dan
c. bronjong, krib.

2.5.4 Sistem Informasi Sumber Daya Air

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air di WS Jeneberang meliputi kegiatan perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi sumber daya air yang dilakukan melalui tahapan:

a. pengambilan dan pengumpulan data;
b. pengelolaan data; dan
c. penyebarluasan data data informasi.

Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air di WS Jeneberang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan informasi sumber daya air untuk diakses oleh pihak yang berkepentingan. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang sebagai penyedia informasi sumber daya air berkewajiban menjaga keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktu atas data dan informasi.

Dengan adanya beberapa permasalahan, maka perlu adanya pengelolaan data dan informasi terkait dengan sumber daya air di WS Jeneberang yang dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu perlu dibentuk Pusat Sistem Informasi Sumber Daya Air yang mengelola seluruh informasi sumber daya air dan menghubungkan semua instansi yang memiliki dan mengolah data dan informasi terkait pengelolaan sumber daya air.

Data yang diperoleh perlu dikembangkan dan berpotensi ditingkatkan menjadi data *real time* pada lokasi terpilih yang berpengaruh signifikan dalam pengelolaan sumber daya air dengan menambah jaringan peralatan otomatis seperti *automatic water level record* yang selanjutnya disebut AWLR maupun *automatic rainfall record* yang selanjutnya disebut ARR. Di samping peralatan, potensi lain yang harus dikembangkan adalah penyiapan sumber daya manusia dan penyiapan kelembagaan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air yang terintegrasi.

2.5.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Instansi terkait pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di WS Jeneberang harus berfungsi sebagai penyedia data dan informasi bagi unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi tingkat nasional yang sekaligus sebagai penyeleksi, penyimpan, penyaji dan penyebar data dan informasi yang dikompilasi dari pengelola sumber daya air di WS Jeneberang. Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air, instansi provinsi melakukan koordinasi dengan dinas dan

institusi lain yang terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, peran kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air di WS Jeneberang perlu senantiasa ditingkatkan serta dilakukan evaluasi tugas dan kewenangan melalui koordinasi yang efektif dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan.

Di lain pihak, peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air perlu ditingkatkan. Pada aspek konservasi sumber daya air, masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan sehingga kegiatan konservasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Pada aspek pendayagunaan sumber daya air, peran masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi melalui Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut TKPSDA. Sedangkan pada aspek pengendalian daya rusak air, peran masyarakat diwujudkan dalam pengendalian pencemaran limbah domestik dan pengolahan limbah domestik komunal.

BAB III
ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI JENEBERANG

3.1 Asumsi, Kriteria Dan Standar

Pola pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di WS Jeneberang dengan prinsip keterpaduan. Secara umum, asumsi dan kriteria dan standar yang digunakan dalam analisis data antara lain yang termuat di dalam:

1. Pedoman Perencanaan Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Tahun 2004;
2. Kriteria penetapan lahan kritis, oleh Balai Rehabilitasi dan Konservasi Tanah (BRKT) dan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (DPKT);
3. Paket Program *Decision Support System* Ribasim yang selanjutnya disebut DSS Ribasim, *Delft Hydraulic*, *Netherland*;
4. Kriteria Kelas Mutu Air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Daerah terkait;
5. Kewenangan pengelolaan daerah irigasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; dan
6. Metode, analisis dan perhitungan sesuai dengan SNI.

Sedangkan, rencana pengembangan sumber daya air di WS Jeneberang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara kebutuhan *(demand)* dan pasokan *(supply)* serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
2. Pengelolaan kuantitas dan kualitas air untuk menjamin ketersediaan air baik untuk saat ini maupun pada saat mendatang melalui alokasi air, ijin pengambilan air, ijin pembuangan limbah cair dan lain sebagainya;
3. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-struktural melalui konservasi

sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah; dan

4. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

Strategi dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang ini diarahkan pada 2 (dua) cakupan umum, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya air untuk tujuan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak secara terpadu dan menyeluruh guna mencapai manfaat yang optimal dalam memenuhi hajat hidup dan kehidupan rakyat; dan
2. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dalam pola tata ruang yang serasi dan terkoordinasi dengan sektor lainnya sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan menjamin fungsi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berikut ini adalah asumsi, kriteria, standar dan analisa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang.

A. Asumsi dalam Penyusunan Rancangan Pola

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pola mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang memuat parameter perubahan politik, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim.

1) Perubahan Politik

Situasi tatakelola pemerintahan (perubahan politik) dimasa yang akan datang kurang lebih sama dengan kondisi saat ini atau status quo dan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan, serta melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan penegakan hukum dan dukungan stakeholders yang memadai.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kondisi sebelumnya dengan kecenderungan stabil antara 4,5% dan 6,5% per tahun. Dalam pola ini digunakan skenario dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah (<4,5%), pertumbuhan ekonomi sedang (antara 4,5% dan 6,5%), pertumbuhan ekonomi tinggi (>6,5%).

3) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk rata-rata kabupaten/kota di Wilayah Sungai Jeneberang sekitar 1,24% pertahun. Dampak nyata pertumbuhan penduduk terhadap pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Jeneberang tidak terlalu banyak, tapi dampaknya akan terasa

dengan cara masyarakat yang memilih tinggal di perkotaan, sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin meningkat.

4) Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air dihitung dengan asumsi berdasarkan standar kebutuhan air domestik didasarkan pada petunjuk teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Standar Perhitungan Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air	
	Rumah Tangga (l/org/hr)	Perkotaan (%)
> 1.000.000	174	60
500.000-1.000.000	142	40
100.000-500.000	126	30
20.000-100.000	78	20
3.000-20.000	54	5

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tahun 2006

5) Kebutuhan Air Bersih

Dalam menghitung proyeksi kebutuhan air sebagaimana ditargetkan dalam *Millenium Development Goal's* sampai dengan Tahun 2015, beberapa kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

a. Skala perkotaan adalah untuk kota dengan status ibukota kabupaten/kota dan ibu kota kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2004 sebesar ≥ 20.000 jiwa;
b. Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan ditetapkan dari setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. Tingkat konsumsi kebutuhan air melalui hidran umum = 45liter/orang/hari;
d. Rasio pelayanan melalui SR = HU dari 90% : 10% menjadi 95% :5%;
e. Pelayanan untuk perkotaan ditetapkan 10% dari kebutuhan rumah tangga;
f. Tingkat penurunan kehilangan air 28% menjadi 20%;
g. Faktor koefisien hari maksimum adalah 1,25;
h. Faktor koefisien jam puncak adalah 1,75;
i. Faktor koefisien kebutuhan air baku adalah 1,1;
j. Skala IKK adalah kota dengan status ibukota kecamatan denganjumlah penduduk tahun 2004 ≤ 20.000 jiwa;
k. Rasio pelayanan melalui SR : HU dari 82% : 18% menjadi 94% : 6%; dan
l. Kriteria lainnya sama dengan skala perkotaan.

6) Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi didasarkan pada jenis tanaman dan periode pertumbuhan dan berdasarkan analisa dan hasil diskusi PKM 1 dan 2 diperoleh nilai 1,4 lt/dt/ha.

7) Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kinerja DAS ditentukan berdasarkan parameter-parameter luas tutupan lahan, erosi dan sedimentasi, sedimentasi sungai dan perbandingan Q maksimum dengan Q minimum dan parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Parameter Luas Tutupan Lahan, Erosi dan Sedimentasi

No.	Parameter	DAS Jelek	DAS Sedang	DAS Baik
1	% Luas tutupan lahan vegetatif permanen terhadap luas DAS	< 30%	30% - 75%	> 75%
2	Erosi dan Sedimentasi	Besar SDR > 75%	Sedang SDR 50 – 75%	Kecil SDR < 50%
3	Sedimentasi Sungai	Besar Jumlah sedimen > 10 ton/ha/th	Sedang Jumlah sedimen 5 – 10 ton/ha/th	Kecil Jumlah sedimen < 5 ton/ha/th
4	Qmax/Qmin	Besar KRS > 120	Sedang KRS 50 – 120	

Catatan :
SDR = *sediment delivery ratio* = rasio sedimentasi/erosi lahan
KRS = koefisien rejim sungai = Qmax/Qmin

B. Kriteria Dalam Penyusunan Rancangan Pola

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menganalisa data, yaitu:

1) Pedoman Perencanaan Wilayah Sungai, Ditjen Sumber Daya Air, Tahun 2004;
2) Kriteria Perencanaan oleh Dirjen Pengairan (KP. 01 s/d 07, PT. 01 s/d 04);
3) Kriteria Penetapan Lahan Kritis, oleh BRLKT dan DPKT;
4) Kriteria Kelas Mutu Air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
5) Kriteria Bendungan Kecil untuk Daerah Semi Kering di Indonesia No.04.00139-HAB; dan
6) Paket Program DSS Ribasim, Delft Hydraulic, Netherland

C. Standar Dalam Penyusunan Rancangan Pola

Standar yang digunakan untuk menganalisa data, yaitu:

1) Perencanaan Banjir untuk Spillway Bendungan; SNI-03-3432-1994;
2) *Design Flood*/Perhitungan Banjir; SNI-03-2415-1991;

3) Standar Nasional Indonesia; SNI-03-3432-1994, 05-2919-1991;
4) Standar Nasional Indonesia; SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air; dan
5) Standar Perencanaan dan Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

D. Analisa

1) Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi WS Jeneberang

Acuan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi berdasarkan Standar Kriteria Perencanaan Irigasi KP-01 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum 1986. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, definisi kebutuhan air irigasi adalah kebutuhan air yang digunakan untuk pertanian. Untuk menghitung kebutuhan air irigasi menurut rencana pola tata tanam, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a) pola tanam yang direncanakan;
b) luas areal yang akan ditanami;
c) kebutuhan air pada petak sawah;
d) efisiensi irigasi; dan
e) awal tanam.

Kebutuhan air irigasi dihitung dengan memperhitungkan pola tanam, awal tanam dan intensitas tanam yang akan dihitung dengan bantuan paket program DSS RIBASIM, sedangkan besar kebutuhan air irigasi pada pintu pengambilan sangat dipengaruhi oleh efisiensi irigasi, yang dalam studi ini diperkirakan sebesar 85%. Proyeksi luas DI berdasarkan DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.3 dan proyeksi kebutuhan air irigasi tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3. Proyeksi Luas DI Berdasarkan DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033

No	Nama DAS	Proyeksi Luas DI (ha)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Cabalu	11.167	11.167	11.167	11.167	11.167
2	Pattiro	13.767	13.767	13.767	13.767	13.767
3	Kaju	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
4	Salangketo	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
5	Luppereng	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239
6	Salomekko	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
7	Tangka	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774
8	Sinjai	997	997	997	997	997
9	Kalamisu	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
10	Bua	7.828	7.828	7.828	7.828	7.828
11	Lolisang	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561
12	Laparang	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
13	Bampang	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

No	Nama DAS	Proyeksi Luas DI (ha)				
		2013	2018	2023	2028	2033
14	Balangtieng	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
15	Bijawang	11.058	11.058	11.058	11.058	11.058
16	Kalotro	446	446	446	446	446
17	Bialo	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662
18	Togambang	688	688	688	688	688
19	Moti	764	764	764	764	764
20	Kaloleng	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
21	Umbaung-Baung	4.348	4.348	4.348	4.348	4.348
22	Biangloe	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
23	Allu	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
24	Panaikang	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
25	Tino	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
26	Palapalasa	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
27	Sipiringa	775	775	775	775	775
28	Kelara-Karaloe	19.046	26.050	26.050	26.050	26.050
29	Jene Tamanroja	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782
30	Puncara	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452
31	Toppa	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
32	Cikoang	237	237	237	237	237
33	Jene Dinging/Pappa	14.088	14.088	20.518	20.518	20.518
34	Jene Gumanti/ Biringkasi	412	412	412	412	412
35	Saro	697	697	697	697	697
36	Limbung	190	190	190	190	190
37	Barombong	91	91	91	91	91
38	Jeneberang	40.955	40.955	60.468	65.346	65.346
39	Tallo	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
40	Bonolengga	0	0	0	0	0
41	Maros	10.887	10.887	10.887	23.345	26.459
42	Tanakeke	0	0	0	0	0
43	Batanglampe	0	0	0	0	0
44	Liangliang	0	0	0	0	0
45	Burungloe	0	0	0	0	0
46	Likangloe	0	0	0	0	0
47	Pasitanete	0	0	0	0	0
48	Selayar	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
49	Pasi	0	0	0	0	0
50	Bahuluang	0	0	0	0	0
51	Tambolongan	0	0	0	0	0
52	Kayu Adi	0	0	0	0	0
53	Tanah Jampea	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
54	Kalao	0	0	0	0	0
55	Bonerate	0	0	0	0	0
56	Karompa	0	0	0	0	0
57	Kalaotoa	0	0	0	0	0
58	Madu	0	0	0	0	0
	Total	**219.453**	**226.457**	**252.400**	**269.736**	**272.850**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Tabel 3.4. Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033

No.	Nama DAS	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (m^3/dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Cabalu	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
2	Pattiro	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
3	Kaju	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
4	Salangketo	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
5	Luppereng	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
6	Salomekko	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
7	Tangka	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
8	Sinjai	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
9	Kalamisu	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
10	Bua	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
11	Lolisang	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
12	Laparang	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
13	Bampang	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
14	Balangtieng	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
15	Bijawang	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
16	Kalotro	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
17	Bialo	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
18	Togambang	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
19	Moti	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
20	Kaloleng	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
21	Umbaung-Baung	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
22	Biangloe	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
23	Allu	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
24	Panaikang	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
25	Tino	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
26	Palapalasa	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
27	Sipiringa	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
28	Kelara-Karaloe	10,67	14,59	14,59	14,59	14,59
29	Jene Tamanroja	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
30	Puncara	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
31	Toppa	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
32	Cikoang	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
33	Jene Dinging/Pappa	7,89	7,89	11,49	11,49	11,49
34	Jene Gumanti/Biringkasi	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
35	Saro	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
36	Limbung	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
37	Barombong	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
38	Jeneberang	22,93	22,93	33,86	36,59	36,59
39	Tallo	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
40	Bonolengga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Maros	6,10	6,10	6,10	13,07	14,82
42	Tanakeke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Batanglampe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Liangliang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Burungloe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Likangloe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pasitanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Selayar	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
49	Pasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Bahuluang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Tambolongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kayu Adi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Tanah Jampea	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

No.	Nama DAS	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (m³/dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
54	Kalao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Bonerate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Karompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kalaotoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Madu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**122,89**	**126,82**	**141,34**	**151,05**	**152,80**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

2) Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Non Perkotaan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, asumsi bahwa tingkat ekonomi di WS Jeneberang di Tahun 2013 yaitu tingkat ekonomi tinggi sehingga kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan adalah sebesar 174 l/kapita/hr diperoleh besar kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan. Kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan pada masing-masing DAS yang ada di WS Jeneberang pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sedangkan proyeksi kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan pada masing-masing DAS di WS Jeneberang pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5. Proyeksi Jumlah Penduduk Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033

No.	Nama DAS	Proyeksi Jumlah Penduduk DAS (Jiwa)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Cabalu	138.166	157.129	182.458	219.860	270.320
2	Pattiro	117.171	134.766	156.491	188.570	231.848
3	Kaju	16.896	19.861	23.063	27.791	34.169
4	Salangketo	28.225	34.205	39.719	47.861	58.846
5	Luppereng	9.760	12.552	14.575	17.563	21.594
6	Salomekko	18.725	22.468	26.090	31.438	38.653
7	Tangka	72.720	84.894	98.578	118.786	146.048
8	Sinjai	73.543	83.323	96.755	116.589	143.346
9	Kalamisu	38.475	44.232	51.363	61.892	76.096
10	Bua	79.490	91.065	105.744	127.421	156.665
11	Lolisang	36.047	41.681	48.399	58.321	71.706
12	Laparang	62.922	72.010	83.618	100.759	123.883
13	Bampang	91.212	104.468	121.308	146.175	179.724
14	Balangtieng	66.000	75.370	87.519	105.460	129.663
15	Bijawang	65.640	74.713	86.757	104.541	128.534
16	Kalotro	39.832	44.878	52.112	62.794	77.206
17	Bialo	47.268	53.665	62.315	75.089	92.323
18	Togambang	27.898	31.631	36.730	44.260	54.417
19	Moti	34.290	39.139	45.448	54.764	67.333
20	Kaloleng	11.264	12.967	15.058	18.145	22.309
21	Umbaung-Baung	26.582	30.213	35.083	42.275	51.978
22	Biangloe	40.522	45.882	53.282	64.200	78.935
23	Allu	10.840	12.463	14.472	17.439	21.442
24	Panaikang	23.913	27.113	31.484	37.938	46.645
25	Tino	2.858	3.510	4.075	4.911	6.038
26	Palapalasa	29.826	33.990	39.470	47.561	58.476
27	Sipiringa	47.172	53.538	62.168	74.912	92.105
28	Kelara-Karaloe	118.485	135.524	157.370	189.629	233.150
29	Jene Tamanroja	101.850	116.119	134.838	162.478	199.768
30	Puncara	57.499	65.688	76.277	91.913	113.007

No.	Nama DAS	Proyeksi Jumlah Penduduk DAS (Jiwa)				
		2013	2018	2023	2028	2033
31	Toppa	26.604	30.213	35.083	42.275	51.978
32	Cikoang	92.016	104.222	121.022	145.831	179.300
33	Jene Dinging/Pappa	148.681	169.401	196.708	237.031	291.432
34	Jene Gumanti/Biringkasi	45.453	51.425	59.715	71.956	88.470
35	Saro	50.436	57.190	66.409	80.022	98.388
36	Limbung	51.241	57.688	66.988	80.720	99.245
37	Barombong	60.683	68.139	79.123	95.342	117.224
38	Jeneberang	454.949	515.287	598.350	721.007	886.482
39	Tallo	1.138.400	1.278.394	1.484.470	1.788.773	2.199.307
40	Bonolengga	75.100	84.432	98.042	118.140	145.254
41	Maros	209.130	239.109	277.653	334.570	411.355
42	Tanakeke	43.304	48.733	56.589	68.189	83.839
43	Batanglampe	258	352	408	492	605
44	Liangliang	2.595	3.059	3.552	4.281	5.263
45	Burungloe	234	276	320	386	474
46	Likangloe	819	994	1154	1390	1709
47	Pasitanete	163	248	287	346	426
48	Selayar	76.861	90.785	105.419	127.029	156.183
49	Pasi	1.809	2.238	2.599	3.132	3.850
50	Bahuluang	89	159	185	223	274
51	Tambolongan	190	282	328	395	486
52	Kayu Adi	334	459	533	643	790
53	Tanah Jampea	19.533	22.728	26.392	31.802	39.100
54	Kalao	10.949	12.992	15.086	18.179	22.351
55	Bonerate	684	905	1051	1266	1557
56	Karompa	234	344	399	481	592
57	Kalaotoa	4.178	5.263	6.111	7.364	9.054
58	Madu	235	345	401	483	594
	Total	**4.050.255**	**4.604.719**	**5.346.996**	**6.443.083**	**7.921.809**

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka 2013 dan Hasil Analisis, Tahun 2013

Tabel 3.6. Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033

No	Nama DAS	Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan (m^3/dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Cabalu	0,26	0,30	0,35	0,42	0,51
2	Pattiro	0,22	0,26	0,30	0,36	0,44
3	Kaju	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04
4	Salangketo	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
5	Luppereng	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
6	Salomekko	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
7	Tangka	0,08	0,09	0,11	0,23	0,28
8	Sinjai	0,08	0,09	0,10	0,22	0,27
9	Kalamisu	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
10	Bua	0,09	0,10	0,20	0,24	0,30
11	Lolisang	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08
12	Laparang	0,07	0,08	0,09	0,19	0,23
13	Bampang	0,10	0,20	0,23	0,28	0,34
14	Balangtieng	0,07	0,08	0,09	0,20	0,25
15	Bijawang	0,07	0,08	0,09	0,20	0,24
16	Kalotro	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
17	Bialo	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
18	Togambang	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
19	Moti	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07
20	Kaloleng	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
21	Umbaung-Baung	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
22	Biangloe	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09

No	Nama DAS	Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga dan Perkotaan (m³/dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
23	Allu	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
24	Panaikang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05
25	Tino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Palapalasa	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
27	Sipiringa	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
28	Kelara-Karaloe	0,22	0,26	0,30	0,36	0,44
29	Jene Tamanroja	0,19	0,22	0,26	0,31	0,38
30	Puncara	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12
31	Toppa	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
32	Cikoang	0,10	0,20	0,23	0,28	0,34
33	Jene Dinging/Pappa	0,28	0,32	0,37	0,45	0,55
34	Jene Gumanti/Biringkasi	0,05	0,06	0,06	0,08	0,10
35	Saro	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11
36	Limbung	0,06	0,06	0,07	0,09	0,11
37	Barombong	0,07	0,07	0,09	0,10	0,22
38	Jeneberang	0,86	1,19	1,38	1,66	2,04
39	Tallo	3,67	4,12	4,78	5,76	7,09
40	Bonolengga	0,08	0,09	0,11	0,22	0,28
41	Maros	0,40	0,45	0,53	0,63	0,78
42	Tanakeke	0,05	0,05	0,06	0,07	0,09
43	Batanglampe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Liangliang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Burungloe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Likangloe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pasitanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Selayar	0,08	0,10	0,20	0,24	0,30
49	Pasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Bahuluang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Tambolongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kayu Adi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Tanah Jampea	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
54	Kalao	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
55	Bonerate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Karompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kalaotoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
58	Madu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**7,84**	**9,26**	**10,93**	**13,71**	**16,99**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

3) Pemenuhan Kebutuhan Air Industri di WS Jeneberang

Kebutuhan air industri Tahun 2013 di WS Jeneberang adalah 0,495 m³/dt. Proyeksi kebutuhan air industri tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Proyeksi Kebutuhan Air Industri Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033

No.	Nama DAS	Kebutuhan Industri (m³/dt				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Cabalu	0,023	0,034	0,043	0,048	0,053
2	Pattiro	0,097	0,130	0,163	0,236	0,299
3	Kaju	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Salangketo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Luppereng	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Salomekko	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

No.	Nama DAS	Kebutuhan Industri (m³/dt				
		2013	2018	2023	2028	2033
7	Tangka	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Sinjai	0,023	0,034	0,043	0,048	0,053
9	Kalamisu	0,023	0,034	0,043	0,048	0,053
10	Bua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Lolisang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Aparang	0,023	0,034	0,043	0,048	0,053
13	Bampang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Balangtieng	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Bijawang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Kalotro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Bialo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Togambang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Moti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Kaloleng	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Umbaung-Baung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Biangloe	0,025	0,037	0,046	0,051	0,057
23	Allu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Panaikang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	Tino	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Palapalasa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Sipiringa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	Kelara-Karaloe	0,023	0,034	0,043	0,048	0,053
29	Tamanroya	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Puncara	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	Toppa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32	Cikoang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	Pappa	0,122	0,167	0,209	0,287	0,356
34	Biringkasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35	Saro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
36	Limbung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	Barombong	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
38	Jeneberang	0,025	0,037	0,046	0,051	0,057
39	Tallo	0,025	0,037	0,046	0,051	0,057
40	Bonolengga	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
41	Maros	0,042	0,056	0,068	0,075	0,082
42	Tanakeke	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	Batanglampe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Liangliang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45	Burungloe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	Liukangloe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47	Pasitanete	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	Selayar	0,023	0,034	0,043	0,048	0,053
49	Pasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50	Bahuluang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51	Tambolongan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
52	Kayu Adi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
53	Tanah Jampea	0,019	0,026	0,031	0,033	0,036
54	Kalao	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	Bonerate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	Karompa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	Kalaotoa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	Madu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total	**0,496**	**0,694**	**0,868**	**1,071**	**1,265**

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

4) Pemenuhan Kebutuhan Air Tambak di WS Jeneberang

Kebutuhan Air Tambak Tahun 2013 di WS Jeneberang adalah 17,320 m^3/dt. Proyeksi jumlah luas lahan tambak sangat terkait dengan kebutuhan air tambak pada tiap DAS di WS Jeneberang. Proyeksi kebutuhan air tambak tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Proyeksi Kebutuhan Air Tambak Tiap DAS di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air Tambak (m^3/dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
1	Cabalu	1,619	1,621	1,625	1,629	1,633
2	Pattiro	2,414	2,418	2,424	2,429	2,435
3	Kaju	0,642	0,643	0,645	0,646	0,648
4	Salangketo	1,779	1,782	1,786	1,790	1,794
5	Luppereng	1,113	1,115	1,117	1,120	1,122
6	Salomekko	1,026	1,027	1,030	1,032	1,034
7	Tangka	0,498	0,499	0,500	0,501	0,502
8	Sinjai	0,135	0,136	0,136	0,136	0,137
9	Kalamisu	0,163	0,163	0,164	0,164	0,165
10	Bua	0,727	0,729	0,730	0,732	0,734
11	Lolisang	0,468	0,469	0,470	0,471	0,472
12	Aparang	0,329	0,330	0,331	0,331	0,332
13	Bampang	0,495	0,496	0,497	0,498	0,499
14	Balangtieng	0,320	0,321	0,322	0,323	0,323
15	Bijawang	0,255	0,256	0,257	0,257	0,258
16	Kalotro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Bialo	0,160	0,160	0,160	0,161	0,161
18	Togambang	0,082	0,082	0,082	0,083	0,083
19	Moti	0,162	0,162	0,162	0,163	0,163
20	Kaloleng	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
21	Umbaung-Baung	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
22	Biangloe	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
23	Allu	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
24	Panaikang	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
25	Tino	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
26	Palapalasa	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
27	Sipiringa	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
28	Kelara-Karaloe	0,272	0,273	0,273	0,274	0,275
29	Tamanroya	0,185	0,185	0,185	0,186	0,186
30	Puncara	0,116	0,117	0,117	0,117	0,117
31	Toppa	0,346	0,347	0,348	0,348	0,349
32	Cikoang	0,963	0,965	0,967	0,970	0,972
33	Pappa	0,259	0,260	0,260	0,261	0,262
34	Biringkasi	0,383	0,383	0,384	0,385	0,386
35	Saro	0,520	0,521	0,522	0,524	0,525
36	Limbung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	Barombong	0,121	0,121	0,122	0,122	0,122
38	Jeneberang	0,529	0,530	0,531	0,532	0,533
39	Tallo	0,406	0,407	0,408	0,409	0,410
40	Bonolengga	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
41	Maros	0,453	0,454	0,455	0,456	0,457
42	Tanakeke	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
43	Batanglampe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Liangliang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45	Burungloe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	Liukangloe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47	Pasitanete	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
48	Selayar	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
49	Pasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

No.	Nama DAS	Kebutuhan Air Tambak (m³/dt)				
		2013	2018	2023	2028	2033
50	Bahuluang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51	Tambolongan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
52	Kayu Adi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
53	Tanah Jampea	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018
54	Kalao	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	Bonerate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	Karompa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	Kalaotoa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	Madu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total	**17,320**	**17,350**	**17,390**	**17,430**	**17,470**

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

5) Neraca Air

Analisa keseimbangan air pada WS Jeneberang dapat disajikan dalam bentuk neraca air. Berikut ditampilkan proyeksi neraca air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 untuk skenario ekonomi rendah ditampilkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Proyeksi Neraca Air di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2013 Skenario Ekonomi Rendah

Keterangan	Tahun (m³/dt)				
	2013	2018	2023	2028	2033
Kebutuhan Air:					
- Irigasi	122,89	126,82	126,82	126,82	126,82
- Rumah Tangga dan Perkotaan	7,84	9,26	10,93	13,71	16,99
- Industri	0,50	0,69	0,87	0,80	1,26
- Tambak	17,32	17,35	17,39	17,43	17,47
Jumlah kebutuhan Air	148,55	154,12	156,00	158,76	162,54
Ketersediaan	139,79	150,72	155,49	161,84	166,51
Q Andalan 80%	741,26	741,26	741,26	741,26	741,26

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Grafik proyeksi neraca air WS Jeneberang Tahun 2012-2032 pada skenario ekonomi rendah ditunjukkan pada Gambar 3.1.

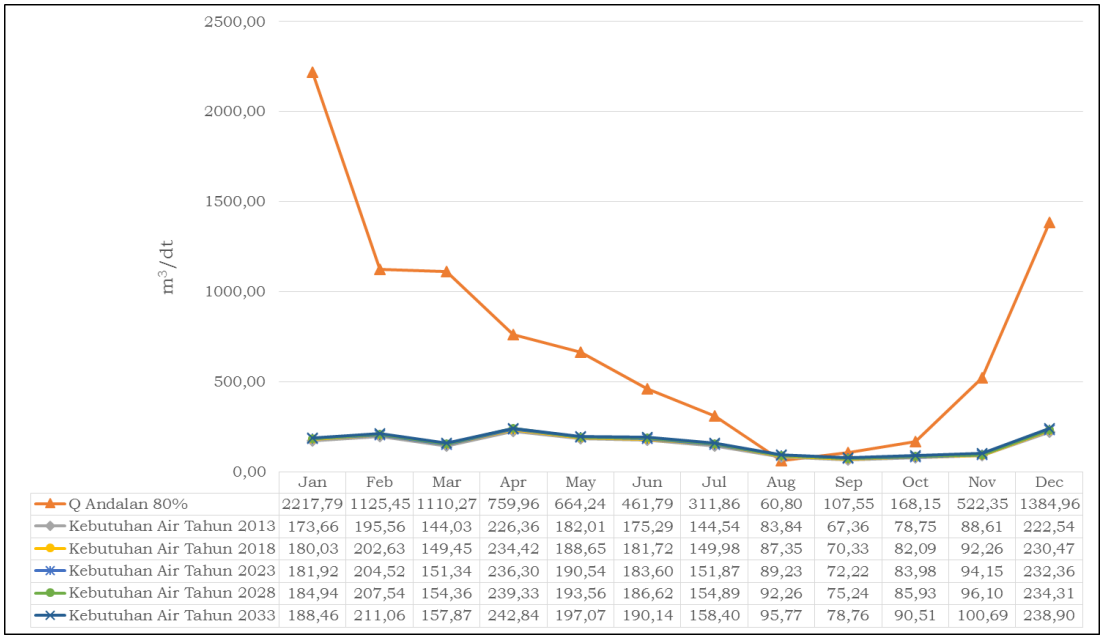

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Q Andalan 80%	2217,79	1125,45	1110,27	759,96	664,24	461,79	311,86	60,80	107,55	168,15	522,35	1384,96
Kebutuhan Air Tahun 2013	173,66	195,56	144,03	226,36	182,01	175,29	144,54	83,84	67,36	78,75	88,61	222,54
Kebutuhan Air Tahun 2018	180,03	202,63	149,45	234,42	188,65	181,72	149,98	87,35	70,33	82,09	92,26	230,47
Kebutuhan Air Tahun 2023	181,92	204,52	151,34	236,30	190,54	183,60	151,87	89,23	72,22	83,98	94,15	232,36
Kebutuhan Air Tahun 2028	184,94	207,54	154,36	239,33	193,56	186,62	154,89	92,26	75,24	85,93	96,10	234,31
Kebutuhan Air Tahun 2033	188,46	211,06	157,87	242,84	197,07	190,14	158,40	95,77	78,76	90,51	100,69	238,90

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.1. Proyeksi Neraca Air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 Skenario Ekonomi Rendah

Adapun hasil analisa keseimbangan air pada WS Jeneberang untuk skenario sedang seperti yang terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Proyeksi Neraca Air di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2013 Skenario Ekonomi Sedang

Keterangan	Tahun (m^3/dt)				
	2013	2018	2023	2028	2033
Kebutuhan Air:					
- Irigasi	122,89	126,82	130,42	130,42	130,42
- Rumah Tangga dan Perkotaan	7,84	9,26	10,93	13,71	16,99
- Industri	0,50	0,69	0,87	0,80	1,26
- Tambak	17,32	17,35	17,39	17,43	17,47
Jumlah kebutuhan Air	148,55	154,12	159,60	162,36	166,14
Ketersediaan	139,79	151,49	158,97	165,70	170,37
Q Andalan 80%	741,26	741,26	741,26	741,26	741,26

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Grafik proyeksi neraca air WS Jeneberang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2033 pada skenario ekonomi sedang ditunjukkan pada Gambar 3.2

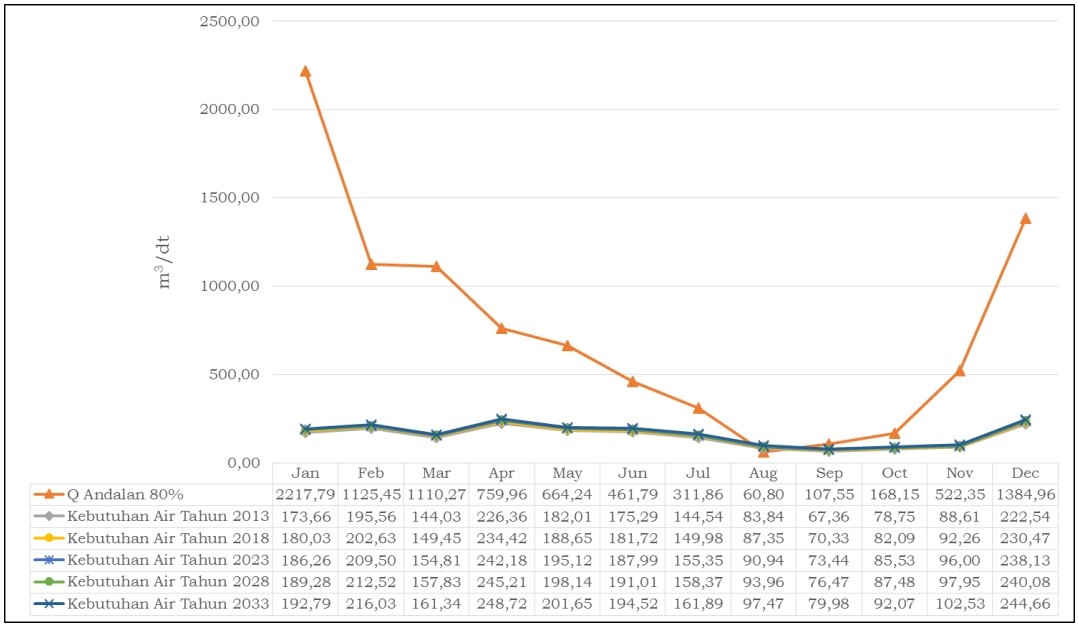

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Q Andalan 80%	2217,79	1125,45	1110,27	759,96	664,24	461,79	311,86	60,80	107,55	168,15	522,35	1384,96
Kebutuhan Air Tahun 2013	173,66	195,56	144,03	226,36	182,01	175,29	144,54	83,84	67,36	78,75	88,61	222,54
Kebutuhan Air Tahun 2018	180,03	202,63	149,45	234,42	188,65	181,72	149,98	87,35	70,33	82,09	92,26	230,47
Kebutuhan Air Tahun 2023	186,26	209,50	154,81	242,18	195,12	187,99	155,35	90,94	73,44	85,53	96,00	238,13
Kebutuhan Air Tahun 2028	189,28	212,52	157,83	245,21	198,14	191,01	158,37	93,96	76,47	87,48	97,95	240,08
Kebutuhan Air Tahun 2033	192,79	216,03	161,34	248,72	201,65	194,52	161,89	97,47	79,98	92,07	102,53	244,66

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.2. Proyeksi Neraca Air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 Skenario Ekonomi Sedang

Adapun hasil analisa keseimbangan air pada WS Jeneberang untuk skenario tinggi seperti yang terlihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Proyeksi Neraca Air di WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2013 Skenario Ekonomi Tinggi

Keterangan	Tahun (m³/dt)				
	2013	2018	2023	2028	2033
Kebutuhan Air:					
- Irigasi	122,89	126,82	141,34	151,05	152,80
- Rumah Tangga dan Perkotaan	7,84	9,26	10,93	13,71	16,99
- Industri	0,50	0,69	0,87	0,80	1,26
- Tambak	17,32	17,35	17,39	17,43	17,47
Jumlah kebutuhan Air	148,55	154,12	170,53	182,99	188,52
Ketersediaan	139,79	152,02	172,97	185,96	192,50
Q Andalan 80%	741,26	741,26	741,26	741,26	741,26

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2013

Grafik proyeksi neraca air WS Jeneberang Tahun 2012 sampai dengan 2032 pada skenario ekonomi tinggi ditunjukkan pada Gambar 3.3 berikut.

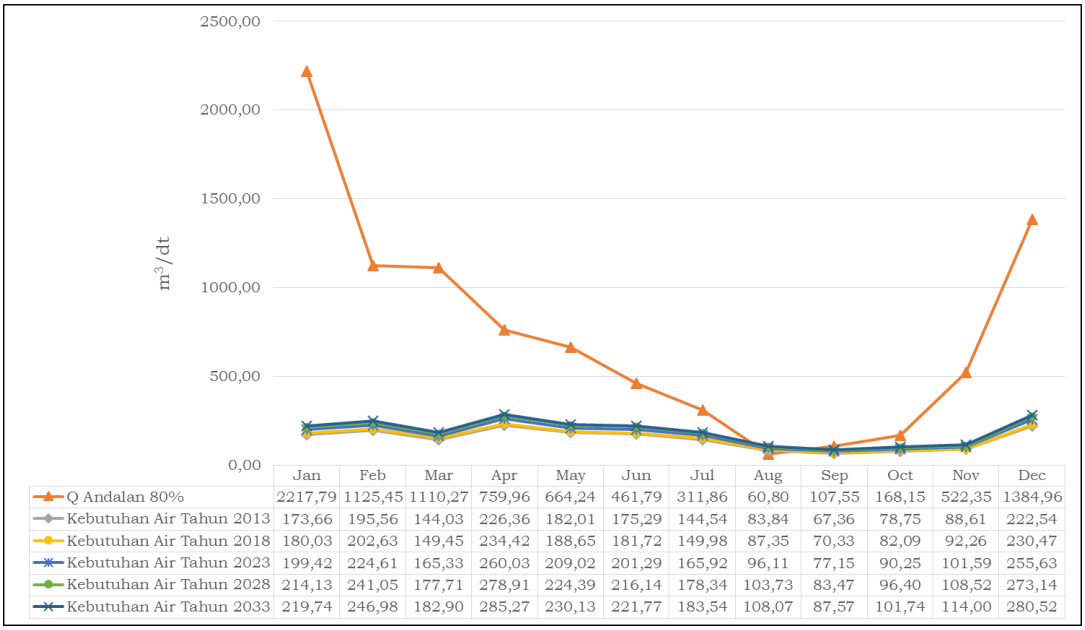

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Q Andalan 80%	2217,79	1125,45	1110,27	759,96	664,24	461,79	311,86	60,80	107,55	168,15	522,35	1384,96
Kebutuhan Air Tahun 2013	173,66	195,56	144,03	226,36	182,01	175,29	144,54	83,84	67,36	78,75	88,61	222,54
Kebutuhan Air Tahun 2018	180,03	202,63	149,45	234,42	188,65	181,72	149,98	87,35	70,33	82,09	92,26	230,47
Kebutuhan Air Tahun 2023	199,42	224,61	165,33	260,03	209,02	201,29	165,92	96,11	77,15	90,25	101,59	255,63
Kebutuhan Air Tahun 2028	214,13	241,05	177,71	278,91	224,39	216,14	178,34	103,73	83,47	96,40	108,52	273,14
Kebutuhan Air Tahun 2033	219,74	246,98	182,90	285,27	230,13	221,77	183,54	108,07	87,57	101,74	114,00	280,52

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.3. Proyeksi Neraca Air WS Jeneberang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 Skenario Ekonomi Tinggi

3.2 Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim, Grafik dan Neraca Air pada WS Jeneberang

Dalam proses penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang telah dilakukan PKM dihadiri oleh Anggota TKPSDA WS Jeneberang. Dalam forum pertemuan tersebut dapat diketahui aspek apa saja yang paling utama untuk dipecahkan bersama. Selain itu, dirumuskan juga skenario pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang di masa yang akan datang.

Skenario dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS WS Jeneberang ini didasarkan pada aspek yang paling dominan, berdasarkan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi di WS Jeneberang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai paling sedikit memuat:

a. Tujuan dan dasar pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya air;
b. Skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang pada seluruh aspek dalam pengelolaan sumber daya air;
c. Strategi pengelolaan sumber daya air; dan
d. Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi di wilayah sungai, misalnya kondisi perekonomian, perubahan iklim atau perubahan politik.

Kondisi perkonomian dimaksudkan sebagai kondisi kemampuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membiayai pembangunan bidang sumber daya air, terutama untuk memenuhi kebutuhan air baik air untuk irigasi, RKI, lingkungan, maupun keperluan lainnya.

Pengelolaan sumber daya air memerlukan dana besar, sehingga apabila pertumbuhan ekonomi rendah maka pembangunan prasarana sumber daya air pun terhambat, bahkan tidak terwujud.

Pembangunan prasarana sumber daya air memerlukan iklim yang kondusif, yaitu iklim yang mendukung investasi pihak swasta sehingga modal yang ditanamkan dapat kembali. Dalam melaksanakan pengelolaan jangka panjang perlu di antisipasi adanya dampak perubahan iklim global yang akan terjadi di masa depan, sehingga seluruh *stakeholders* wajib mengetahui hal tersebut.

Skenario Pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang disusun berdasarkan analisis terhadap:

a. tatakelola pemerintahan dan ketangguhan unit pengelola sumber daya air;
b. pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal; dan
c. perubahan iklim global.

Pengelolaan sumber daya air WS WS Jeneberang di masa depan tergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota terkait dan dukungan politik, serta aspek eksternal lainnya yaitu adanya perubahan iklim.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, disajikan melalui PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan penurunan.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, dapat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi periode 2013 sampai dengan Tahun 2033, dengan memperhitungkan target pertumbuhan ekonomi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambaran perkembangan laju pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam WS Jeneberang disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 di WS Jeneberang Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (%)			
		2009	2010	2011	2012
1	Kepulauan Selayar	7,89	8,01	8,52	9,18
2	Bulukumba	6,47	6,27	6,38	8,97
3	Bantaeng	7,61	7,90	8,43	8,49
4	Jeneponto	5,38	7,25	7,32	7,27
5	Takalar	6,58	6,85	7,34	7,40
6	Gowa	7,99	6,05	6,20	7,28
7	Sinjai	7,02	6,03	5,09	6,34
8	Maros	6,27	7,03	7,57	8,00
9	Makassar	9,20	9,83	9,65	9,88
10	Bone	7,51	7,63	6,20	8,01

Sumber: Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Dalam Angka 2013

Kajian skenario pengelolaan sumber daya air di wilayah ini didasarkan pada aspek ekonomi. Pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di WS Jenebarang relatif sama dengan pertumbuhan PDRB rata-rata di Provinsi Sulawesi Selatan. Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air diasumsikan hanya dipengaruhi oleh faktor dan kondisi ekonomi pada WS Jeneberang.

B. Tatakelola Pemerintahan

Tatakelola pemerintahan atau *governance* di WS Jenebarang dan di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat diasumsikan sebagai tatakelola yang mendukung pengelolaan sumber daya air Jenebarang, sehingga memungkinkan adanya pengembangan yang padat modal, inovatif, serta mempunyai keuntungan sosial ekonomi yang tinggi.

C. Perubahan Iklim

Perkiraan perubahan iklim yang terjadi di WS Jenebarang terbatas pada perubahan curah hujan rata-rata dimasa yang akan datang.

Sangat sulit untuk merumuskan tata kelola pemerintahan menjadi 2 kelompok yaitu *Current Trend* dan *Good Governance*. Diperlukan studi yang lebih mendalam tentang tata kelola pemerintahan tersebut untuk memberikan penilaian bahwa kondisi sekarang (*current trend*) itu lebih buruk dari *Good Governance*. Diperlukan parameter untuk menilai apakah *current trend* itu memang lebih buruk dalam pengelolaan sumber daya air saat ini.

Persoalan kedua adalah bagaimana merumuskan tata kelola pemerintahan tersebut menjadi kemampuan ekonomi untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah. Berikut skenario pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang.

1. Skenario A : Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Rendah

Skenario ini merupakan skenario proyeksi perkembangan ekonomi berdasarkan kondisi makro ekonomi yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun <5%;
b) Luasan potensial irigasi yang masih bisa dikembangkan di WS Jeneberang sebesar 7.004 ha dikembangkan dalam kurun waktu 20 tahun;
c) Kenaikan kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan rata-rata 5% per 5 tahun;
d) Upaya pemenuhan kebutuhan air secara keseluruhan didanai oleh APBN;
e) Pembangunan infrastruktur berupa intake air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing kabupaten/kota di WS Jeneberang; dan

f) Pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku dengan dibangunnya Bendungan Karalloe.

Konsep pengembangan skenario pada skala pertumbuhan ekonomi rendah:

1) Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti *gully plug*, terasering bekerja sama dengan masyarakat;
2) Menyusun Peraturan pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan dan penetapan batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk sesuai kewenangannya;
3) Membangun *Check Dam*/system sabo pada DAS Jeneberang dan DAS Kelara Karaloe;
4) Pengerukan sedimen (DAS Jeneberang dan DAS Kelara Karaloe);
5) Pengerukan Waduk Bili-bili;
6) Pembangunan sistem telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System* di DAS Jeneberang;
7) Survai dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis;
8) Pembangunan pengaman abrasi pantai di Pantai Galesong (Kabupaten Takalar), Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, (Kabupaten Takalar), Pantai Maros Kabupaten Maros;
9) Membangun embung di tiap kabupaten/kota, diantaranya embung Panrangnuangku Kabupaten Takalar, Embung Batu Lohe di Kabupaten Bulukumba, Embung Malela di Kabupaten Takalar, Embung Allu di Kabupaten Jeneponto, Embung Kampala di Kabupaten Bantaeng;
10) Pembangunan Bendungan Karallo;
11) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
12) Rehabilitasi Daerah Irigasi Kalamisu Kabupaten Sinjai, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pammukkulu Kabupaten Takalar, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros, Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa, Daerah Irigasi Lekopancing Kabupaten Maros, Saluran Sekunder Bijawang Jaringan Irigasi Bontomanai, Daerah Irigasi Bayang-Bayang, Daerah Irigasi Bontomanai;
13) Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal);
14) Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan

Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/Tanjung Bunga;

15) Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata; Tammangapa di Kota Makassar;

16) SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Tallo, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang;

17) Pembangunan PLTA Karaloe;

18) Pengendalian Banjir Sungai Pappa, Sungai Tamanroya Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Sungai Bua-Bua Kabupaten Selayar, Sungai Bialo Kabupaten Bantaeng, Sungai Mare-Mare Kabupaten Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase;

19) Perbaikan Tanggul dan Normalisasi saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar;

20) Pengendalian Banjir Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar;

21) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan kemampuan tenaga Sumber Daya Manusia.

Kondisi perekonomian nasional relatif tumbuh lambat (<5,5%) dan kapasitas pengelolaan unit pengelola sumber daya air di daerah yang lemah, sehingga mengakibatkan tidak adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektor di daerah. Program dan upaya pengelolaan sumber daya air akan terbatas pada kegiatan OP prasarana sumber daya air. Berdasarkan asumsi tersebut, maka usaha pemenuhan suplai air pada skenario ekonomi rendah disajikan pada Gambar 3.4.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.4. Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Rendah

2. Skenario B : Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Sedang

Skenario kedua ini merupakan proyeksi perkembangan ekonomi berdasarkan kondisi makro ekonomi saat ini. Adapun kriteria dasar yang dipakai dalam skenario berikut adalah :

a) Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun 5% - 6,5%;
b) Luasan potensial irigasi yang masih bisa dikembangkan di WS Jeneberang sebesar 13.434 ha dikembangkan dalam kurun waktu 20 tahun;
c) Kenaikan kebutuhan air rumah tangga dan perkotaan rata-rata 6,5% per 5 tahun;
d) Upaya pemenuhan kebutuhan air sebagian besar didanai oleh APBN dan sedikit dari APBD;
e) Pembangunan infrastruktur berupa intake air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing kabupaten/kota di WS Jeneberang; dan
f) Pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku dengan dibangunnya Bendungan Karalloe dan Bendungan Pamukkulu.

Konsep pengembangan skenario pada skala pertumbuhan ekonomi sedang:

1) Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti *gully plug*, terasering bekerja sama dengan masyarakat;
2) Menyusun Peraturan pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan dan penetapan batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk sesuai kewenangannya;
3) Membangun *Check Dam* atau sistem sabo pada DAS Tamanroya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros;
4) Pengerukan sedimen (DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros);
5) Pengerukan Waduk Bili-bili;
6) Pembangunan sistem telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System* di DAS Jeneberang;
7) Pembangunan *Chek Dam* Mangottong 2 Kabupaten Sinjai;
8) Survai dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis;
9) Pembangunan pengaman abrasi pantai di Pantai Galesong (Kabupaten Takalar), Pantai Cabodo, (Kabupaten Bantaeng), Pantai Kota Benteng, (Kabupaten Selayar), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Bahari, Pantai Tino (Kabuapaten Jeneponto), Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, (Kabupaten Bulukumba), Pantai Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai

Jeneberang, Pantai Mangindara, (Kabupaten Takalar), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros;

10) Membangun embung di tiap kabupaten/kota, diantaranya Embung Panrangnuangku Kabupaten Takalar, Embung Batu Lohe di Kabupaten Bulukumba, Embung Malela di Kabupaten Takalar, Embung Allu di Kabupaten Jeneponto, Embung Kampala di Kabupaten Bantaeng;
11) Pembangunan Bendungan Karaloe dan Bendungan Pamukkulu.
12) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
13) Rehabilitasi Daerah Irigasi Kalamisu Kabupaten Sinjai, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pammukkulu Kabupaten Takalar, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros, Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa, Daerah Irigasi Lekopancing Kabupaten Maros, Saluran Sekunder Bijawang Jaringan Irigasi Bontomanai, Daerah Irigasi Bayang-Bayang, Daerah Irigasi Bontomanai;
14) Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal);
15) Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/Tanjung Bunga;
16) Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata; Tammangapa di Kota Makassar;
17) SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Tallo, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang;
18) Pembangunan PLTA Karaloe dan PLTA Pamukkulu;
19) Pengendalian Banjir Sungai Pappa, Sungai Tamanroya Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Sungai Bua-Bua Kabupaten Selayar, Sungai Bialo Kabupaten Bantaeng, Sungai Mare-Mare Kabupaten Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase;
20) Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kabupaten Jeneponto;
21) Perbaikan Tanggul dan Normalisasi saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar;
22) Pengendalian Banjir Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar;

23) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan kemampuan tenaga Sumber Daya Manusia.

Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat (>6,5%) namun terdapat unit pengelola sumber daya air di daerah yang sedang. Unit pengelola sumber daya air yang tidak kuat menyebabkan tujuan pengelolaan sumber daya air sulit dicapai karena kurangnya jaringan kelembagaan, koordinasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka usaha pemenuhan suplai air pada skenario ekonomi sedang disajikan pada Gambar 3.5.

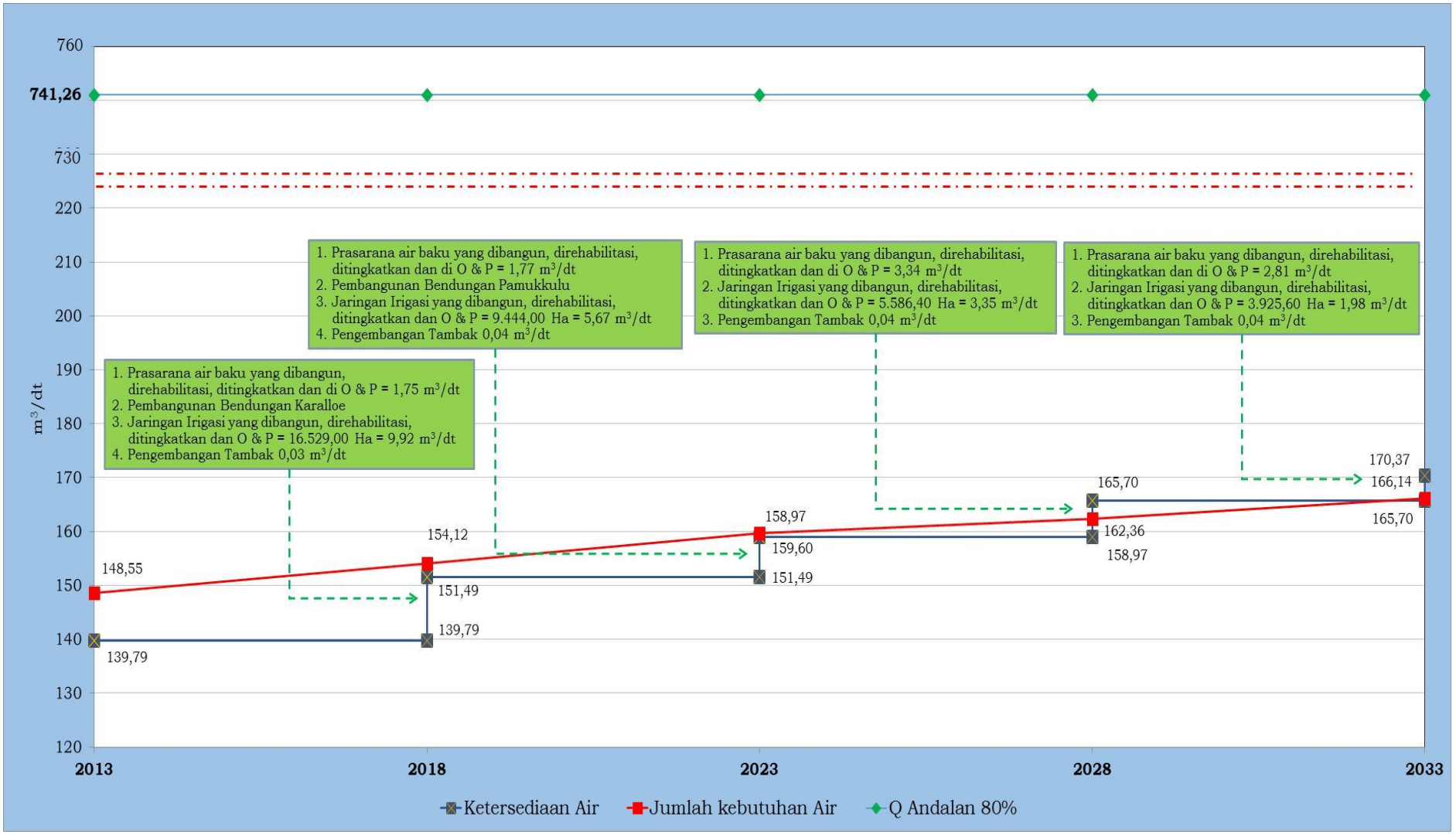

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.5. Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Sedang

3. Skenario C : Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Tinggi

Skenario ketiga ini merupakan proyeksi perkembangan ekonomi berdasarkan kondisi makro ekonomi saat ini. Adapun kriteria dasar yang dipakai dalam skenario berikut adalah :

a) Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun >6,5%
b) Luasan potensial irigasi yang masih bisa dikembangkan di WS Jeneberang sebesar 53.597 Ha dikembangkan dalam kurun waktu 20 tahun.
c) Kenaikan kebutuhan air non domestik rata-rata 10% per 5 tahun.
d) Upaya pemenuhan kebutuhan air didanai oleh APBN dan APBD.
e) Pembangunan infrastruktur berupa intake air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masing-masing kabupaten/kota di WS Jeneberang; dan
f) Pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air baku dengan dibangunnya Bendungan Karalloe, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Jenelata, Bendungan Bontosunggu, Bendungan Posi, Bendungan Cinemabella, dan Bendungan Bontojaya.

Konsep pengembangan skenario pada skala pertumbuhan ekonomi tinggi:

1) Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti *gully plug*, terasering bekerja sama dengan masyarakat;
2) Menyusun Peraturan pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan dan penetapan batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk sesuai kewenangannya;
3) Membangun Check Dam/system sabo pada DAS Tamanroya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros, DAS Pappa, DAS Puncara, DAS Sinjai, DAS Tallo, DAS Toppa);
4) Pengerukan sedimen (DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros, DAS Pappa, DAS Puncara, DAS Sinjai, DAS Tallo, DAS Toppa);
5) Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang;
6) Pengerukan Waduk Bili-bili;
7) Pembangunan sistem telemetri Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System di DAS Jeneberang;
8) Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kabupaten Sinjai, Eremata, Jene Attaburru dan Bodak;
9) Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis;

10) Pembangunan pengaman abrasi pantai di Pantai Galesong (Kabupaten Takalar), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkaninong (Kabupaten Bantaeng), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke (Kabupaten Selayar), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Patton-tongan, Pantai Bahari, Pantai Tino (Kabuapaten Jeneponto), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng (Kabupaten Bulukumba), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi (Kabupaten Takalar), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros;

11) Membangun embung di tiap kabupaten/kota diantaranya Embung Panrangnuangku Kabupaten Takalar, Embung Batu Lohe di Kabupaten Bulukumba, Embung Malela di Kabupaten Takalar, Embung Allu di Kabupaten Jeneponto, Embung Kampala di Kabupaten Bantaeng, Embung Bukit Harapan di Kabupaten Bulukumba, Embung Konservasi Lembang-Lembang Kabupaten Selayar, Embung Konservasi Puca Kabupaten Maros, Embung Konservasi Binanga Nipa Kabupaten Selayar, Embung Konservasi Binanga Parra, Embung Konservasi Lembang-Lembang;

12) Pembangunan Bendungan Karalloe, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Jenelata, Bendungan Bontosunggu, Bendungan Posi, Bendungan Cinemabella, dan Bendungan Bontojaya;

13) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;

14) Rehabilitasi Daerah Irigasi Kalamisu Kabupaten Sinjai, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pammukkulu Kabupaten Takalar, Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros, Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa, Daerah Irigasi Lekopancing Kabupaten Maros, Saluran Sekunder Bijawang Jaringan Irigasi Bontomanai, Daerah Irigasi Bayang-Bayang, Daerah Irigasi Bontomanai;

15) Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal);

16) Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu;

17) Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata; Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar;

18) SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang;

19) Pembangunan PLTA Kelara Karaloe, PLTA Bontosunggu, PLTA Jenelata dan PLTA Pamukkulu;

20) Pengendalian Banjir Sungai Pappa, Sungai Tamanroya Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Sungai Bua-Bua Kabupaten Selayar, Sungai Bialo Kabupaten Bantaeng, Sungai Mare-Mare Kabupaten Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase;

21) Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kabupaten Jeneponto;

22) Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kabupaten Gowa, saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar;

23) Pengendalian Banjir Sungai Balantieng Kabupaten Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Sungai Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar, Sungai Taroang dan muara Sungai Tamanroya Kabupaten Jeneponto, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Sungai Bialo Kabupaten Bulukumba, Sungai Bampang dan Sungai Bijawang Kabupaten Bulukumba;

24) Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air dan kemampuan tenaga Sumber Daya Manusia.

25) Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat (>6,5%) dan unit pengelola sumber daya air di daerah yang kuat pula. Dalam pengelolaan sumber daya air akan terjadi perubahan dan inovasi, memungkinkan adanya pengembangan yang padat

modal dan keuntungan sosial ekonomi tinggi. Dalam Skenario ini akan memungkinkan terjadinya pengembangan infrastruktur baru. Pengembangan akan menarik walaupun berisiko tinggi dan berdasarkan atas rencana pengembangan strategis jangka panjang. Berdasarkan asumsi tersebut, maka usaha pemenuhan suplai air pada skenario ekonomi tinggi disajikan pada Gambar 3.6. Adapun skema sistem sungai di WS Jeneberang dalam rangka upaya pemenuhan ketersediaan air di WS Jeneberang tahun 2013 sampai dengan Tahun 2033 ditampilkan dalam Gambar 3.7

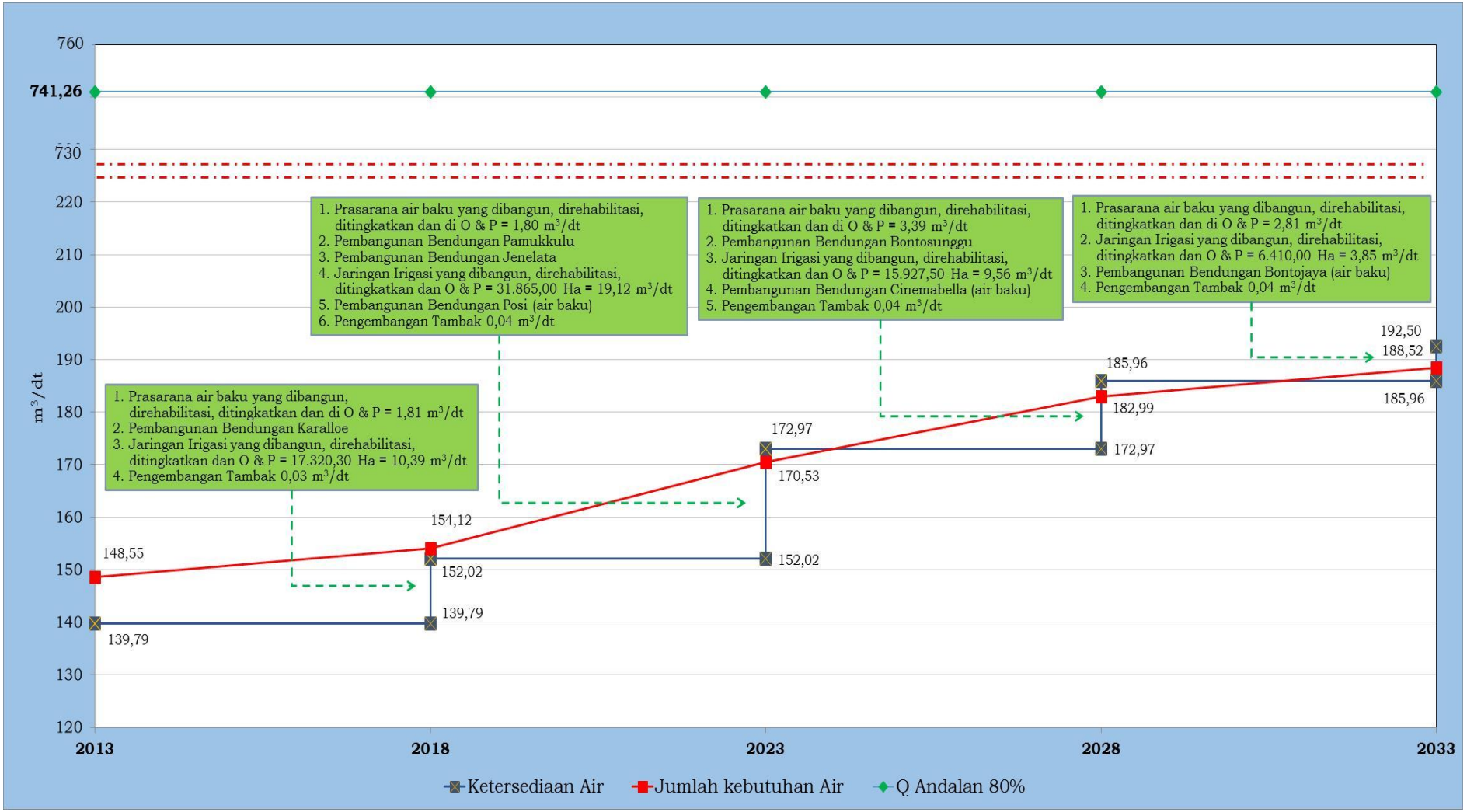

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.6. Skenario Pengelolaan Sumber Daya Air Ekonomi Tinggi

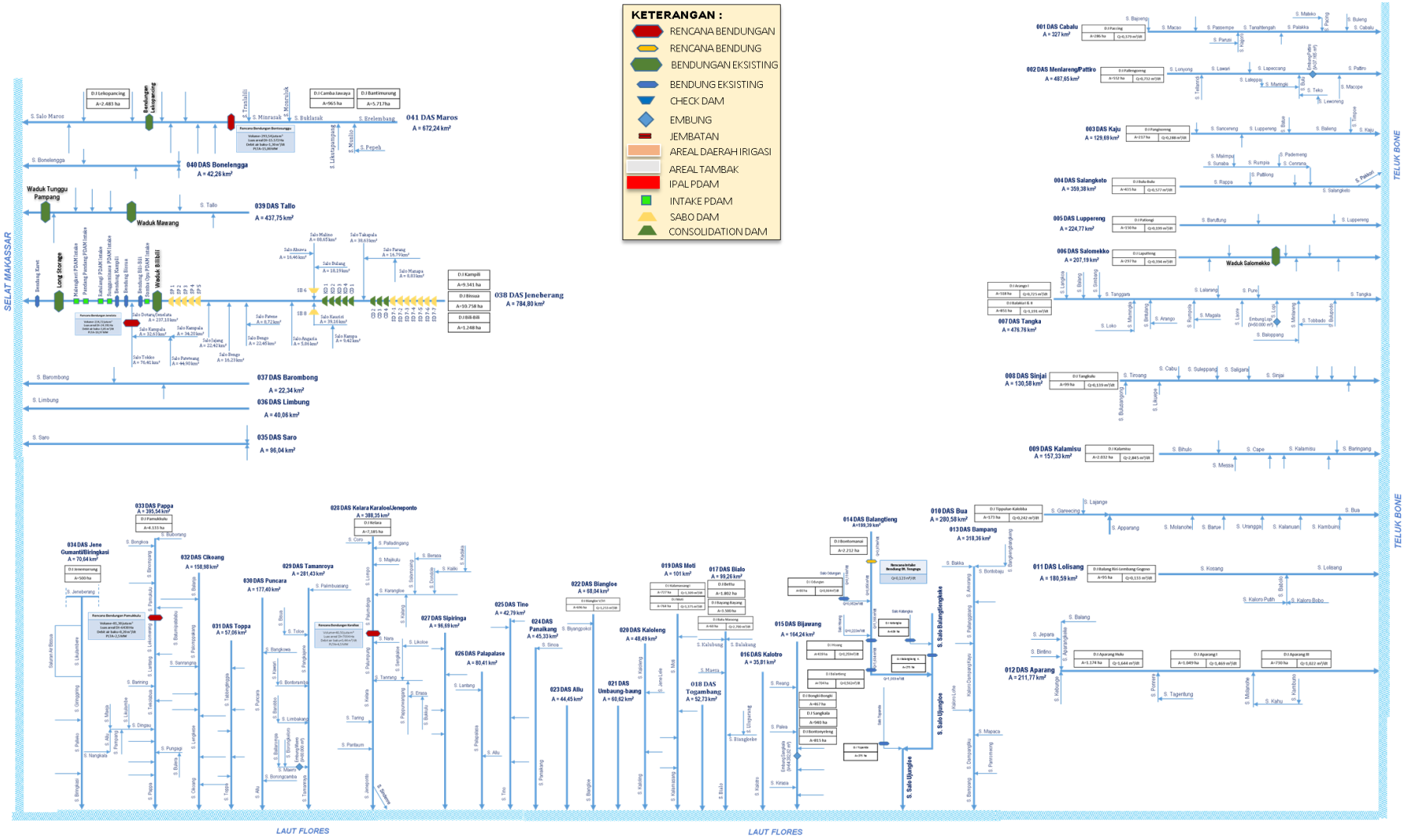

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2013

Gambar 3.7. Skema Sistem Sungai WS Jeneberang Rencana

3.3 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang

Strategi pengelolaan sumber daya air akan dikelompokkan berdasarkan aspek konservasi sumber daya air, aspek pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, aspek sitem informasi sumber daya air dan aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha.

3.3.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Strategi pola pengelolaan sumber daya air pada aspek konservasi sumber daya air di WS Jeneberang diperinci berdasarkan sub-sub aspek, yaitu perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air.

1. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air

a) Meningkatkan kegiatan reboisasi kawasan hutan, khususnya kawasan hutan kritis dan yang potensi permudaannya kurang;

b) Membuat bangunan pengendali erosi dan sedimen;

c) Mensosialisasikan peraturan sempadan sungai dan sumber air;

d) Membangun dan mengembangkan agroforestry;

e) Menetapkan kebijakan zona pengambilan air dari mata air;

f) Menetapkan persyaratan baku mutu limbah cair (kadar dan beban) melalui Peraturan Daerah;

g) Sinkronisasi implementasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, dalam pelestarian Wilayah Sungai Jeneberang; dan

h) Memberlakukan sanksi bagi pelanggar dan pemberian penghargaan bagi yang berjasa atau berprestasi dalam kegiatan konservasi.

2. Pengawetan Air

a) Melakukan pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pengaturan sistem pembagian air irigasi secara berkeadilan;

b) Kampanye gerakan hemat air;

c) Merehabilitasi sarana dan prasarana irigasi yang telah ada;

d) Mengatur pemanfaatan air tanah secara efisien;

e) Melakukan pengaturan dan pengendalian pengambilan/ pemanfaatan air bawah tanah melalui Peraturan Daerah;

f) Penerapan *System Rice of Intensification* yang selanjutnya disebut SRI; dan

g) Pembangunan Bendungan.

3. Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air

a) Sosialisasi kegiatan pengendalian kualitas air;

b) Melakukan pengolahan limbah industri, rumah sakit, hotel, dan domestik secara indvidu atau terpusat;

c) Memonitoring dan evaluasi kualitas air Wilayah Sungai Jeneberang dan sumber pencemar yang masuk ke sungai secara periodik;

d) Menetapkan persyaratan baku mutu limbah cair (kadar dan beban) yang disesuaikan dengan kondisi setempat; dan

e) Audit lingkungan.

3.3.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air

Strategi pendayagunaan sumber daya air di WS Jeneberang diperinci berdasarkan sub-sub aspek sebagai berikut:

1. Penatagunaan Sumber Daya Air

a) Melakukan penataan kawasan lindung dan budidaya dengan porsi 30% kawasan hutan;

b) Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air dan Peruntukan Air;

c) Melakukan pengendalian untuk pemanfaatan air secara efisien; dan

d) Penetapan kawasan sempadan sungai.

2. Penyediaan Sumber Daya Air

a) Pembangunan bendungan, bendung dan embung di DAS-DAS yang berpotensi di Wilayah Sungai Jeneberang;

b) Melakukan peningkatan penyediaan air bersih oleh PDAM untuk keperluan rumah tangga perkotaan dan industri;

c) Suplesi air minum pedesaan;

d) Melakukan pengembangan PDAM dan pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS dan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disebut SPAM IKK; dan

e) Melakukan pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

3. Penggunaan Sumber Daya Air

a) Menetapkan Perda penggunaan sumber daya air sesuai kebutuhan dan skala prioritas;

b) Operasi dan Pemeliharaan (O&P) penggunaan air;

c) Melakukan pengembangan dan pemanfaatan air hasil daur ulang; dan

d) Memanfaatkan air baku sungai-sungai di Wilayah Sungai Jeneberang untuk berbagai kebutuhan.

4. Pengembangan Sumber Daya Air

a) Rehabilitasi jaringan irigasi;

b) Peningkatan biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&P); dan

c) Mengendalikan penggunaan air tanah.

5. Pengusahaan Sumber Daya Air

a) Menyusun pedoman biaya jasa pengelolaan sumber daya air;

b) Melakukan pengembangan air baku untuk usaha industri, dan lain sebagainya; dan

c) Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH.

3.3.3 Pengendalian Daya Rusak Air

Strategi pengendalian daya rusak di Wilayah Sungai Jeneberang diperinci berdasarkan sub-sub aspek sebagai berikut:

1. Pencegahan Bencana Alam

a) Menyusun pedoman pengendalian banjir;

b) Mempercepat pembangunan sarana pengendalian banjir, khususnya di daerah rawan banjir;

c) Pengadaan dan optimalisasi sarana peringatan dini;

d) Melakukan perlindungan tebing sungai dengan tanaman; dan

e) Membuat terasering pada lereng di daerah yang berpotensi longsor.

2. Penanggulangan Dampak Bencana Alam

a) Menyediakan fasilitas mitigasi bencana;

b) Pembangunan tanggul dan bangunan pengendali banjir lainnya;dan

c) Inventarisasi dan penanggulangan abrasi serta pantai kritis.

3. Pemulihan Daya Rusak Air

Rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana sumber daya air.

3.3.4 Sistem Informasi Sumber Daya Air

Strategi yang dapat dilakukan untuk menyusun sistem informasi sumber daya air antara lain adalah:

a. Pengelola sumber daya air di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas terkait lainnya wajib mengikuti norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan sistem informasi;

b. Updating data dan informasi secara periodik dalam rangka menjaga keakuratan data dan informasi sumber daya air;

c. Akses terhadap informasi sumber daya air yang bersifat khusus, misalnya peta sumber daya air skala besar, peta cekungan air tanah skala besar, dan informasi sebagai analisis data yang memerlukan keahlian khusus dapat dikenakan biaya jasa penyediaan informasi sumber daya air; dan

d. Badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air.

3.3.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengelolaan sumber daya air antara lain:

a. melakukan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sempadan sungai, dan mata air, melalui program mata pencaharian alternatif dan optimalisasi Lembaga Adat;

b. menata hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup;

c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air;

d. membentuk Dewan Sumber Daya Air;

e. menggerakkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk melestarikan dan meningkatkan mutu hutan beserta lingkungan secara berkelanjutan;

f. membina kemitraan dalam pengelolaan hutan antara pemerintah, masyarakat dan swasta;

g. membangun kelembagaan yang bergerak di bidang konservasi tanah dan air dalam rangka pelestarian sumber daya air Wilayah Sungai Jeneberang yang difasilitasi pemerintah;

h. melibatkan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sumber daya air; dan

i. memberdayakan kelompok-kelompok penyuluhan yang telah ada.

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS JENEBERANG

Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air merupakan arahan pokok untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air yang telah ditentukan. Skenario penentuan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air dipengaruhi oleh kondisi skenario pertumbuhan ekonomi baik rendah, sedang, maupun tinggi, serta faktor kondisi politik dan perubahan iklim.

Skenario yang masih akan dikaji pada penyusunan pola pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

1) perubahan iklim masih dikaji diseluruh dunia antara lain akibat kenaikan muka air laut dan perubahan pola hujan di suatu wilayah sungai dan masih perlu di evaluasi pada 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
2) perubahan kondisi politik: pengaruhnya tidak dapat diprediksikan, meskipun dukungan politik (misalnya dukungan dari Pemerintah Daerah) sangat diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, terutama aspek organisasi.

Kebijakan operasional tersebut disusun untuk setiap pilihan strategi berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi rendah (skenario 1), pertumbuhan ekonomi sedang (skenario 2) dan pertumbuhan ekonomi tinggi (skenario 3).

Kebijakan Operasional dalam pengelolaan sumber daya air menurut skenario dan strategi jangka pendek, menengah dan panjang ditampilkan dalam bentuk matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang skenario ekonomi rendah ditampilkan dalam Tabel 4.1, matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang skenario ekonomi sedang ditampilkan dalam Tabel 4.2 dan matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang skenario ekonomi tinggi ditampilkan dalam Tabel 4.3. Masing-masing matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air memuat:

1) strategi untuk masing-masing skenario;
2) kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi;
3) stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan masing-masing strategi; dan
4) instansi yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, dari hasil matrik kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam peta tematik setiap aspek pengelolaan untuk masing-masing skenario. Peta tematik pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang

skenario ekonomi rendah dapat dilihat pada Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.5. Peta tematik pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang skenario sedang dapat dilihat pada Gambar 4.6 sampai dengan Gambar 4.10 dan Peta tematik pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang skenario ekonomi tinggi dapat dilihat pada Gambar 4.11 sampai dengan Gambar 4.15.

Tabel 4.1. Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang (Skenario Ekonomi Rendah)

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
I. Konservasi Sumber Daya Air								
1.	Perlindu-ngan Dan Pelestarian Sumber Air	Fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan berkurang, terdapat lahan kritis: - DAS Jeneberang 219,74 km^2 - DAS Pappa 194,63 km^2 - DAS Kelara Karaloe 95,20 km^2 - DAS Tangka 87,43 km^2 dan DAS lainnya	Terlaksana-nya konservasi lahan kritis pada DAS di WS Jeneberang	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 100% - Kritis 20% - Agak kritis 40% - Potensial kritis 60% - Monitoring pelaksanaan - Penataan kawasan dan pengaturan bercocok tanam	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 100% - Kritis 60% (kumulatif) - Agak kritis 70% (kumulatif) - Potensial kritis 90% (kumulatif) - Monitoring pelaksanaan dan mempertahankan lahan yang telah direhabilitasi - Penataan kawasan dan pengaturan bercocok tanam	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 100% - Kritis 100% (kumulatif) - Agak kritis 100% (kumulatif) - Potensial kritis 100% (kumulatif) - Monitoring pelaksanaan dan mempertahankan lahan yang telah direhabilitasi - Penataan kawasan dan pengaturan bercocok tanam	- Konservasi lahan kritis dilakukan secara berkelanju-tan dan pelibatan peran serta masyara-kat	Dinas Kehutanan Provinsi SulSel/Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, Sinjai , BP DAS Jeneberang, BBWS Pompengan Jeneberang, dan Kelompok masyarakat
		Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan tidak sesuai kaidah konservasi, menyebabkan	Pemanfaa-tan lahan di luar kawasan hutan sesuai dengan kaidah	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 20% lahan - Pembuatan bangunan	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 60% kumulatif luas lahan	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 100% kumulatif luas lahan - Pembuatan bangunan	Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan harus sesuai dengan	Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, Sinjai,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		meningkatnya kekritisan lahan, terutama di Kab. Gowa (3.039 km^2 tahun 2003 menjadi 3.118 km^2 tahun 2010)	konservasi	konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat - Revegetasi lahan 1000 ha.	- Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat - Revegetasi lahan 2000 ha.	konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat - Revegetasi lahan 3000 ha.	kaidah konservasi lahan	BP DAS Jeneberang, BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas Pertanian Prov. Sulsel dan Kelompok masyarakat
		Belum ada penetapan batas maupun peruntukan sempadan sungai dan waduk	Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk diterbitkan	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk - Sosialisasi dan menerapkan Perda	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk - Sosialisasi Perda - Penerapan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda	Penerbitan Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai dan Bone, BBWS Pompengan Jeneberang, Bappeda Provinsi Sulsel, Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai dan Bone.
		Masih terbatasnya ruang terbuka hijau di perkotaan (masih < 30% luas ruang) khususnya Kota Makassar	Minimum 30% ruang terbuka hijau dapat terpenuhi	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau di tiap kabupaten/kota sesuai RTRW yang disusun - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau di tiap kabupaten/kota sesuai RTRW yang disusun - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau tiap kabupa-ten/kota sesuai RTRW - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri	Peningkatan luas ruang terbuka hijau	Dinas PSDA, Bappeda, Pemda Provinsi Sulsel, Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau	masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau - Pemantauan sistem pemberian insentif	yang meningkatkan ruang terbuka hijau - Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif secara berkelanjutan		Selayar, Sinjai dan Bone, BPN Prov. Sulsel dan masyarakat
		Terjadi kerusakan morfologi sungai akibat penambangan galian mineral non logam di Sungai Jeneberang (Hilir Bendungan Bili Bili), di Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, Kec. Pallanga, Bontomarannu, Bontonompo dan Parangloe Kab. Gowa, Kec. Manggala Kota Makassar dan Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai	Pengambi-lan galian mineral non logam terkendali	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pembentukan kelompok para penambang dan mengarahkan kegiatannya pada lokasi yang sesuai dan aman dilengkapi dengan ijin penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pembentukan kelompok para penambang dan pengarahan kegiatan pada lokasi yang sesuai dan aman dilengkapi dengan ijin penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar - Evaluasi semua kegiatan penambangan sesuai dengan kondisi lingkungan sungai	Penyiapan lokasi yang sesuai untuk galian mineral non logam	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Gowa, Sinjai , BBWS Pompengan Jeneberang, Bapedalda Provinsi Sulsel, Kab. Gowa dan Sinjai, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel, Kab. Gowa dan Sinjai

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Potensi sedimentasi total WS Jeneberang sebanyak 83,76 ton/ha/tahun (DAS Taman Roya 6,85 ton/ha/tahun, DAS Jeneberang 25,62 ton/ha/tahun, DAS Kelara/Karaloe 4,39 ton/ha/tahun, DAS Maros 4,68 ton/ha/tahun, DAS Pappa 4,95 ton/ha/tahun, DAS Puncara 2,63 ton/ha/tahun, DAS Sinjai 5,63 ton/ha/tahun, DAS Tallo 3,22 ton/ha/tahun, DAS Toppa 2,20 ton/ha/tahun)	Sedimentasi dapat terkendali	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System - Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kab. Sinjai - Pembangunan check dam pengendali diseluruh WS Jeneberang terutama di DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, dan DAS Sinjai. - Pengerukan sedimen diseluruh WS Jeneberang terutama di DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, dan DAS Sinjai. - Pembangunan Dam Pengendali Sedimen diseluruh WS Jeneberang terutama di Sungai Eremata, Sungai Jene Attaburru, Sungai Bodak, Sungai Jene Rakikang, Sungai Mangottong, Sungai Malino, Sungai Kausisi. - Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Kab.Gowa.	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System - Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kab. Sinjai - Pembangunan check dam pengendali diseluruh WS Jeneberang terutama di DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, DAS Sinjai, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros dan DAS Pappa. - Pengerukan sedimen diseluruh WS Jeneberang terutama di DAS Taman Roya, DAS Sinjai, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros dan DAS Pappa. - Pembangunan Dam Pengendali Sedimen diseluruh WS Jeneberang terutama di Sungai Eremata, Sungai Jene Attaburru, Sungai Bodak, Sungai Jene Rakikang, Sungai Mangottong, Sungai Malino, Sungai Kausisi. - Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Kab.Gowa.	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System - Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kab. Sinjai - Pembangunan check dam pengendali diseluruh WS Jeneberang terutama di DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros, DAS Pappa, DAS Puncara, DAS Sinjai, DAS Tallo, DAS Toppa. - Pengerukan sedimen diseluruh WS Jeneberang terutama di DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros, DAS Pappa, DAS Puncara, DAS Sinjai, DAS Tallo, DAS Toppa. - Pembangunan Dam Pengendali Sedimen diseluruh WS Jeneberang terutama di Sungai Eremata, Sungai Jene Attaburru, Sungai Bodak, Sungai Jene Rakikang, Sungai Mangottong, Sungai Malino, Sungai Kausisi. - Pengendalian Sedimen Bawakaraeng Kab.Gowa.	Pengurangan sedimentasi	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Gowa, Maros, Jeneponto, Takalar, Sinjai, kota Makassar, BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Kab. Gowa, Maros, Jeneponto, Takalar, Sinjai, kota Makassar, BPDAS Jeneberang, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Gowa, Maros, Jeneponto, Takalar, Sinjai, kota Makassar.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Abrasi dan pantai kritis yang tersebar di Kabupaten Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Makassar, Jeneponto dan Maros	Terlindung-nya kawasan pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 20% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkani-nong (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Patton-tongan, Pantai Bahari, Pantai Tino (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 60% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkani-nong (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Patton-tongan, Pantai Bahari, Pantai Tino (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati,	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 100% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkaninong (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Pattontongan, Pantai Bahari, Pantai Tino (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng (**Kab. Bulukumba**),	Pelindungan kawasan pantai secara berkelanju-tan	Dinas PSDA Provinsi Sulsel Kab. Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros, Bone, BBWS Pompengan Jeneberang, Bappeda Provinsi Sulsel Kab. Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros, Bone.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng (**Kab. Bulukumba**), Pantai Pala'lakang, Pantai Bontosunggu, Pantai Kaluku Bodo, Pantai Kampung Takalar lama, Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Kurilompoa - Kec. Marusu, Nisobalia Pantai Maros (**Kabupaten Maros**), TPI Paotere - Kecamatan Ujung Tanah, Pantai Maccini Sombala - Kecamatan Tamalate - Revitalisasi Pantai Plaza COI Kota Makassar**,** Pantai Pajukkukang Kab. Takalar**,** Pantai Kuri Kab. Maros - Pembuatan tanggul pengaman pantai di Kab. Selayar - Rehabilitasi Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Bonehalang Kab. Kep Selayar, Pantai Cikoang Kab. Takalar, Pantai Bantaeng Kab. Bantaeng, Pantai Batangmata Kab. Kep Selayar, Pantai Bangkala Kab. Jeneponto, Pantai Tile-Tile Kab. Kep Selayar, Pantai Takalar Kab. Takalar.	Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros - Revitalisasi Pantai Plaza COI Kota Makassar**,** Pantai Pajukkukang Kab. Takalar**,** Pantai Kuri Kab. Maros - Pembuatan tanggul pengaman pantai di Kab. Selayar - Rehabilitasi Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Bonehalang Kab. Kep Selayar, Pantai Cikoang Kab. Takalar, Pantai Bantaeng Kab. Bantaeng, Pantai Batangmata Kab. Kep Selayar, Pantai Bangkala Kab. Jeneponto, Pantai Tile-Tile Kab. Kep Selayar, Pantai Takalar Kab. Takalar.	Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros - Revitalisasi Pantai Plaza COI Kota Makassar**,** Pantai Pajukkukang Kab. Takalar**,** Pantai Kuri Kab. Maros - Pembuatan tanggul pengaman pantai di Kab. Selayar - Rehabilitasi Bangunan Pengaman Abrasi Pantai Bonehalang Kab. Kep Selayar, Pantai Cikoang Kab. Takalar, Pantai Bantaeng Kab. Bantaeng, Pantai Batangmata Kab. Kep Selayar, Pantai Bangkala Kab. Jeneponto, Pantai Tile-Tile Kab. Kep Selayar, Pantai Takalar Kab. Takalar.		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
2.	Pengawetan Air	Ketersediaan air permukaan masih terbatas (volume tampungan 4,91 milyar m^3) dan masih banyak air mengalir ke laut pada saat musim penghujan	Optimalisa-si potensi ketersedia-an air	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 10 embung di tiap kabupaten/kota - Peningkatan biaya O & P sampai 40% OP normal - Pembangunan waduk/embung di seluruh WS Jeneberang terutama Waduk Kelara, Waduk Bonto-sunggu, Waduk Tunggu Nipanipa, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba, Bendung Gerak di Kab. Jeneponto, Embung Malela di Kab. Takalar, Embung Allu di Kab. Jeneponto, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Kampala di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba, Embung Konservasi Lembang-Lembang Kab. Selayar, Embung Konservasi Puca Kab. Maros, Embung Konservasi Binanga Nipa Kab. Selayar, Embung Konservasi Binanga Parra, Embung Konservasi Lembang-Lembang, Embung air baku Salassae Kab. Bulukumba, Embung air baku oddungan Kab. Bulukumba.	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 10 embung di tiap kabupaten/kota - Peningkatan biaya O & P sampai 70% OP normal - Pembangunan waduk/embung di seluruh WS Jeneberang terutama Waduk Kelara, Waduk Bonto-sunggu, Waduk Tunggu Nipanipa, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba, Bendung Gerak di Kab. Jeneponto, Embung Malela di Kab. Takalar, Embung Allu di Kab. Jeneponto, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Kampala di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba, Embung Konservasi Lembang-Lembang Kab. Selayar, Embung Konservasi Puca Kab. Maros, Embung Konservasi Binanga Nipa Kab. Selayar, Embung Konservasi Binanga Parra, Embung Konservasi Lembang-Lembang, Embung air baku Salassae Kab. Bulukumba, Embung air baku oddungan Kab. Bulukumba.	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 10 embung di tiap kabupaten/kota - Peningkatan biaya O & P sampai 100% OP normal - Pembangunan waduk/embung di seluruh WS Jeneberang terutama Waduk Kelara, Waduk Bonto-sunggu, Waduk Tunggu Nipanipa, Waduk Janelata, Waduk Pamukkulu, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba, Bendung Gerak di Kab. Jeneponto, Embung Malela di Kab. Takalar, Embung Allu di Kab. Jeneponto, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Kampala di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba, Embung Konservasi Lembang-Lembang Kab. Selayar, Embung Konservasi Puca Kab. Maros, Embung Konservasi Binanga Nipa Kab. Selayar, Embung Konservasi Binanga Parra, Embung Konservasi Lembang-Lembang, Embung air baku Salassae Kab. Bulukumba, Embung air baku oddungan Kab. Bulukumba.	Peningkatan kapasitas tampungan air	Dinas PSDA Provinsi Sulsel Kab. Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros, Bone, Gowa, Selayar, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Kemampuan resapan air semakin berkurang terutama di kawasan perkotaan (rata-rata potensi resapan 35,72 mm/bulan pada tahun 2003 turun menjadi 34,25 mm/bulan pada tahun 2010)	Peningka-tan daerah resapan air (*recharge area*)	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang sudah ada - Peningkatan luasan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Pembangunan sarana resapan air (biopori dan sumur resapan) 10% luas - Rehabilitasi lahan konservasi	- Identifikasi daerah resapan air - Perlindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang sudah ada - Peningkatan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas adminis-trasi kabupaten/kota - Pembangunan sarana peresapan air (biopori dan sumur resapan) 30% luas - Evaluasi kegiatan dan keberhasilan program - Rehabilitasi lahan konservasi	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Pembangunan sarana peresapan air (biopori dan sumur resapan) 50% luas - Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang sudah ada - Peningkatan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Evaluasi kegiatan dan keberhasilan program - Rehabilitasi lahan konservasi	Pelestarian daerah resapan air	Dinas PSDA Provinsi Sulsel Kab. Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Maros, Bone, Gowa, Selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Efisiensi pemakaian air masih rendah (Kehilangan air di jaringan irigasi masih tinggi akibat kerusakan jaringan irigasi - D.I. Kalamisu, D.I. Pamukkulu, D.I. Bantimurung, D.I. Kampili, D.I. Lekopancing, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai.	Tercapainya efisiensi pemakaian air	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (40% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi D.I, Jaringan Irigasi, JIAT diseluruh WS Jeneberang terutama di D.I. Kalamisu Kab. Sinjai, Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar, Jaringan Irigasi Bettu Kab. Bulukumba, Jaringan	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (70% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi D.I, Jaringan Irigasi, JIAT diseluruh WS Jeneberang terutama di D.I. Kalamisu Kab. Sinjai, Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar, Jaringan Irigasi Bettu Kab. Bulukumba,	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan pening-katan biaya O & P (100% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi D.I, Jaringan Irigasi, JIAT diseluruh WS Jeneberang terutama di D.I. Kalamisu Kab. Sinjai, Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar, Jaringan Irigasi Bettu Kab. Bulukumba, Jaringan	Peningkatan efisiensi pemakaian air	Dinas Pertanian Provinsi Sulsel, Kab. Sinjai, Takalar, Maros, Jeneponto, dan Bulukumba

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe Kab. Jeneponto, D.I. Lekopancing Kab. Maros, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai, JIAT di Kab Gowa, JIAT di Kab Jeneponto, JIAT di Kab Bantaeng, JIAT di Kab Bulukumba, JIAT di Kab Maros.	Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe Kab. Jeneponto, D.I. Lekopancing Kab. Maros, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai, JIAT di Kab Gowa, JIAT di Kab Jeneponto, JIAT di Kab Bantaeng, JIAT di Kab Bulukumba, JIAT di Kab Maros.	Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe Kab. Jeneponto, D.I. Lekopancing Kab. Maros, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai, JIAT di Kab Gowa, JIAT di Kab Jeneponto, JIAT di Kab Bantaeng, JIAT di Kab Bulukumba, JIAT di Kab Maros.		
3.	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengenda-lian Pencemaran Air	Terjadi penurunan kualitas air akibat pembuangan limbah domestik, industri dan pertanian (mengandung BOD 5,4 mg/l, COD 14,35 mg/l, DO 5,1 mg/l, TSS 65,30 mg/l, Nitrit 0,074 mg/l, Phospat 1,614 mg/l dimana hal tersebut melebihi ambang batas kandungan untuk mutu air kelas II)	Kualitas air menjadi lebih baik	- Penyusunan Perda tentang pembuangan limbah cair - Kegiatan PROKASIH dihidupkan kembali - Identifikasi sumber pencemar - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal), target 20% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga;	- Penyusunan dan implementasi Perda tentang pembuangan limbah cair - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Perlombaan PROKASIH di setiap wilayah - Identifikasi sumber pencemar - kabupaten/kota - Pembangunan IPAL industri dan domes-tik (komunal), target 40% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri	- Penyusunan dan implementasi Perda tentang pembuangan limbah cair - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Perlombaan PROKASIH di setiap wilayah kabupaten/kota - Identifikasi sumber pencemar - Pembangunan IPAL industri dan domes-tik (komunal), target 60% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung	Peningkatan kualitas air sungai sesuai dengan standar baku mutu	Bapedalda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Takalar, Gowa, Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Takalar, Gowa, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu	Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu	Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu		
		Pengelolaan limbah sampah belum optimal	Pengelolaan dan pengolahan sampah semakin baik	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kabupaten - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kecamatan - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kecamatan - Evaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	Sampah dikelola dengan baik dan berkelanjutan	Bapedalda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, Masyarakat, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
II. Pendayagunaan Sumber Daya Air								
1.	Penataguna-an Sumber Daya Air	Belum ada zona pemanfaatan sumber daya air	Ada penetapan zona untuk pemanfaatan sumber daya air di setiap wilayah sungai	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air 20% yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar.	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air 50% yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar. - Evaluasi dan atau penetapan kembali zona pemanfaatan sumber daya air - Pemantauan pelaksanaan zona pemanfaatan sumber daya air dan melakukan revisi jika diperlukan	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air 100% yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar. - Evaluasi dan atau penetapan kembali zona pemanfaatan sumber daya air - Pemantauan pelaksanaan zona pemanfaatan sumber daya air dan melakukan revisi jika diperlukan	Penetapan zona untuk pemanfaatan SDA di WS	Bapedalda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar. BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten/Kota
		Belum ada peraturan yang menetapkan peruntukan air pada sumber air	Ada peraturan yang menetapkan peruntukan dan kelas air sungai	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas 20% - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Terbit Peraturan Gubernur dan melakukan sosialisasi	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas 50% - Implementasi PerGub yang sudah terbit - Penyusunan kajian penetapan untuk sungai lainnya - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Terbit PerGub dan melakukan sosialisasi - Evaluasi PerGub yang telah terbit bersama TKPSDA	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas 80% - Implementasi PerGub yang sudah terbit - Penyusunan kajian penetapan untuk sungai lainnya - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Terbit PerGub dan melakukan sosialisasi - Evaluasi PerGub yang telah terbit bersama TKPSDA	Pengkajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai	Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
2.	Penyediaan Sumber Daya Air	Terjadi kekurangan air baku irigasi, tambak dan RKI (terjadi defisit 2,97 m^3/dt pada tahun 2012 dan meningkat menjadi ± 27,59 m^3/dt pada tahun 2032 apabila tidak dilakukan pembangunan sarana SDA)	Layanan air baku tercukupi	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 10 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan bendung, waduk,embung dan jaringan air baku di seluruh WS Jeneberang terutama Waduk Kelara, Waduk Bontosunggu, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Bendung Gerak dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Malela dan Jaringan Air Baku di Kab. Takalar, Embung Allu dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Bendung Karet Kab. Gowa, Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar, Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba, Embung air baku Benjala Kab. Bulukumba, Embung Bontobiraeng Kab. Bulukumba. - Pembangunan jaringan irigasi, sumur bor dalam, JIAT, D.I, saluran	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 10 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan bendung, waduk,embung dan jaringan air baku di seluruh WS Jeneberang terutama Waduk Kelara, Waduk Bontosunggu, Waduk Pamukkulu, Waduk Jenelata, Waduk Bontojaya, Waduk Posi, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Bendung Gerak dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Malela dan Jaringan Air Baku di Kab. Takalar, Embung Allu dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Bendung Karet Kab. Gowa, Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar, Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba, Embung air baku Benjala Kab. Bulukumba, Embung Bontobiraeng	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten unan 10 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan bendung, waduk,embung dan jaringan air baku di seluruh WS Jeneberang terutama Waduk Kelara, Waduk Bontosunggu, Waduk Pamukkulu, Waduk Jenelata, Waduk Bontojaya, Waduk Posi, Embung Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar, Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Bendung Gerak dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Malela dan Jaringan Air Baku di Kab. Takalar, Embung Allu dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Bendung Karet Kab. Gowa, Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar, Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba, Embung air baku Benjala Kab. Bulukumba, Embung Bontobiraeng Kab. Bulukumba. - Pembangunan jaringan	Tersedianya kecukupan air untuk irigasi dan RKI	Dinas Pertanian Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				sekunder, intake di seluruh WS Jeneberang terutama Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros, Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe, Sumur Bor Dalam Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, ,Kab. Maros, Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Gowa, JIAT di Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Bulukumba. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros, Malino Kab. Gowa, Bissapu Kab. Bantaeng. - Penyediaan dan peningkatan Jaringan Tata Air Tambak di Mappakasunggu Kab. Takalar dan Ujung Loe Kab. Bulukumba.1500 ha - Pembangunan Sabo Dam Sungai Malino. - Revitalisasi Prasarana Sungai Wilayah Sungai Jeneberang. - Monitoring dan Evaluasi Prasarana Sungai	Kab. Bulukumba. - Pembangunan jaringan irigasi, sumur bor dalam, JIAT, D.I, saluran sekunder, intake di seluruh WS Jeneberang terutama Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros, Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe, Sumur Bor Dalam Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, ,Kab. Maros, Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Gowa, JIAT di Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Bulukumba. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros, Malino Kab. Gowa, Bissapu Kab. Bantaeng. - Penyediaan dan peningkatan Jaringan Tata Air Tambak di Mappakasunggu Kab. Takalar dan Ujung Loe Kab. Bulukumba. 3000 ha. - Pembangunan Sabo Dam Sungai Malino - Revitalisasi Prasarana Sungai Wilayah Sungai Jeneberang. - Monitoring dan Evaluasi Prasarana Sungai	irigasi, sumur bor dalam, JIAT, D.I, saluran sekunder, intake di seluruh WS Jeneberang terutama Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros, Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe, Sumur Bor Dalam Kab. Jeneponto, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, ,Kab. Maros, Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Gowa, JIAT di Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Gowa, Kab. Bulukumba. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros, Malino Kab. Gowa, Bissapu Kab. Bantaeng. - Penyediaan dan peningkatan Jaringan Tata Air Tambak di Mappakasunggu Kab. Takalar dan Ujung Loe Kab. Bulukumba. 6000 ha. - Pembangunan Sabo Dam Sungai Malino. - Revitalisasi Prasarana Sungai Wilayah Sungai Jeneberang. - Monitoring dan Evaluasi Prasarana Sungai		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Tingkat layanan air perpipaan masih dibawah (50% rata-rata WS	Layanan air baku sesuai target MDG's	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau PDAM - SPAM jaringan perpipaan air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 50% untuk tiap kabupaten/kota	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Maros, Tallo, Pappa, dan Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 70% untuk tiap kabupaten/kota	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 80% untuk tiap kabupaten/kota	Peningkatan layanan air baku untuk masyarakat	Dinas Cipta Karya Prov. Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, PDAM Kota Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar Bappeda Prov. Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar
3.	Penggunaan Sumber Daya Air	Kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya (D.I. Kalamisu, D.I. Bantimurung, D.I. Kampili, D.I. Lekopancing, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai, D.I. Pamukulu)	Jaringan irigasi dan prasarana SDA dapat beroperasi normal	- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Perbaikan dan peningkatan biaya O&P sampai 40% O&P normal - Penyusunan AKNOP OP. Sungai WS. Jeneberang - Operasi dan pemeliharaan,	- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Perbaikan dan peningkatan biaya O&P sampai 70% O&P normal - Penyusunan AKNOP OP. Sungai WS. Jeneberang - Operasi dan	- Inventarisasi dan identifikasi kerusak-an jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Perbaikan dan peningkatan biaya O&P sampai 100% O&P normal - Penyusunan AKNOP OP. Sungai WS. Jeneberang - Operasi dan pemeliharaan,	Rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA	Dinas Pertanian Provinsi Prov. Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, Dinas PSDA Provinsi Prov. Sulsel, Kab.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				rehablitasi, *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya seluruh DI WS Jeneberang terutama D.I. Kalamisu Kab. Sinjai, D.I. Pammukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, D.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang Kab. Bulukumba, D.I. Bontomanai Kab. Bulukumba, D.I. Patontongan Kab. Maros, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe Kab.Jeneponto, D.I. Bongki-Bongki Kab. Bulukumba, D.I. Bontonyeleng Kab. Bulukumba, D.I. Bettu Kab. Bulukumba. - Rehabilitasi Jaringan Tata Air Tambak diseluruh WS Jeneberang terutama Jaringan Tata Air tambak Tuppabiring/Ampeka-le Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Batang Kab. Jeneponto. Jaringan Tata Air Tambak Tamanroya Kab. Jeneponto, Jaringan Tata Air Tambak Kajang dan Ujung Loe Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Pitumpanua Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Sinjai Utara dan Timur Kab. Sinjai, Jaringan Tata Air	pemeliharaan, rehablitasi, *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya seluruh DI WS Jeneberang terutama D.I. Kalamisu Kab. Sinjai, D.I. Pammukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, D.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang Kab. Bulukumba, D.I. Bontomanai Kab. Bulukumba, D.I. Patontongan Kab. Maros, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe Kab.Jeneponto, D.I. Bongki-Bongki Kab. Bulukumba, D.I. Bontonyeleng Kab. Bulukumba, D.I. Bettu Kab. Bulukumba. - Rehabilitasi Jaringan Tata Air Tambak diseluruh WS Jeneberang terutama Jaringan Tata Air tambak Tuppabiring/Ampe-kale Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Batang Kab. Jeneponto. Jaringan Tata Air Tambak Tamanroya Kab. Jeneponto, Jaringan Tata Air Tambak Kajang dan Ujung Loe Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Pitumpanua Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Sinjai	rehablitasi, *upgrading* prasarana irigasi baik bendung dan jaringannya seluruh DI WS Jeneberang terutama D.I. Kalamisu Kab. Sinjai, D.I. Pammukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, D.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang Kab. Bulukumba, D.I. Bontomanai Kab. Bulukumba, D.I. Patontongan Kab. Maros, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe Kab.Jeneponto, D.I. Bongki-Bongki Kab. Bulukumba, D.I. Bontonyeleng Kab. Bulukumba, D.I. Bettu Kab. Bulukumba. - Rehabilitasi Jaringan Tata Air Tambak diseluruh WS Jeneberang terutama Jaringan Tata Air tambak Tuppabiring/Ampeka-le Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Batang Kab. Jeneponto. Jaringan Tata Air Tambak Tamanroya Kab. Jeneponto, Jaringan Tata Air Tambak Kajang dan Ujung Loe Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Pitumpanua Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Sinjai Utara dan Timur Kab. Sinjai, Jaringan Tata Air Tambak Takalar Tua Kab.		Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Tambak Takalar Tua Kab. Takalar, Jaringan Tata Air Tambak Mangara Bombang Kab. Takalar, Jaringan Tata Air Tambak Maranak Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Kadarbobo Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Bonto Baharu Kab. Kep Selayar. - Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak di seluruh WS Jeneberang terutama di Saluran Irigasi Tambak Salemba di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Manjalling di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Sapolohe di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Manyampa di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Rawa di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Kalumeme di Kab. Bulukumba. - Peningkatan Jaringan Irigasi 5000 ha - Rehabilitasi jaringan irigasi 10.000 ha	Utara dan Timur Kab. Sinjai, Jaringan Tata Air Tambak Takalar Tua Kab. Takalar, Jaringan Tata Air Tambak Mangara Bombang Kab. Takalar, Jaringan Tata Air Tambak Maranak Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Kadarbobo Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Bonto Baharu Kab. Kep Selayar. - Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak di seluruh WS Jeneberang terutama di Saluran Irigasi Tambak Salemba di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Manjalling di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Sapolohe di Kab. Bulukumba. Saluran Irigasi Tambak Manyampa di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Rawa di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Kalumeme di Kab. Bulukumba. - Peningkatan Jaringan Irigasi 10000 ha - Rehabilitasi jaringan irigasi 20.000 ha	Takalar, Jaringan Tata Air Tambak Mangara Bombang Kab. Takalar, Jaringan Tata Air Tambak Maranak Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Kadarbobo Kab. Maros, Jaringan Tata Air Tambak Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Jaringan Tata Air Tambak Bonto Baharu Kab. Kep Selayar. - Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak di seluruh WS Jeneberang terutama di Saluran Irigasi Tambak Salemba di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Manjalling di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Sapolohe di Kab. Bulukumba. Saluran Irigasi Tambak Manyampa di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Rawa di Kab. Bulukumba, Saluran Irigasi Tambak Kalumeme di Kab. Bulukumba. - Peningkatan Jaringan Irigasi 20000 ha - Rehabilitasi jaringan irigasi 40.000 ha		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Belum tersedia manual SOP waduk, embung dan prasarana SDA lainnya yang ada di setiap DAS	Tersedia manual SOP di setiap waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Bencana Banjir di WS. Jeneberang - Penyusunan Manual OP Sungai di WS. Jeneberang	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penerapan SOP di seluruh waduk, embung dan prasarana SDA lainnya - Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Bencana Banjir di WS. Jeneberang - Penyusunan Manual OP Sungai di WS. Jeneberang	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penerapan SOP di seluruh waduk, embung dan prasarana SDA lainnya - Review SOP disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan prasarana SDA-nya - Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Bencana Banjir di WS. Jeneberang - Penyusunan Manual OP Sungai di WS. Jeneberang	Penyiapan SOP waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	Dinas PSDA Provinsi Prov. Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Manajemen asset sarana dan prasarana SDA belum berjalan	Asset sarana dan prasarana SDA dapat terinventori dengan baik	- Inventori asset SDA dan melaksanakan manajemen asset (50% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang	- Inventori asset SDA dan melaksanakan manajemen asset (75% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang - Evaluasi dan updating buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang secara berkelanjutan	- Inventori asset SDA dan melaksanakan manajemen asset (100% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang - Evaluasi dan updating buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang secara berkelanjutan	Penyusunan asset manajemen sarana dan prasarana SDA	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
4.	Pengemba-ngan Sumber Daya Air	Belum optimalnya pemanfaatan potensi keterse-diaan air untuk pembangkitan tenaga listrik	Pengembangan potensi PLTA/PLTM di WS Jeneberang terlaksana	- Identifikasi dan kajian potensi SDA untuk listrik tenaga air - Pembangunan PLTA Kelara - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 10% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat desa/ masyarakat setempat - Studi Identifikasi Potensi Air Tanah dan Air Baku - Pelibatan dunia usaha	- Identifikasi dan kajian potensi SDA untuk listrik tenaga air - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe dan PLTA Bontosunggu - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 30% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat desa/ masyarakat setempat	- Identifikasi dan kajian potensi SDA untuk listrik tenaga air - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe, PLTA Bontosunggu, PLTA Jenelata dan PLTA Pamukkulu - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 60% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat	Peningkatan ketahanan energi listrik tenaga air	Dinas PSDA, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang.

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				dalam PSDA	- Studi Identifikasi Potensi Air Tanah dan Air Baku - Pelibatan dunia usaha dalam PSDA	desa/ masyarakat setempat - Studi Identifikasi Potensi Air Tanah dan Air Baku - Pelibatan dunia usaha dalam PSDA		
		Kebutuhan air baku untuk domestik semakin meningkat (tahun 2010 sebesar 9,32 m3/dt menjadi 15,83 m3/dt di tahun 2032)	Kebutuhan air baku terpenuhi	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 50% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 70% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 80% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	Peningkatan ketahanan air bersih	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang, Bappeda, Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, PDAM kota Makassar, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar
5.	Pengusaha-an Sumber Daya Air	Belum ada institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA	Pendirian institusi pengelola SDA yang dapat	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya	Pendirian institusi pengelola SDA yang dapat	Dinas PSDA, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
			melakukan pengusaha-an SDA	institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN atau BUMD)	berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN/BUMD) - Pengoperasian institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA - Evaluasi institusi pengelola	institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN/BUMD) - Pengoperasian institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA - Evaluasi institusi pengelola	melakukan pengusahaan sumber daya air	Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang.
		Terbatasnya pengusahaan SDA oleh swasta	Pengemba-ngan Pengusaha-an SDA oleh swasta (air bersih maupun energi listrik) terlaksana	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU)	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU) - Implementasi BLU dalam pengelolaan WS Jeneberang	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU) - Implementasi BLU dalam pengelolaan WS Jeneberang	Peningkatan peran serta pihak swasta	BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas PSDA, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar.
III. Pengendalian Daya Rusak Air								
1.	Pencegahan Daya Rusak Air	Belum tersedia sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh	Sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh tersusun	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (10% kegiatan) - Revegetasi lahan kritis 50.000 ha	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (40% kegiatan) - Revegetasi lahan kritis 100.000 ha	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (70% kegiatan) - Evaluasi dan review sistem pengendalian banjir yang telah disusun - Revegetasi lahan kritis 150.000 ha	Pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Masih kurangnya rencana tindak darurat (RTD) bangunan Utama belum tersosialisasi	Tersedia pedoman rencana tindak darurat (RTD)	- Penyusunan RTD (20% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Penyusunan RTD (40% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Penyusunan RTD (70% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	Peningkatan kesiapan dalam menghadapi jebolnya waduk/em-bung	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Berkurangnya kapasitas aliran sungai	Sungai mampu mengalirkan debit banjir sesuai rencana	- Perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Tangka, Sungai Perkotaan. - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (15%)	- Perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Maros, Tallo, Tangka, Tamanroya, Sungai Bialo. - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (45%) - Pelaksanaan O&P sungai sepanjang tahun	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Maros, Tallo, Tangka, Tamanroya, Bialo, Sinjai, Pappa, Allo, Sungai Pampang. - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (95%) - Pelaksanaan O&P sungai sepanjang tahun	Peningkatan kapasitas aliran sungai	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Penggunaan bantaran sungai untuk permukiman (Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo dan sungai-sungai lainnya terutama yang melitas perkotaan)	Bantaran sungai bebas dari permuki-man	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penertiban hunian di daerah sempadan	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penerapan Perda tentang sempadan sungai - Penertiban hunian di daerah sempadan sungai dan melakukan pengawasannya	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penerapan Peraturan Daerah tentang sempadan sungai - Penertiban hunian di daerah sempadan sungai dan melakukan pengawasannya	Penertiban bantaran sungai dari permukiman	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Belum tersedia sistem peringatan dini banjir pada sungai utama	Semua sungai utama mempunyai sistem peringatan dini	- Perencanaan pengem-bangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama - Pemasangan sistem pada	- Perencanaan pengembangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama dan sungai	- Perencanaan pengembangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama, sungai prioritas dan semua	Tingkatkan kewaspadaan terhadap banjir	Dinas PSDA Provinsi/ Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
			banjir	sungai utama - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	prioritas lainnya - Pemasangan sistem pada sungai utama dan sungai prioritas - Operasional sistem pada sungai utama dan sungai prioritas lainnya - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	sungai rawan banjir - Pemasangan sistem pada sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Operasional sistem pada sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir		Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
2.	Penanggulangan Daya Rusak Air	Terjadi banjir/luapan air pada Sungai Jeneberang, Maros, Pappa, Tangka dan Taman Roya	Teratasinya luapan air sungai	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir diseluruh WS Jeneberang terutama di Sungai Pappa, Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto dan Kab.Takalar, Sungai Bua-Bua Kab. Selayar, Sungai Bialo Kab. Bantaeng, Sungai Mare-Mare Kab. Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase, Sungai Balantieng Kab. Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir diseluruh WS Jeneberang terutama di Sungai Pappa, Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto Kab.Takalar, Sungai Bua-Bua Kab. Selayar, Sungai Bialo Kab. Bantaeng, Sungai Mare-Mare Kab. Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase, Sungai Balantieng Kab. Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Merencanakan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembu-angan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir diseluruh WS Jeneberang terutama di Sungai Pappa, Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto Kab.Takalar, Sungai Bua-Bua Kab. Selayar, Sungai Bialo Kab. Bantaeng, Sungai Mare-Mare Kab. Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase, Sungai Balantieng Kab. Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Sungai Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai	Tingkatkan kesiapan dalam penanggula-ngan banjir	Dinas PSDA Provinsi/ Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Maros, Sungai Tangka Kab. Sinjai, Sungai Parappa Kab. Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Sungai Panaikang Kab.Takalar, Sungai Sagge Bongga Kab.Takalar, Sungai Giring-Giring Kab. Kep. Selayar, Sungai Mongottong Kab. Sinjai, Sungai Batangse Kab Selayar - Normalisasi dan perkuatan tebing muara sungai diseluruh WS Jeneberang terutama pada Sungai Batua Kab. Bulukumba, Sungai Bampang Kab. Bulukumba, Sungai Balang Tieng Kab. Bulukumba, Sungai Manyampa kab. Kab. Bulukumba, Sungai Bijawang Kab. Bulukumba, Sungai Topa Kab. Jeneponto, Sungai Sangkala Kab. Bulukumba, Sungai Alorang di Kab. Bulukumba, Sungai Lajae Kab. Bulukumba, Sungai Lolisang Kab. Bulukumba, Sungai Bialo Kab. Bulukumba. - Rehabilitasi Tanggul Banjir Sungai Maros Kab. Maros. - Pengendalian Banjir Kanal Jongaya Kota Makassar - Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Biangloe dan Sungai Cilendu di Kab. Bantaeng - Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir	Maros, Sungai Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Sungai Taroang dan muara Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto, Sungai Panaikang Kab.Takalar, Sungai Sagge Bongga Kab.Takalar, Sungai Giring-Giring Kab. Kep. Selayar, Sungai Mongottong Kab. Sinjai, Sungai Batangse Kab. Selayar - Normalisasi dan perkuatan tebing muara sungai diseluruh WS Jeneberang terutama pada Sungai Batua Kab. Bulukumba, Sungai Bampang Kab. Bulukumba, Sungai Balang Tieng Kab. Bulukumba, Sungai Manyampa kab. Kab. Bulukumba, Sungai Bijawang Kab. Bulukumba, Sungai Topa Kab. Jeneponto, Sungai Sangkala Kab. Bulukumba, Sungai Alorang di Kab. Bulukumba, Sungai Lajae Kab. Bulukumba, Sungai Lolisang Kab. Bulukumba, Sungai Bialo Kab. Bulukumba. - Rehabilitasi Tanggul Banjir Sungai Maros Kab. Maros	Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Sungai Taroang dan muara Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto, Sungai Panaikang Kab.Takalar, Sungai Sagge Bongga Kab.Takalar, Sungai Giring-Giring Kab. Kep. Selayar, Sungai Mongottong Kab. Sinjai, Sungai Batangse Kab. Selayar - Normalisasi dan perkuatan tebing muara sungai diseluruh WS Jeneberang terutama pada Sungai Batua Kab. Bulukumba, Sungai Bampang Kab. Bulukumba, Sungai Balang Tieng Kab. Bulukumba, Sungai Manyampa kab. Kab. Bulukumba, Sungai Bijawang Kab. Bulukumba, Sungai Topa Kab. Jeneponto, Sungai Sangkala Kab. Bulukumba, Sungai Alorang di Kab. Bulukumba, Sungai Lajae Kab. Bulukumba, Sungai Lolisang Kab. Bulukumba, Sungai Bialo Kab. Bulukumba. - Rehabilitasi Tanggul Banjir Sungai Maros Kab. Maros - Pengendalian Banjir Kanal Jongaya Kota Makassar - Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Biangloe dan Sungai Cilendu di Kab. Bantaeng		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Panakkukang Kota Makassar. - Pengelolaan OP Drainase/Canal kota Makassar. - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar. - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (20%)	- Pengendalian Banjir Kanal Jongaya Kota Makassar - Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Biangloe dan Sungai Cilendu di Kab. Bantaeng - Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir Panakkukang Kota Makassar. - Pengelolaan OP Drainase/Canal kota Makassar. - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Sungai Bialo Kabupaten Bulukumba, Sungai Bampang dan Sungai Bijawang Kabupaten Bulukumba - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (40%, kumulatif 60%)	- Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir Panakkukang Kota Makassar. - Pengelolaan OP Drainase/Canal kota Makassar. - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto, Sungai Bialo Kabupaten Bulukumba, Sungai Bampang dan Sungai Bijawang Kabupaten Bulukumba - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (40%, kumulatif 100%)		
		Terdapat pantai kritis dan abrasi pantai di Kabupaten Takalar, Bantaeng, Selayar, Maros, Makassar, Sinjai, Bulukumba dan Jeneponto	Kerusakan/abrasi Pantai teratasi	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Konservasi garis pantai - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 20% dari yang seharusnya - Pengaman Abrasi Pantai Galesong, Pantai Mangesu, Pantai Parappa, Pantai Boddia, Pantai Mangindara **Kab. Takalar**, Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Pemeliharaan konstruksi yang telah ada sebelumnya - Konservasi garis pantai masing-masing - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 40%, kumulatif 60% - Pengaman Abrasi Pantai Galesong, Pantai Mangesu, Pantai	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Pemeliharaan konstruksi yang telah ada sebelumnya - Konservasi garis pantai masing-masing - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 40%, kumulatif 100% - Pengaman Abrasi Pantai Galesong, Pantai Mangesu, Pantai Parappa, Pantai Boddia, Pantai Mangindara	Pengamanan garis pantai	Dinas PSDA Provinsi/ Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkani-nong, Pantai Bantaeng, Pantai Lasepang (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke, Pantai Bonehalang-Padang, Pantai Kepulauan Selayar - (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Pattontongan, Pantai Bahari, Pantai Tino, Pantai Bangkala (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng, Pantai Kalumeme, Pantai Sapolohe, Pantai Raowa, Pantai Bajange, Pantai Nambal, Pantai Timur Samboang, Pantai	Parappa, Pantai Boddia, Pantai Mangindara **Kab. Takalar**, Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkani-nong, Pantai Bantaeng, Pantai Lasepang (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke, Pantai Bonehalang-Padang, Pantai Kepulauan Selayar (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Pattontong-an, Pantai Bahari, Pantai Tino, Pantai Bangkala (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai	**Kab. Takalar**, Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa, Pantai Tonro Kassi, Pantai Gallea, Pantai Lambocca, Pantai Makkaninong, Pantai Bantaeng, Pantai Lasepang (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak, Pantai Appabatu, Pantai Baruyya, Pantai Bua-Bua, Pantai Dusun Padang, Pantai Dusun Tongke-Tongke, Pantai Bonehalang-Padang, Pantai Kepulauan Selayar (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke, Pantai Pattontongan, Pantai Bahari, Pantai Tino, Pantai Bangkala (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng, Pantai Kalumeme,		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Matteko, Pantai Tamae, Pantai Bintarore, Pantai Parang nyeling (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi, Pantai Popo (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai **Kabupaten Sinjai**, Pantai Maros **Kab. Maros,** Pantai Tanjung Bunga **Kota Makassar,** Pantai Mallusetasi, Pantai Polejiwa **Kab. Barru,** Pantai Makassar COI, Pantai CPI, Pantai Belopa **Kota Makassar.** - Penanaman pohon lindung.	Bintorere, Pantai Menara, Pantai Lappa'E, Pantai Pasar Cikkeng, Pantai Kalumeme, Pantai Sapolohe, Pantai Raowa, Pantai Bajange, Pantai Nambal, Pantai Timur Samboang, Pantai Matteko, Pantai Tamae, Pantai Bintarore, Pantai Parang nyeling (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi , Pantai Popo (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai **Kabupaten Sinjai**, Pantai Maros **Kab. Maros**, Pantai Tanjung Bunga **Kota Makassar,** Pantai Mallusetasi, Pantai Polejiwa **Kab. Barru,** Pantai Makassar COI, Pantai CPI, Pantai Belopa **Kota Makassar.** - Penanaman pohon lindung.	, Pantai Sapolohe, Pantai Raowa, Pantai Bajange, Pantai Nambal, Pantai Timur Samboang, Pantai Matteko, Pantai Tamae, Pantai Bintarore, Pantai Parang nyeling (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara, Pantai Takalar, Pantai Topejawa, Pantai Boddia, Pantai Mandi, Pantai Popo (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai **Kabupaten Sinjai**, Pantai Maros **Kab. Maros,** Pantai Tanjung Bunga **Kota Makassar,** Pantai Mallusetasi, Pantai Polejiwa **Kab. Barru,** Pantai Makassar COI, Pantai CPI, Pantai Belopa **Kota Makassar.** - Penanaman pohon lindung.		
		Sedimen bawakaraeng mengancam keberlangsungan fungsi Bendungan Bili-Bili	Bendungan Bili-Bili dapat berfungsi dengan baik	- Rehabilitasi dan OP Sabo Dam, Sand Pocket, Konsolidasi Dam yang ada di sepanjang hulu bendungan Bili-Bili. - Pengerukan sedimen Bendungan Bili-Bili - Pelaksanaan Revegetasi di	- Rehabilitasi dan OP Sabo Dam, Sand Pocket, Konsolidasi Dam yang ada di sepanjang hulu bendungan Bili-Bili. - Pengerukan sedimen Bendungan Bili-Bili - Pelaksanaan Revegetasi di	- Rehabilitasi dan OP Sabo Dam, Sand Pocket, Konsolidasi Dam yang ada di sepanjang hulu bendungan Bili-Bili. - Pengerukan sedimen Bendungan Bili-Bili - Pelaksanaan Revegetasi di	Pengemba-lian fungsi bendungan bili-bili	Dinas Kehutanan, Dinas PSDA provinsi Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				daerah kaldera dan sepanjang sungai di hulu bendungan bili-bili. - Pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian bendungan bili-bili	daerah kaldera dan sepanjang sungai di hulu bendungan bili-bili. - Pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian bendungan bili-bili	daerah kaldera dan sepanjang sungai di hulu bendungan bili-bili. - Pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian bendungan bili-bili		Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang, BP DAS Jeneberang
3.	Pemulihan Daya Rusak Air	Terjadi kerusakan sarana prasarana sumber daya air	Sarana dan prasarana dapat beroperasi kembali	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air - Normalisasi sungai maros, sungai pappa	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air - Normalisasi sungai maros, sungai pappa	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air - Normalisasi sungai maros, sungai pappa	Pengembalian fungsi sarana dan prasarana	Dinas PSDA Provinsi/ Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
IV. Sistem Informasi Sumber Daya Air								
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Data base SDA (hidrologi, prasarana, hidrogeologi, hidroklimatologi, kualitas air dan lingkungan) belum terintegrasi	Data base SDA tersedia dengan baik dan benar serta terintegrasi	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (20% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Penyediaan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P) - Inventarisasi Data Base Bangunan Sungai & OP Sungai WS Jeneberang - Penggantian & Pemasangan Peralatan Hidroklimatologi - Pembuatan Papan Informasi Hidroklimatologi - Audit Sistem Informasi (Flood Warning System) WS. Jeneberang	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (60% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Penyediaan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P) - Inventarisasi Data Base Bangunan Sungai & OP Sungai WS Jeneberang - Penggantian & Pemasangan Peralatan Hidroklimatologi - Pembuatan Papan Informasi Hidroklimatologi - Audit Sistem Informasi (Flood Warning System) WS. Jeneberang	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (100% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Penyediaan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P) - Inventarisasi Data Base Bangunan Sungai & OP Sungai WS Jeneberang - Penggantian & Pemasangan Peralatan Hidroklimatologi - Pembuatan Papan Informasi Hidroklimatologi - Audit Sistem Informasi (Flood Warning System) WS. Jeneberang	Peningkatan kualitas data, SDM dan dana operasi dan pemeliharaan	Dinas PSDA Provinsi/ Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Belum ada unit SISDA yang mengelola dan mengintegrasikan data SDA dari instansi terkait lainnya	Ada unit pengelola SISDA yang berkelanjutan dan dapat diakses dengan mudah	- Koordinasi untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi - Perencanaan Penyusunan Sitem Informasi Data Terpadu WS. Jeneberang - Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir	- Koordinasi untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Perencanaan Penyusunan Sitem Informasi Data Terpadu WS. Jeneberang - Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir	- Koordinasi untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA yang terintegrasi antar instansi terkait - Perencanaan Penyusunan Sitem Informasi Data Terpadu WS. Jeneberang - Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir	Data SISDA dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi	Dinas PSDA Provinsi/ Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Pedoman pengelolaan SISDA belum ada	Tersedianya pedoman tentang pengelolaan SISDA	- Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (20% dari sistem yang ada) - Penerapan pedoman	- Penerapan pedoman dan evaluasi penerapannya - Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif	- Penerapan pedoman dan evaluasi penerapannya - Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (100%	Pengelolaan SISDA	Dinas PSDA Provinsi/ Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
					(60% dari sistem yang ada)	dari sistem yang ada)		Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
2.	Pengembangan Kesepaha-man Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Transparansi dalam penyajian informasi sumber daya air	Terciptanya transparansi dalam penyajian informasi sumber daya air	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	Transparansi pengelolaan sistem informasi sumber daya air	Seluruh instansi terkait pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
V. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha								
1.	Pemberdayaan Stakehol-der dan Lem-baga Penge-lola Sumber Daya Air	Koordinasi dan pembagian kewenangan belum optimal	Optimalnya koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewenang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola SDA - Uji coba Badan Pengelola SDA - Menerbitkan pe-doman, petunjuk teknis pelaksanaan peran	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewe-nang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola Sumber Daya Air - Uji coba Badan Pengelola SDA - Implementasi Badan Pengelola SDA - Menerbitkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan peran	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewenang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola Sumber Daya Air - Uji coba Badan Pengelola SDA - Implementasi Badan Pengelola SDA - Menerbitkan pedoman, petun juk teknis pelaksanaan peran	Pembentu-kan Badan Pengelola Sumber Daya Air	Ditjen SDA Kementerian PU, seluruh stakeholder SDA WS Jeneberang
2.	Pelibatan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA meningkat	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha	Pemda Propinsi Dinas PSDA Provinsi/ Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Keterbatasan sumber daya manusia dan dana	Sumber daya manusia dan dana lebih baik	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Pemda Propinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, Dinas PSDA Provinsi

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasional	Lembaga/ Instansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
								Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang
		Belum adanya kerjasama hulu hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS	Konservasi DAS dengan prinsip hubungan hulu hilir terlaksana	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang dan DAS prioritas - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang dan DAS prioritas	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepa-katan hulu hilir pada DAS Jeneberang, DAS prioritas dan DAS lainnya - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang, DAS prioritas dan DAS lainnya	Peningkatan kerjasama hulu hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS	Dinas PU PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, BBWSPJ Bappeda Propinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar

Tabel 4.2. Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang (Skenario Ekonomi Sedang)

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
I Konservasi Sumber Daya Air								
1.	Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Air	Fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan berkurang, terdapat lahan kritis: - DAS Jeneberang 219,74 km^2 - DAS Pappa 194,63 km^2 - DAS Kelara Karaloe 95,20 km^2 - DAS Tangka 87,43 km^2 dan DAS lainnya	Terlaksana-nya konservasi lahan kritis pada DAS di WS Jeneberang	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 100% - Kritis 20% - Agak kritis 30% - Potensial kritis 40% - Monitoring pelaksanaan	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 100% - Kritis 50% (kumulatif) - Agak kritis 50% (kumulatif) - Potensial kritis 60% (kumulatif) - Monitoring pelaksanaan dan mempertahankan lahan yang telah direhabilitasi	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 100% - Kritis 80% (kumulatif) - Agak kritis 80% (kumulatif) - Potensial kritis 80% (kumulatif) - Monitoring pelaksanaan dan mempertahankan lahan yang telah direhabilitasi	- konservasi lahan kritis dilakukan secara berkelan-jutan dan pelibatan peran masyarakat	Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BP DAS Jeneberang, BBWS Pompengan Jeneberang, Kelompok masyarakat
		Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan tidak sesuai kaidah konservasi, menyebabkan meningkatnya kekritisan lahan, terutama di Kab. Gowa (3.039 km^2 tahun 2003 menjadi 3.118 km^2 tahun 2010)	Pemanfaa-tan lahan di luar kawasan hutan sesuai dengan kaidah konservasi	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 20% lahan - Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 50% kumulatif luas lahan - Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 80% kumulatif luas lahan - Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat	Pemanfaa-tan lahan di luar kawasan hutan harus sesuai dengan kaidah konservasi lahan	Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BP DAS Jeneberang, BBWS Pompengan Jeneberang, Dinas Pertanian provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar Kelompok masyarakat

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Belum ada penetapan batas maupun peruntukan sempadan sungai dan waduk	Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk diterbitkan	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk - Sosialisasi dan penerapan Perda	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk - Sosialisasi Perda - Penerapan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda	Penertiban Peraturan Daerah tentang batas dan Peruntu-kan sempadan sungai dan waduk	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar
		Masih terbatasnya ruang terbuka hijau di perkotaan (masih < 30% luas ruang) khususnya Kota Makassar	Minimum 30% ruang terbuka hijau dapat terpenuhi	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau di tiap kabupaten/kota sesuai RTRW yang disusun - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau di tiap kabupaten/kota sesuai RTRW yang disusun - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau - Pemantauan sistem pemberian insentif	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau tiap kabupa-ten/kota sesuai RTRW - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau - Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif secara berkelanjutan	Peningka-tan luas ruang terbuka hijau	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, Bappeda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar BPN, masyarakat
		Terjadi kerusakan morfologi sungai akibat penambangan galian mineral non logam di	Pengambi-lan galian mineral non logam terkendali	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para	Penyiapan lokasi yang sesuai untuk galian mineral	Dinas PSDA Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Sungai Jeneberang (Hilir Bendungan Bili Bili), di Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, Kec. Pallanga, Bontomarannu, Bontonompo dan Parangloe Kab. Gowa, Kec. Manggala Kota Makassar dan Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai		sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar	kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pembentukan kelompok para penambang dan mengarahkan kegiatannya pada lokasi yang sesuai dan aman dilengkapi dengan ijin penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar	penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pembentukan kelompok para penambang dan mengarah kan kegiatannya pada lokasi yang sesuai dan aman dilengkapi dengan ijin penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar - Evaluasi semua kegiatan penam-bangan sesuai dengan konsisi lingkungan sungai	non logam	Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, BBWS Pompengan Jeneberang, Bapedalda Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulsel, Kab. Maros, Gowa, Takalar, Kota Makassar, Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone dan selayar
		Potensi sedimentasi total WS Jeneberang sebanyak 83,76 ton/ha/tahun (DAS Taman Roya 6,85 ton/ha/tahun, DAS Jeneberang 25,62 ton/ha/tahun, DAS Kelara/Karaloe 4,39 ton/ha/tahun, DAS Maros 4,68 ton/ha/tahun, DAS Pappa 4,95 ton/ha/tahun, DAS Puncara 2,63 ton/ha/tahun, DAS Sinjai 5,63	Sedimentasi dapat terkendali	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pembangunan check dam pengendali di DAS Jeneberang dan DAS Sinjai - Pengerukan sedimen (DAS Jeneberang dan DAS Sinjai) - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri *Caldera*	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pembangunan check dam pengendali di DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, DAS Sinjai, DAS Kelara Karaloe - Pengerukan sedimen (DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, DAS Sinjai, DAS Kelara Karaloe) - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pembangunan check dam pengendali (DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros, DAS Pappa) - Pengerukan sedimen (DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe, DAS Maros, DAS Pappa) - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem	Pengurangan sedimentasi	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ, Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BPDAS, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/ Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		ton/ha/tahun, DAS Tallo 3,22 ton/ha/tahun, DAS Toppa 2,20 ton/ha/tahun)		*Collapse, Debris Monitoring and Warning System* - Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kab. Sinjai - Pembangunan Dam Pengendali Sedimen Eremata dan Bodak	telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System* - Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kab. Sinjai - Pembangunan Dam Pengendali Sedimen Eremata dan Bodak	telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System* - Pembangunan Chek Dam Mangottong 2 Kab. Sinjai - Pembangunan Dam Pengendali Sedimen Eremata dan Bodak		
		Abrasi dan pantai kritis yang tersebar di Kabupaten Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Makassar, Jeneponto dan Maros	Terlindungnya kawasan pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 20% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 50% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 80% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo,	Pelindungan kawasan pantai secara berkelanju-tan	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Merpati, Tanaberu, Bintorere, Menara (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	Bintorere, Pantai Menara (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros		
2.	Pengawetan Air	Ketersediaan air permukaan masih terbatas (volume tampungan 4,91 milyar m3) dan masih banyak air mengalir ke laut pada saat musim penghujan	Optimalisasi potensi ketersediaan air	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 10 embung di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe - Pembangunan Waduk Bontosunggu - Pembangunan Waduk Tunggu Nipanipa - Pembangunan Waduk Waru Waru - Pembangunan Embung Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba - Pembangunan Embung Malela di Kab. Takalar - Pembangunan Embung Allu di Kab. Jeneponto - Pembangunan Embung	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 10 embung di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe - Pembangunan Waduk Bontosunggu - Pembangunan Waduk Tunggu Nipanipa - Pembangunan Waduk Waru Waru - Pembangunan Embung Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba - Pembangunan Embung Malela di Kab. Takalar - Pembangunan Embung Allu di Kab. Jeneponto - Pembangunan Embung Kampala di Kab. Bantaeng	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 10 embung di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe - Pembangunan Waduk Bontosunggu - Pembangunan Waduk Tunggu Nipanipa - Pembangunan Waduk Pamukkulu - Pembangunan Waduk Waru Waru - Pembangunan Embung Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba - Pembangunan Embung Malela di Kab. Takalar - Pembangunan Embung Allu di Kab. Jeneponto	Peningkatan kapasitas tampungan air	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Kampala di Kab. Bantaeng - Pembangunan Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba - Peningkatan biaya O & P sampai 30% OP normal	- Pembangunan Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba - Peningkatan biaya O & P sampai 50% OP normal	- Pembangunan Embung Kampala di Kab. Bantaeng - Pembangunan Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba - Peningkatan biaya O & P sampai 80% OP normal		
		Kemampuan resapan air semakin berkurang terutama di kawasan perkotaan (rata-rata potensi resapan 35,72 mm/bulan pada tahun 2003 turun menjadi 34,25 mm/bulan pada tahun 2010)	Peningka-tan daerah resapan air (*recharge area*)	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Ruang terbuka hijau yang sudah ada dipertahankan - Peningkatan luasan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Pembangunan sarana resapan air (biopori dan sumur resapan) 10% luas	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Ruang terbuka hijau yang sudah ada dipertahankan - Peningkatan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Pembangunan sarana peresapan air (biopori dan sumur resapan) 30% luas - Evaluasi kegiatan dan keberhasilan program	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Pembangunan sarana peresapan air (biopori dan sumur resapan) 50% luas - Ruang terbuka hijau yang sudah ada dipertahankan - Peningkatan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Evaluasi kegiatan dan keberhasilan program	Pelestarian daerah resapan air	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		Efisiensi pemakaian air masih rendah (Kehilangan air di jaringan irigasi masih tinggi akibat kerusakan jaringan irigasi D.I. Kalamisu, D.I. Pamukkulu, D.I. Bantimurung, D.I. Kampili, D.I. Lekopancing, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai.	Tercapainya efisiensi pemakaian air	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (30% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (60% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi D.I. Kalamisu Kab. Sinjai	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (80% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi D.I. Kalamisu Kab. Sinjai	Peningka-tan efisien-si pemakai-an air	Dinas Pertanian Provinsi/Kabu-paten/ Kota, Perindustrian Provinsi/Kabu-paten/ Kota, Bappeda

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				- Rehabilitasi D.I. Kalamisu Kab. Sinjai - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros - Rehabilitasi D.I. Kampili Kab. Gowa - Rehabilitasi D.I. Lekopancing Kab. Maros - Rehabilitasi Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai - Rehabilitasi D.I. Bayang-Bayang	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros - Rehabilitasi D.I. Kampili Kab. Gowa - Rehabilitasi D.I. Lekopancing Kab. Maros - Rehabilitasi Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai - Rehabilitasi D.I. Bayang-Bayang	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros - Rehabilitasi D.I. Kampili Kab. Gowa - Rehabilitasi D.I. Lekopancing Kab. Maros - Rehabilitasi Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai - Rehabilitasi D.I. Bayang-Bayang		
3.	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Terjadi penurunan kualitas air akibat pembuangan limbah domestik, industri dan pertanian (mengandung BOD 5,4 mg/l, COD 14,35 mg/l, DO 5,1 mg/l, TSS 65,30 mg/l, Nitrit 0,074 mg/l, Phospat 1,614 mg/l dimana hal tersebut melebihi ambang batas kandungan untuk mutu air kelas II)	Kualitas air menjadi lebih baik	- Penyusunan Perda tentang pembuangan limbah cair - Kegiatan PROKASIH diaktifkan kembali - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal), target 20% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL	- Penyusunan dan implementasi Perda tentang pembuangan limbah cair - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Perlombaan PROKASIH di setiap wilayah kabupaten/kota - Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal), target 40% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu,	- Penyusunan dan implementasi Perda tentang pembuangan limbah cair - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Perlombaan PROKASIH di setiap wilayah kabupaten/kota - Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal), target 60% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL	Peningka-tan kualitas air sungai sesuai dengan standar baku mutu	Bapedalda Provinsi/ Kabupaten/Kota, Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu	IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu	Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu		
		Pengelolaan limbah sampah belum optimal	Pengelolaan dan pengolahan sampah semakin baik	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kabupaten - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kecamatan - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kecamatan - Evaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	Sampah dikelola dengan baik dan berkelanju-tan	Bapedalda Provinsi/ Kabupaten/Kota, Masyarakat, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
II. Pendayagunaan Sumber Daya Air								
1.	Penataguna-an Sumber Daya Air	Belum ada zona pemanfaatan sumber daya air	Ada penetapan zona untuk pemanfaa-tan sumber daya air di setiap wilayah sungai	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi/Kabupa-ten/Kota	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota - Evaluasi dan atau penetapan kembali zona pemanfaatan sumber daya air - Pemantauan pelaksanaan zona pemanfaatan sumber daya air dan melakukan revisi jika diperlukan	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota - Evaluasi dan atau penetapan kembali zona pemanfaatan sumber daya air - Pemantauan pelaksanaan zona pemanfaatan sumber daya air dan melakukan revisi jika diperlukan	Penetapan zona untuk pemanfaa-tan SDA di WS	Bapedalda Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten /Kota
		Belum ada peraturan yang menetapkan peruntukan air pada sumber air	Ada aturan yang menetapkan peruntukan dan kelas air sungai	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Penerbitan Peraturan Gubernur dan dilakukan sosialisasi	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas - Implementasi PerGub yang sudah terbit - Penyusunan kajian penetapan untuk sungai lainnya - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Penerbitan PerGub dan dilakukan sosialisasi - Evaluasi PerGub yang telah terbit bersama TKPSDA	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas - Implementasi PerGub yang sudah terbit - Penyusunan kajian penetapan untuk sungai lainnya - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Penerbitan PerGub dan melakukan sosialisasi - Evaluasi PerGub yang telah terbit bersama TKPSDA	Pengkajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai	Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten /Kota
2.	Penyediaan Sumber Daya Air	Terjadi kekurangan air baku irigasi dan RKI (terjadi defisit ± 78 m3/dt pada tahun 2010 dan meningkat menjadi ± 186 m3/dt pada tahun 2032 apabila tidak dilakukan pembangunan sarana SDA)	Layanan air baku tercukupi	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 10 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe, Bonto-sunggu, Tunggu	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 10 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe, Bonto-sunggu, Tunggu Nipanipa,	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 10 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe, Bonto-sunggu, Tunggu Nipanipa, Waru waru	Tersedia-nya kecukupan air untuk irigasi dan RKI	Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten / Kota, BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Nipanipa, Waru waru - Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros dan Malino Kab. Gowa - Pembangunan Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Embung Malela dan Jaringan Air Baku di Kab. Takalar, Embung Allu dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba - Pembangunan Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Gowa - Pembangunan Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba - Pembangunan D.I. Kelara Karaloe - Pembangunan JIAT Kab. Sinjai, Kab. Jene-ponto, Kab. Bantaeng - Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros	Waru waru - Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros dan Malino Kab. Gowa - Pembangunan Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Embung Malela dan Jaringan Air Baku di Kab. Takalar, Embung Allu dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba - Pembangunan Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Gowa - Pembangunan Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba - Pembangunan D.I. Kelara Karaloe - Pembangunan JIAT Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng - Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros	- Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros dan Malino Kab. Gowa - Pembangunan Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Embung Malela dan Jaringan Air Baku di Kab. Takalar, Embung Allu dan Jaringan Air Baku di Kab. Jeneponto, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba - Pembangunan Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Gowa - Pembangunan Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba - Pembangunan D.I. Kelara Karaloe - Pembangunan JIAT Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng - Pembangunan Jaringan Irigasi Pompa - nisasi Kab. Maros - Penyediaan Air Baku Kelara Kab. Jeneponto, Sungai Panrere Kab. Sinjai - Penyediaan Air Baku Tompobulu		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Tingkat layanan air perpipaan masih terbatas (40% rata-rata WS Jeneberang – Bantaeng 39,90%; Bulukumba 74,70%; Gowa 54,25%; Jeneponto 66,13%; Makassar 75,50%; Maros 31,29%; Selayar 77,25%; Sinjai 35,67%; Takalar 56,00%; Sulawesi Selatan 45,25%)	Layanan air baku sesuai target MDG's	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 40% untuk tiap kabupaten/kota	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 60% untuk tiap kabupaten/kota	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 70% untuk tiap kabupaten/kota	Peningka-tan layanan air baku untuk masyarakat	Dinas Cipta Karya, PDAM, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota
3.	Penggunaan Sumber Daya Air	Kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya (D.I. Kalamisu, D.I. Pamukkulu, D.I. Bantimurung, D.I. Kampili, D.I. Lekopancing, J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai, D.I.	Jaringan irigasi dan prasarana SDA dapat beroperasi normal	- Inventarisasi dan identifikasi kerusak-an jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Rehabilitasi D.I. Pamukkulu Kab. Takalar, D.I.	- Inventarisasi dan identifikasi kerusak-an jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Rehabilitasi D.I. Pamukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab.	- Inventarisasi dan identifikasi kerusak-an jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Rehabilitasi D.I. Pamukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab.	Rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA	Dinas Pertanian Provinsi/Kabu-paten/ Kota, Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten / Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Bissua)		Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang - Perbaikan dan peningkatan biaya O&P sampai 40% O&P normal	Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang - Perbaikan dan peningkatan biaya O&P sampai 60% O&P normal	Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, D.I. Bissua Kab. Takalar, D.I. Kelara Karaloe, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang - Perbaikan dan peningkatan biaya O&P sampai 80% O&P normal		
		Belum tersedia manual SOP waduk, embung dan prasarana SDA lainnya yang ada di setiap DAS	Tersedia manual SOP di setiap waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penerapan SOP di seluruh waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penerapan SOP di seluruh waduk, embung dan prasarana SDA lainnya - Review SOP disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan prasarana SDA-nya	Penyiapan SOP waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		Manajemen asset sarana dan prasarana SDA belum berjalan	Asset sarana dan prasarana SDA dapat terinventori dengan baik	- Inventori asset SDA dan pelaksanaan manajemen asset (40% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang	- Inventori asset SDA dan pelaksanaan manajemen asset (60% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang - Evaluasi dan updating buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang secara berkelanjutan	- Inventori asset SDA dan pelaksanaan manajemen asset (80% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang - Evaluasi dan updating buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang secara berkelanjutan	Penyusunan asset manajemen sarana dan prasarana SDA	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
4.	Pengembangan Sumber Daya Air	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ketersediaan air untuk pembangkitan tenaga listrik	Pengembangan potensi PLTA/PLTM di WS Jeneberang terlaksana	- Pelaksanaan identifikasi dan kajian potensi SDA untuk listrik tenaga air - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 10% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat desa/ masyarakat setempat	- Pelaksanaan identifikasi dan kajian potensi SDA untuk listrik tenaga air - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe dan PLTA Bontosunggu - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 20% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat desa/ masyarakat setempat	- Pelaksanaan identifikasi dan kajian potensi SDA untuk listrik tenaga air - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe, PLTA Bontosunggu dan PLTA Pamukkulu - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 50% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat desa/ masyarakat setempat	Peningka-tan ketahanan energi listrik tenaga air	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota
		Kebutuhan air baku untuk domestik semakin meningkat (tahun 2010 sebesar 9,32 m3/dt menjadi 12,01 m3/dt tahun 2032)	Kebutuhan air baku terpenuhi	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi SPAM IKK dan PAM-SIMAS untuk mendukung 50% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Maros, Tallo, Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 70% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Maros, Tallo, Pappa, dan Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 80% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	Peningka-tan keta-hanan air bersih	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda, Provinsi/Kabu-paten/ Kota, PDAM

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
5.	Pengusahaan Sumber Daya Air	Belum ada institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA	Didirikan institusi pengelola SDA yang dapat melakukan pengusahaan SDA	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN atau BUMD)	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN/BUMD) - Pengoperasian institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA - Evaluasi institusi pengelola	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN/BUMD) - Pengoperasian institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA - Evaluasi institusi pengelola	Pendirian institusi pengelola SDA yang dapat melakukan pengusahaan sumber daya air	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota
		Terbatasnya pengusahaan SDA oleh swasta	Pengembangan pengusahaan SDA oleh swasta (air bersih maupun energi listrik) terlaksana	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU)	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU) - Implementasi BLU dalam pengelolaan WS Jeneberang	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU) - Implementasi BLU dalam pengelolaan WS Jeneberang	Peningka-tan peran serta pihak swasta	BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten / Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
III. Pengendalian Daya Rusak Air								
1.	Pencegahan Daya Rusak Air	Belum tersedia sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh	Sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh tersusun	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (10% kegiatan)	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (30% kegiatan)	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (60% kegiatan) - Evaluasi dan review sistem pengendalian banjir yang telah disusun	Pengendalian banjir secara terpadu dan Menyeluruh	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		Belum tersedia pedoman untuk rencana tindak darurat (RTD)	Tersedia pedoman rencana tindak darurat (RTD)	- Penyusunan RTD (20% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Penyusunan RTD (30% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Penyusunan RTD (60% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	Peningka-tan kesiapan dalam menghadapi jebolnya waduk/embun g	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		Berkurangnya kapasitas aliran sungai	Sungai mampu mengalirankan debit banjir sesuai rencana	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Tangka - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (15%)	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Tangka, Sungai Tamanroya, Sungai Bialo - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (35%) - Pelaksanaan O&P sungai sepanjang tahun	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Tangka, Sungai Tamanroya, Sungai Bialo, Sungai Sinjai, Sungai Pappa - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (80%) - Pelaksanaan O&P sungai sepanjang tahun	Peningkatan kapasitas aliran sungai	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		Penggunaan bantaran sungai untuk permukiman (Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo dan sungai-sungai lainnya terutama yang melitas perkotaan)	Bantaran sungai bebas dari permuki-man	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penertiban hunian di daerah sempadan	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penerapan Peraturan Daerah tentang sempadan sungai - Penertiban hunian di daerah sempadan sungai dan melakukan pengawasannya	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penerapan Peraturan Daerah tentang sempadan sungai - Penertiban hunian di daerah sempadan sungai dan melakukan pengawasannya	Penertiban bantaran sungai dari permuki-man	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Belum tersedia sistem peringatan dini banjir pada sungai utama	Semua sungai utama mempunyai sistem peringatan dini banjir	- Perencanaan pengem-bangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama - Pemasangan sistem pada sungai utama - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	- Perencanaan pengem-bangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama dan sungai prioritas lainnya - Pemasangan sistem pada sungai utama dan sungai prioritas - Operasional sistem pada sungai utama dan sungai prioritas lainnya - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	- Perencanaan pengembangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Pemasangan sistem pada sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Operasional sistem pada sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	Tingkatkan kewaspadaan Terhadap banjir	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
2.	- Penanggulangan Daya Rusak Air	- Terjadi banjir/luapan air pada Sungai Jeneberang, Maros, Pappa, Tangka dan Taman Roya	- Teratasinya luapan air sungai	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Pengendalian Banjir S. Pappa, Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto Kab.Takalar, Sungai Bua-Bua Kab. Selayar, S. Bialo Kab. Bantaeng, S. Mare-Mare Kab. Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Pengendalian Banjir S. Pappa, Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto Kab.Takalar, Sungai Bua-Bua Kab. Selayar, S. Bialo Kab. Bantaeng, S. Mare-Mare Kab. Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Pengendalian Banjir S. Pappa, Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto Kab.Takalar, Sungai Bua-Bua Kab. Selayar, S. Bialo Kab. Bantaeng, S. Mare-Mare Kab. Selayar, Sungai Bialo, Sungai Batangase - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembu-angan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir S. Balantieng Kab.	- Tingkatkan kesiapan dalam penanggulangan banjir	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir S. Balantieng Kab. Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Sungai Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (15%)	- Pengendalian Banjir S. Balantieng Kab. Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Sungai Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pengendalian Banjir Sungai Taroang & muara Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (25%, kumulatif 40%)	Bulukumba, Sungai Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Sungai Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pengendalian Banjir Sungai Taroang & muara Sungai Tamanroya Kab. Jeneponto - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (40%, kumulatif 80%)		
		- Terdapat pantai kritis dan abrasi pantai di Kabupaten Takalar, Bantaeng, Selayar, Maros, Makassar, Sinjai, Bulukumba dan Jeneponto	- Kerusakan/abrasi - Pantai teratasi	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Konservasi garis pantai - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 20% dari yang seharusnya - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Pemeliharaan konstruksi yang telah ada sebelumnya - Konservasi garis pantai masing-masing - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 40%, kumulatif 60% - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Pemeliharaan konstruksi yang telah ada sebelumnya - Konservasi garis pantai masing-masing - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 20%, kumulatif 80% - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua, Pantai Maricaya, Pantai Tompong, Pantai Lembang, Pantai Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai	- Pengama-nan garis pantai	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Merpati, Tanaberu, Bintorere, Pantai Menara (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Papo, Saro, Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	Lamalaka, Pantai Ujung Labbu, Pantai Pasorongi, Pantai Mattoanging, Pantai Rappoa (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Papo, Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	Rappoa (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan, Pantai Kota Benteng, Pantai Desa Bonelohe, Pantai Dusun Maharayya, Pantai Barugaiya, Pantai Dusun Parak (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung, Pantai Binamu, Pantai Arongkeke (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu, Pantai Bintorere, Pantai Menara (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro, Pantai Mangesu, Pantai Beru, Pantai Tamasaju, Pantai Muara Sungai Jeneberang, Pantai Mangindara (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros		
3.	- Pemulihan Daya Rusak Air	- Terjadi kerusakan sarana prasarana - sumber daya air	- Sarana dan prasarana dapat beroperasi kembali	- Inventarisasi kerusa-kan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabili-tasi sarana prasarana sumber daya air	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air	- Pengemba-lian fungsi sarana dan prasarana	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
IV. Sistem Informasi Sumber Daya Air								
1.	- Pengelolaan Sistem Infor-masi Sumber Daya Air	- Data base SDA (hidrologi, prasarana, - hidrogeologi, hidroklimatologi, kualitas air dan lingkungan) belum terintegrasi	- Data base SDA tersedia dengan baik dan benar serta - terintegrasi	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (20% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Penyediaan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P)	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (60% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Penyediaan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P)	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (80% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Penyediaan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P)	- Peningkatan kualitas data, SDM dan dana operasi dan pemeliharaa n	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Belum ada unit SISDA yang mengelola dan mengintegrasikan data SDA dari - instansi terkait lainnya	- Ada unit pengelola SISDA yang - berkelanjutan dan dapat diakses - dengan mudah	- Koordinasi dilakukan untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi	- Koordinasi dilakukan untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	- Koordinasi dilakukan untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA yang terintegrasi antar instansi terkait	- Data SISDA dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Pedoman pengelolaan SISDA belum ada	- Tersedianya pedoman tentang pengelolaan SISDA	- Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (20% dari sistem yang ada) - Penerapan pedoman	- Penerapan pedoman dan evaluasi penerapannya - Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (60% dari sistem yang ada)	- Penerapan pedoman dan evaluasi penerapannya - Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (80% dari sistem yang ada)	- Pengelolaan SISDA	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
2.	- Pengem-bangan Kese-pahaman Da-lam Penge-lolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	- Transparansi dalam penyajian informasi sumber daya air	- Terciptanya transparansi dalam penyajian informasi sumber daya air	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Transpa-ransi pengelolaan sistem informasi sumber daya air	- Seluruh instansi terkait pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
V. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha								
1.	- Pemberdaya-an *Stake-holder* dan Lembaga Pengelola Sumber Daya Air	- Koordinasi dan pembagian kewenangan belum optimal	- Optimalnya koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewe-nang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola SDA - Uji coba Badan Pengelola SDA	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewe-nang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola Sumber Daya Air - Uji coba Badan Pengelola SDA - Implementasi Badan Pengelola SDA	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewenang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola Sumber Daya Air - Uji coba Badan Pengelola SDA - Implementasi Badan Pengelola SDA	- Pembentu-kan Badan Pengelola Sumber Daya Air	- Ditjen SDA Departemen PU, seluruh stakeholder SDA WS Jeneberang
2.	- Pelibatan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	- Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan - masyarakat dalam pengelolaan SDA	- Pembinaan dan pemberda-yaan masyarakat dalam pengelolaan SDA meningkat	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha	- Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
		- Keterbatasan sumber daya manusia dan dana	- Sumber daya manusia dan dana lebih baik	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Peningkatan ke-mampuan sumber daya manusia	- Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Belum terbentuknya Dewan SDA	- Dewan SDA terbentuk	- Koordinasi yang melibatkan masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk membentuk Dewan SDA - Dewan SDA terbentuk	- Koordinasi yang melibatkan masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk membentuk Dewan SDA - Dewan SDA daerah terbentuk - Operasional Dewan SDA tingkat kabupaten/kota	- Koordinasi yang melibatkan masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk membentuk Dewan SDA - Dewan SDA daerah terbentuk - Operasional Dewan SDA tingkat kabupaten/kota	- Pembentu-kan Dewan SDA tingkat kabupaten/kota	- Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
		- Belum adanya kerjasama hulu hilir dalam - pelaksanaan konservasi DAS	- Konservasi DAS dengan prinsip hubungan hulu hilir terlaksana	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang dan DAS prioritas - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang dan DAS prioritas	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang, DAS prioritas dan DAS lainnya - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang, DAS prioritas dan DAS lainnya	- Pelaksana-an kerjasama - hulu hilir dalam pelaksa- - naan - konservasi DAS	- Dinas PU PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, BBWSPJ - Bappeda Propinsi/ Kabupaten/Ko-ta

Tabel 4.3. Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Jeneberang (Skenario Ekonomi Tinggi)

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
I. Konservasi Sumber Daya Air								
1.	- Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Air	- Fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan berkurang, terdapat lahan kritis: - DAS Jeneberang 219,74 km^2 - DAS Pappa 194,63 km^2 - DAS Kelara Karaloe 95,20 km^2 - DAS Tangka 87,43 km^2 dan DAS lainnya	- Terlaksanany a konservasi lahan kritis pada DAS di WS Jeneberang	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 50% - Kritis 20% - Agak kritis 20% - Potensial kritis 30% - Monitoring pelaksanaan	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 60% - Kritis 40% (kumulatif) - Agak kritis 40% (kumulatif) - Potensial kritis 40% (kumulatif) - Monitoring pelaksanaan dan mempertahankan lahan yang telah direhabilitasi	- Sosialisasi pentingnya upaya konservasi hutan - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan: - Sangat kritis 80% - Kritis 50% (kumulatif) - Agak kritis 50% (kumulatif) - Potensial kritis 50% (kumulatif) - Monitoring pelaksanaan dan mempertahankan lahan yang telah direhabilitasi	- Pengura-ngan kekritisan lahan dengan mela-kukan konservasi berkelanjuta n dan melibatkan peran masyarakat	- Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupate n/ Kota, BP DAS, BBWSPJ, Kelompok masyarakat
		- Pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan tidak sesuai kaidah konservasi, menyebabkan meningkatnya - kekritisan lahan, terutama di Kab. Gowa (3.039 km^2 tahun 2003 menjadi 3.118 km^2 tahun 2010)	- Pemanfaa-tan lahan di luar kawasan hutan sesuai dengan kaidah konservasi	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 10% lahan - Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 40% kumulatif luas lahan - Pembuatan bangunan kon-servasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat	- Sosialisasi, pelatihan, pendampingan masyarakat sekitar hutan dengan target 50% kumulatif luas lahan - Pembuatan bangunan konservasi sederhana seperti gully plug, terasiring bekerja sama dengan masyarakat	- Pemanfaa-tan lahan di luar kawasan hutan harus sesuai dengan kaidah konservasi lahan	- Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupate n/ Kota, BP DAS, BBWSPJ, Dinas Pertanian, Kelompok masyarakat
		- Belum ada penetapan batas maupun peruntukan sempadan sungai dan waduk	- Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk diterbitkan	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk - Sosialisasi dan penerapan Perda	- Penyusunan Perda pada sungai-sungai strategis terutama di perkotaan - Penetapan Perda tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk - Sosialisasi dan menerapkan Perda - Penerapan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda	- Penertiban Peraturan Daerah tentang batas dan peruntukan sempadan sungai dan waduk	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Masih terbatasnya ruang terbuka hijau di perkotaan (masih < 30% luas ruang) khususnya Kota Makassar	- Minimum 30% ruang terbuka hijau dapat terpenuhi	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau di tiap kabupaten/kota sesuai RTRW yang disusun - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau di tiap kabupaten/kota sesuai RTRW yang disusun - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau - Pemantauan sistem pemberian insentif	- Perencanaan ruang terbuka hijau pada RTRW tiap kabupaten/kota - Penetapan kawasan terbuka hijau tiap kabupa-ten/kota sesuai RTRW - Implementasi RTRW - Pemberian insentif bagi masyarakat atau industri yang meningkatkan ruang terbuka hijau - Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif secara berkelanjutan	- Peningkatan luas ruang terbuka hijau	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPN, masyarakat
		- Terjadi kerusakan morfologi sungai akibat penambangan galian mineral non logam di Sungai Jeneberang (Hilir Bendungan Bili Bili), di Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, Kec. Pallanga, Bontomarannu, Bontonompo dan Parangloe Kab. Gowa, Kec. Manggala Kota Makassar dan Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai	- Pengambilan galian mineral non logam terkendali	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pembentukan kelompok para penambang dan mengarahkan kegiatannya pada lokasi yang sesuai dan aman dilengkapi dengan ijin penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar	- Inventarisasi lokasi untuk pengambilan galian mineral non logam dan melakukan sosialisasi kepada para penambang - Penetapan lokasi penambangan - Pembentukan kelompok para penambang dan mengarahkan kegiatannya pada lokasi yang sesuai dan aman dilengkapi dengan ijin penambangan - Pemberian sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar - Evaluasi semua kegiatan penambangan sesuai dengan konsisi lingkungan sungai	- Penyiapan lokasi yang sesuai untuk galian mineral non logam	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bapedalda Provinsi/Kabupaten/ Kota, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Potensi sedimentasi total WS Jeneberang sebanyak 83,76 ton/ha/tahun - (DAS Taman Roya 6,85 ton/ha/tahun, DAS Jeneberang 25,62 ton/ha/tahun, DAS Kelara/Karaloe 4,39 ton/ha/tahun, DAS Maros 4,68 ton/ha/tahun, DAS Pappa 4,95 ton/ha/tahun, DAS Puncara 2,63 ton/ha/tahun, DAS Sinjai 5,63 ton/ha/tahun, DAS Tallo 3,22 ton/ha/tahun, DAS Toppa 2,20 ton/ha/tahun)	- Sedimentasi dapat terkendali	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pembangunan check dam pengendali di DAS Jeneberang dan DAS Sinjai - Pengerukan sedimen (DAS Jeneberang dan DAS Sinjai) - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System*	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pembangunan check dam pengendali di DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, DAS Sinjai, DAS Kelara Karaloe - Pengerukan sedimen (DAS Jeneberang, DAS Taman Roya, DAS Sinjai, DAS Kelara Karaloe) - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System*	- Survei dan investigasi lokasi dam pengendali sedimen dan pengerukan sedimen - Perencanaan dam pengendali sedimen - Pembangunan check dam pengendali (DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe) - Pengerukan sedimen (DAS Taman Roya, DAS Jeneberang, DAS Kelara Karaloe) - Pengerukan Waduk Bilibili - Pembangunan sistem telemetri *Caldera Collapse, Debris Monitoring and Warning System*	- Pengura-ngan sedimentasi	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPDAS, Bappeda Provinsi/Kabupaten/ Kota
		- Abrasi dan pantai kritis yang tersebar di Kabupaten Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Makassar, Jeneponto dan Maros	- Terlindung-nya kawasan pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 10% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Tappanjeng, Borongka-lukua (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Ujung (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Merpati,	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 30% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu (**Kab. Bulukumba**), Pantai	- Survei dan investigasi detail lokasi-lokasi pantai kritis - Perencanaan bangunan pengaman pantai dan 50% telah dilaksanakan - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo,	- Pelindungan kawasan pantai secara berkelanju-tan	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Tanaberu (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Papo, Saro (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	Pantai Saro (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros		
2.	Pengawetan Air	- Ketersediaan air permukaan masih terbatas (volume tampungan 4,91 milyar m^3) dan masih banyak air mengalir ke laut pada saat musim penghujan	- Optimalisasi potensi ketersediaan air	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 5 embung di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe - Pembangunan Waduk Bontosunggu - Pembangunan Waduk Tunggu Nipanipa - Pembangunan Waduk Waru Waru - Pembangunan Embung Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba - Pembangunan Embung Kampala di Kab. Bantaeng - Pembangunan Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba - Peningkatan biaya O & P sampai 20% OP normal	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 5 embung di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe - Pembangunan Waduk Bontosunggu - Pembangunan Waduk Tunggu Nipanipa - Pembangunan Waduk Waru Waru - Pembangunan Embung Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba - Pembangunan Embung Kampala di Kab. Bantaeng - Pembangunan Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba - Peningkatan biaya O & P sampai 30% OP normal	- Perencanaan embung/waduk - Pembangunan 5 embung di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe - Pembangunan Waduk Bontosunggu - Pembangunan Waduk Tunggu Nipanipa - Pembangunan Waduk Pamukkulu - Pembangunan Waduk Waru Waru - Pembangunan Embung Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe di Kab. Bulukumba - Pembangunan Embung Kampala di Kab. Bantaeng - Pembangunan Embung Bukit Harapan di Kab. Bulukumba - Peningkatan biaya O & P sampai 50% OP normal	- Peningkatan kapasitas tampungan air	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Kemampuan resapan air semakin berkurang terutama di kawasan perkotaan (rata-rata potensi resapan 35,72 mm/bulan pada tahun 2003 turun menjadi 34,25 mm/bulan pada tahun 2010)	- Peningka-tan daerah resapan air (*recharge area*)	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Ruang terbuka hijau yang sudah ada dipertahankan - Peningkatan luasan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Pembangunan sarana resapan air (biopori dan sumur resapan) 10% luas	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Ruang terbuka hijau yang sudah ada dipertahankan - Peningkatan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Pembangunan sarana peresapan air (biopori dan sumur resapan) 30% luas - Evaluasi kegiatan dan keberhasilan program	- Identifikasi daerah resapan air - Pelindungan dan peningkatan daerah resapan air - Sosialisasi tentang fungsi resapan air - Pembangunan sarana peresapan air (biopori dan sumur resapan) 50% luas - Ruang terbuka hijau yang sudah ada dipertahankan - Peningkatan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas administrasi kabupaten/kota - Evaluasi kegiatan dan keberhasilan program	- Pelestarian daerah resapan air	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ
		- Efisiensi pemakaian air masih rendah (Kehilangan air di jaringan irigasi masih tinggi akibat kerusakan jaringan irigasi - D.I. Kalamisu, D.I. Pamukkulu, D.I. Bantimurung, D.I. Kampili, D.I. Lekopancing, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai)	- Tercapainya efisiensi pemakaian air	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (20% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros - Rehabilitasi D.I.	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (30% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros - Rehabilitasi D.I. Kampili Kab. Gowa - Rehabilitasi D.I. Lekopancing Kab. Maros - Rehabilitasi Saluran Sek.	- Sosialisasi hemat pemakaian air - Identifikasi detail kerusakan jaringan irigasi - Perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan biaya O & P (50% normal) - Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pammukkulu Kab. Takalar - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantimurung Kab. Maros - Rehabilitasi D.I. Kampili Kab. Gowa - Rehabilitasi D.I. Lekopancing Kab. Maros - Rehabilitasi Saluran Sek.	- Peningkatan efisiensi pemakaian air	- Dinas Pertanian Provinsi/Kabu-paten/ Kota, Perindustrian Provinsi/Kabu-paten/ Kota, Bappeda

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Kampili Kab. Gowa - Rehabilitasi D.I. Lekopancing Kab. Maros - Rehabilitasi Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai	Bijawang J.I. Bontomanai	Bijawang J.I. Bontomanai		
3.	- Pengelolaan Kualitas Air dan Pengen-dalian Pencemaran Air	- Terjadi penurunan kualitas air akibat pembuangan limbah domestik, industri dan pertanian (mengandung BOD 5,4 mg/l, COD 14,35 mg/l, DO 5,1 mg/l, TSS 65,30 mg/l, Nitrit 0,074 mg/l, Phospat 1,614 mg/l dimana hal tersebut melebihi ambang batas kandungan untuk mutu air kelas II)	- Kualitas air menjadi lebih baik	- Penyusunan Perda tentang pembuangan limbah cair - Kegiatan PROKASIH diaktifkan kembali - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal), target 10% terlaksana - Memasukkan pela-jaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air	- Penyusunan dan implementasi Perda tentang pembuangan limbah cair - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Perlombaan PROKASIH di setiap wilayah kabupaten/kota - Pembangunan IPAL industri dan domestik (komunal), target 30% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan	- Menyusun dan implementasi Perda tentang pembu-angan limbah cair - Pemantauan kualitas air secara berkelanjutan - Perlombaan PROKASIH di setiap wilayah kabupaten/kota - Pembangunan IPAL industri dan domes-tik (komunal), target 50% terlaksana - Pelajaran lingkungan hidup di SD/SMP dan SMA dimasukkan sebagai muatan lokal - Pembangunan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar melalui IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/ Tanjung Bunga; sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) melalui IPAL Galesong; dan sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu	- Peningkatan kualitas air sungai sesuai dengan standar baku mutu	- Bapedalda Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu	Industri Gowa (KIWA) melalui IPAL Somba Opu			
		- Pengelolaan limbah sampah belum optimal	- Pengelolaan dan pengolahan sampah semakin baik	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kabupaten - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kecamatan - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Pembangunan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu dan berkelanjutan (insenerator) - Penerapan insenerator di setiap ibukota kecamatan - Evaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan - Pembangunan lokasi TPA untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata: Tammangapa di Kota Makassar; Bontoramba di Kabupaten Maros; Cadika di Kabupaten Gowa; Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan Ballang di Kabupaten Takalar	- Sampah dikelola dengan baik dan berkelanju-tan	- Bapedalda Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, Masyarakat, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
II. Pendayagunaan Sumber Daya Air								
1.	- Penataguna-an Sumber Daya Air	- Belum ada zona pemanfaatan sumber daya air	- Ada penetapan zona untuk pemanfaa-tan sumber daya air di setiap wilayah sungai	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi/Kabupa-ten/ Kota	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi/Kabupaten/ Kota - Evaluasi dan atau penetapan kembali zona pemanfaatan sumber daya air - Pemantauan pelaksanaan zona pemanfaatan sumber daya air dan melakukan revisi jika diperlukan	- Penyusunan dan penetapan zona pemanfaatan sumber daya air yang terintegrasi dengan RTRW Propinsi/Kabupaten/ Kota - Evaluasi dan atau penetapan kembali zona pemanfaatan sumber daya air - Pemantauan pelaksanaan zona pemanfaatan sumber daya air dan melakukan revisi jika diperlukan	- Penetapan zona untuk pemanfaa-tan SDA di WS	- Bapedalda Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabupaten/Kota
		- Belum ada peraturan yang menetapkan peruntukan air pada sumber air	- Ada aturan yang menetapkan peruntukan dan kelas air sungai	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Penerbitan Peraturan Gubernur dan melakukan sosialisasi	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas - Implementasi PerGub yang sudah terbit - Penyusunan kajian penetapan untuk sungai lainnya - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Penerbitan PerGub dan melakukan sosialisasi - Evaluasi PerGub yang telah terbit bersama TKPSDA	- Penyusunan kajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai berdasarkan prioritas - Implementasi PerGub yang sudah terbit - Penyusunan kajian penetapan untuk sungai lainnya - Pembahasan kajian bersama TKPSDA - Penerbitan PerGub dan melakukan sosialisasi - Evaluasi PerGub yang telah terbit bersama TKPSDA	- Pengkajian penetapan peruntukan air dan kelas air sungai	- Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabu-paten/Kota
2.	- Penyediaan Sumber Daya Air	- Terjadi kekurangan air baku irigasi dan - RKI (terjadi defisit ± 78 m^3/dt pada tahun 2010 dan meningkat menjadi ± 186 m^3/dt pada tahun 2032 apabila tidak	- Layanan air baku tercukupi	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 5 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 5 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk	- Pemeliharaan kapasitas tampungan dan prasarana SDA di setiap kabupaten - Pembangunan 5 embung tersebar di tiap kabupaten/kota - Pembangunan Waduk Kelara Karaloe, Bonto-	- Tersedianya kecukupan air untuk irigasi dan RKI	- Dinas Pertanian Provinsi/Kabu-paten/ Kota, BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		dilakukan pembangunan sarana SDA)		Kelara Karaloe, Bonto-sunggu, Tunggu Nipanipa, Waru waru - Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros dan Malino Kab. Gowa - Pembangunan Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba - Pembangunan Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar - Pembangunan Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba - Pembangunan D.I. Kelara Karaloe - Pembangunan JIAT Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng - Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros	Kelara Karaloe, Bonto-sunggu, Tunggu Nipanipa, Waru waru - Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros dan Malino Kab. Gowa - Pembangunan Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba - Pembangunan Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar - Pembangunan Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba - Pembangunan D.I. Kelara Karaloe - Pembangunan JIAT Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng - Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros	sunggu, Tunggu Nipanipa, Waru waru - Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Bulukumba, Jamala Kab. Maros dan Malino Kab. Gowa - Pembangunan Embung dan JAB Panrangnuangku Kab. Takalar - Pembangunan Embung Batu Lohe dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba, Embung Kampala dan Jaringan Air Baku di Kab. Bantaeng, Embung Bukit Harapan dan Jaringan Air Baku di Kab. Bulukumba - Pembangunan Saluran Sekunder Dingau D.I Bissua Kab. Takalar - Pembangunan Bendung Bayang-Bayang Kab. Bulukumba - Pembangunan D.I. Kelara Karaloe - Pembangunan JIAT Kab. Sinjai, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng - Pembangunan Jaringan Irigasi Pompanisasi Kab. Maros		

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Tingkat layanan air perpipaan masih terbatas (40% rata-rata WS Jeneberang – Bantaeng 39,90%; Bulukumba 74,70%; Gowa 54,25%; Jeneponto 66,13%; Makassar 75,50%; Maros 31,29%; Selayar 77,25%; Sinjai 35,67%; Takalar 56,00%; Sulawesi Selatan 45,25%)	- Layanan air baku sesuai target MDG's	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Maros, Tallo, Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 20% untuk tiap kabupaten/kota	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 40% untuk tiap kabupaten/kota	- Penyiapan sarana dan prasarana air baku PDAM - Pembangunan jaringan distribusi baru - Pelayanan air baku melalui program PAMSIMAS dan SPAM IKK untuk daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang - Pelayanan air PDAM dapat mencapai 60% untuk tiap kabupaten/kota	- Peningkatan layanan air baku untuk masyarakat	- Dinas Cipta Karya, PDAM, Bappeda Provinsi/Kabu-paten/Kota
3.	- Penggunaan Sumber Daya Air	- Kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya (D.I. Kalamisu, D.I. Pamukkulu, D.I. Bantimurung, D.I. Kampili, D.I. Lekopancing, J.I. Bontomanai, D.I. Bayang-Bayang, D.I. Bontomanai, D.I. Pamukulu)	- Jaringan irigasi dan prasarana SDA dapat beroperasi normal	- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Rehabilitasi D.I. Pamukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab.	- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Rehabilitasi D.I. Pamukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing	- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan jaringan irigasi dan prasarana SDA lainnya - Perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA - Rehabilitasi D.I. Pamukkulu Kab. Takalar, D.I. Bantimurung Kab. Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing	- Rehabilitasi jaringan irigasi dan prasarana SDA	- Dinas Pertanian Provinsi/Kabupate n/ Kota, Dinas PSDA Provinsi/Kabupate n/ Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Maros, D.I. Kampili Kab. Gowa, D.I. Lekopancing Kab. Maros, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai - Perbaikan dan meningkatkan biaya O&P sampai 20% O&P normal	Kab. Maros, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai - Perbaikan dan meningkatkan biaya O&P sampai 40% O&P normal	Kab. Maros, Saluran Sek. Bijawang J.I. Bontomanai - Perbaikan dan meningkatkan biaya O&P sampai 50% O&P normal		
		- Belum tersedia manual SOP waduk, embung dan prasarana SDA lainnya yang ada di setiap DAS	- Tersedia manual SOP di setiap waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penerapan SOP di seluruh waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	- Penyusunan SOP dan pelatihan untuk ujicoba penerapan SOP - Penerapan SOP di seluruh waduk, embung dan prasarana SDA lainnya - Review SOP disesuaikan dengan kondisi lingkungan	- Penyiapan SOP waduk, embung dan prasarana SDA lainnya	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Manajemen asset sarana dan prasarana SDA belum berjalan	- Asset sarana dan prasarana SDA dapat terinventori dengan baik	- Inventori asset SDA dan melaksanakan manajemen asset (30% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang	- Inventori asset SDA dan melaksanakan manajemen asset (40% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang - Evaluasi dan updating buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang secara berkelanjutan	- Inventori asset SDA dan melaksanakan manajemen asset (50% terinventori) - Penyusunan buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang - Evaluasi dan updating buku induk inventarisasi asset SDA di WS Jeneberang secara berkelanjutan	- Penyusunan asset manajemen sarana dan prasarana SDA	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
4.	- Pengemba-ngan Sumber Daya Air	- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ketersediaan air untuk pembangkitan tenaga listrik	- Pengembangan potensi PLTA/PLTM di WS Jeneberang terlaksana	- Identifikasi dan kajian potensi PLTM/PLTMH - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 10% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan	- Identifikasi dan kajian potensi PLTM/PLTMH - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe dan PLTA Bontosunggu - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 20% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat	- Identifikasi dan kajian potensi PLTM/PLTMH - Pembangunan PLTA Kelara Karaloe, PLTA Bontosunggu dan PLTA Pamukkulu - Pelaksanaan konstruksi PLTM/ PLTMH 30% dari potensi yang ada - Pelaksanaan O&P PLTM yang telah dibangun dan koordinasi dengan aparat	- Peningkatan ketahanan energi listrik tenaga air	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				koordinasi dengan aparat desa/ masyarakat setempat	desa/ masyarakat setempat	desa/ masyarakat setempat		
		- Kebutuhan air baku untuk domestik semakin meningkat (tahun 2010 sebesar 9,32 m^3/dt menjadi 12,01 m^3/dt tahun 2032)	- Kebutuhan air baku terpenuhi	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 40% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 50% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Penyusunan kajian potensi air baku untuk domestik - Pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK dan PAMSIMAS untuk mendukung 60% layanan PDAM di setiap kabupaten - SPAM jaringan perpipaan unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti, meliputi: IPA Somba Opu, IPA Ratulangi, IPA Panaikang dan IPA Antang, IPA Maccini Sombala, IPA Maros, IPA Pattallassang, IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang	- Peningkatan ketahanan air bersih	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta, BBWSPJ, Bappeda, Provinsi/Kabu-paten/ Kota, PDAM
5.	- Pengusahaan Sumber Daya Air	- Belum ada institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA	- Didirikan institusi pengelola SDA yang dapat melakukan pengusa-haan SDA	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN atau BUMD)	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN/BUMD) - Pengoperasian institusi pengelola SDA yang mela-kukan pengusahaan SDA	- Penyusunan kajian kelayakan institusi pengelola - Proses legalisasi berdirinya institusi pengelola yang melakukan pengusahaan SDA (BUMN/BUMD) - Pengoperasian institusi pengelola SDA yang melakukan pengusahaan SDA	- Pendirian institusi pengelola SDA yang dapat melakukan pengusa-haan sumber daya air	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ, Bappeda Provinsi/Kabupate n/Kota

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
					- Evaluasi institusi pengelola	- Evaluasi institusi pengelola		
		- Terbatasnya pengusahaan SDA oleh swasta	- Pengemba-ngan Pengusaha-an SDA oleh swasta (air bersih maupun energi listrik) terlaksana	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU)	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU) - Implementasi BLU dalam pengelolaan WS Jeneberang	- Pihak swasta didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih dan PLTA/PLTM - Penyusunan kajian pengelolaan WS Jeneberang secara korporat atau Badan Layanan Umum (BLU) - Implementasi BLU dalam pengelolaan WS Jeneberang	- Peningkatan peran serta pihak swasta	- BBWSPJ, Dinas PSDA Provinsi/Kabu-paten/ Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Ko-ta

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
III. Pengendalian Daya Rusak Air								
1.	- Pencegahan Daya Rusak Air	- Belum tersedia sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh	- Sistem pengenda-lian banjir secara terpadu dan menyeluruh tersusun	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (10% kegiatan)	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (30% kegiatan)	- Pembuatan sistem pengendalian banjir secara terpadu dan menyeluruh - Implementasi sistem pengendalian banjir yang telah disusun (50% kegiatan) - Evaluasi dan review sistem pengendalian banjir yang telah disusun	- Pengenda-lian banjir secara terpadu dan Menyeluruh	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Belum tersedia pedoman untuk rencana tindak darurat (RTD)	- Tersedia pedoman rencana tindak darurat (RTD)	- Penyusunan RTD (20% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Penyusunan RTD (30% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Penyusunan RTD (50% dari waduk/ embung yang ada) - Sosialisasi RTD yang telah disahkan	- Peningkatan kesiapan dalam menghadapi jebolnya waduk/em-bung	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Berkurangnya kapasitas aliran sungai	- Sungai mampu mengaliranka n debit banjir sesuai rencana	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (15%)	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Tangka - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (35%) - Pelaksanaan O&P sungai sepanjang tahun	- Pelaksanaan perencanaan normalisasi Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Tangka, Sungai Tamanroya - Pelaksanaan normalisasi sungai secara bertahap (50%) - Melaksanakan O&P sungai sepanjang tahun	- Peningkatan kapasitas aliran sungai	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Penggunaan bantaran sungai untuk permukiman (Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo dan sungai-sungai lainnya terutama yang melitas perkotaan)	- Bantaran sungai bebas dari permuki-man	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penertiban hunian di daerah sempadan	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penerapan Peraturan Daerah tentang sempadan sungai - Penertiban hunian di daerah sempadan sungai dan melakukan pengawasannya	- Penyusunan Perda tentang peruntukan sempadan sungai - Sosialisasi Perda - Penerapan Peraturan Daerah tentang sempadan sungai - Penertiban hunian di daerah sempadan sungai dan melakukan pengawasannya	- Penertiban bantaran sungai dari permuki-man	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		- Belum tersedia sistem peringatan dini banjir pada sungai utama	- Semua sungai utama mempunyai sistem peringatan dini banjir	- Pelaksanaan perencanaan pengembangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama - Pemasangan sistem pada sungai utama - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	- Pelaksanaan perencanaan pengembangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama dan sungai prioritas lainnya - Pemasangan sistem pada sungai utama dan sungai prioritas - Operasional sistem pada sungai utama dan sungai prioritas lainnya - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	- Perencanaan pengembangan sistem peringatan dini banjir pada sungai-sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Pemasangan sistem pada sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Operasional sistem pada sungai utama, sungai prioritas dan semua sungai rawan banjir - Pemeliharaan sistem peringatan dini banjir	- Tingkatkan kewaspada-an terhadap banjir	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
2.	- Penanggu-langan Daya Rusak Air	- Terjadi banjir/luapan air pada Sungai Jeneberang, Maros, Pappa, Tangka dan Taman Roya	- Teratasinya luapan air sungai	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir S. Balantieng Kab. Bulukumba, S. Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Tangka	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembuangan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir S. Balantieng Kab. Bulukumba, S. Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten	- Inspeksi badan sungai yang rawan banjir (dilakukan pada musim kemarau) - Penyiapan material/bahan banjiran - Perencanaan bangunan pengendali banjir dengan debit kala ulang Q25 - Rehabilitasi Tanggul Sungai Topa Kab. Jeneponto - Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai Mappili Buku, Kab. Gowa - Normalisasai saluran Pembu-angan Biringjene Kota Makassar - Pengendalian Banjir S. Balantieng Kab. Bulukumba, S. Tallo Kota Makassar, Sungai Maros, Tangka Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan	- Tingkatkan kesiapan dalam penanggulan gan banjir	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Kabupaten Sinjai, Sungai Parappa Kabupaten Selayar, Sungai Kelara Kabupaten Jeneponto - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (15%)	Jeneponto - Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga dan Pampang Kota Makassar - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (15%, kumulatif 30%)	Pampang Kota Makassar - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali banjir atau tanggul (20%, kumulatif 50%)		
		- Terdapat pantai kritis dan abrasi pantai di Kabupaten Takalar, Bantaeng, Selayar, Maros, Makassar, Sinjai, Bulukumba dan Jeneponto	- Kerusakan/abrasi pantai teratasi	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Konservasi garis pantai - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 10% dari yang seharusnya - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Tap-panjeng, Borongka-lukua (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Pantai Kampung Joo, Pantai Dusun Turungan (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Pantai Papo, Pantai Saro (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai,	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Pemeliharaan konstruksi yang telah ada sebelumnya - Konservasi garis pantai masing-masing - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 20%, kumulatif 30% - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Tappanjeng, Borongka-lukua (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Kampung Joo, Dusun Turungan (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Pantai Ujung (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Merpati, Tanaberu (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Papo, Saro (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	- Identifikasi pantai-pantai kritis dan penyebabnya - Pemeliharaan konstruksi yang telah ada sebelumnya - Konservasi garis pantai masing-masing - Pelaksanaan konstruksi bangunan pengendali pantai 20%, kumulatif 50% - Pengaman Abrasi Pantai Galesong (**Kab. Takalar**), Pantai Cabodo, Pantai Tappanjeng, Pantai Borongka-lukua (**Kab. Bantaeng**), Pantai Bonea, Kampung Joo, Dusun Turungan (**Kab. Selayar**), Pantai Batule'leng, Ujung (**Kab. Jeneponto**), Pantai Ela-Ela, Pantai Merpati, Pantai Tanaberu (**Kab. Bulukumba**), Pantai Parappa, Papo, Pantai Saro (**Kab. Takalar**), Pantai Sinjai Kabupaten Sinjai, Pantai Maros Kabupaten Maros	- Pengama-nan garis pantai	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
				Pantai Maros Kabupaten Maros				
3.	- Pemulihan Daya Rusak Air	- Terjadi kerusakan sarana prasarana sumber daya air	- Sarana dan prasarana dapat beroperasi kembali	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air	- Inventarisasi kerusakan dan penaksiran biaya yang diperlukan untuk pemulihan - Pengalokasian dana untuk perbaikan dan rehabilitasi - Pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air	- Pengemba-lian fungsi sarana dan prasarana	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
IV. Sistem Informasi Sumber Daya Air								
1.	Pengelolaan Sistem Infor-masi Sumber Daya Air	Data base SDA (hidrologi, prasarana, hidrogeologi, hidroklimatologi, kualitas air dan lingkungan) belum terintegrasi	Data base SDA tersedia dengan baik dan benar serta terintegrasi	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (10% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Menyediakan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P)	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (30% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Menyediakan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P)	- Penyediaan perlengkapan peralatan untuk menunjang SISDA (50% area tercover) - Peningkatan kemampuan tenaga SDM - Menyediakan dana untuk pemelihaan peralatan (O&P)	- Peningkatan kualitas data, SDM dan dana operasi dan pemeliharaa n	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Belum ada unit SISDA yang mengelola dan mengintegrasikan data SDA dari instansi terkait lainnya	- Ada unit pengelola SISDA yang berkelanjutan dan dapat diakses dengan mudah	- Koordinasi untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi	- Koordinasi untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	- Koordinasi untuk pembentukan unit SISDA tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Pengoperasian unit SISDA yang terintegrasi antar instansi terkait	Data SISDA dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi	Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
		- Pedoman pengelolaan SISDA belum ada	- Tersedianya pedoman tentang pengelolaan SISDA	- Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (20% dari sistem yang ada) - Penerapan pedoman	- Penerapan pedoman dan evaluasi penerapannya - Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (35% dari sistem yang ada)	- Penerapan pedoman dan evaluasi penerapannya - Penyusunan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang komprehensif (50% dari sistem yang ada)	- Pengelolaan SISDA	- Dinas PSDA Provinsi/ Kabupaten/Kota, BBWSPJ
2.	- Pengemba-ngan Kese-pahaman dalam Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	- Transparansi dalam penyajian informasi sumber daya air	- Terciptanya transparansi dalam penyajian informasi sumber daya air	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Penyusunan pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air - *Updating* data secara berkelanjutan	- Transparansi pengelolaan sistem informasi sumber daya air	- Seluruh instansi terkait pengelolaan sumber daya air WS Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
V. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha								
1.	- Pemberdaya-an Stakehol-*der* dan Lembaga Pengelola Sumber Daya Air	- Koordinasi dan pembagian kewenangan belum optimal	- Optimalnya koordinasi dan pembagian kewena-ngan yang jelas	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewe-nang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola SDA - Uji coba Badan Pengelola SDA	- Evaluasi dan Pengaturan kembali tugas dan wewe-nang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola Sumber Daya Air - Uji coba Badan Pengelola SDA - Implementasi Badan Pengelola SDA	- Evaluasi dan pengaturan kembali tugas dan wewenang institusi terkait dengan pengelolaan SDA - Penyusunan konsep Badan Pengelola Sumber Daya Air - Uji coba Badan Pengelola SDA - Implementasi Badan Pengelola SDA	- Pembentu-kan Badan Pengelola Sumber Daya Air	- Ditjen SDA Departemen PU, seluruh stakeholder SDA WS Jeneberang
2.	- Pelibatan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	- Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA	Pembinaan dan pemberda-yaan masyarakat dalam pengelolaan SDA meningkat	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	- Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan - Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DAS hulu dan sekitar hutan - Peningkatan kegiatan *community development*	Peningka-tan peran serta masyarakat dan dunia usaha	Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
		Keterbatasan sumber daya manusia dan dana	Sumber daya manusia dan dana lebih baik	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	- Optimalisasi sumber daya yang ada - Pelatihan sumber daya manusia - Pemberdayaan masyarakat dengan pola kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air - Alokasi dana yang cukup (10% APBD)	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target Yang Ingin Dicapai	Strategi			Kebijakan Operasio-nal	Lembaga/In-stansi Terkait
				Jangka Pendek (2013-2018)	Jangka Menengah (2013-2023)	Jangka Panjang (2013-2033)		
		Belum terbentuknya Dewan SDA	Dewan SDA terbentuk	- Koordinasi yang melibatkan masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk membentuk Dewan SDA - Dewan SDA terbentuk	- Koordinasi yang melibatkan masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk membentuk Dewan SDA - Dewan SDA daerah terbentuk - Operasional Dewan SDA tingkat kabupaten/kota	- Koordinasi yang melibatkan masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk membentuk Dewan SDA - Dewan SDA daerah terbentuk - Operasional Dewan SDA tingkat kabupaten/kota	Pembentu-kan Dewan SDA tingkat kabupaten/kota	Pemda Propinsi/ Kabupaten/Kota, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
		Belum adanya kerjasama hulu hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS	Konservasi DAS dengan prinsip hubungan hulu hilir terlaksana	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepakatan hulu hilir pada DAS Jeneberang dan DAS prioritas - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang dan DAS prioritas	- Penyiapan MOU dan pelaksanaan uji coba kesepa-katan hulu hilir pada DAS Jeneberang, DAS prioritas dan DAS lainnya - Pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan kerjasama hulu hilir DAS Jeneberang, DAS prioritas dan DAS lainnya	Peningkatan kerjasama hulu hilir dalam pelaksanaan konservasi DAS	Dinas PU PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, BBWSPJ Bappeda Propinsi/ Kabupaten/Kota

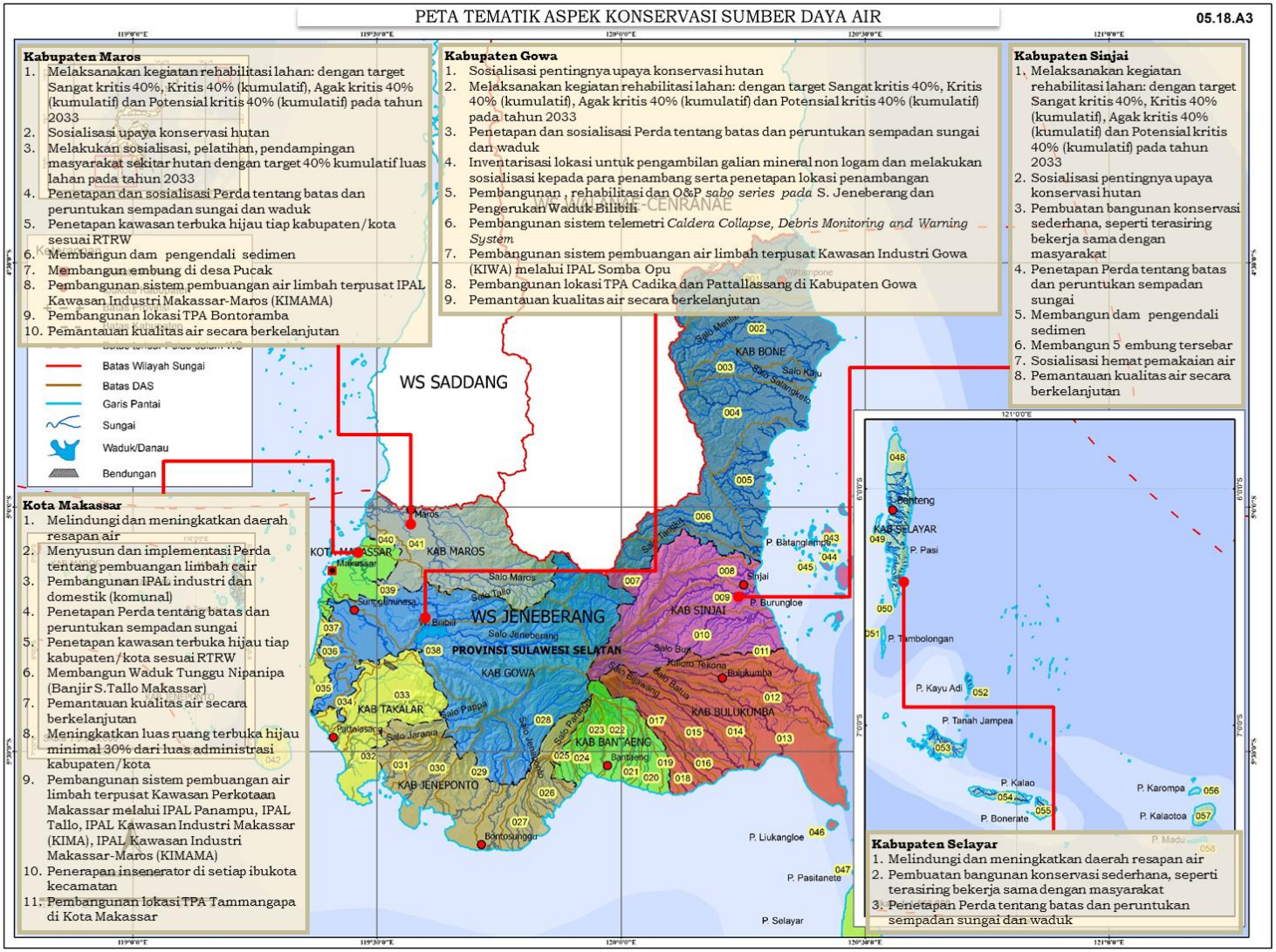

Gambar 4.1. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah

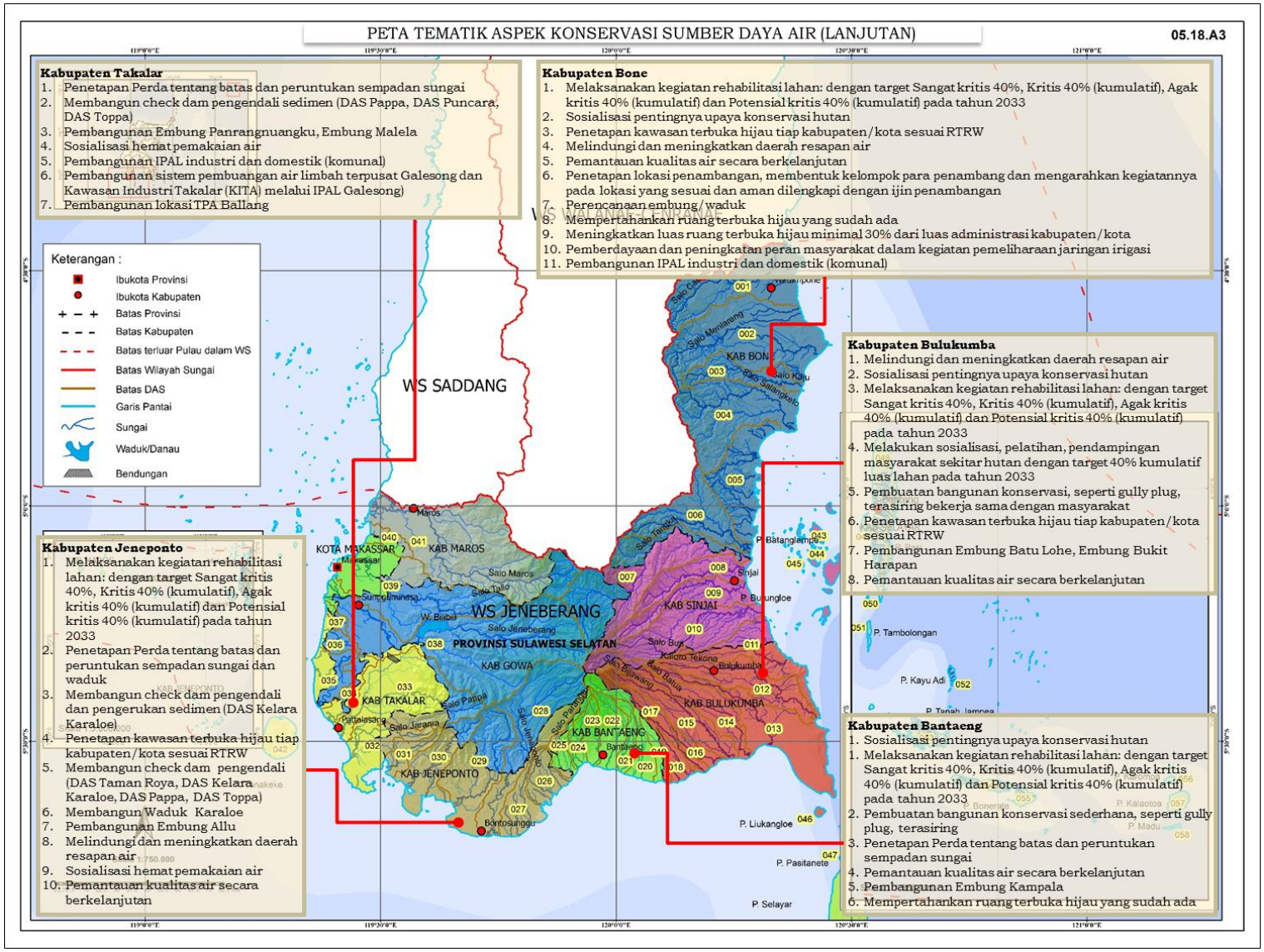

Gambar 4.2. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah (Lanjutan)

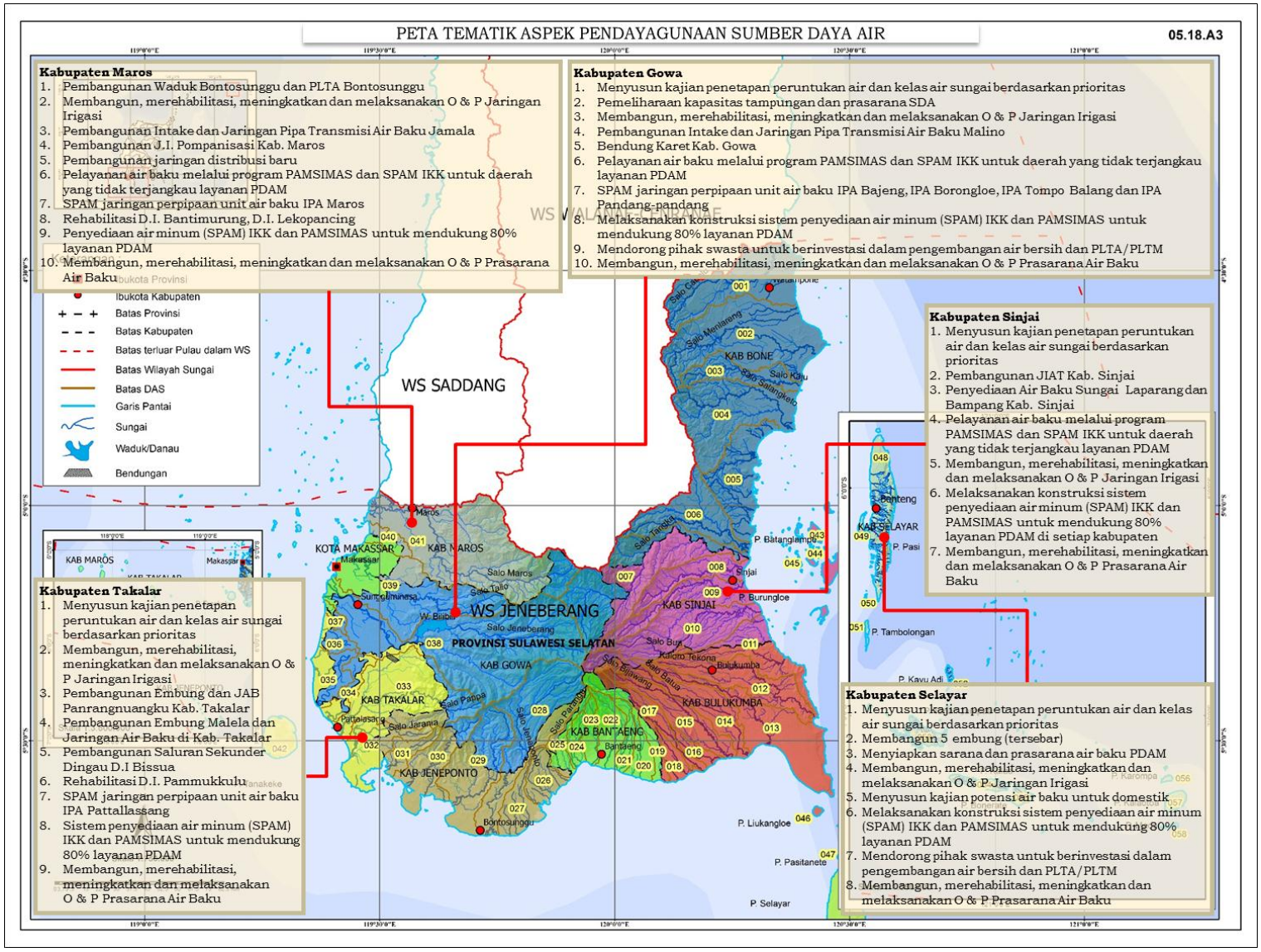

Gambar 4.3. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah

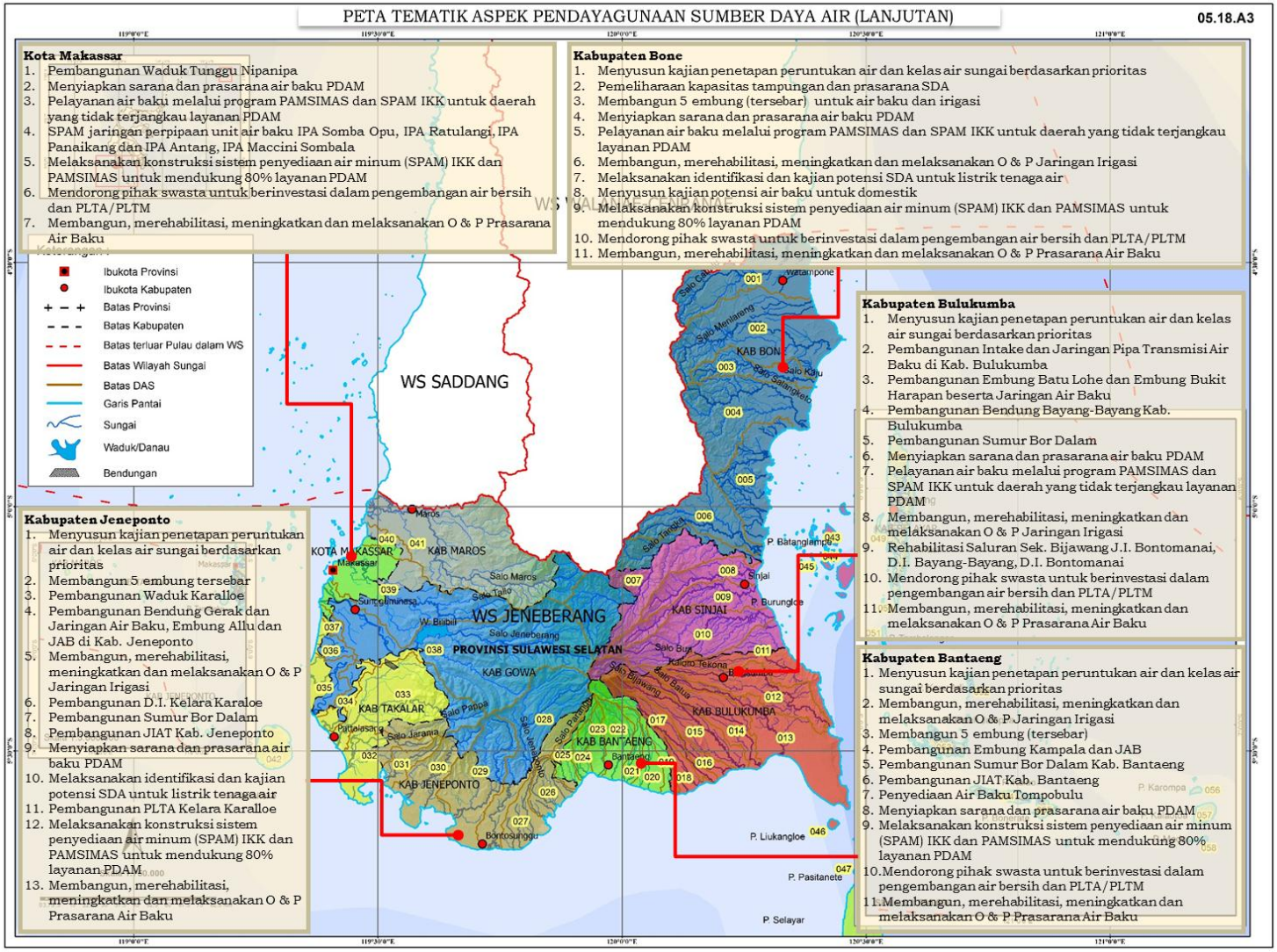

Gambar 4.4. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah (Lanjutan)

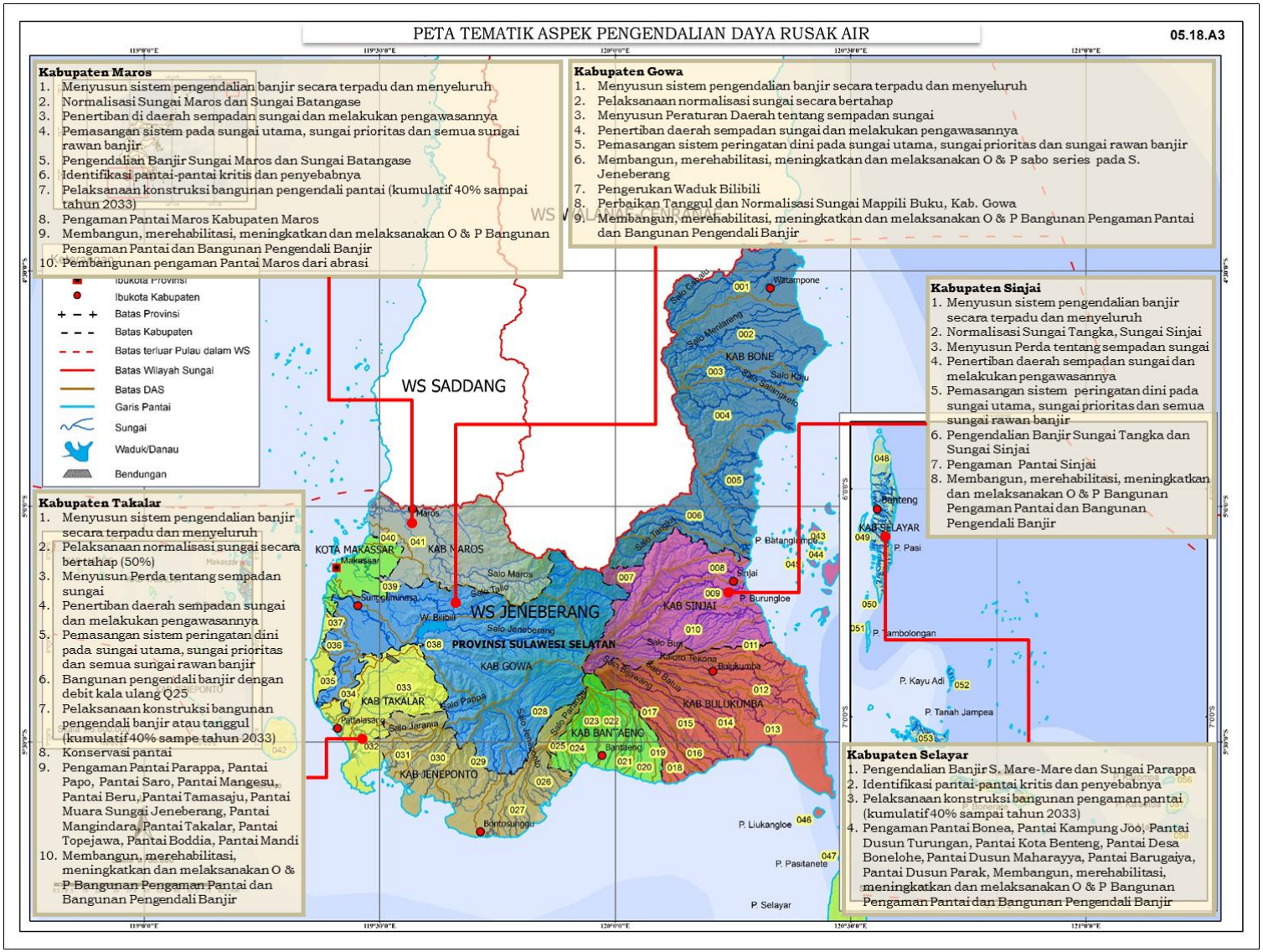

Gambar 4.5. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Rendah

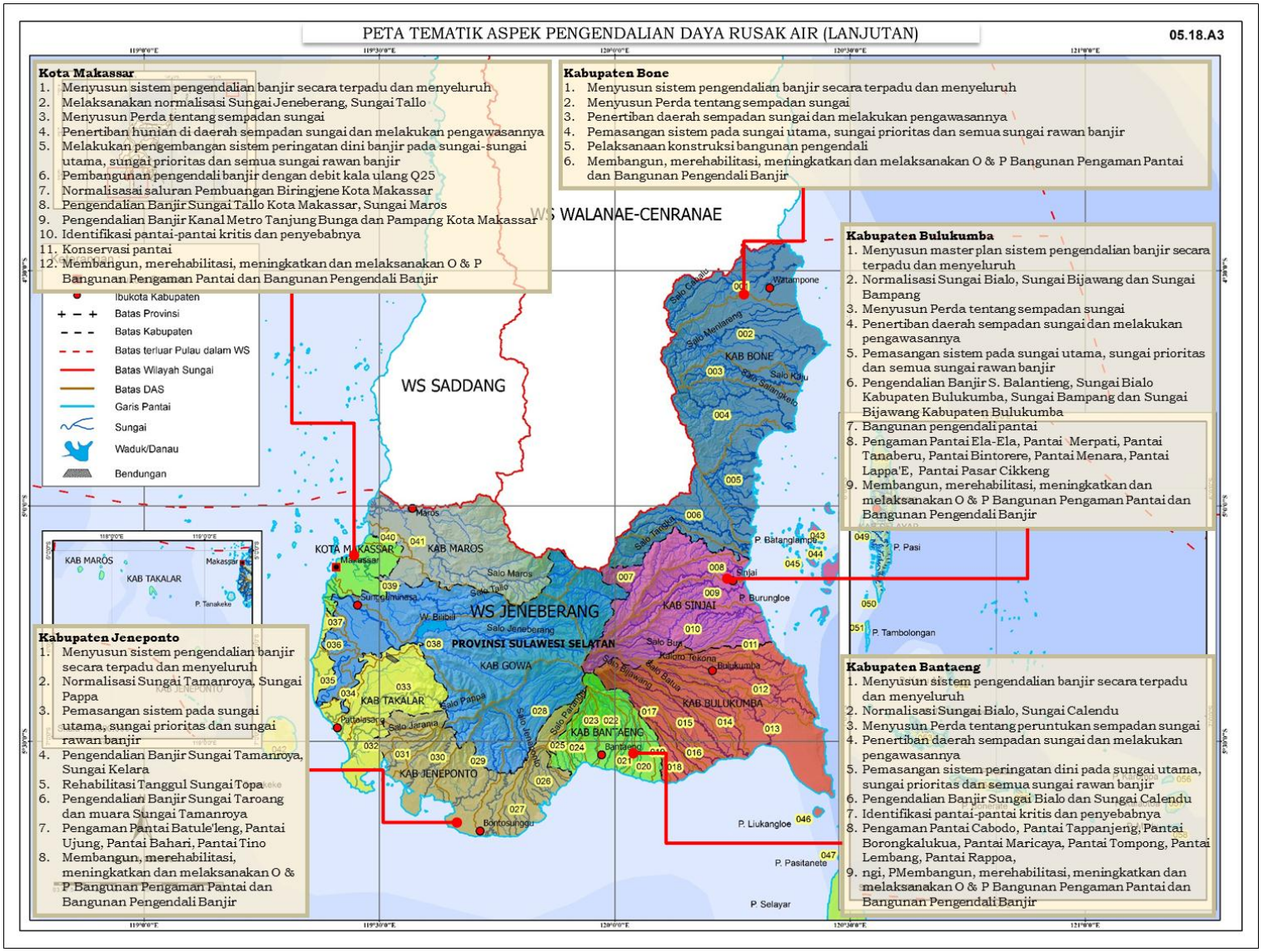

Gambar 4.6. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Rendah (Lanjutan)

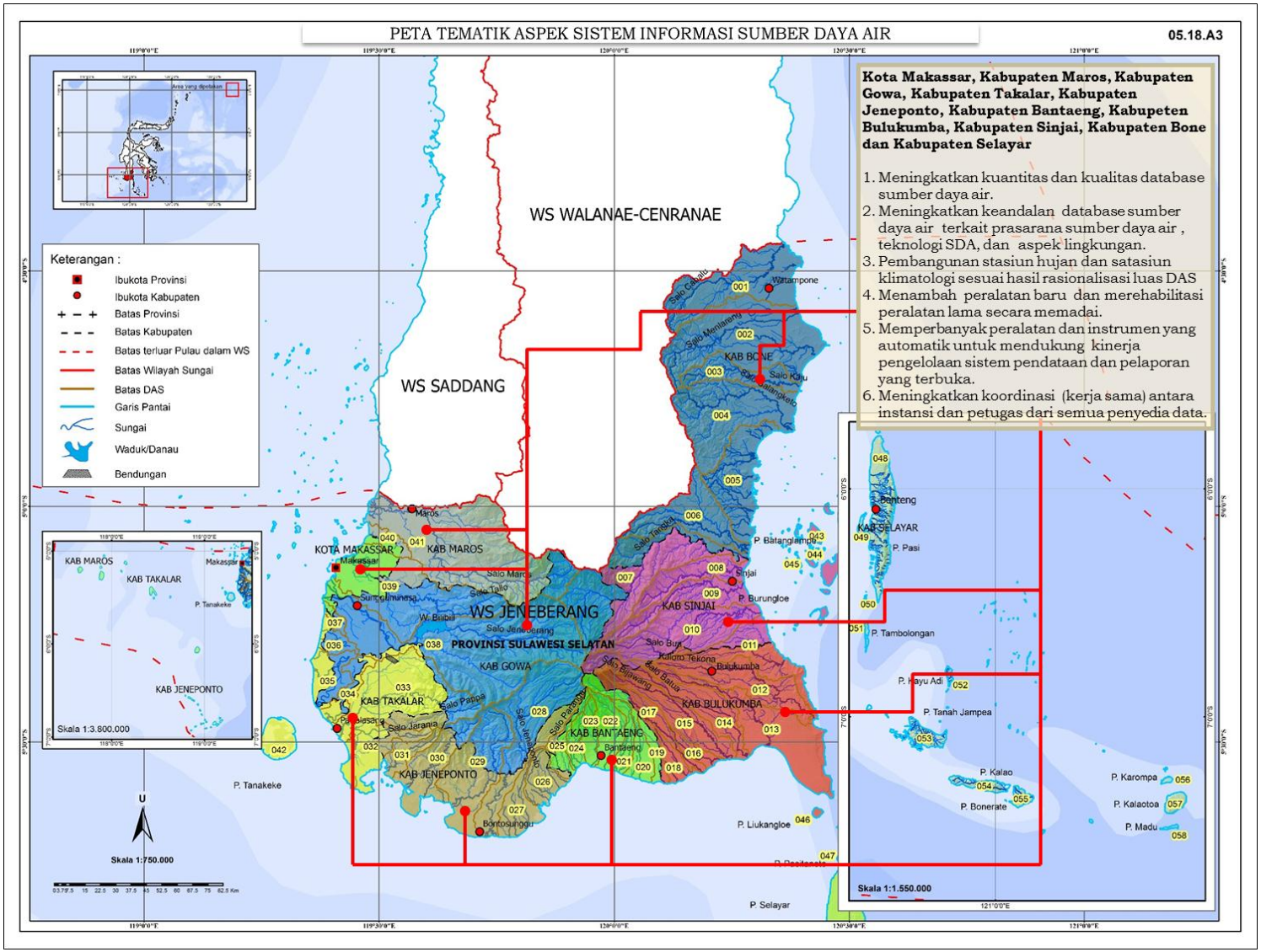

Gambar 4.7. Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Rendah

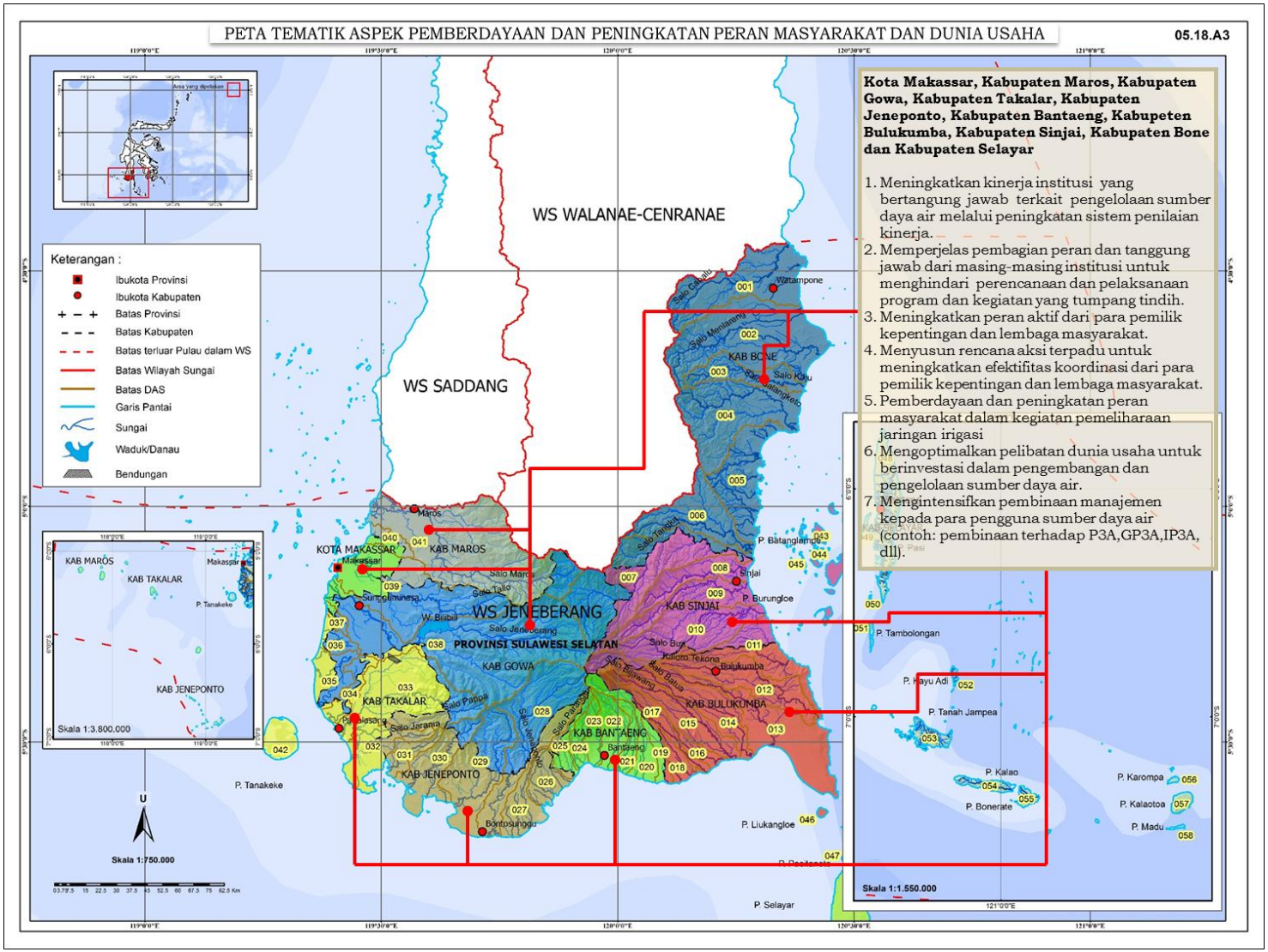

Gambar 4.8. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Rendah

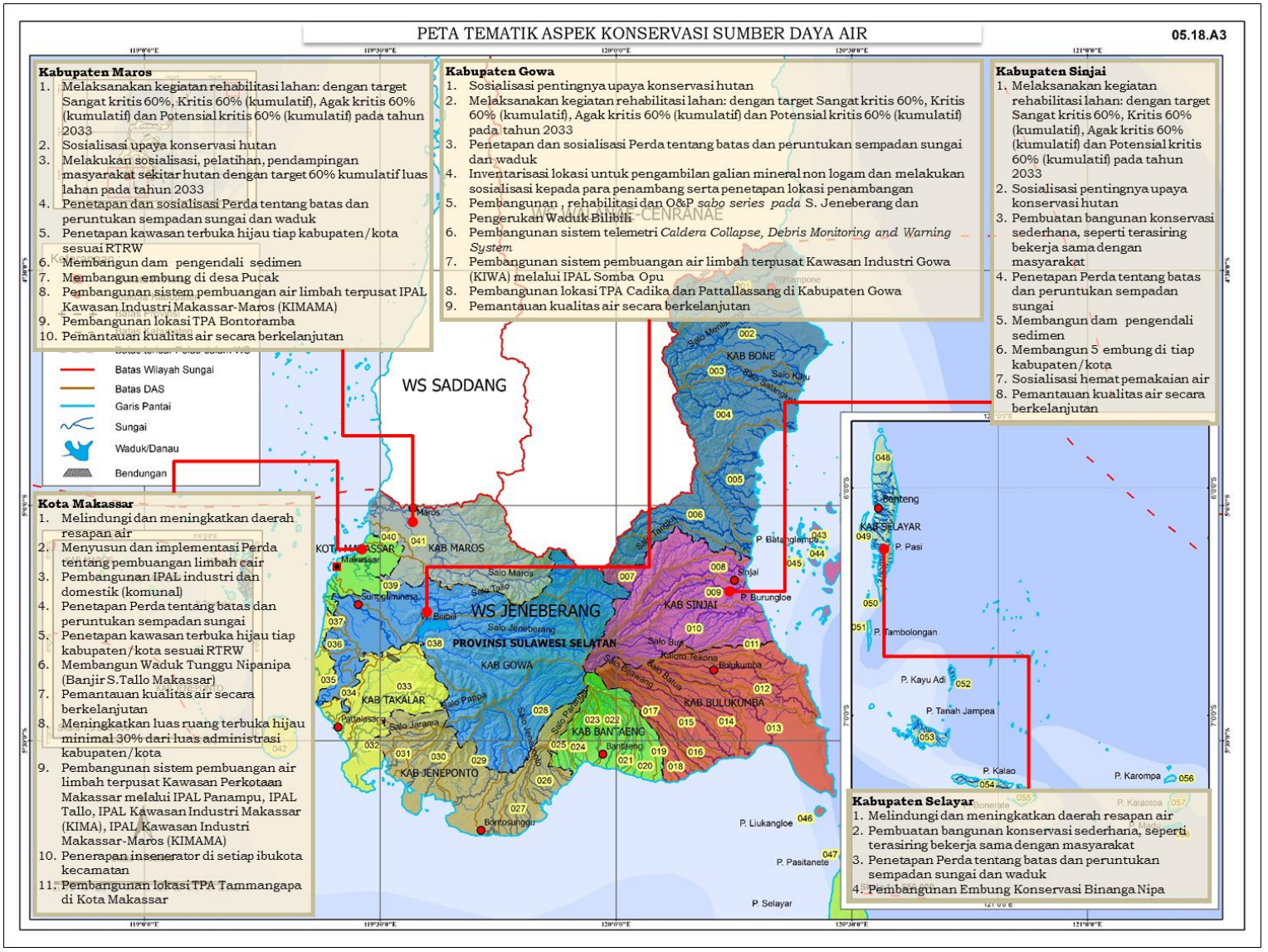

Gambar 4.9. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang

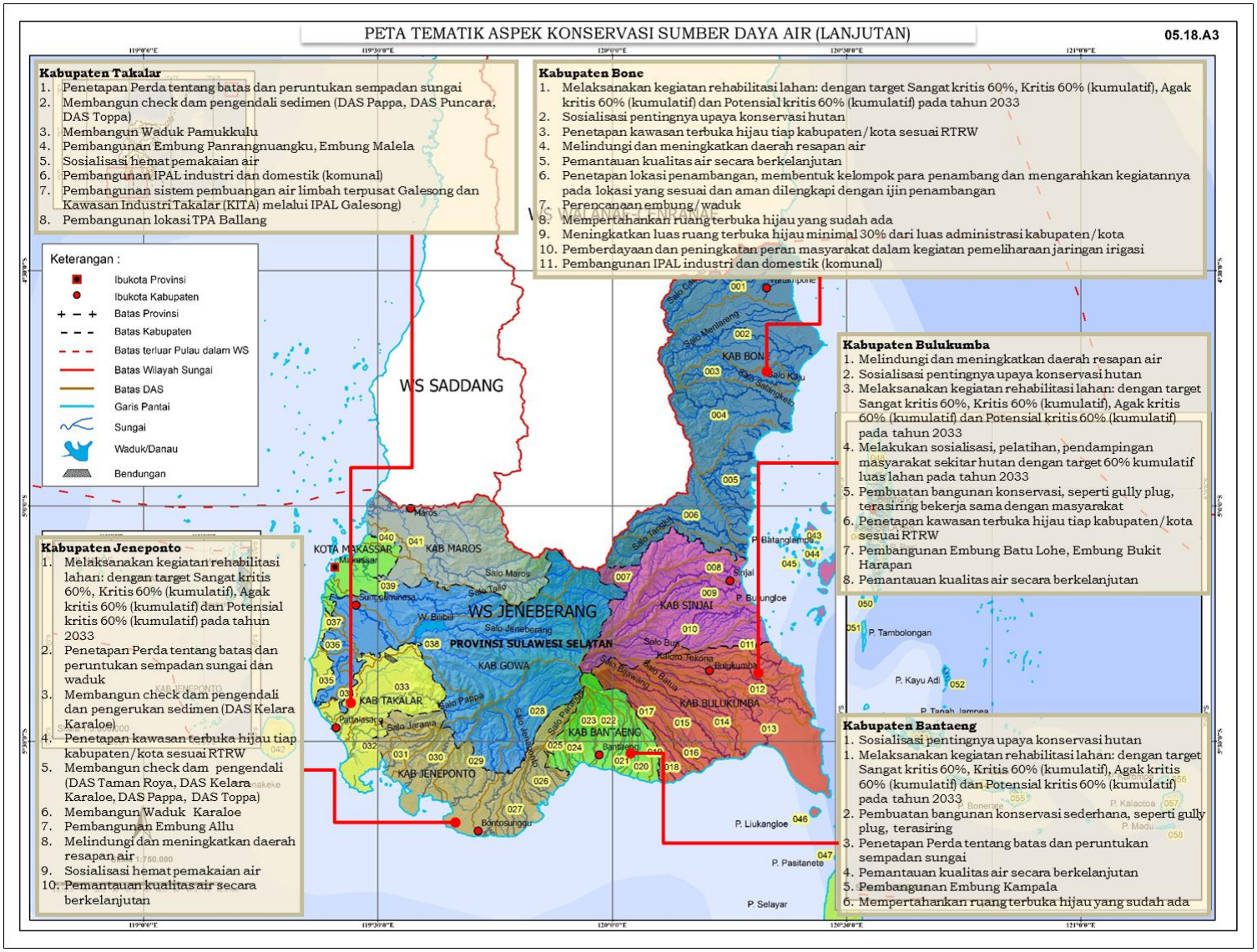

Gambar 4.10. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang (Lanjutan)

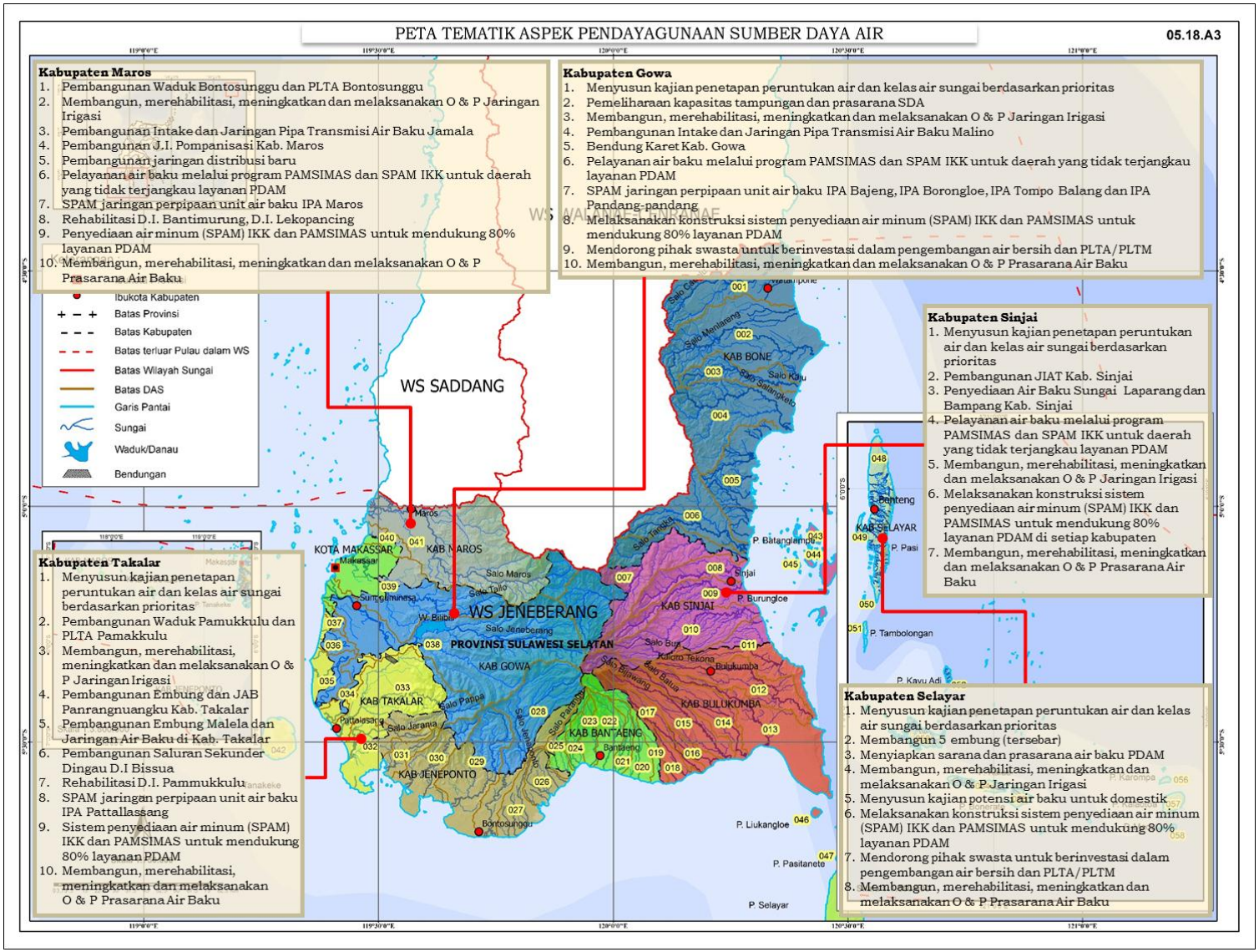

Gambar 4.11. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang

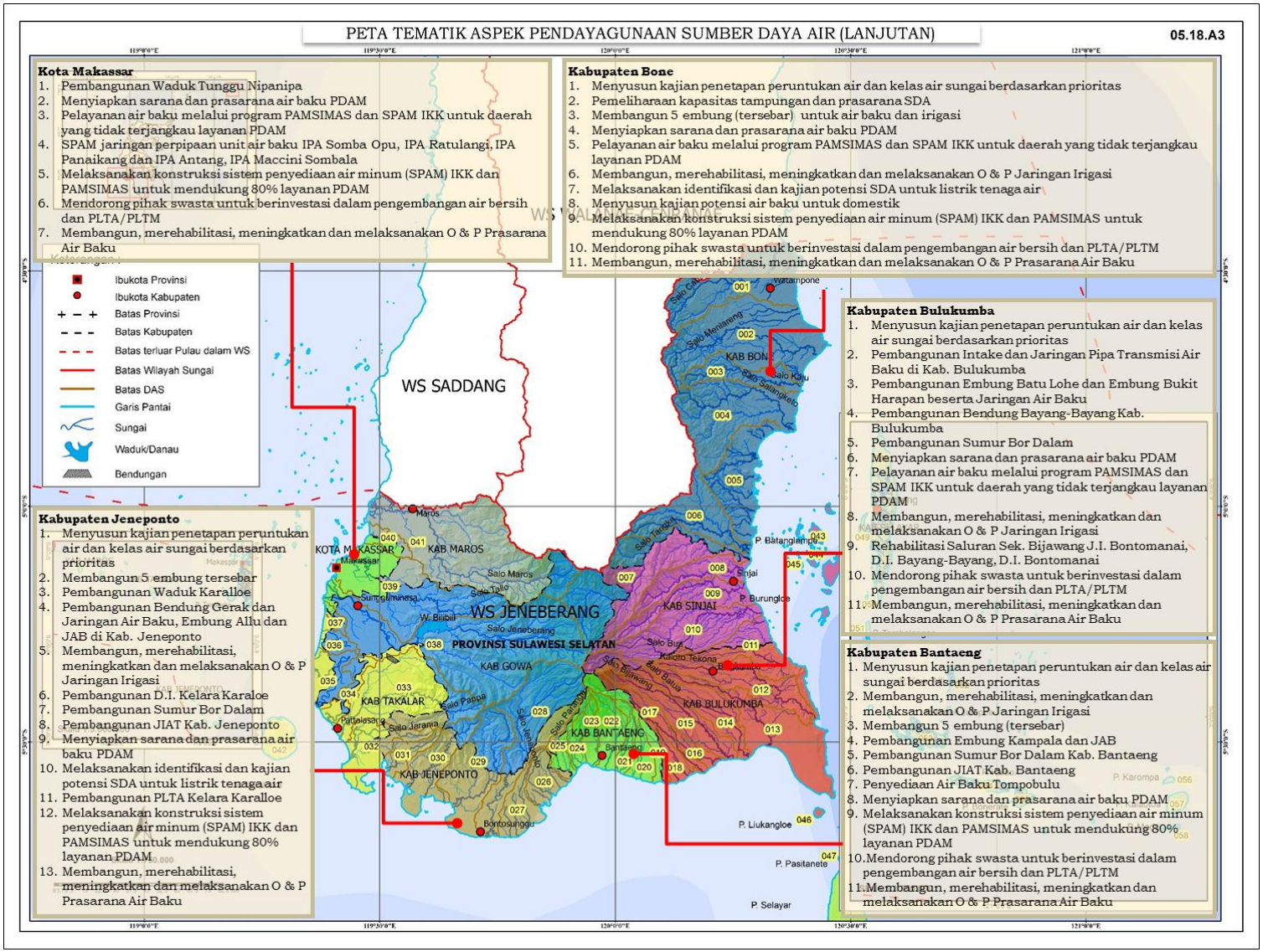

Gambar 4.12. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang (Lanjutan)

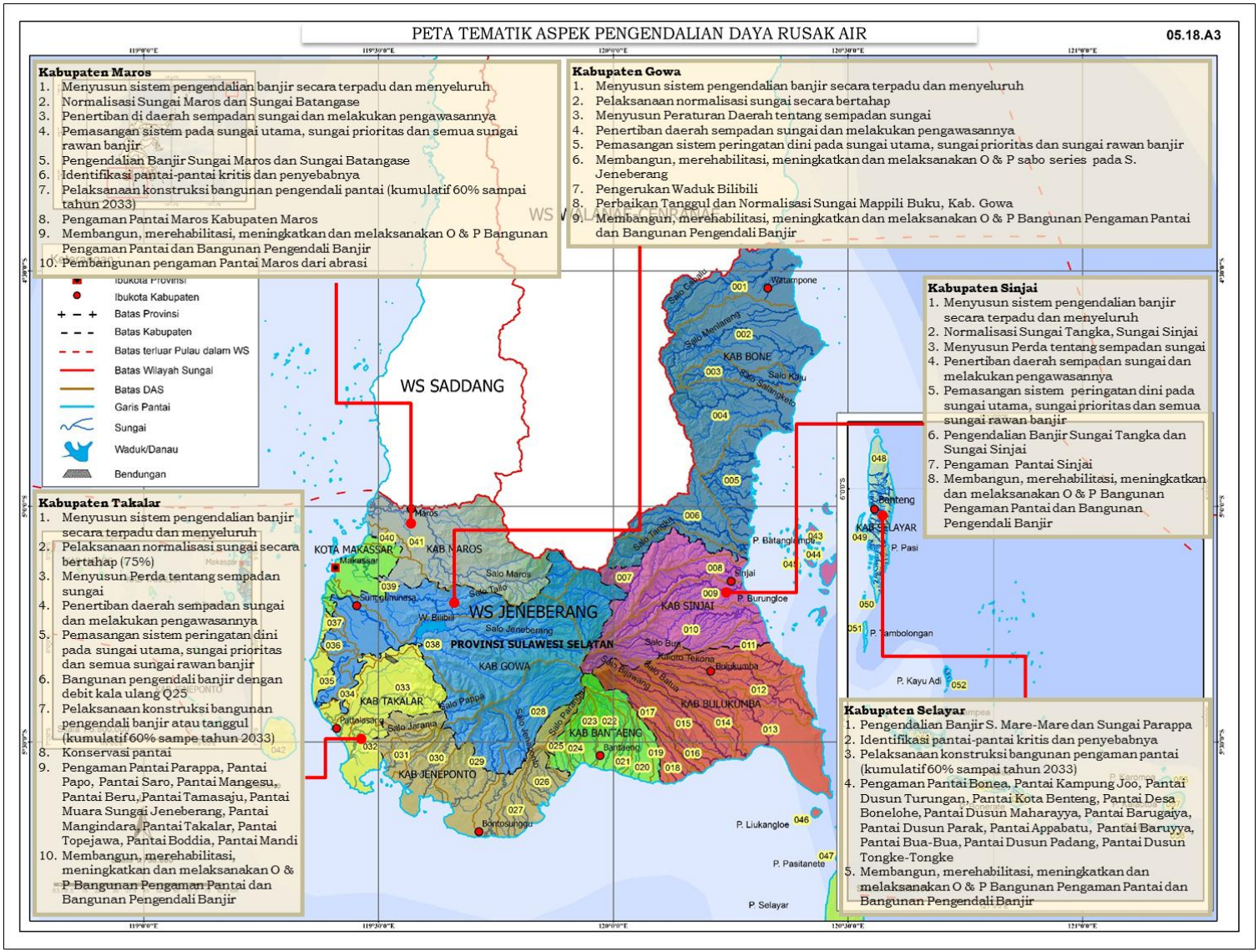

Gambar 4.13. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Sedang

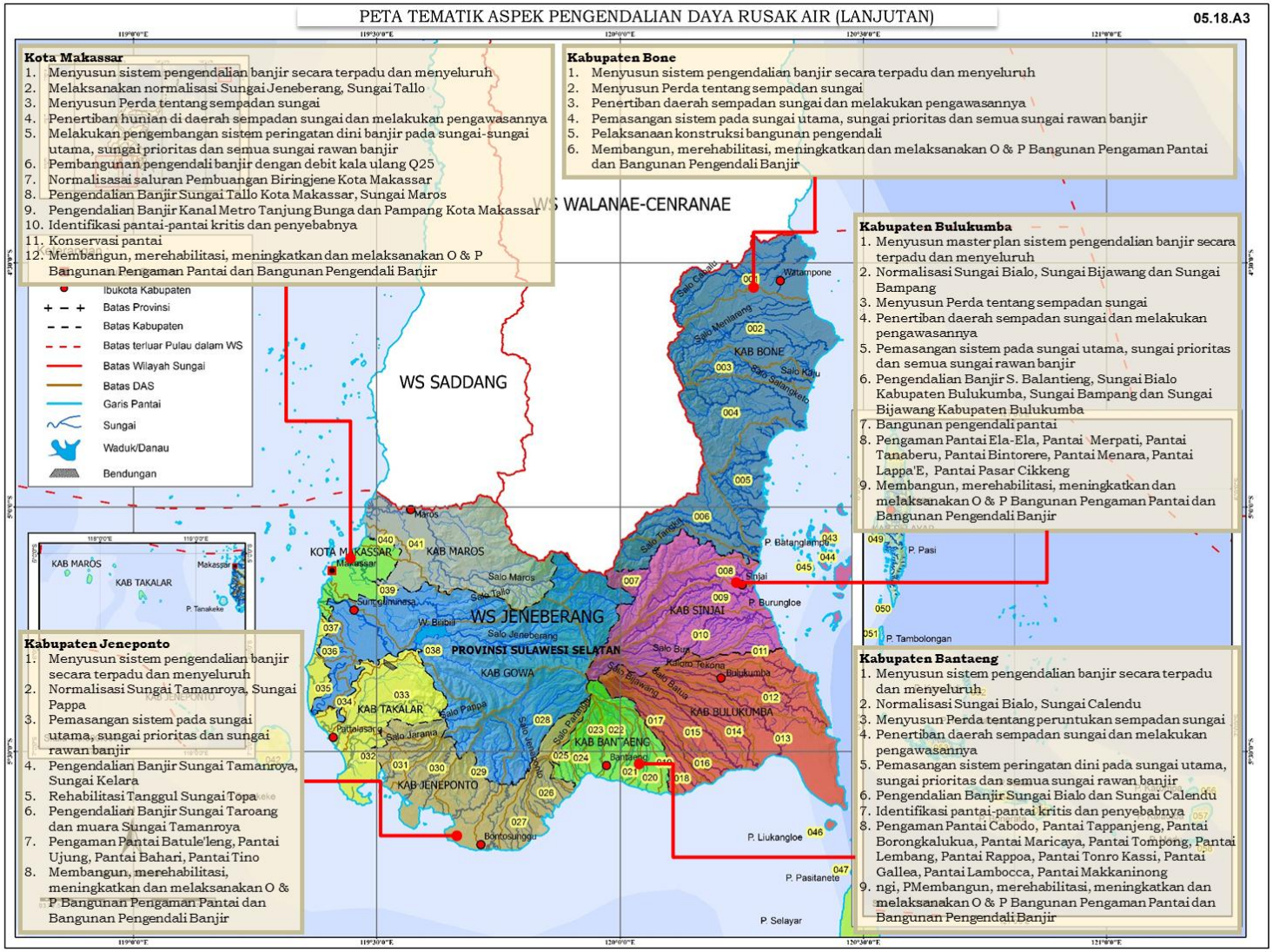

Gambar 4.14. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Sedang (Lanjutan)

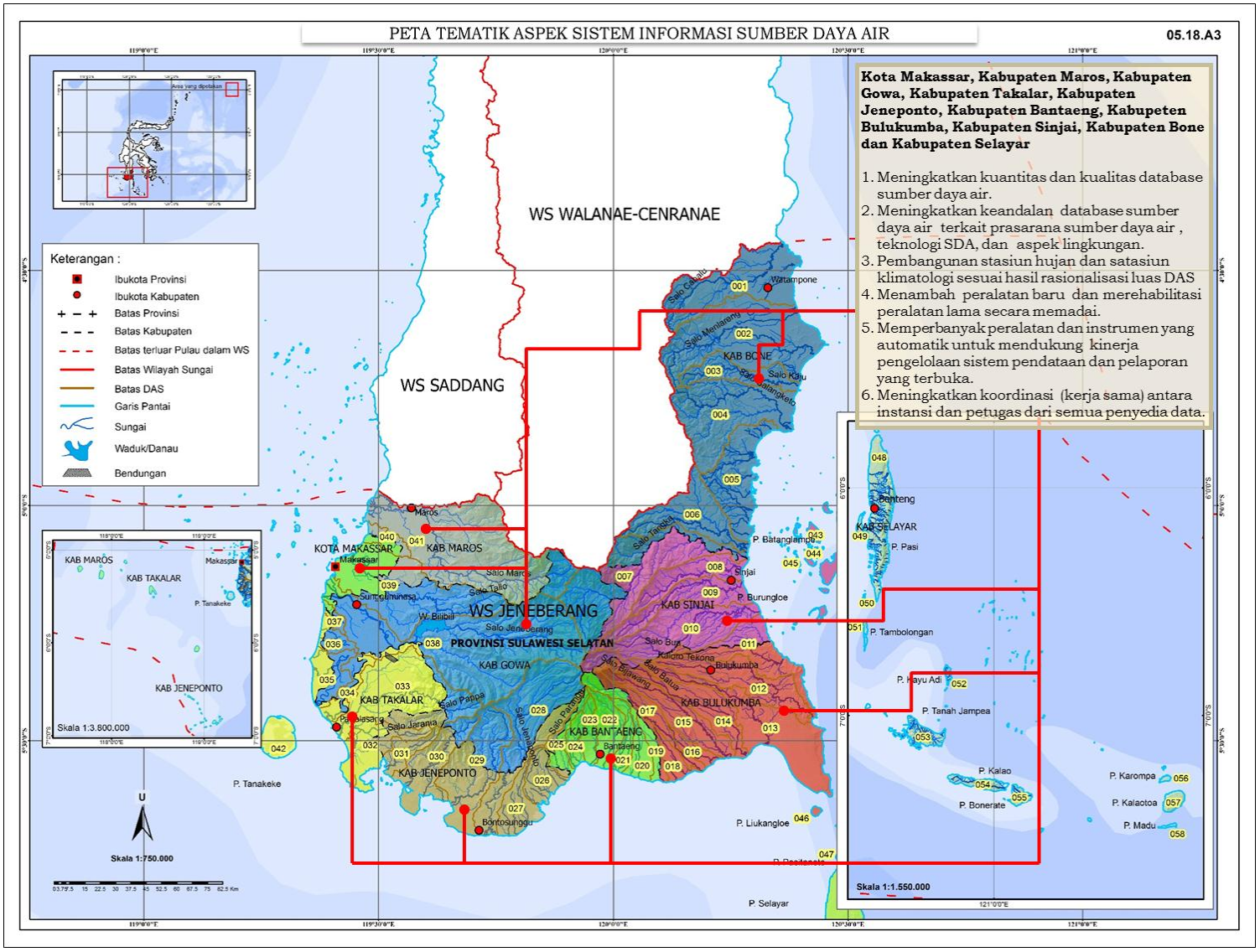

Gambar 4.15. Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Sedang

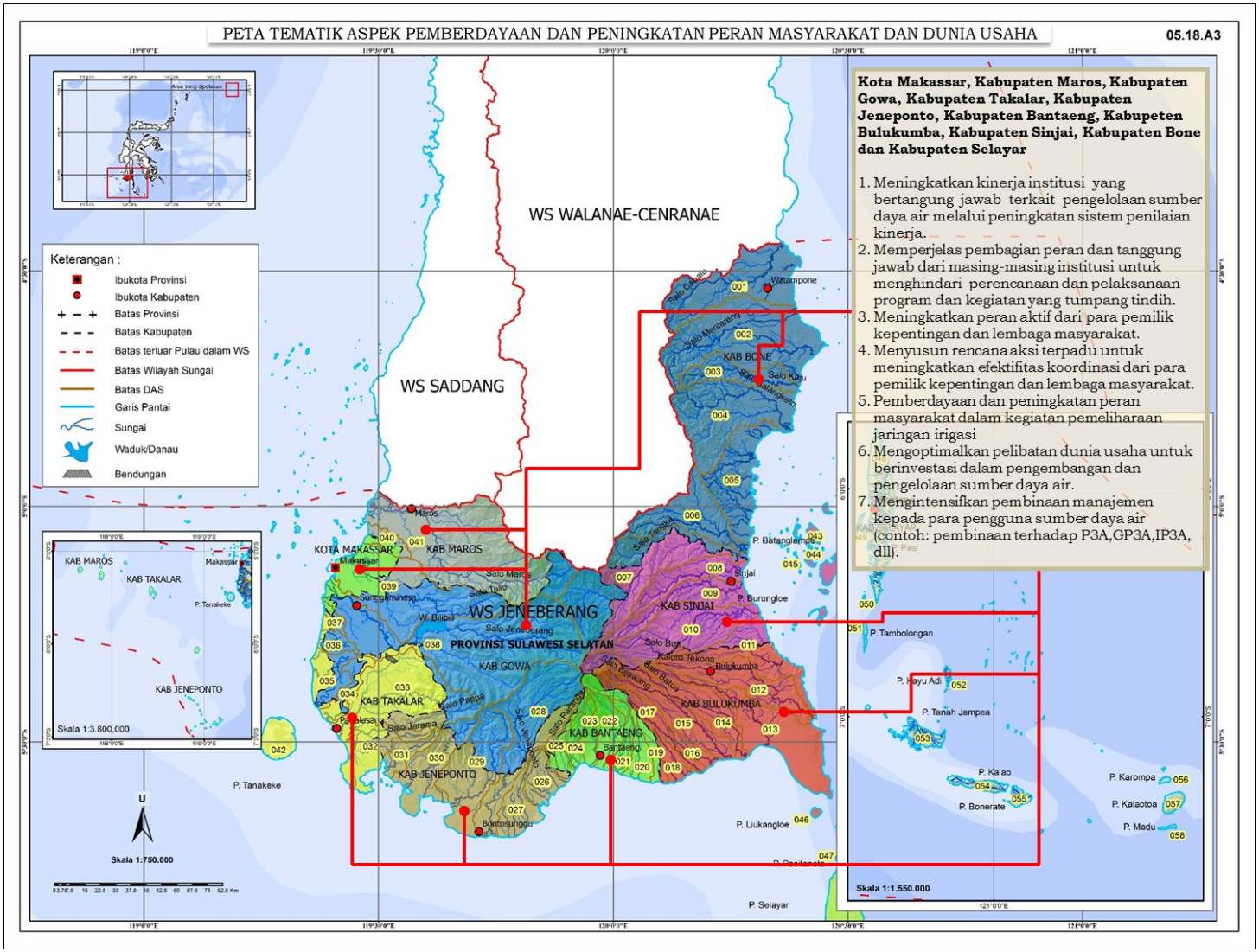

Gambar 4.16. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Sedang

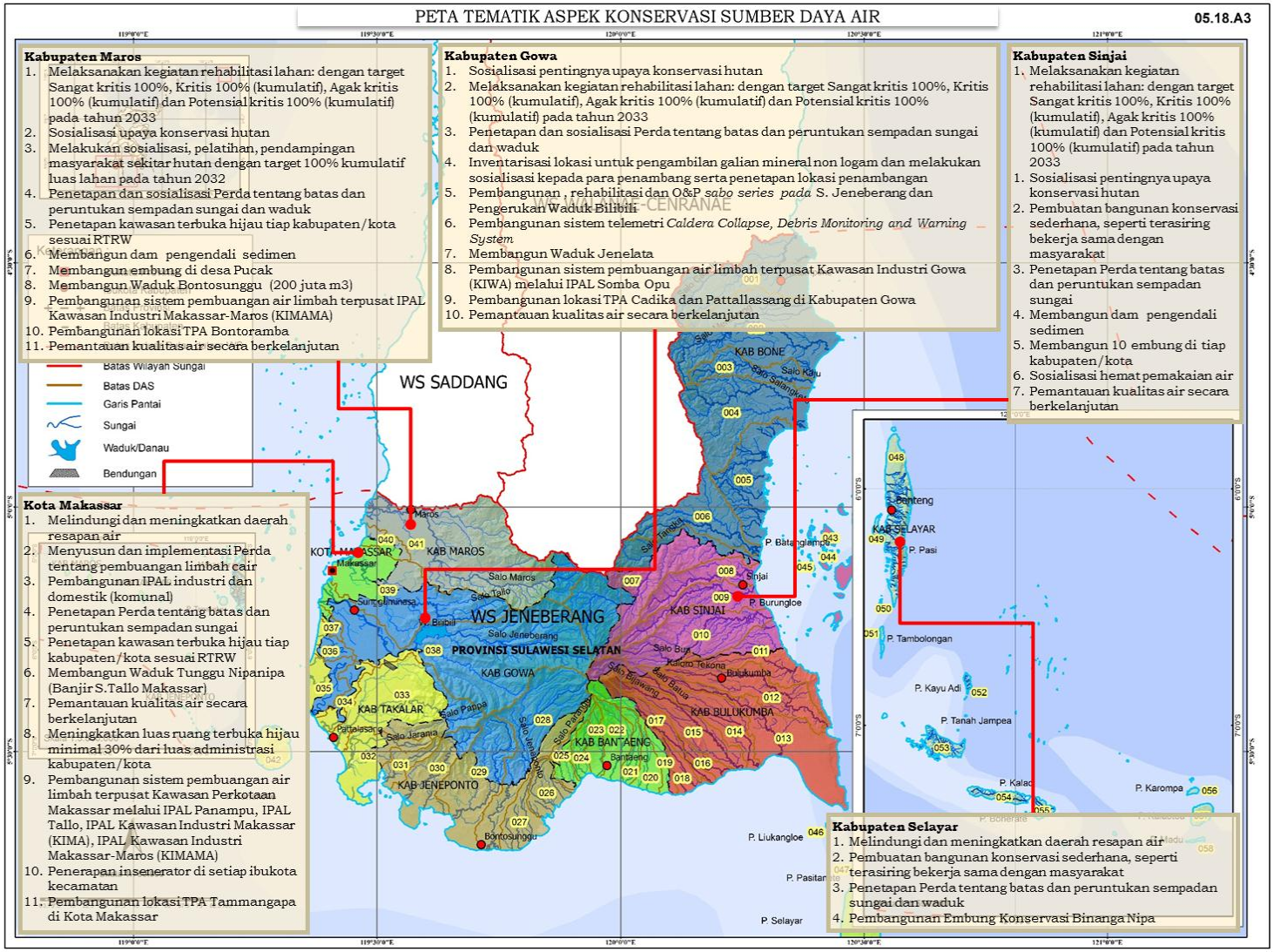

Gambar 4.17. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi

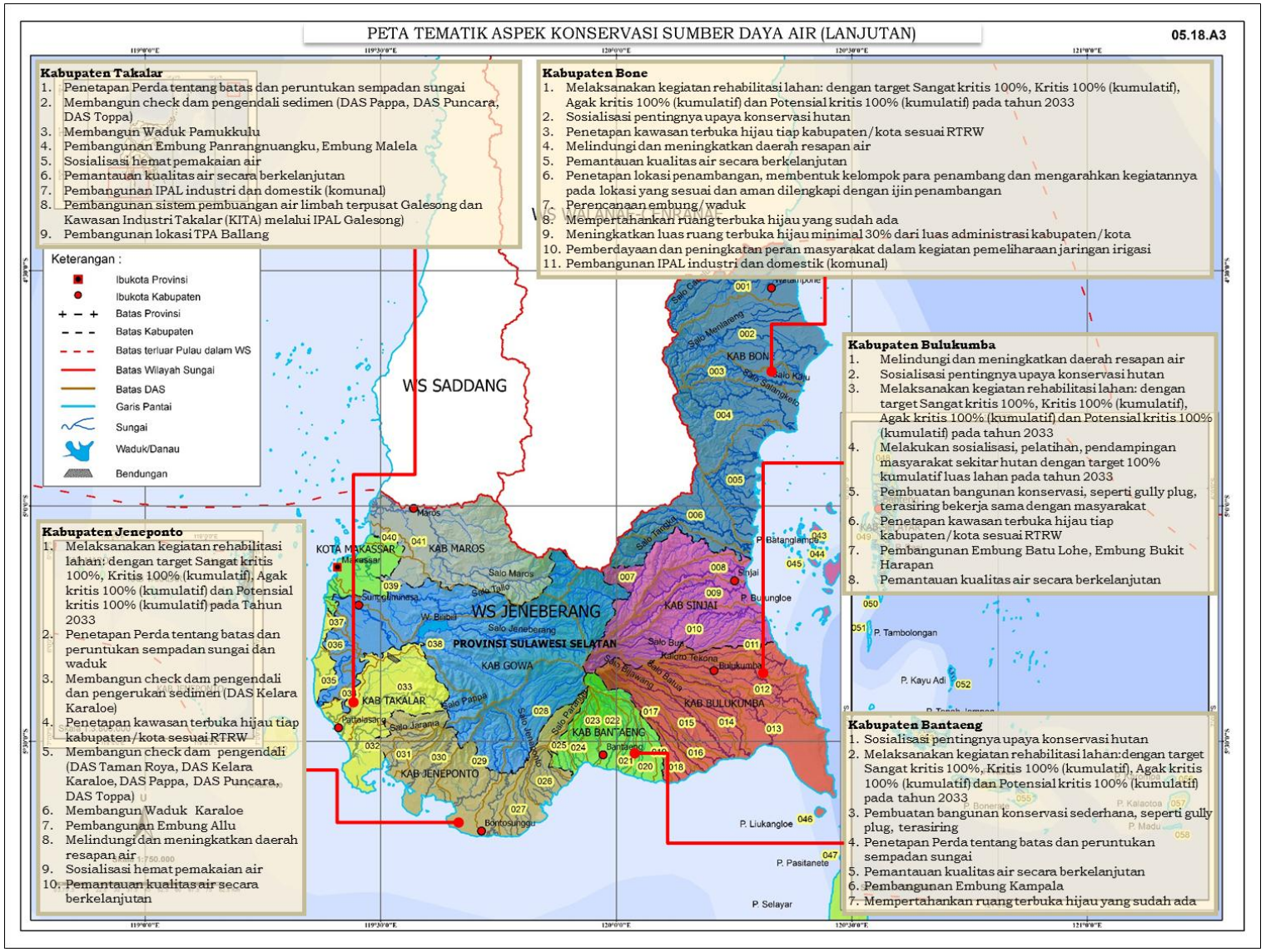

Gambar 4.18. Peta Tematik Aspek Konservasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)

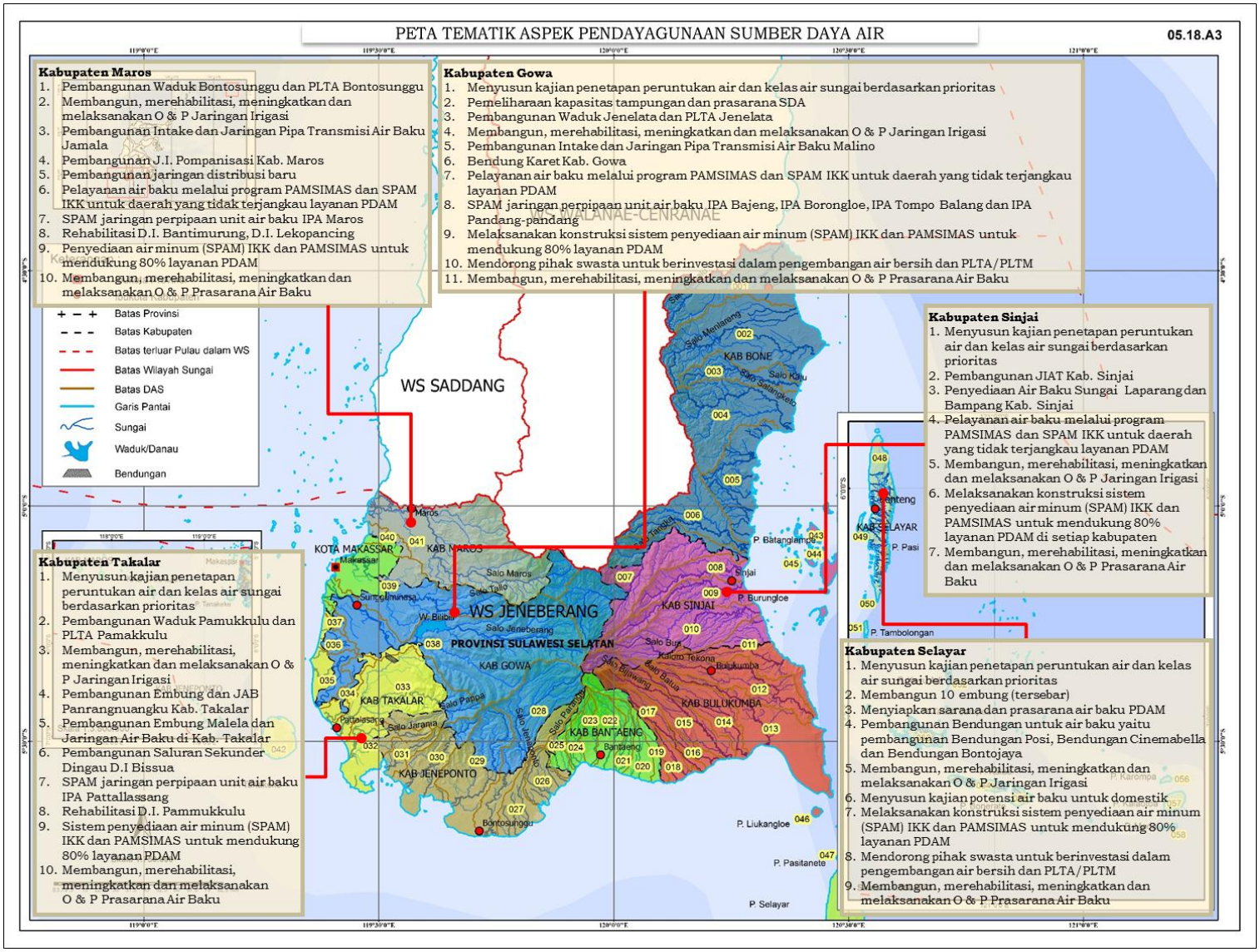

Gambar 4.19. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi

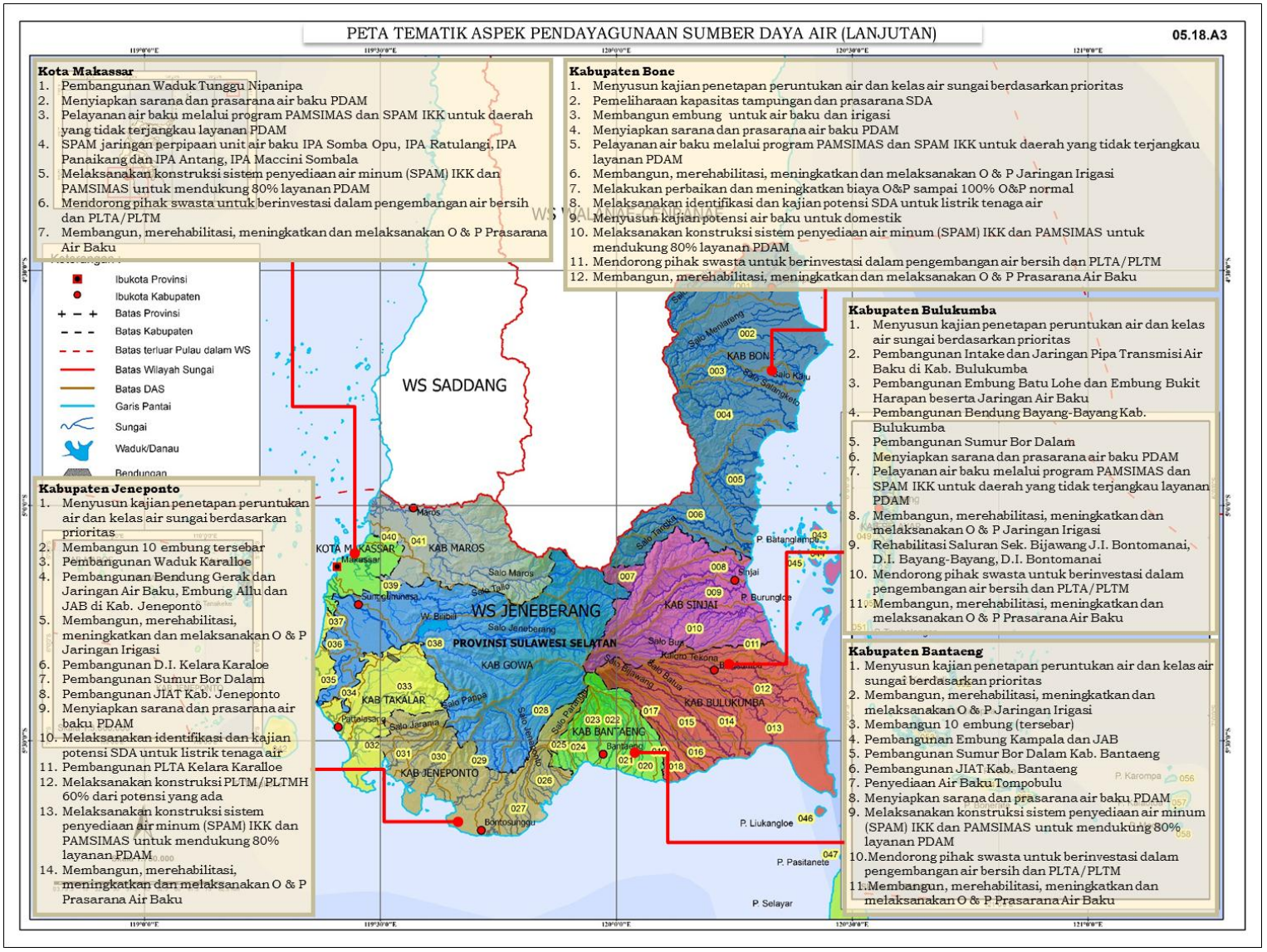

Gambar 4.20. Peta Tematik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)

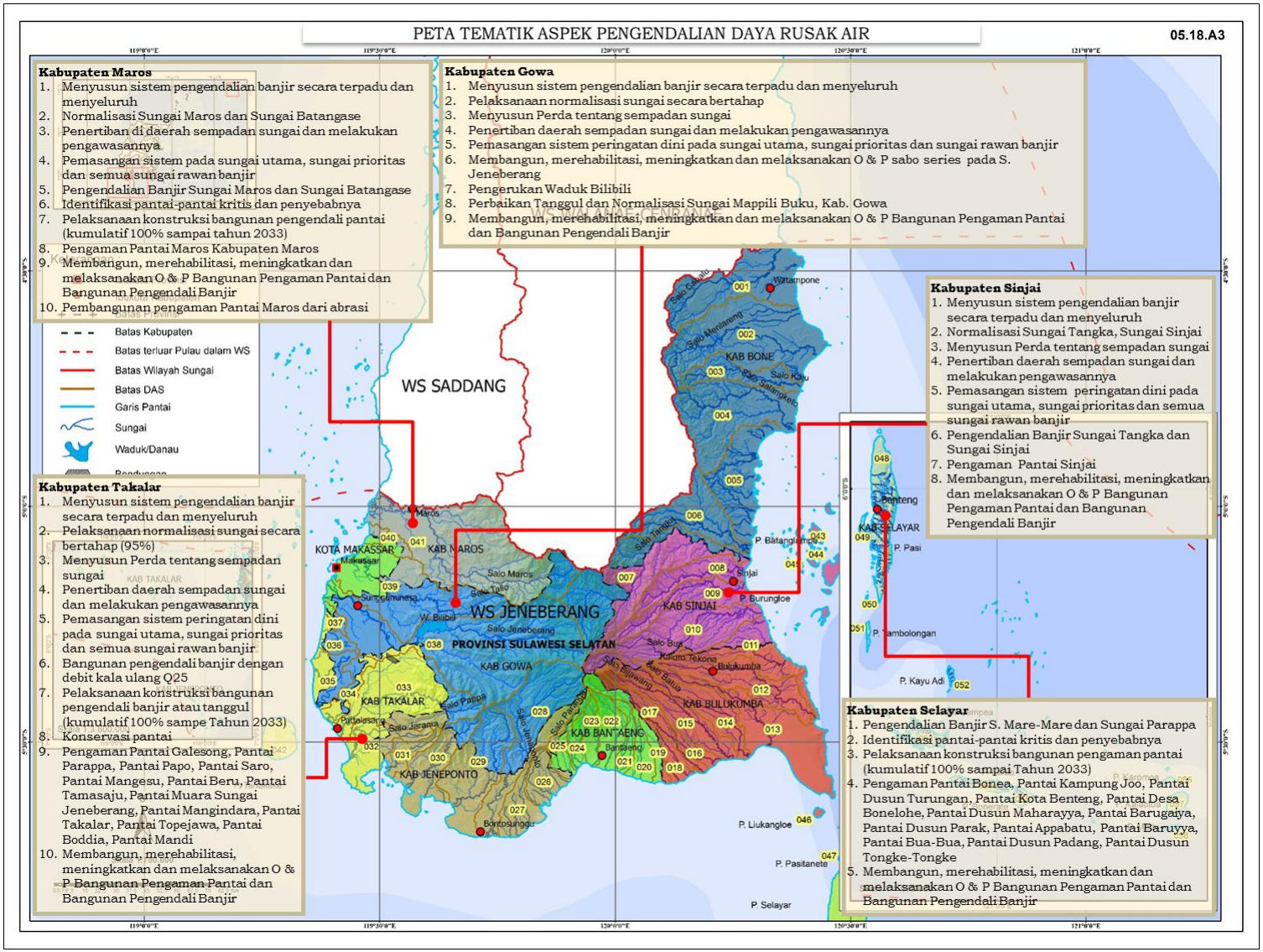

Gambar 4.21. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi

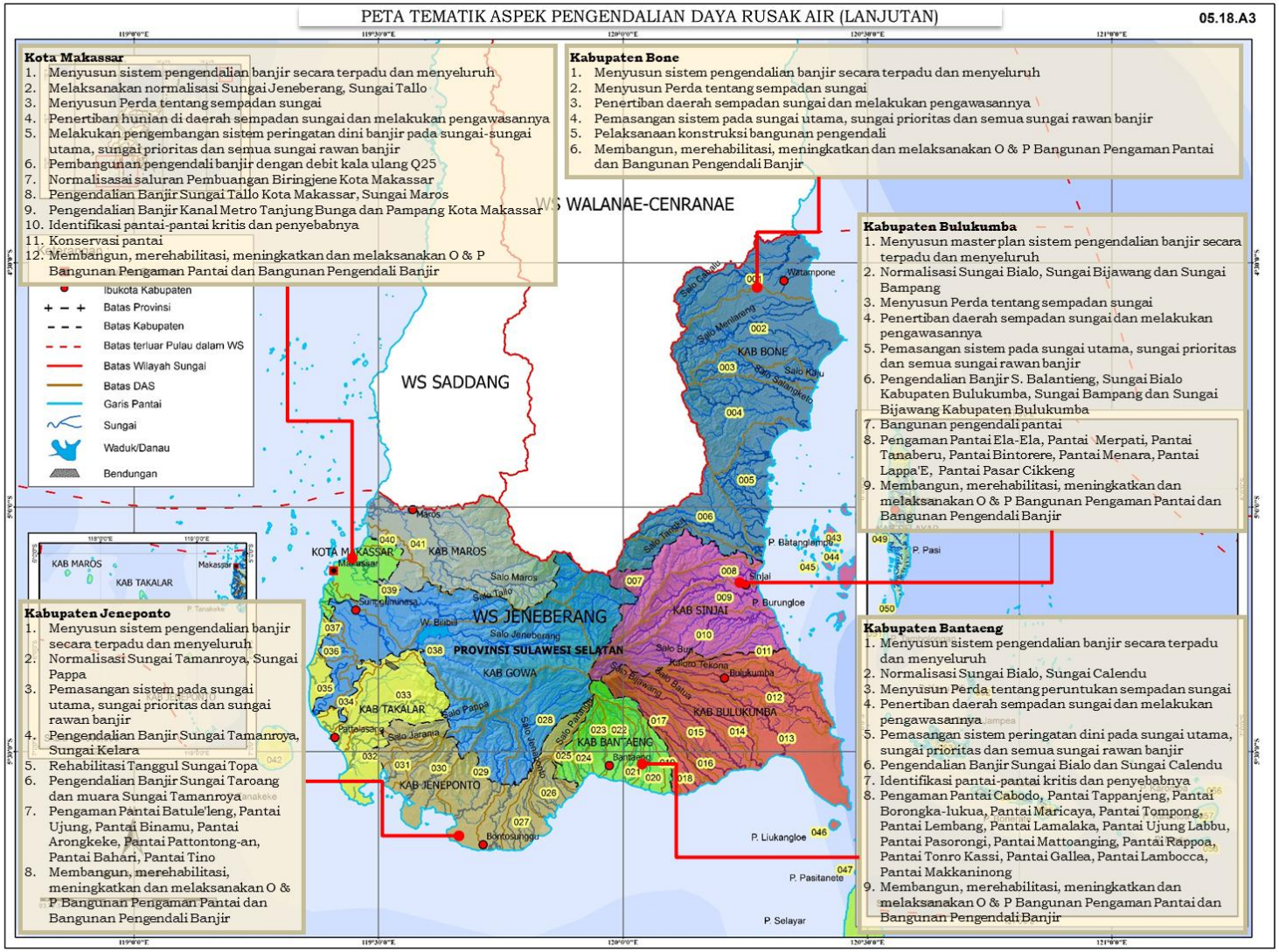

Gambar 4.22. Peta Tematik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi (Lanjutan)

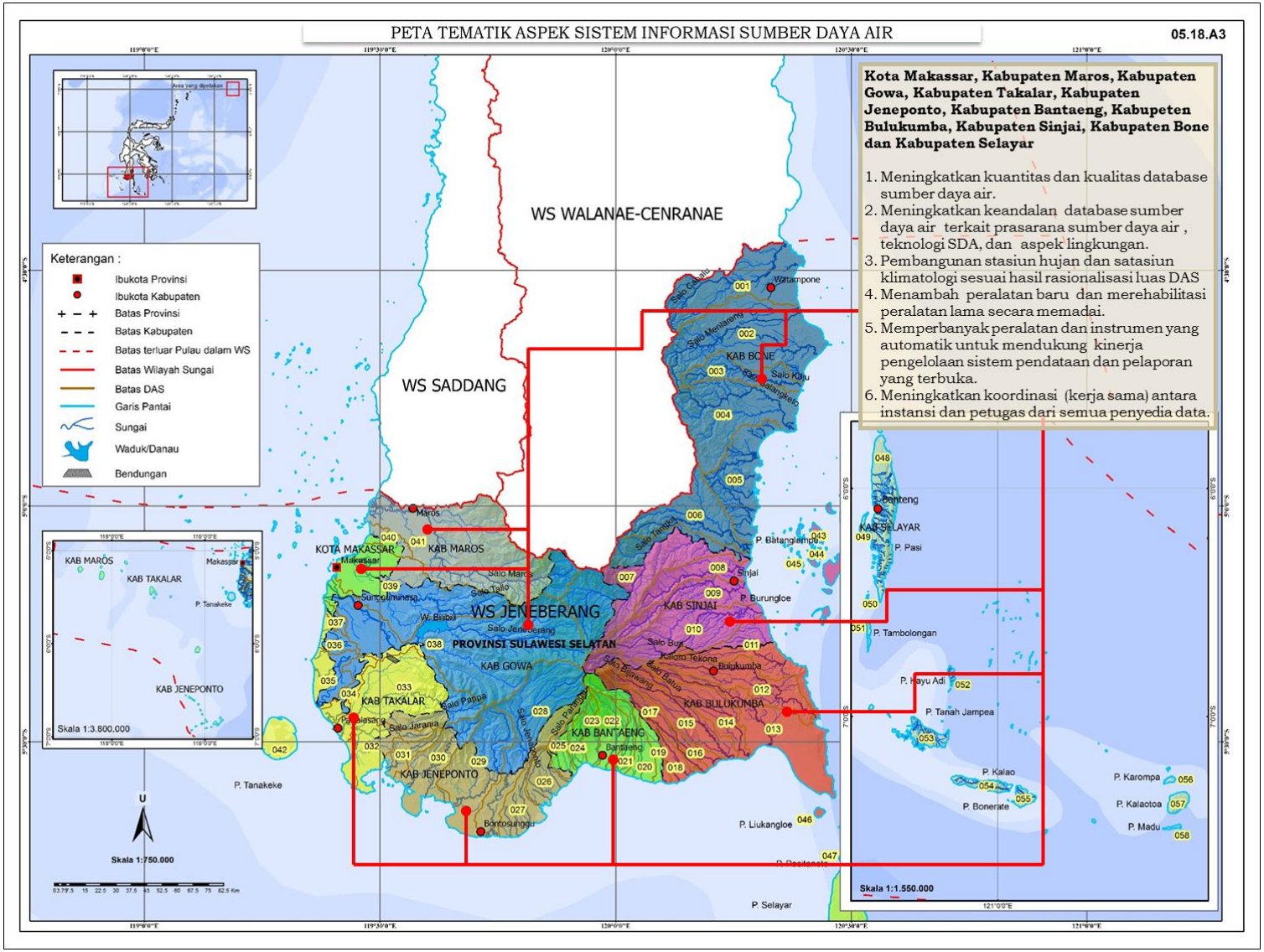

Gambar 4.23. Peta Tematik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi

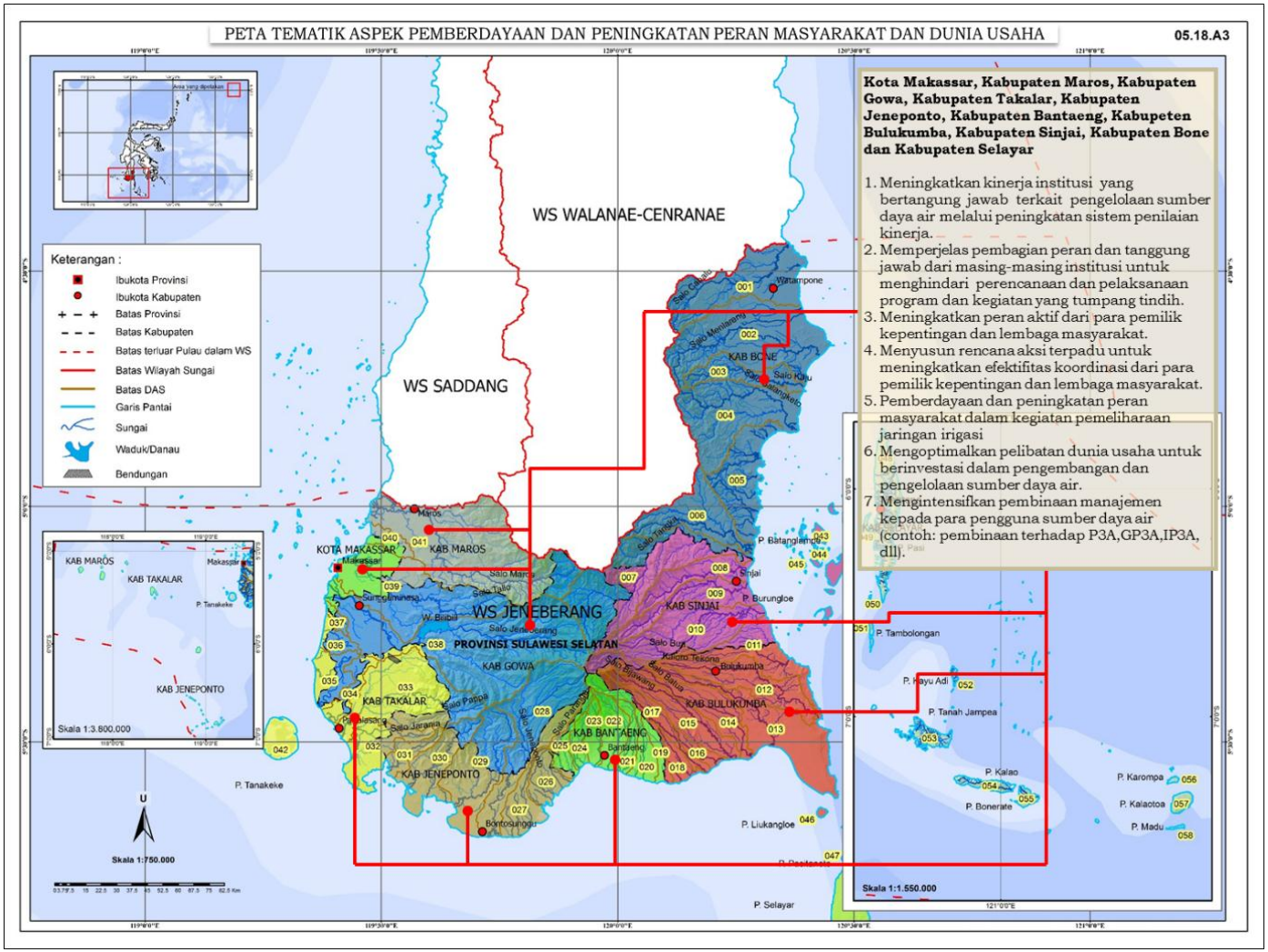

Gambar 4.24. Peta Tematik Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Tinggi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
SEKRETARIAT
JLN. SEKOLAH GURU PERAWAT No. 3 Telp. (0411) 868792-868781
Fax (0411) 868781, Makassar – Sulawesi Selatan, 90222 , Email : tkpsdawsj@gmail.com

KEPUTUSAN SIDANG PLENO
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI JENEBERANG
Tanggal 15 Agustus 2012

TENTANG;

RANCANGAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI JENEBERANG;

SETELAH MENDENGARKAN PANDANGAN KOMISI-KOMISI ,MAKA SIDANG MEMUTUSKAN BAHWA RANCANGAN POLA YANG TELAH DISUSUN OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG DAPAT DISETUJUI DENGAN SYARAT MENYEMPURNAKAN HAL-HAL, SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM PANDANGAN KOMISI-KOMISI.

Makassar, 15 Agustus 2012
PIMPINAN SIDANG

TKPSDA

Ir. AGUS SETAWAN,DIPL.HE	**DRS.MUH.DJAMIL BAGUS**
KETUA	SEKRETARIS